



ISSN 2089-3531

2018



# PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER



KERJASAMA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN  
**BADAN PUSAT STATISTIK**



2018



**PEMBANGUNAN  
MANUSIA  
BERBASIS  
GENDER**

# PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2018

ISSN : 2089-3531

No. Publikasi :

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xviii + 182 halaman

Naskah : Subdirektorat Analisis Statistik

Gambar Kulit : Subdirektorat Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dicetak oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

# Tim Laporan

## Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018

### Pengarah

Sri Soelistyowati  
Pribudiarta Nur Sitepu

### Penanggung Jawab

Sentot Bangun Widoyono  
Indra Gunawan

### Editor

Iswadi  
Yoyo Karyono  
Tria Rosalina Budi Rahayu

### Penulis

Dina Nur Rahmawati  
Indah Lukitasari  
Anugrah Pambudi Raharjo

### Pengolah Data

Dina Nur Rahmawati  
Adi Nugroho

### Desain Kulit

Adi Nugroho

### Desain dan Tata Letak

Dina Nur Rahmawati



# Sambutan Menteri KPPA



Sesuai Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan nasional meliputi tiga hal yaitu: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya dalam Pengarusutamaan Gender sasaran utamanya adalah 1. meningkatnya IPG (metode baru, menggantikan selisih IPM dan IPG seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019), 2. Menurunnya Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) dan 3. meningkatnya IDG secara periodik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Pemerintah Indonesia menargetkan IDG pada RPJMN 2015-2019 semakin meningkat setiap tahunnya.

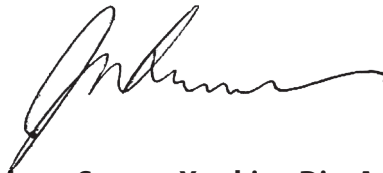
Penghitungan ketiga indeks tersebut dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). IPG dan IDG merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Untuk itu, jika didapatkan angka IPG atau IDG yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya, pemerintah setempat diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi indikator tunggal/pembentuk

mana yang masih rendah.

Strategi bersama sector terkait harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan IPG dan IDG dan berupaya meningkatkannya. Dalam publikasi ini dijelaskan contoh beberapa provinsi yang mengalami penurunan nilai IPG dan IDG untuk dapat membantu daerah lain menggali indikator yang perlu diperbaiki.

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran yang setiap tahun mendukung kami, dalam menyajikan data terkini terkait isu gender. Akhir kata kami harapkan semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, akademisi dan masyarakat yang berkepentingan terhadap publikasi ini.

Jakarta, Desember 2018  
Menteri Pemberdaya Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA**

# Kata Pengantar

Sebagai wujud dari fungsi pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) untuk menyusun publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018”. Publikasi ini berisi indikator statistik dan ulasan tentang perkembangan pencapaian dua indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas kepercayaannya kepada BPS untuk mengembangkan data dan indikator statistik terpilah gender. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu tersusunnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, November 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto





# Daftar Isi

Sambutan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiv
Ringkasan Eksekutif	xv
<b>Bab 1 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>1</b>
Kesetaraan Gender: Hal yang Harus Diperjuangkan	3
Kesetaraan Gender Menjadi Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	5
Kesetaraan Gender Tercantum dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan	9
<b>Bab 2 Kondisi Pembangunan Gender di Indonesia</b>	<b>13</b>
Kecepatan Pembangunan Perempuan Kembali Lampau Laki-laki	15
Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-laki	16
Laki-laki dan Perempuan Memiliki Peluang Sama untuk Mengenyam Pendidikan	18
Realita Capaian Pendidikan Antargender Masih Timpang	20
Ekonomi Indonesia Secara Umum Masih Didominasi Laki-laki	22
Pembangunan Gender Belum Merata Antarwilayah	25
Pembangunan Perempuan Lebih Cepat di Sebagian Besar Provinsi di Indonesia	31
Disparitas Pembangunan Gender Masih Terjadi di Level Kabupaten/Kota	35

# Daftar Isi

<b>Bab 3 Kondisi Pemberdayaan Gender di Indonesia</b>	39
Dinamika Sosial Menuju Terwujudnya Kesenjangan	41
Pemberdayaan Gender di Indonesia Semakin Nyata	42
Kiprah Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan	43
Harapan akan Kesenjangan pada Pekerjaan Profesional	45
Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Diperhitungkan	48
Pemberdayaan Gender Belum Merata di Semua Provinsi	50
Kesenjangan Pemberdayaan Gender Antarkabupaten/kota Masih Tinggi	53
<b>Bab 4 Kesenjangan Gender dan Pembangunan Manusia</b>	57
Pembangunan Gender Sejalan dengan Pembangunan Manusia	59
Kualitas Pembangunan Relatif Rendah di Sebagian Besar Provinsi	60
Pergeseran Kondisi Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender	62
Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti oleh Pemberdayaan	63
Mayoritas Provinsi Berada pada Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Bawah Angka Nasional	65
Pergeseran Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	
<b>Bab 5 Kesimpulan</b>	69
Daftar Pustaka	73
Lampiran	77
Catatan Teknis	169

# Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Produktivitas Tenaga Kerja dan Persentase Tenaga Kerja Perempuan Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 .....	24
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah Provinsi di KBI dan KTI Menurut Jenis Kelamin dan Status Pembangunan Manusia, 2016 dan 2017 .....	28
<b>Tabel 2.3</b>	IPG, IPM Laki-laki dan IPM Perempuan dan Ranking IPG di Lima Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah, 2016-2017 .....	29
<b>Tabel 2.4</b>	Pertumbuhan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan serta Selisih IPG di Lima Provinsi dengan Pertumbuhan IPG Tertinggi dan Terendah, 2016-2017 .....	31
<b>Tabel 2.5</b>	Pertumbuhan Indikator Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2016-2017 .....	33
<b>Tabel 2.6</b>	Matriks Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPG dan IPM, 2017 .....	37
<b>Tabel 2.7</b>	IPG, IPM laki-laki, dan IPM Perempuan di Beberapa Kabupaten/Kota Menurut Nilai IPG Tertinggi dan Terendah, 2015 dan 2017 .....	38
<b>Tabel 3.1</b>	Indikator-indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2007 dan 2017 .....	41
<b>Tabel 3.2</b>	Jumlah Anggota DPR RI Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014 .....	44
<b>Tabel 3.3</b>	Capaian IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi, 2016-2017 .....	52
<b>Tabel 3.4</b>	Capaian IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya Menurut Kabupaten/kota, 2017 .....	55
<b>Tabel 4.1</b>	Pergeseran Kondisi Kesetaraan Pembangunan Gender dan Pembangunan Manusia .....	62
<b>Tabel 4.2</b>	Pergeseran Kondisi Kesetaraan Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender .....	68

# Daftar Gambar

<b>Gambar 2.1</b>	Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-laki, IPM dan IPG, 2010-2017 .....	15
<b>Gambar 2.2</b>	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017.....	16
<b>Gambar 2.3</b>	Berbagai Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, 2017 .....	17
<b>Gambar 2.4</b>	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017 .....	18
<b>Gambar 2.5</b>	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2017 .....	19
<b>Gambar 2.6</b>	Persentase Pekerja Anak, 2015-2017 .....	20
<b>Gambar 2.7</b>	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017.....	20
<b>Gambar 2.8</b>	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Terhadap Laki-laki Menurut Kelompok Umur, 2010-2017 .....	21
<b>Gambar 2.9</b>	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Perempuan Terhadap Laki-laki (dalam ribuan), 2010-2017.....	22
<b>Gambar 2.10</b>	Rasio Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017 .....	23
<b>Gambar 2.11</b>	Rata-rata Upah Pekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin (dalam ribu rupiah), 2014-2017.....	25
<b>Gambar 2.12</b>	Capaian IPG Menurut Provinsi, 2017 .....	26
<b>Gambar 2.13</b>	Peta Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi, 2017.....	26
<b>Gambar 2.14</b>	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki Menurut Provinsi, 2017.....	27
<b>Gambar 2.15</b>	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Provinsi, 2017.....	27
<b>Gambar 2.16</b>	Rata-rata Upah Pekerja di Lima Provinsi dengan IPG Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2017.....	30
<b>Gambar 2.17</b>	Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Status Capaian IPM dan Jenis Kelamin , 2017 .....	35
<b>Gambar 2.18</b>	Variasi IPG Kabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017 .....	36

# Daftar Gambar

Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2010-2017.....	42
Gambar 3.2	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2016 dan 2017 .....	43
Gambar 3.3	Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2010-2017 .....	45
Gambar 3.4	Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017 .....	46
Gambar 3.5	Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017 .....	47
Gambar 3.6	Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen), 2010-2017.....	48
Gambar 3.7	Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010 dan 2017 .....	49
Gambar 3.8	Persentase Pekerja formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2017 .....	50
Gambar 3.9	Capaian IDG Menurut Provinsi, 2017.....	51
Gambar 3.10	Peta IDG Menurut Provinsi, 2017 .....	51
Gambar 3.11	Variasi IDG Antarkabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017.....	54
Gambar 4.1	Sebaran IPM dan IPG Menurut Provinsi, 2017 .....	59
Gambar 4.2	Sebaran Kabupaten/kota Menurut IPM dan IPG, 2017 .....	60
Gambar 4.3	Hubungan Antara IPM dan IPG, 2013-2017 .....	61
Gambar 4.4	Sebaran Provinsi Menurut IPG dan IDG, 2017 .....	64
Gambar 4.5	Sebaran Kabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017 .....	64
Gambar 4.6	Hubungan Antara IPG dan IDG, 2013-2017 .....	66

# Daftar Lampiran

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen,2017 .....	79
Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2017 .....	97
Lampiran 3. IPG Menurut Provinsi, 2010-2017 .....	115
Lampiran 4. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017.....	116
Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2017 .....	133
Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi, 2010-2017 .....	151

# Ringkasan Eksekutif

**D**iskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai “warga kelas dua”.

Kesepakatan secara internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA)*. Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals (MDGs)* yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir. Pada tahun 2017, pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibanding pembangunan laki-laki yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010-2015. Nilai IPG tahun 2017 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 sebesar 91,03.

IPM dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Di bidang kesehatan, UHH perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2017 UHH perempuan sebesar 73,06 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 69,16 tahun. Dari aspek



pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah hampir sama. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/ sederajat. Selama delapan tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun. Dari sisi rata-rata lama sekolah, laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun.

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam hal ekonomi. Di bidang ini, perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki. Pada tahun 2017, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,75 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 14,93 juta per tahun.

Disparitas pembangunan gender terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini dapat dilihat dari peringkat IPG tertinggi yang mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di KBI. Provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sulawesi Utara (94,78), DKI Jakarta (94,70), dan DI Yogyakarta (94,39). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Kalimantan Timur (85,62), Papua Barat (82,42) dan Papua (79,09).

Lebih dari separuh dari jumlah kabupaen/kota di Indonesia telah mencapai IPG di atas 90. Namun, hal ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang "sama-sama tinggi" dan "sama-sama rendah". Terbukti, masih terdapat 2 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki level IPG di atas 90, namun pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di wilayah tersebut masih berstatus rendah atau kurang dari 60. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua.

Untuk melihat hubungan antara IPM dan IPG diperlukan pemetaan provinsi berdasarkan level IPG dan IPM. Oleh sebab itu digunakan analisis kuadran yang membagi provinsi dalam empat kelompok (kuadran). Kuadran I merupakan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional. Kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional. Kuadran III adalah provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional. Dari hasil pengolahan data, 50 persen provinsi di Indonesia berada pada Kuadran III dimana capaian IPM maupun IPG

provinsi berada dibawah nasional. Sedangkan provinsi yang berada pada Kuadran I dengan capaian IPM dan IPG pada level di atas nasional hanya sebanyak 7 provinsi.

Secara nasional, IDG Indonesia terus meningkat dalam 7 tahun terakhir dan mencapai angka 71,74 pada tahun 2017. Angka ini meningkat 0,35 poin atau sebesar 0,49 persen dibanding tahun 2016. Pertumbuhan IDG pada periode 2016-2017 tidak secepat sebelumnya yang mencapai 0,56 poin atau 0,79 persen. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh dua komponen yang tidak mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu persentase perempuan di parlemen dan persentase perempuan dalam pekerjaan profesional.

Dilihat dari komponen pembentuk IDG, peningkatan IDG pada tahun 2017 disebabkan oleh semakin besarnya porsi sumbangan pendapatan yang diciptakan oleh perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan mencapai 36,62 persen. Angka ini meningkat 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Dua komponen lain yakni persentase perempuan dalam parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari hasil pemilu tahun 2014, perempuan yang menduduki kursi DPR RI hanya sebesar 17,32 persen. Komponen persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurun dari 47,59 persen di tahun 2016 menjadi 46,31 persen di tahun 2017.

Disparitas capaian IDG antara KBI dan KTI tidak begitu terlihat. Terdapat lima provinsi di KTI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG tertinggi. Bahkan, tiga besar provinsi dengan IDG tertinggi ditempati oleh provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, ada 3 provinsi di KBI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG terendah.

Posisi lima besar provinsi dengan IDG tertinggi tidak berubah selama dua tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan prestasinya dalam hal pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2017, IDG Sulawesi Utara sebesar 82,37. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 79,36 disusul oleh Maluku (78,87), Riau (75,36) dan Jawa Tengah (75,10). Sementara itu, lima provinsi dengan IDG terendah adalah Kalimantan Utara (61,09), Nusa Tenggara Barat (59,95), Kalimantan Timur (56,64), Kepulauan Bangka Belitung (54,91) dan Papua Barat (47,88).

Nilai IDG pada tingkat kabupaten/kota sangat bervariasi dengan rentang dari 28,71 hingga 86,20. IDG tertinggi pada level kabupaten/kota ditempati oleh Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 86,20 diikuti oleh Kota Kendari dan Kota Surabaya di posisi kedua dan ketiga. Sebanyak lima dari 10 kabupaten/kota dengan IDG tertinggi berada di KBI, dan 5 lainnya berada di KTI. Berbeda halnya dengan kabupaten/kota yang memiliki IDG tertinggi, sepuluh daerah dengan IDG terendah sebagian besar ditempati oleh kabupaten di wilayah

timur Indonesia, terutama di Papua dan Papua Barat.

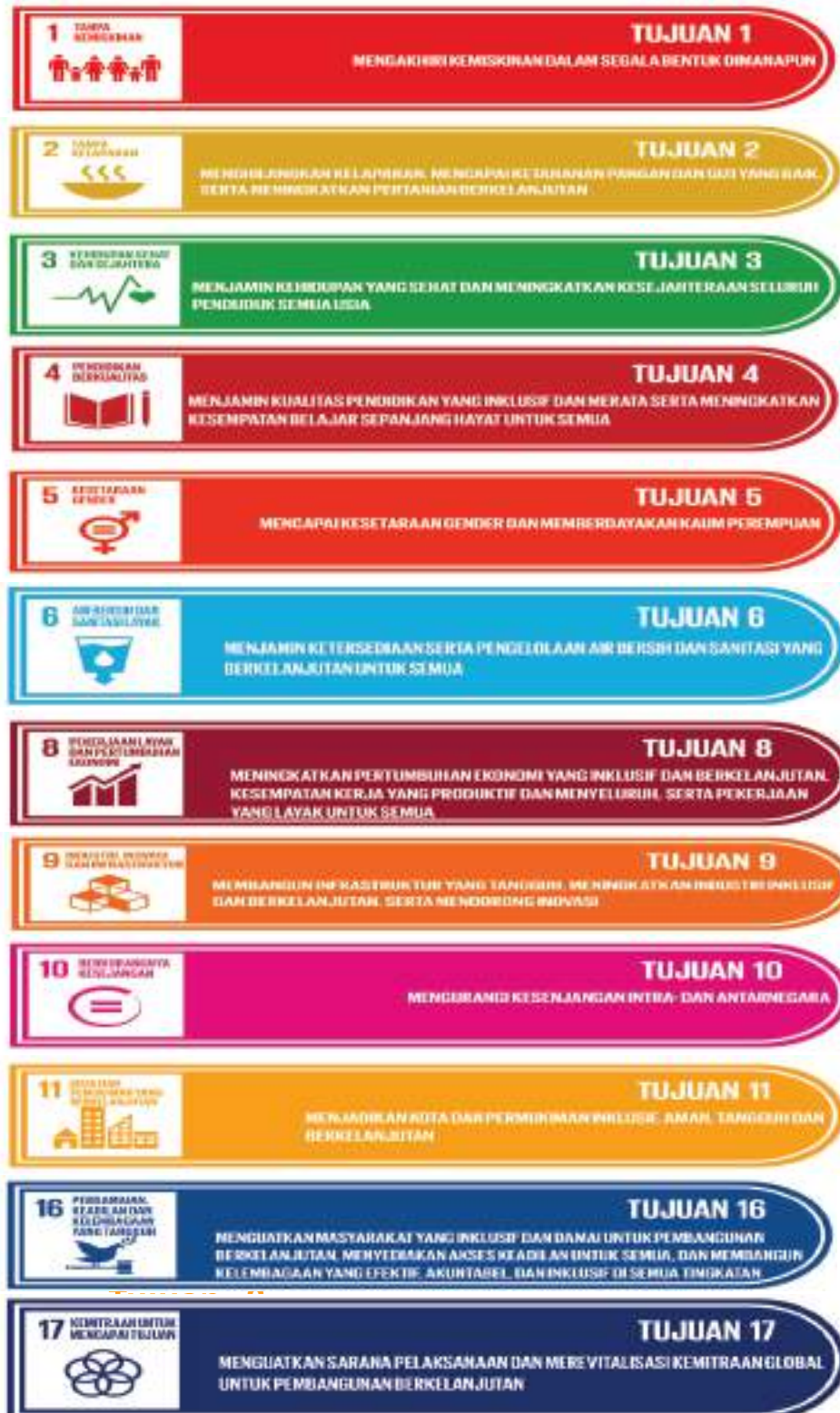
Pembangunan gender selayaknya memiliki asosiasi dengan pemberdayaan gender di suatu wilayah. Pemetaan wilayah berdasarkan capaian IPG dan IDG diperlukan sebagai dasar kebijakan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok kuadran I merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kuadran III adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional. Sebagian besar provinsi berada pada kuadran III (14 provinsi), sementara hanya ada 4 provinsi yang berada di posisi ideal (kuadran I).

# BAB 1



## **KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

# KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



# Kesetaraan Gender

## dalam Pembangunan

### Kesetaraan Gender: Hal yang Harus Diperjuangkan

Gender mengacu pada atribut, peluang sosial, dan hubungan yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Atribut, peluang dan hubungan ini dibangun dan dipelajari secara sosial melalui proses sosialisasi. Gender mengacu pada atribut, harapan, dan norma sosial, perilaku, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan atau laki-laki (UN Women dalam World Bank, 2012). Istilah gender seringkali disamaartikan dengan jenis kelamin. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Jenis kelamin sendiri mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, terdapat perbedaan norma dan perilaku antarkeduanya. Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian membentuk peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat yang seringkali disebut dengan gender.

Perbedaan perlakuan, norma dan pandangan yang terbentuk di masyarakat antara laki-laki dan perempuan berdampak pada berbagai hal di kehidupan. Diskriminasi gender menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ketimpangan gender. Di berbagai wilayah di dunia, seperti di Indonesia, ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkutat di peran domestik.

Ketimpangan gender terjadi di berbagai hal. Diskriminasi yang terjadi mengakibatkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat ditemui di bidang kesehatan, ekonomi dan tenaga kerja. Secara umum, capaian perempuan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki.

Meski secara lahiriah perempuan dibekali oleh faktor genetik yang membuatnya memiliki kemungkinan hidup lebih panjang,

tapi masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian seperti kematian ibu dan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Capaian ini tidak memenuhi target tujuan pembangunan millenium yang telah berakhir pada tahun 2015 sebesar 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dengan capaian itu, tampaknya perjuangan masih perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup yang ditargetkan pada tahun 2030.

Di bidang ekonomi dan tenaga kerja, berbagai polemik ketimpangan gender masih umum terjadi. Perempuan masih terbelenggu budaya dan norma yang lebih menempatkan mereka pada pekerjaan domestik dibanding pekerjaan di sektor publik. Sebenarnya, pilihan untuk menjalani peran domestik atau publik merupakan hak setiap perempuan. Masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat. Partisipasi perempuan di dunia kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 TPAK perempuan berada di angka 50,89. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding laki-laki dengan TPAK sebesar 82,51 (BPS, 2017). Kondisi ini tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Ketimpangan Partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan umumnya terjadi di negara berkembang (Verick, 2014).

Selain tentang partisipasi kerja, polemik peran perempuan dalam penciptaan pendapatan juga terjadi dalam pekerjaan yang dilakukan. Ketika perempuan telah memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, mereka dihadapkan kembali oleh berbagai kebijakan yang tidak responsif gender. Diskriminasi dalam proses perekrutan pegawai hingga perbedaan upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Pelecehan yang mengarah ke tindak asusila serta tindak perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi dan prostitusi masih menjadi polemik yang tampaknya masih sulit terpecahkan. Data *International Organization for Migration* mengungkap bahwa pada periode tahun 2005-2015, sebanyak 70 persen korban perdagangan manusia berjenis kelamin perempuan.

Di bidang pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah sama. Program pemerintah yang berfokus pada pendidikan seperti Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah mulai terasa dampaknya. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan yang tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan baik pada level nasional maupun level daerah.

Kesetaraan yang terjadi di bidang pendidikan menunjukkan bahwa perempuan sudah tidak mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki di bidang akademis. Cita-cita RA Kartini dan perjuangan untuk pendidikan perempuan semakin nyata

terlihat. Namun dibalik prestasi tersebut, masih terdapat berbagai ironi yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya berdaya dan setara. Berbagai contoh ketimpangan gender yang masih terjadi menyadarkan semua pihak bahwa masih perlu berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai perbedaan dan menciptakan kehidupan yang bersifat adil secara gender.

Upaya dalam meraih kesetaraan gender sebenarnya telah dirintis sejak lama. Upaya tersebut diawali dengan gerakan-gerakan feminisme di negara-negara barat di abad ke-17 kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya berbagai kesepakatan yang mengikat secara internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA)*. Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Hal ini dilakukan guna menghapuskan berbagai macam diskriminasi yang akan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.

## Kesetaraan Gender Menjadi Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong *United Nations (UN)* memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2000. Isu gender tercantum dalam Tujuan ketiga MDGS yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”.

Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan tersebut memiliki beberapa target yaitu :

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.



- Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan
- Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
- Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan

Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan yang berisi poin tentang isu gender antara lain sebagai berikut:

### Tujuan 1 : “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat”

- Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

**Kotak 1. Sustainable Development Goals (SDGs), 2015-2030**

1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan**
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya Kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

- Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan

**Tujuan 2 : “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”**

- Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula

**Tujuan 3 : “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”**

- Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
- Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

**Tujuan 4 : “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”**

- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
- Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
- Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas
- Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

### Tujuan 6 : “Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan , untuk semua”

- Populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
- Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

### Tujuan 8 : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”

- Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
- Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya

### Tujuan 9 : “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”

- Penduduk menggunakan telepon genggam dan internet

### Tujuan 10 : “Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara”

- Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut

### Tujuan 11 : “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”

- Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas

## Kesetaraan Gender Tercantum dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan

Implementasi SDGs berlaku baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Peran pemerintah menjadi faktor penentu terbesar dalam

mencapai target SDGs. Bukti keseriusan pemerintah terkait implementasi SDGs di Indonesia adalah pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Perpres tersebut menekankan terlaksananya agenda SDGs di Indonesia melalui kerjasama berbagai pihak yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar. Selain itu, upaya pemerintah dalam meraih target SDGs adalah membentuk tim kerja gabungan atau *joint working group* dalam rangka melaksanakan SDGs. Tim kerja tersebut terdiri dari Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan masyarakat sipil.

Isu gender kini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Hal ini tersirat dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi periode tahun 2015-2019 yang lebih dikenal dengan Nawa Cita. Meski tidak dicantumkan secara khusus, namun pembangunan dan pemberdayaan gender tersirat dalam dua dari sembilan poin dalam agenda prioritas tersebut, yaitu:

- **Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.** Dalam penjelasannya, poin ini memuat beberapa sub-agenda. Salah satu agenda yang ada berfokus pada peran perempuan dalam politik. Hal itu tercantum dalam sub-agenda ketiga yaitu “Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan”
- **Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.** Dari beberapa poin yang menjadi sub-agenda dari rencana ini, terdapat satu hal yang menyinggung tentang gender. Hal itu tercantum dalam sub-agenda ke-enam yaitu “Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal”

Keseriusan pemerintah dalam implementasi agenda SDGs dalam pembangunan nasional tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Implementasi ini mencakup semua poin SDGs termasuk tentang isu gender. Salah satu sub-bab di Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat tentang “Agenda Pembangunan Bidang” menyebutkan bahwa program pengarusutamaan gender (PUG) sebagai jalan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG di Indonesia diawali oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang diperkuat dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kedua dasar hukum dalam pengarusutamaan gender di Indonesia juga didukung oleh berbagai peraturan pada level yang lebih kecil dan spesifik.

## Kotak 2. Agenda Prioritas Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, 2015-2019

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. **Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.**
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. **Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, juga menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015-2019, yakni:

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

“Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan” yang merupakan poin pertama dari tiga isu strategis tersebut secara lebih spesifik akan dibahas pada bab-bab selanjutnya pada buku ini. Pembahasan mengenai perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia terpilah gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi alat utama dalam melihat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai kebijakan terkait pengarusutamaan gender diharapkan dapat meningkatkan capaian ketiga indikator tersebut, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada RPJMN 2014-2019.



## BAB 2



# KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA



# INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) INDONESIA 2017



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

90,96



69,16  
TAHUN

UMUR HARAPAN  
HIDUP SAAT LAHIR



UMUR HARAPAN  
HIDUP SAAT LAHIR

73,06  
TAHUN

12,78  
TAHUN

HARAPAN LAMA  
SEKOLAH



HARAPAN LAMA  
SEKOLAH

12,93  
TAHUN

8,56  
TAHUN

RATA-RATA LAMA  
SEKOLAH

RATA-RATA LAMA  
SEKOLAH

7,65  
TAHUN

14.932  
RIBU RUPIAH

PENGELUARAN PER  
KAPITA PER TAHUN



PENGELUARAN PER  
KAPITA PER TAHUN

8.752  
RIBU RUPIAH

74,85

INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA

IPM

INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA

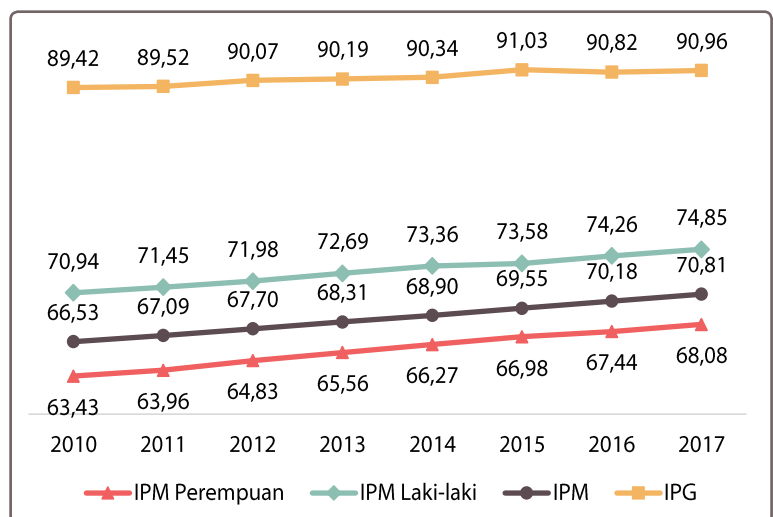
68,08

# Kondisi Pembangunan Gender di Indonesia

## Kecepatan Pembangunan Perempuan Kembali Lampaui Laki-laki

IPG Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pertumbuhan IPM Perempuan yang kalah cepat dibanding IPM Laki-laki. Pada tahun 2017, pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat. IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan IPG disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2016-2017. IPM perempuan tumbuh 0,95 persen, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki yang tumbuh 0,79 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010-2015. Nilai IPG tahun 2017 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 sebesar 91,03.

**Gambar 2.1** Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-laki, IPM, dan IPG, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

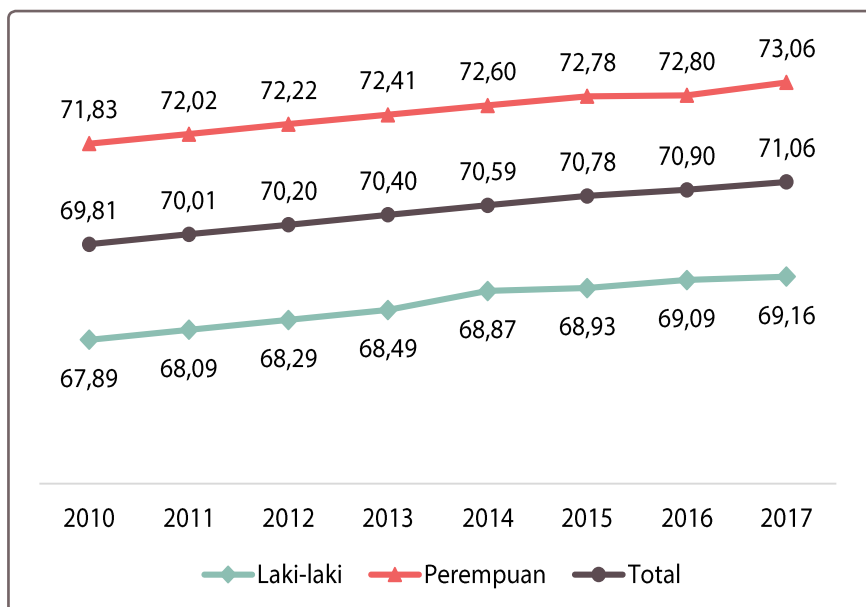
Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Secara nasional, pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Dari tahun 2010, pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih di kisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Indonesia masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2017. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding laki-laki.

### Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-laki

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki.

Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

**Gambar 2.2** Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



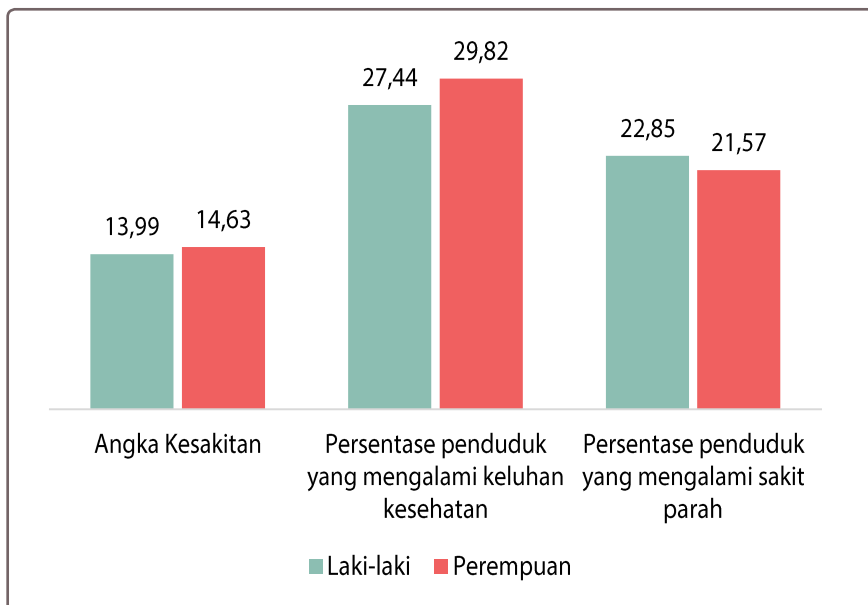
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode tahun 2010-2017, harapan hidup penduduk di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar 2.2 menunjukkan tren UHH perempuan di Indonesia selalu di atas UHH laki-laki. Pada tahun 2017 UHH perempuan sebesar 73,06 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 69,16 tahun.

Selain memiliki level yang lebih tinggi, pada tahun 2017, pertumbuhan UHH perempuan juga lebih besar dibanding laki-laki. UHH perempuan tumbuh 0,36 persen, tiga kali lebih cepat dibanding UHH laki-laki yang meningkat 0,10 persen dibanding tahun 2016. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap peningkatan IPG tahun 2017.

Selain dari sisi harapan hidup, perbedaan derajat kesehatan antargender juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Kenyataan tentang harapan hidup perempuan yang lebih lama dibanding laki-laki didukung oleh beberapa indikator kesehatan. Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa meskipun angka kesakitan dan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun persentase penduduk yang mengalami sakit parah lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan.

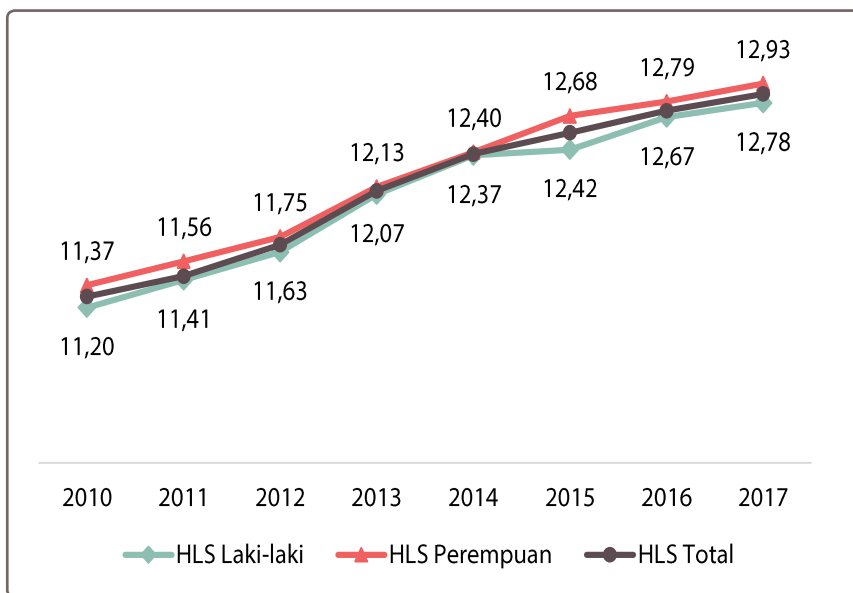
**Gambar 2.3** Berbagai Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 (BPS, 2017c)

Hal ini dapat berkaitan dengan perbedaan kepedulian terhadap kesehatan antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian Stefan Ek (2015) mengungkapkan bahwa perempuan menaruh perhatian dan rasa keingintahuan yang lebih besar dibanding laki-laki mengenai kesehatan serta lebih memperhatikan barang-barang yang mereka beli yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, laki-laki dinilai lebih rentan untuk terjangkit penyakit kronis seperti sirosis hati, jantung dan kanker dibanding perempuan (Waldron dan Johnston, 2010).

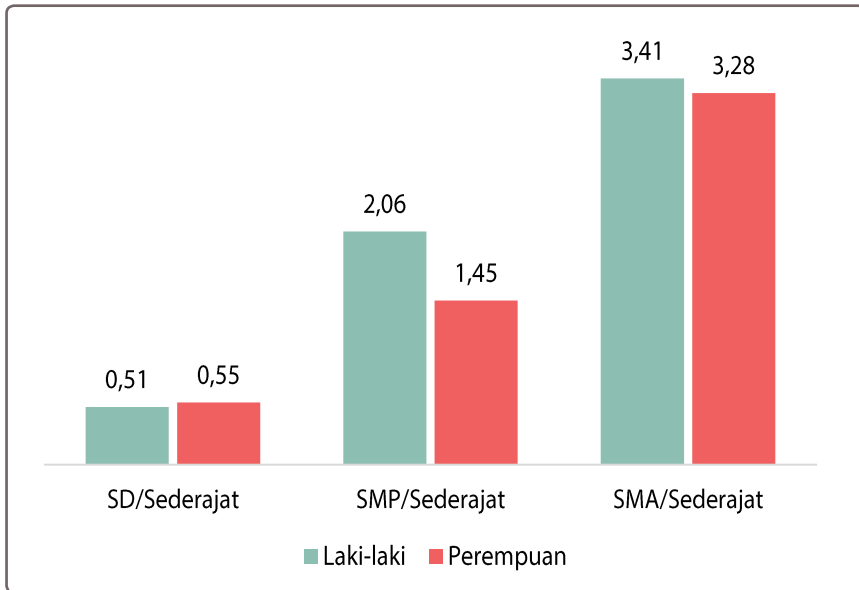
**Gambar 2.4** Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

## Laki-laki dan Perempuan Memiliki Peluang Sama untuk Mengenyam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator, salah satunya harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas.

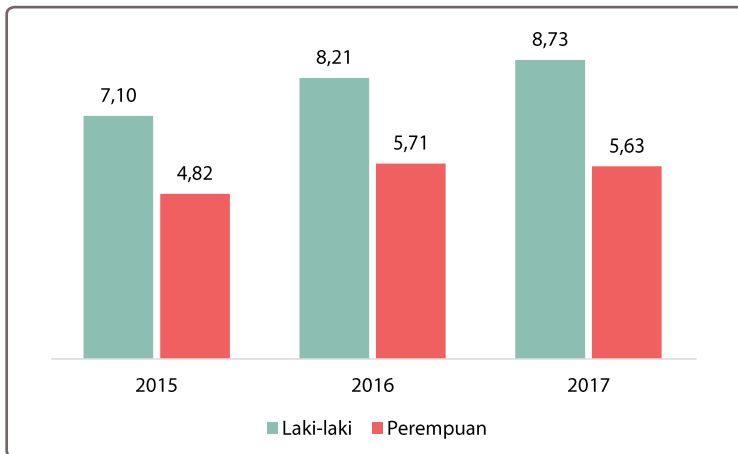
**Gambar 2.5** Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2017

Sumber: Potret Pendidikan Indonesia 2017 (BPS, 2017)

Secara nasional, harapan lama sekolah baik total maupun terpilah gender mengalami peningkatan pada periode 2010-2017. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/ sederajat. Selama delapan tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun.

Peluang bersekolah laki-laki yang sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan beberapa fenomena. Berdasarkan Gambar 2.5, angka putus sekolah laki-laki lebih besar dibanding perempuan pada jenjang sekolah menengah. Partisipasi bersekolah laki-laki yang lebih rendah dari perempuan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah ekonomi. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, persentase pekerja anak baik laki-laki maupun perempuan cenderung meningkat. Dari tahun 2015 hingga 2017, persentase pekerja anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini tentu memiliki andil terhadap partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan.

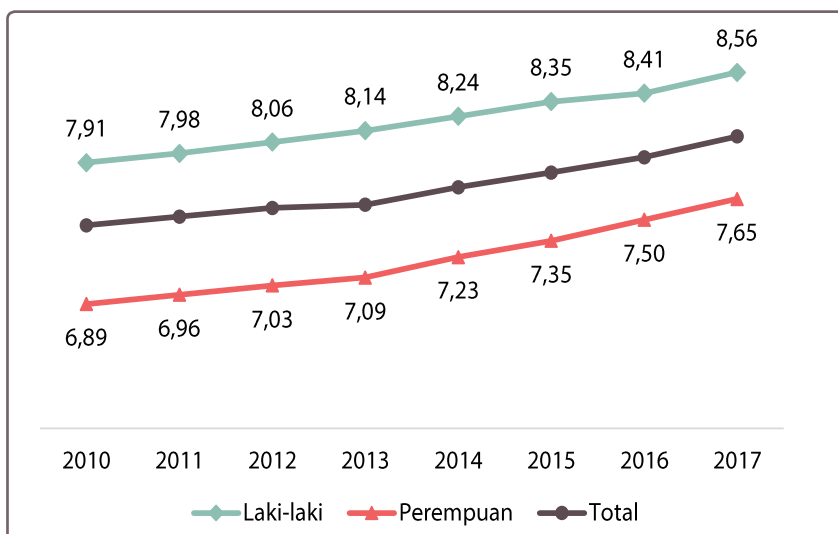
Oleh karena itu, perlu kebijakan khusus yang berkesinambungan untuk menangani masalah pendidikan anak seperti peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan serta akses pendidikan yang adil bagi seluruh penduduk dari segala kalangan ekonomi.

**Gambar 2.6** Persentase Pekerja Anak, 2015-2017

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018, (BPS, 2018)

## Realita Capaian Pendidikan Antargender Masih Timpang

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung lama tahun sekolah secara rata-rata bagi penduduk yang berumur tahun ke atas, berbeda dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun ke atas. Angka ini mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

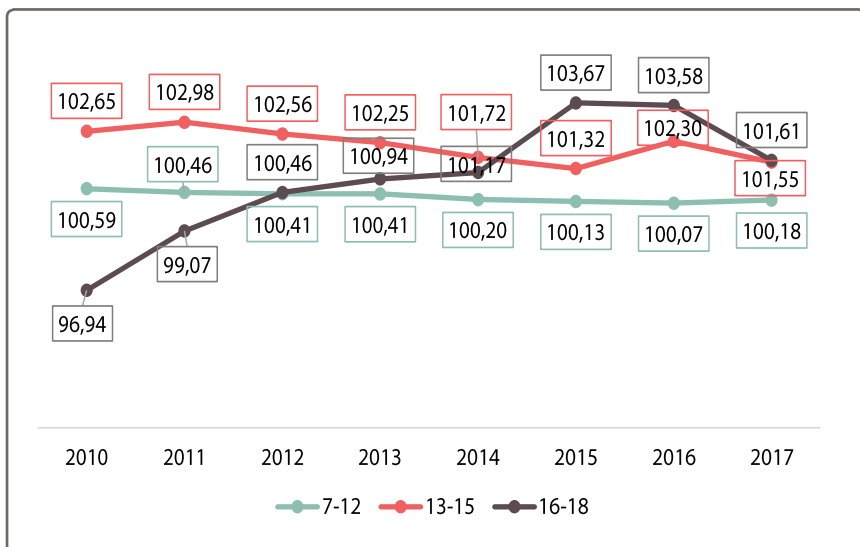
**Gambar 2.7** Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2017, terjadi perbedaan hampir 1 tahun capaian indikator ini antargender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun.

Dalam periode tahun 2010-2017, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Namun pada, RLS perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Pada tahun 2017, RLS perempuan mampu tumbuh sebesar 1,51 persen dibandingkan capaiannya pada tahun 2010, sedangkan laki-laki meningkat 1,13 persen saja. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan RLS perempuan antartahun bernilai lebih besar dibanding pertumbuhan RLS laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan RLS antargender menurun dari waktu ke waktu. Selain itu, RLS perempuan yang lebih cepat tumbuh dibanding laki-laki menjadi salah satu hal yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017.

**Gambar 2.8** Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Terhadap Laki-laki Menurut Kelompok Umur, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Fenomena peningkatan rata-rata lama sekolah serta penurunan kesenjangan indikator tersebut antara laki-laki dan perempuan didukung oleh indikator pendidikan lain. Rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian dalam hal pendidikan penduduk dengan umur 25 tahun ke atas yang diasumsikan telah menyelesaikan fase bersekolah. Rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2017 merupakan dampak dari partisipasi sekolah penduduk di beberapa periode tahun yang lalu. Dilihat dari partisipasi sekolah perempuan umur 7-18 tahun di Gambar



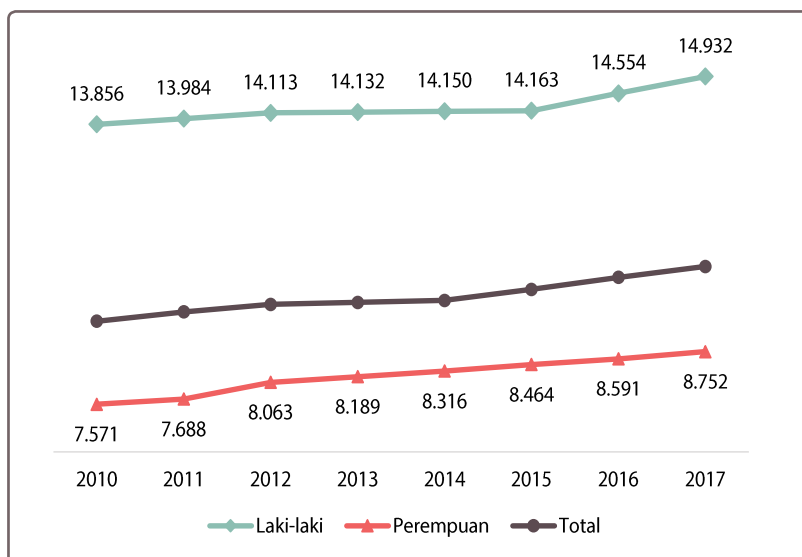
2.8, rasio partisipasi sekolah perempuan dibanding laki-laki menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Bahkan pada tahun 2017, rasio APS perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100, yang berarti bahwa partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Capaian ini memberikan optimisme bahwa dalam beberapa periode tahun ke depan, rata-rata lama sekolah perempuan akan menyamai laki-laki, atau dengan kata lain kesetaraan capaian pendidikan antargender akan tercapai.

## Ekonomi Indonesia Secara Umum Masih Didominasi Laki-laki

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah faktor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita, namun karena keterbatasan data yang dimiliki, indikator tersebut diproksi menggunakan pengeluaran perkapita. Untuk tujuan analisis perbedaan capaian tersebut antara laki-laki dan perempuan, dalam Gambar 2.9 disajikan perkembangan pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin dalam kurun waktu 2010-2017.

**Gambar 2.9** Perkembangan Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan), 2010-2017

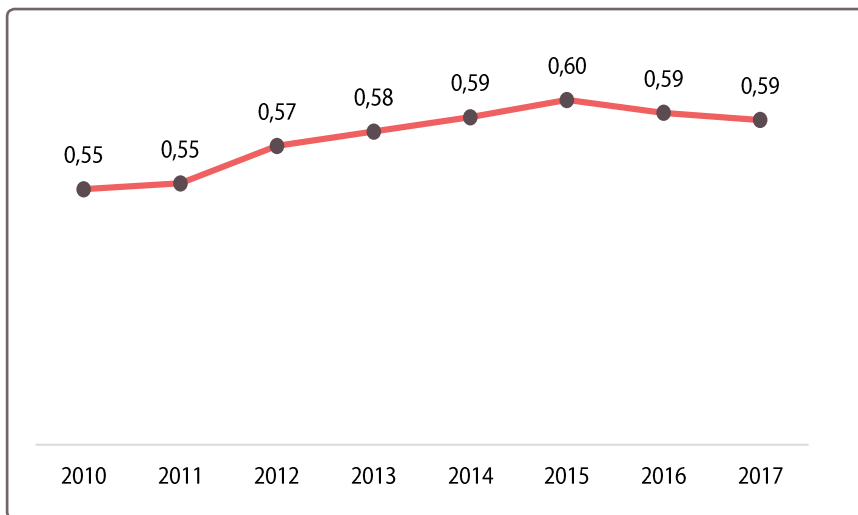


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tahun 2010 hingga 2017, terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,75 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 14,93 juta per tahun.

Kesenjangan dari sisi ekonomi juga dapat dilihat dari rasio pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki. Selama periode tahun 2010-2017, rasio ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti, berkisar antara 0,55 hingga 0,60. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki berada pada angka 0,59 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya sekitar hampir 60 persen saja dari pengeluaran perkapita laki-laki.

**Gambar 2.10** Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan Terhadap Laki-laki, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu penyebab lebarnya kesenjangan pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan adalah *share* perempuan yang relatif rendah pada beberapa lapangan usaha dengan produktivitasnya tinggi. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sektor-sektor produktif seperti pertambangan dan penggalian (B), pengadaan listrik dan gas (D), informasi dan komunikasi (J) serta real estat (L) mayoritas diisi oleh tenaga kerja laki-laki. Bahkan pada sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan produktivitas tertinggi ketiga, persentase tenaga kerja perempuannya tidak mencapai 10 persen. Perempuan di Indonesia cenderung bekerja di sektor jasa, penyediaan akomodasi dan perdagangan dengan tingkat produktivitas yang tidak begitu tinggi.

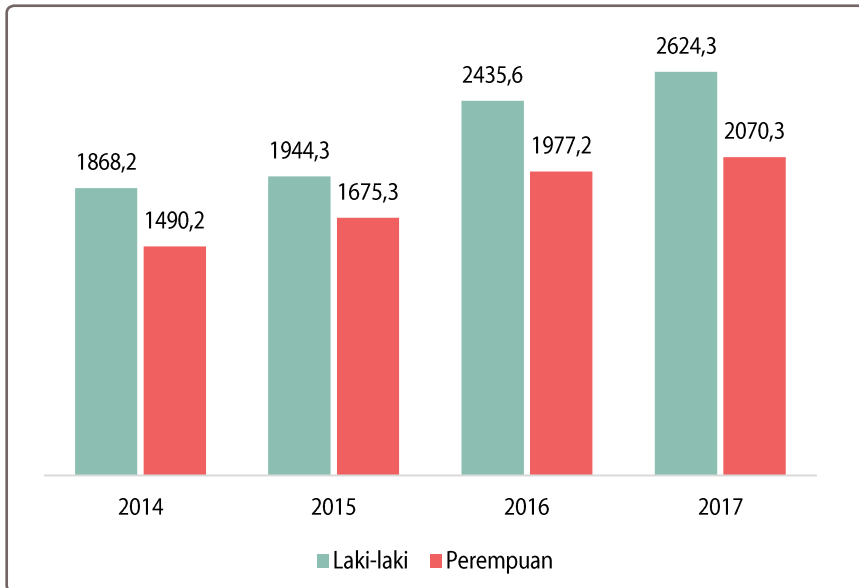
**Tabel 2.1** Produktivitas Tenaga Kerja dan Persentase Tenaga Kerja Perempuan Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017

Kode	Lapangan Usaha	Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah /tahun)	Persentase Tenaga Kerja Perempuan (persen)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,99	35,66
B	Pertambangan dan Penggalian	562,35	8,27
C	Industri Pengolahan	119,77	42,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	335,83	12,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,26	21,34
F	Konstruksi	121,41	2,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	58,35	48,57
H	Transportasi dan Pergudangan	80,30	4,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,23	55,68
J	Informasi dan Komunikasi	615,57	30,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	231,32	35,00
L	Real Estat	949,92	26,49
M, N	Jasa Perusahaan	103,83	23,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	71,27	25,76
P	Jasa Pendidikan	50,94	60,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,42	66,80
R, S, T, U	Jasa lainnya	28,36	53,62
<b>TOTAL</b>		<b>81,91</b>	<b>38,25</b>

Sumber: PDB dan Sakernas 2017, diolah

Perbedaan yang cukup tinggi pada pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan selama ini, secara langsung disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang diterima. Gambar 2.11 menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, upah yang diterima oleh pekerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Pekerja laki-laki secara rata-rata menerima Rp 2,62 juta perbulan, terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan pekerja perempuan yang hanya menerima Rp. 2,07 juta perbulan.

**Gambar 2.11** Rata-rata Upah Pekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin (dalam ribu rupiah), 2014-2017



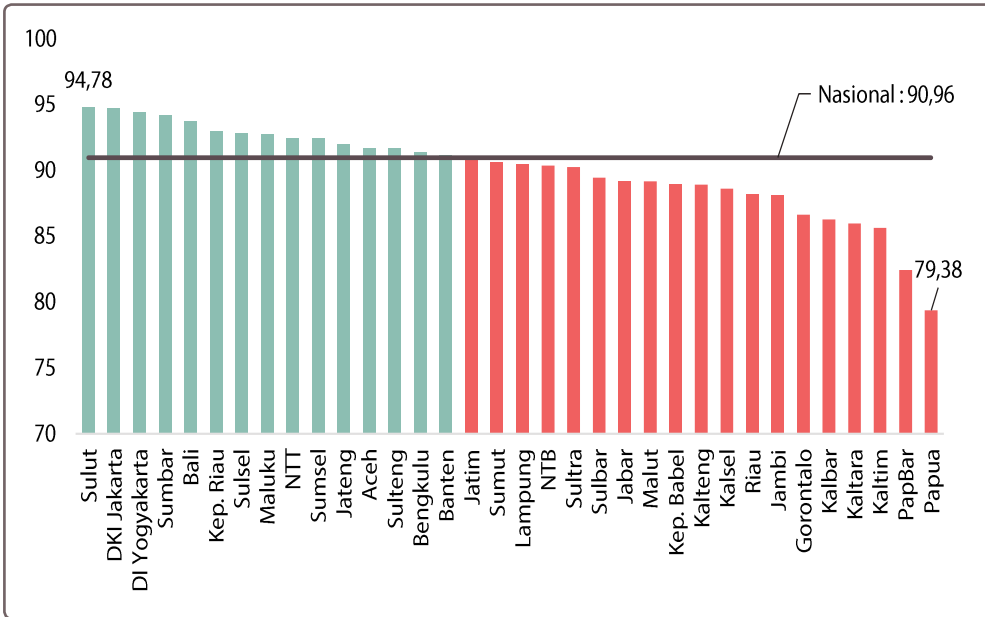
Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia Tahun 2017 (BPS, 2017b)

Fakta mengenai kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung sejak lama. Diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja serta kurangnya pendidikan dan kompetensi yang dimiliki perempuan berkontribusi terhadap masalah ini. Diperlukan usaha serta kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi.

## Pembangunan Gender Belum Merata Antarwilayah

Dalam melihat kemajuan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari capaian antardaerahnya, termasuk dalam hal pembangunan gender. Melihat capaian pembangunan gender di daerah juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program otonomi daerah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 pada level provinsi sangat bervariasi. Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan IPG tertinggi sebesar 94,78. Posisi IPG terendah diduduki oleh Papua sebesar 79,38. Hampir separuh dari total seluruh provinsi di Indonesia (15 provinsi) memiliki nilai IPG di atas rata-rata nasional.

**Gambar 2.12** Capaian IPG Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembangunan gender di sebagian besar provinsi di Indonesia sudah berada di atas level 90. Beberapa provinsi juga sudah mencapai IPG pada rentang nilai 85-90. Artinya, pembangunan gender sudah hampir merata pada level daerah. Meskipun demikian, masih ada provinsi dengan nilai IPG di bawah 85, yakni Papua dan Papua Barat (Gambar 2.13).

**Gambar 2.13** Peta Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah mencapai IPM laki-laki level “tinggi”, sedangkan IPM perempuan masih di level “sedang”. Ketertinggalan pembangunan perempuan ini yang menyebabkan pembangunan manusia yang bersifat adil gender belum sepenuhnya tercapai.

**Gambar 2.14** Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki Menurut Provinsi, 2017



**Gambar 2.15** Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Provinsi, 2017



Keterangan :

- Rendah :  $IPM < 60$
- Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik

Fenomena yang kontras terjadi di pulau Kalimantan dan Papua. Pembangunan laki-laki di pulau Kalimantan sudah mencapai level tinggi, bahkan pembangunan laki-laki di provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki level “sangat tinggi”. Prestasi pembangunan laki-laki di pulau Kalimantan ini tidak dibarengi dengan kualitas pembangunan perempuan. Terbukti, pembangunan perempuan di seluruh provinsi di pulau Kalimantan masih berstatus “sedang”. Selain disebabkan oleh faktor kesehatan dan pendidikan, hal ini dapat dikaitkan dengan perekonomian Kalimantan yang dominan di pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan persentase tenaga kerja perempuan yang relatif rendah.

Pola yang hampir sama juga terjadi di Papua. Berdasarkan Gambar 2.14 dapat diketahui bahwa pembangunan laki-laki di Papua sudah berada di atas level 60 atau masuk dalam kategori “sedang”, bahkan di Papua Barat sudah masuk status pembangunan “tinggi”. Mirisnya, pembangunan laki-laki yang sudah terjadi di kedua provinsi di Papua belum dirasakan sepenuhnya oleh perempuan. Pembangunan perempuan di kedua provinsi tersebut masih tertinggal di level pembangunan “rendah”. Menciptakan keadilan gender dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Papua membutuhkan banyak usaha dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Penyediaan infrastruktur serta peningkatan ekonomi wilayah timur perlu menjadi fokus pembangunan. Hal ini juga sudah tercantum menjadi salah satu poin Nawa Cita yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran”.

**Tabel 2.2** Jumlah Provinsi di KBI dan KTI Menurut Jenis Kelamin dan Status Pembangunan Manusia, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Kategori IPM	2016		2017	
		KBI	KTI	KBI	KTI
Laki-laki	Rendah	0	0	0	0
	Sedang	0	4	0	4
	Tinggi	15	13	15	12
	Sangat Tinggi	2	0	2	1
Perempuan	Rendah	0	3	0	2
	Sedang	13	13	12	14
	Tinggi	4	1	5	1
	Sangat Tinggi	0	0	0	0
Laki-laki + Perempuan	Rendah	0	1	0	1
	Sedang	7	14	5	13
Perempuan	Tinggi	10	2	11	3
	Sangat Tinggi	0	0	1	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lima provinsi dengan IPG terendah pada tahun 2017 ditempati oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Kalimantan Utara mengalami penurunan peringkat seiring dengan penurunan level IPG. Pada tahun 2017, IPG Kalimantan Utara sebesar 85,96, turun 0,38 poin dibanding tahun 2016. Provinsi dengan peringkat IPG terendah ditempati oleh Papua dan menjadi satu-satunya provinsi dengan IPG di bawah 80.

Disparitas pembangunan juga terlihat antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terlebih pada pembangunan perempuan dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Pembangunan perempuan di KTI masih perlu banyak perhatian, pasalnya masih terdapat 2 provinsi yang berstatus rendah dan hanya 1 provinsi yang berstatus tinggi. Pada pembangunan manusia secara keseluruhan, mayoritas provinsi di KTI berada di status “sedang”, sedangkan sebagian besar provinsi di KBI sudah berada di level “tinggi”. Berbeda dengan pembangunan perempuan dan pembangunan manusia secara keseluruhan, pembangunan laki-laki di Indonesia pada tahun 2017 sudah hampir merata yang ditandai dengan tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan laki-laki “rendah”. Perbaikan kualitas pembangunan manusia juga dapat dilihat dari beberapa provinsi yang mengalami peningkatan status seiring dengan peningkatan nilai IPM baik perempuan, laki-laki maupun total.

Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa posisi lima besar IPG tertinggi pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Provinsi Sulawesi Utara masih menduduki posisi teratas dengan nilai IPG sebesar 94,78 meskipun IPG-nya turun dari tahun sebelumnya. Empat provinsi tertinggi lainnya adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali.

**Tabel 2.3** IPG, IPM Laki-laki dan IPM Perempuan dan Ranking IPG di Lima Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah, 2016-2017

Provinsi	IPG		IPM Laki-laki		IPM Perempuan		Ranking IPG	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>IPG Tertinggi 2017</b>								
Sulawesi Utara	95,04	94,78	74,18	74,86	70,50	70,95	1	1
DKI Jakarta	94,98	94,70	82,28	82,87	78,15	78,48	2	2
DI Yogyakarta	94,27	94,39	81,37	81,77	76,71	77,18	4	3
Sumatera Barat	94,42	94,16	74,00	74,62	69,87	70,26	3	4
Bali	93,20	93,70	77,08	77,50	71,84	72,62	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik

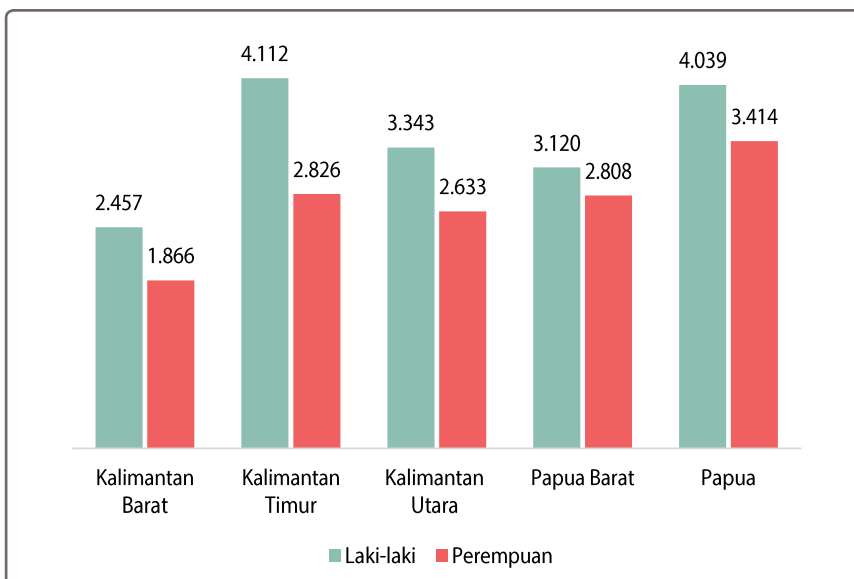


**Tabel 2.3** IPG, IPM Laki-laki dan IPM Perempuan dan Ranking IPG di Lima Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah, 2016-2017 (lanjutan)

Provinsi	IPG		IPM Laki-laki		IPM Perempuan		Ranking IPG	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>IPG Terendah 2017</b>								
Kalimantan Barat	85,77	86,28	70,85	71,14	60,77	61,38	31	30
Kalimantan Utara	86,34	85,96	73,92	74,62	63,82	64,14	29	31
Kalimantan Timur	85,60	85,62	79,46	80,03	68,02	68,52	32	32
Papua Barat	82,34	82,42	70,04	70,69	57,67	58,26	33	33
Papua	79,09	79,38	63,74	64,55	50,41	51,24	34	34

Sumber: Badan Pusat Statistik

Disparitas ekonomi menjadi faktor yang memberi andil besar terhadap kesenjangan dalam pembangunan gender di Indonesia. Kesenjangan tersebut juga terjadi di lima provinsi dengan nilai IPG terendah. Upah pekerja perempuan di provinsi-provinsi tersebut jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ketimpangan upah yang paling terlihat adalah di provinsi Kalimantan Utara. Rasio upah pekerja perempuan dibanding laki-laki di provinsi tersebut masih kurang dari 0,7. Artinya, besaran upah yang didapatkan oleh pekerja perempuan di Kalimantan Utara masih kurang dari 70 persen dari upah yang didapat laki-laki.

**Gambar 2.16** Rata-rata Upah Pekerja di Lima Provinsi dengan IPG Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

## Pembangunan Perempuan Lebih Cepat di Sebagian Besar Provinsi di Indonesia

Kenaikan nilai IPG disebabkan oleh pembangunan perempuan yang tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki, sedangkan untuk kasus penurunan IPG berlaku sebaliknya. Sebanyak 14 provinsi atau 41,18 persen dari total provinsi di Indonesia mengalami penurunan IPG dibandingkan tahun 2016. Penurunan nilai IPG tidak dapat diartikan sebagai penurunan kualitas pembangunan perempuan karena pada kenyataannya Indeks Pembangunan Manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan di semua daerah pada tahun 2017.

Tabel 2.4 menyajikan lima provinsi dengan kecepatan pembangunan gender tertinggi dan terendah. Perubahan IPG pada setiap provinsi berkisar antara -0,44 persen hingga 0,61 persen. Provinsi dengan kecepatan IPG tertinggi ditempati oleh Gorontalo (0,61 persen), Kalimantan Barat (0,59 persen), Bali (0,54 persen), Maluku (0,40 persen) dan Sumatera Selatan (0,38 persen).

**Tabel 2.4** Pertumbuhan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan serta Selisih IPG di Lima Provinsi dengan Pertumbuhan IPG Tertinggi dan Terendah, 2016-2017

Provinsi	IPG		Pertumbuhan IPM Laki-laki	Pertumbuhan IPM Perempuan	Selisih IPG 2016-2017	Pert. IPG
	2016	2017	(%)	(%)	(point)	(%)
<b>Pertumbuhan IPG Tertinggi</b>						
Gorontalo	86,12	86,64	0,90	1,51	0,53	0,61
Kalimantan Barat	85,77	86,28	0,41	1,00	0,51	0,59
Bali	93,20	93,70	0,54	1,09	0,50	0,54
Maluku	92,38	92,75	0,66	1,06	0,37	0,40
Sumatera Selatan	92,08	92,43	0,61	0,99	0,35	0,38
<b>Pertumbuhan IPG Terendah</b>						
Jawa Tengah	92,22	91,94	0,83	0,53	-0,27	-0,29
Kalimantan Selatan	88,86	88,60	0,91	0,61	-0,26	-0,30
NTT	92,72	92,44	0,97	0,66	-0,28	-0,31
Jawa Barat	89,56	89,18	1,04	0,62	-0,37	-0,42
Kalimantan Utara	86,34	85,96	0,95	0,50	-0,38	-0,44

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menariknya ada beberapa fenomena terkait kecepatan IPG dikaitkan dengan level IPG. Contohnya, Provinsi Bali dalam dua tahun berturut-turut masuk dalam jajaran provinsi dengan nilai dan pertumbuhan IPG tercepat. Hal ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Provinsi Bali mampu menciptakan keadilan gender serta memperlihatkan kemajuan yang membanggakan. Selain itu, meskipun Provinsi Kalimantan Barat berada dalam lima provinsi dengan level IPG terendah, namun kecepatan pembangunan gender di provinsi tersebut masuk dalam jajaran provinsi dengan pertumbuhan IPG tercepat. Hal ini berarti bahwa meskipun memiliki level IPG yang relatif rendah, namun Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan kemajuan yang lebih besar dibanding provinsi lain.

Penurunan atau peningkatan level IPG yang dipengaruhi oleh kecepatan IPM antara laki-laki dan perempuan merupakan dampak dari kecepatan komponen penyusun IPM untuk masing-masing jenis kelamin. Tabel 2.5 menyajikan data pertumbuhan komponen penyusun IPM menurut jenis kelamin dan rasio pertumbuhan komponen pembangunan perempuan dibanding pertumbuhan komponen pembangunan laki-laki. Jika rasio pertumbuhan bernilai di atas 1, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan komponen pembangunan perempuan lebih cepat dibanding pertumbuhan komponen pembangunan perempuan, berlaku sebaliknya. Pada lima provinsi dengan pertumbuhan IPG terendah mayoritas rasio pertumbuhan bernilai di bawah 1. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan IPM perempuan kalah cepat dibanding IPM laki-laki yang berdampak pada penurunan IPG. Secara umum, komponen pendidikan dan pengeluaran yang memberikan andil yang cukup berarti bagi penurunan ini.

Adapun penyebab penurunan IPG pada kelima provinsi tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

### Jawa Tengah

Pada tahun 2017 IPG provinsi Jawa Tengah turun 0,29 persen menjadi 91,94. Hal ini disebabkan oleh peningkatan IPM laki-laki yang lebih tinggi dibanding IPM perempuan. Ada 3 komponen yang menyebabkan penurunan IPG provinsi Jawa Tengah yakni Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup dan Pengeluaran. Peningkatan ketiga komponen tersebut di pembangunan laki-laki lebih cepat daripada di perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan ketiga komponen yang bahkan tidak mampu melebihi 0,5. Artinya, peningkatan kualitas pembangunan laki-laki di komponen UHH, HLS dan pengeluaran 2-3 kali lebih cepat dibanding perempuan.

**Tabel 2.5** Pertumbuhan Indikator Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2016-2017

No	Provinsi	JK	Indikator			
			UHH	HLS	RLS	Pengeluaran
1	Jawa Tengah	Laki-laki	0,08	1,46	1,43	2,47
		Perempuan	0,04	0,48	1,95	1,10
		Rasio P Terhadap L	0,50	0,33	1,36	0,45
2	Kalimantan Selatan	Laki-laki	0,09	3,04	0,84	1,72
		Perempuan	0,16	0,08	1,62	1,92
		Rasio P Terhadap L	1,78	0,03	1,93	1,12
3	Nusa Tenggara Timur	Laki-laki	0,05	1,64	1,91	2,65
		Perempuan	0,06	0,08	1,78	2,31
		Rasio P Terhadap L	1,20	0,05	0,93	0,87
4	Jawa Barat	Laki-laki	0,01	2,14	2,63	2,01
		Perempuan	0,04	0,08	2,26	1,62
		Rasio P Terhadap L	4,00	0,04	0,86	0,81
5	Kalimantan Utara	Laki-laki	0,01	2,73	1,42	1,83
		Perempuan	0,05	0,55	0,12	1,86
		Rasio P Terhadap L	5,00	0,20	0,08	1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

### Kalimantan Selatan

IPG provinsi Kalimantan Selatan turun 0,30 persen dari tahun 2016 hingga ke level 88,60. Sebenarnya, semua komponen pembangunan perempuan di Kalimantan Selatan naik lebih cepat dibanding laki-laki kecuali Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah menjadi satu-satunya penyebab penurunan IPG di provinsi ini. HLS perempuan mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,08 persen, capaian ini terpaut relatif jauh dengan pertumbuhan HLS laki-laki yang mencapai 3,04 persen. Rasio pertumbuhan HLS perempuan dibanding laki-laki hanya sebesar 0,03. Artinya, HLS laki-laki mampu tumbuh 38 kali lebih cepat dibanding perempuan. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan partisipasi sekolah perempuan di Kalimantan Selatan lebih rendah dibanding laki-laki di hampir semua kelompok umur, bahkan partisipasi sekolah perempuan di kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2016 (BPS, 2016 dan BPS, 2017).

## Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengalami penurunan IPG pada tahun 2017. Setelah pada tahun 2016 komponen pengeluaran menjadi sebab dominan penurunan IPG, pada tahun 2017 penurunan IPG di NTT lebih disebabkan oleh komponen Harapan Lama Sekolah. Meski demikian, komponen rata-rata lama sekolah dan pengeluaran tetap memiliki andil di penurunan IPG NTT namun pengaruhnya tidak sebesar komponen HLS. Harapan lama sekolah perempuan di NTT tumbuh 0,08 persen, berbeda jauh dibanding HLS laki-laki yang berhasil tumbuh 1,64 persen dibanding tahun 2017. Rasio pertumbuhan HLS perempuan dibanding laki-laki hanya sebesar 0,05 yang artinya pertumbuhan HLS laki-laki 20 kali lebih cepat dibanding pertumbuhan HLS perempuan. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan partisipasi sekolah perempuan lebih kecil dari laki-laki di kelompok umur 13-15 dan 19-24, bahkan turun di kelompok umur 13-15 tahun (BPS, 2016 dan BPS, 2017).

## Jawa Barat

Pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah 90. Level IPG di provinsi ini merupakan yang terendah di Pulau Jawa. IPG Jawa Barat turun dari 89,56 di tahun 2016 menjadi 89,18 di tahun 2017. Penurunan IPG Jawa Barat sebesar 0,42 persen dan menjadi penurunan IPG terbesar kedua setelah Kalimantan Utara. Penyebab IPG turun di provinsi ini adalah komponen pendidikan dan pengeluaran perempuan yang kalah cepat dibanding laki-laki terutama di indikator harapan lama sekolah. Rasio pertumbuhan HLS perempuan di Jawa Barat sebesar 0,04 dibanding laki-laki. HLS laki-laki di Jawa Barat tumbuh hampir 27 kali lebih cepat dibanding perempuan. Hal ini didukung dengan data pertumbuhan partisipasi sekolah perempuan yang kalah cepat dibanding laki-laki di dua kelompok umur yakni 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Bahkan, partisipasi sekolah perempuan di dua kelompok umur tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (BPS, 2016 dan BPS, 2017).

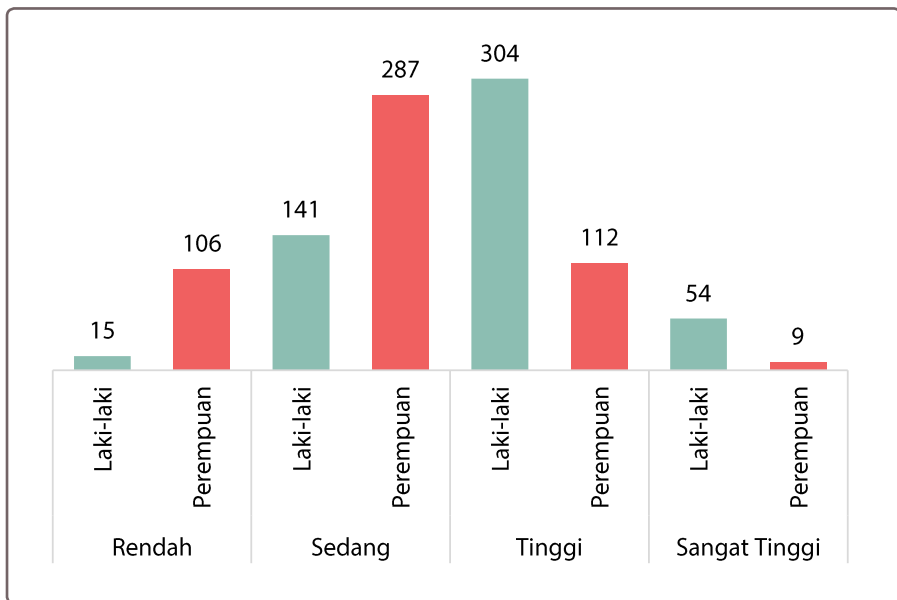
## Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan penurunan IPG terbesar pada tahun 2017. Kalimantan Utara mencatatkan kualitas pembangunan gender pada level 85,96. Capaian ini mengalami turun 0,44 persen dari tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh dua komponen pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah perempuan yang jauh tertinggal dari laki-laki. Selain menjadi provinsi dengan pertumbuhan IPG terbawah, Kalimantan Utara juga termasuk dalam empat provinsi dengan IPG terendah. Hal ini terjadi karena pembangunan laki-laki sudah masuk level "tinggi", sedangkan pembangunan perempuan masih berada di level "sedang".

## Disparitas Pembangunan Gender Masih Terjadi di Level Kabupaten/Kota

Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah memiliki IPG di atas 90, artinya pada level provinsi, pemerataan pembangunan berbasis gender sudah hampir terlaksana. Jika analisis dilakukan pada level yang lebih kecil, kesenjangan pembangunan manusia masih sangat terlihat. Meskipun tidak ada kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPM baik laki-laki maupun perempuan, namun disparitas capaian antar keduanya masih nyata terlihat.

**Gambar 2.17** Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Status Capaian IPM dan Jenis Kelamin, 2017



Keterangan :

Rendah :  $IPM < 60$

Sedang :  $60 \leq IPM < 70$

Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$

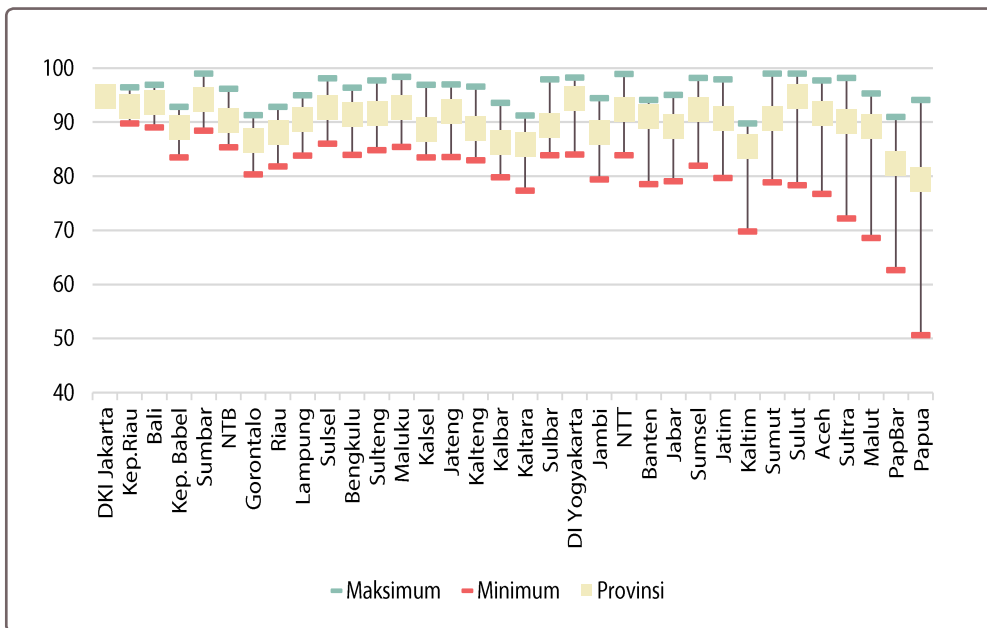
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.17 menyajikan data jumlah kabupaten/kota berdasarkan status capaian IPM dan jenis kelamin. Pembangunan perempuan pada level kabupaten/kota masih tertinggal dari pembangunan yang dicapai oleh laki-laki. Sebagian besar pembangunan perempuan di kabupaten/kota masih berada di level kurang dari 70, bahkan masih terdapat kabupaten/kota dengan pembangunan perempuan di level kurang dari 60 atau berstatus “rendah”.

Hal yang kontras terlihat pada pembangunan laki-laki. Capaian pembangunan laki-laki di tingkat kabupaten/kota lebih baik ddari pada pembangunan perempuan. Sebagian besar kabupaten/kota telah mencapai IPM di atas 70. Hanya 15 kabupaten/kota atau sekitar 2,92 persen yang masih berada di level pembangunan “rendah”. Bahkan jumlah kabupaten dengan IPM laki-laki di atas 80 mencapai enam kali jumlah kabupaten dengan IPM perempuan di level yang sama.

Selain terjadi antarprovinsi di level nasional, disparitas pembangunan gender juga terjadi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Berdasarkan Gambar 2.18, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan variasi IPG terkecil disusul oleh Kepulauan Riau dan Bali. Hal ini berarti capaian pembangunan gender antarkabupaten/kota dalam provinsi-provinsi tersebut hampir sama dan merata. Berbeda halnya dengan ketiga provinsi di atas, tiga provinsi di timur Indonesia yakni Maluku Utara, Papua Barat dan Papua memiliki kesenjangan yang tinggi dalam hal pembangunan gender antarwilayahnya. Kesenjangan yang nyata ini menjadi bukti bahwa kebijakan otonomi daerah yang telah dilakukan, belum sepenuhnya menjangkau dan berdampak pada semua wilayah salahsatunya dalam hal penjaminan keadilan peningkatan kualitas manusia baik bagi laki-laki maupun perempuan.

**Gambar 2.18** Variasi IPG Kabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembangunan gender yang tinggi diharapkan dibangun dari pembangunan manusia yang tinggi pula baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, formulasi IPG yang merupakan rasio dari IPM perempuan terhadap IPM Laki-laki memunculkan beberapa kasus yang terjadi. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan

dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” dan “sama-sama rendah”. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan penafsiran dan analisis data IPG, perlu dicermati nilai IPM terpilah gender.

Berdasarkan tabel 2.6, masih terdapat 2 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki level IPG di atas 90, namun pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di wilayah tersebut masih berstatus rendah atau kurang dari 60. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua. Sementara itu, sudah terdapat 9 kabupaten/kota yang berada di kondisi yang telah diharapkan yakni daerah dengan status IPG di atas 90 serta IPM Laki-laki dan IPM Perempuan yang berstatus “sangat tinggi”. Kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar. Mirisnya, masih terdapat 13 kabupaten dengan kualitas pembangunan manusia baik laki-laki dan perempuan berstatus rendah serta pembangunan gender di bawah 90. Semua daerah tersebut berada di Provinsi Papua.

**Tabel 2.6** Matriks Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPG dan IPM, 2017

Indikator		IPM Laki-laki				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
IPG < 90	IPM Perempuan	Rendah	13	63	24	0
		Sedang	0	17	126	0
		Tinggi	0	0	2	3
		Sangat Tinggi	0	0	0	0
IPG ≥ 90	IPM Perempuan	Rendah	2	4	0	0
		Sedang	0	57	87	0
		Tinggi	0	0	65	42
		Sangat Tinggi	0	0	0	9

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan IPG juga terjadi pada level kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 182 kabupaten/kota (35,41 persen) mengalami penurunan IPG. Pada tahun 2017, Kota Tomohon menjadi daerah dengan IPG tertinggi. Hal ini terjadi karena kesenjangan capaian pembangunan laki-laki dan perempuan yang kecil, meskipun IPM baik laki-laki dan perempuan di kota tersebut bukanlah yang terbaik. Kota Yogyakarta menjadi daerah yang termasuk dalam sepuluh



kabupaten/kota dengan IPG tertinggi yang sejalan dengan capaian IPM laki-laki dan perempuan yang berada di atas angka 80 (berstatus sangat tinggi". Di sisi lain, sepuluh daerah dengan level IPG terendah mayoritas ditempati oleh kabupaten-kabupaten di wilayah timur Indonesia. Jika dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IPM perempuan di wilayah-wilayah tersebut berada di angka yang jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

**Tabel 2.7** IPG, IPM laki-laki, dan IPM Perempuan di Beberapa Kabupaten/Kota Menurut Nilai IPG Tertinggi dan Terendah, 2015 dan 2017

Kabupaten/Kota	IPM Laki-laki		IPM Perempuan		IPG	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017
<b>IPG Tertinggi</b>						
Kota Tomohon	74,64	75,77	74,12	75,00	99,30	98,98
Pakpak Bharat	65,77	66,87	65,46	66,19	99,52	98,98
Kota Pariaman	75,80	76,51	74,83	75,71	98,72	98,95
Nagekeo	64,73	65,30	63,00	64,60	97,32	98,93
Kota Bukittinggi	78,87	80,43	78,67	79,45	99,75	98,78
Kota Payakumbuh	78,46	79,05	77,30	77,89	98,52	98,53
Tanah Datar	70,33	71,28	69,24	70,22	98,44	98,51
Seram Bagian Barat	63,44	64,72	61,96	63,65	97,67	98,35
Maluku Tengah	70,16	71,15	68,53	69,94	97,68	98,30
Kota Yogyakarta	85,10	86,21	84,07	84,71	98,78	98,26
<b>IPG Terendah</b>						
Paser	75,70	76,57	51,97	53,43	68,66	69,78
Deiyai	54,85	55,46	38,12	38,65	69,51	69,69
Pulau Morotai	65,26	66,41	43,91	45,54	67,29	68,57
Intan Jaya	52,24	53,45	35,65	36,57	68,25	68,42
Paniai	59,75	60,45	39,46	40,59	66,04	67,15
Tambrauw	59,39	60,44	39,02	40,19	65,71	66,50
Puncak Jaya	52,86	53,98	32,96	34,78	62,36	64,43
Manokwari Selatan	66,74	67,91	41,10	42,55	61,58	62,66
Tolikara	54,31	56,08	30,67	32,40	56,47	57,77
Asmat	53,14	55,03	26,29	27,85	49,48	50,61

Sumber: Badan Pusat Statistik

## BAB 3

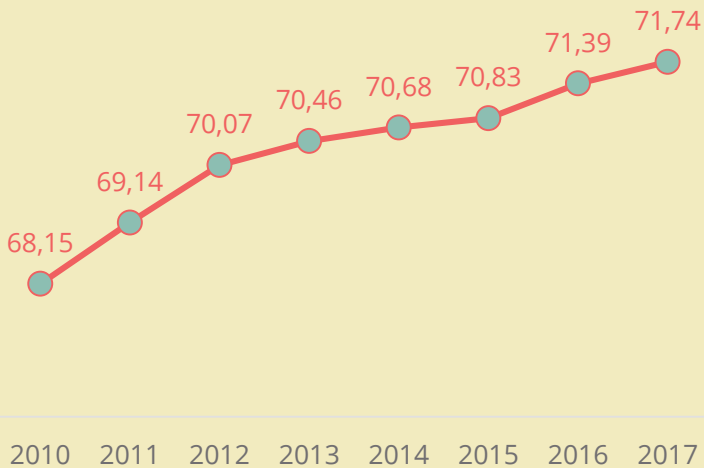


# KONDISI PEMBERDAYAAN GENDER DI INDONESIA

# PEREMPUAN INDONESIA MAKIN MENUNJUKKAN PERANNYA

Peran gender dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik dapat dipantau melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sebagai bagian dari gender, perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya. IDG Indonesia semakin meningkat sejak 2010 meskipun kuota kursi parlemen perempuan belum mencapai 30%.

TREN IDG INDONESIA, 2010-2017



**17,32%**

Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen



**46,31%**

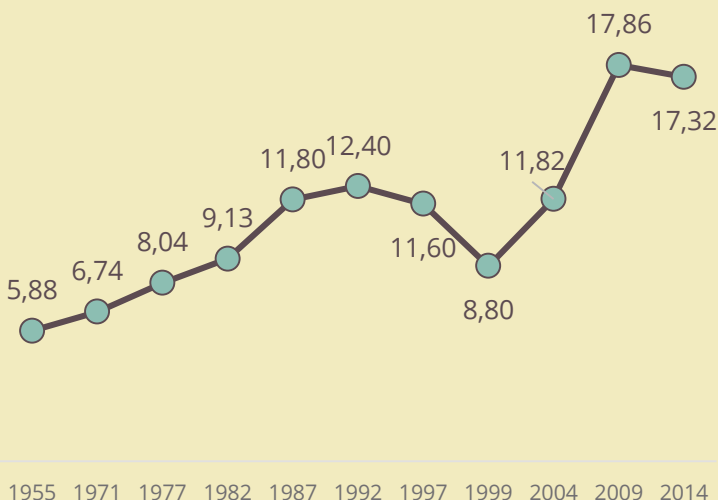
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Kepemimpinan, dan Teknisi



**36,62%**

Sumbangan Pendapatan Perempuan

TREN ANGGOTA DPR RI PEREMPUAN, 1955-2014 (%)



## KOMPOSISI ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014-2019



**463**  
ORANG



**97**  
ORANG

# Kondisi Pemberdayaan Gender di Indonesia

## Dinamika Sosial Menuju Terwujudnya Kesetaraan

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

**Tabel 3.1** Indikator-indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2007 dan 2017

Indikator	2007		2017		Pertumbuhan (persen)	
	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,72	50,25	82,51	50,89	-1,45	1,27
Persentase penduduk 15 tahun yang bekerja terhadap penduduk 15 tahun	76,94	44,84	77,95	48,12	1,31	7,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,11	10,77	5,53	5,44	-31,81	-49,49

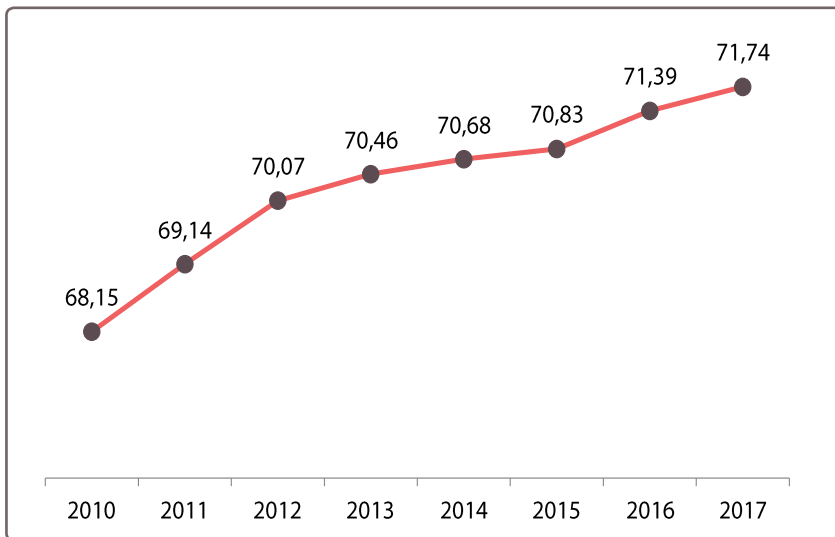
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2007 dan 2017 (BPS, 2007 dan BPS 2017a)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, indikator-indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan peningkatan. Meskipun secara level belum dapat menyamai capaian laki-laki, namun indikator ketenagakerjaan perempuan mampu tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini tentu memberikan rasa optimis bagi terwujudnya pemberdayaan.

## Pemberdayaan Gender di Indonesia Semakin Nyata

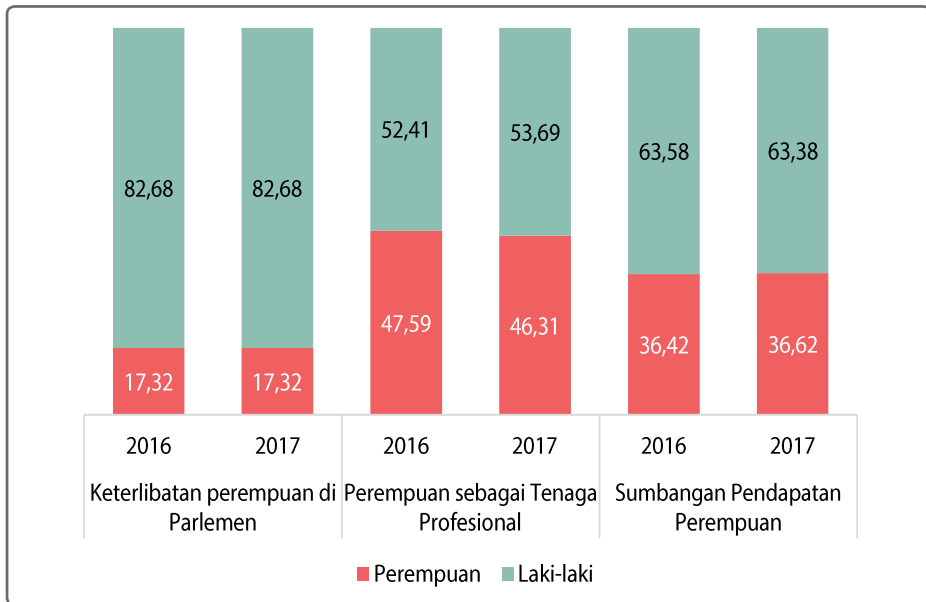
Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

**Gambar 3.1** Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara nasional, IDG Indonesia terus meningkat dalam 7 tahun terakhir dan mencapai angka 71,74. Angka ini meningkat 0,35 poin atau sebesar 0,49 persen dibanding tahun 2016. Pertumbuhan IDG pada periode 2016-2017 tidak secepat sebelumnya yang mencapai 0,56 poin atau 0,79 persen. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh dua komponen yang tidak mengalami kenaikan pada tahun 2017. Keterlibatan perempuan dalam parlemen tetap bertahan di angka 17,32 persen bahkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurun dari tahun sebelumnya. Meski demikian, setidaknya angka IDG yang terus meningkat merupakan indikasi baik bagi kondisi kesetaraan gender di Indonesia.

**Gambar 3.2** Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2016 dan 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

### Kiprah Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia.

Untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub-agenda ketiga dari 9 sasaran utama di RPJMN 2015-2019 yaitu "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan".

Sayangnya, pada level nasional, peran aktif perempuan dalam politik masih relatif rendah. Pada pemilihan umum tahun 2014, hanya terdapat 17,32 persen anggota legislatif perempuan pada level nasional. Angka ini bahkan mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Keikutsertaan perempuan sebagai anggota DPR RI tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari waktu ke waktu.

**Tabel 3.2** Jumlah Anggota DPR RI Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,8
1992	438	62	500	12,4
1997	442	58	500	11,6
1999	456	44	500	8,8
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17,32

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, telah terjadi proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik terhadap perempuan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, perempuan pada umumnya masih buta politik; kedua, umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis; ketiga, umumnya perempuan belum memahami hak asasi mereka, termasuk hak asasi dalam bidang politik dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak tersebut; keempat, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana (Muslidah Mulia, 2008). Menurut UNDP (2010), dominasi elit politik yang mayoritas laki-laki juga menghambat partisipasi perempuan di dunia politik khususnya di dalam struktur partai. Marjinalisasi pada perempuan yang terjadi pada struktur partai, menghambat perempuan dalam memengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan terlebih dalam melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Rendahnya persentase perempuan dalam parlemen pada level nasional diikuti dengan pola yang sama pada level kabupaten/kota dan provinsi. Meski demikian, sudah terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase anggota legislatif

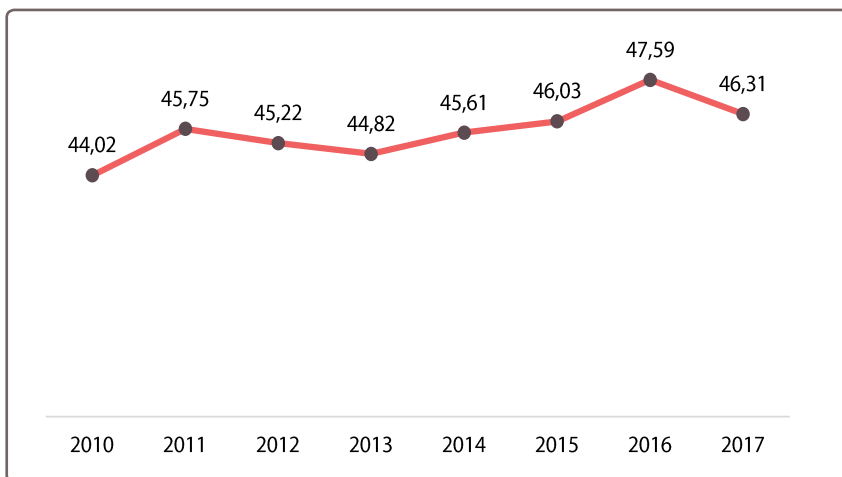
perempuan yang cukup tinggi yakni di atas 25 persen, diantaranya adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku. Bahkan persentase perempuan dalam parlemen di Provinsi Sulawesi Utara hampir mencapai 40 persen.

Kabar baik juga datang dari hasil Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018. Pilkada tersebut melahirkan wajah-wajah birokrat baru, beberapa diantaranya adalah perempuan. Setidaknya ada 14 perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Angka ini menambah daftar pemimpin perempuan di Indonesia. Bahkan saat ini di Provinsi Jawa Timur, terdapat sepuluh kepala daerah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam politik terus menunjukkan peningkatan.

### Harapan akan Kesetaraan pada Pekerjaan Profesional

Faktor sosial budaya yang selama ini berkembang di Indonesia mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi kerja perempuan terutama di sektor formal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Corner, 2011).

**Gambar 3.3** Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2010-2017



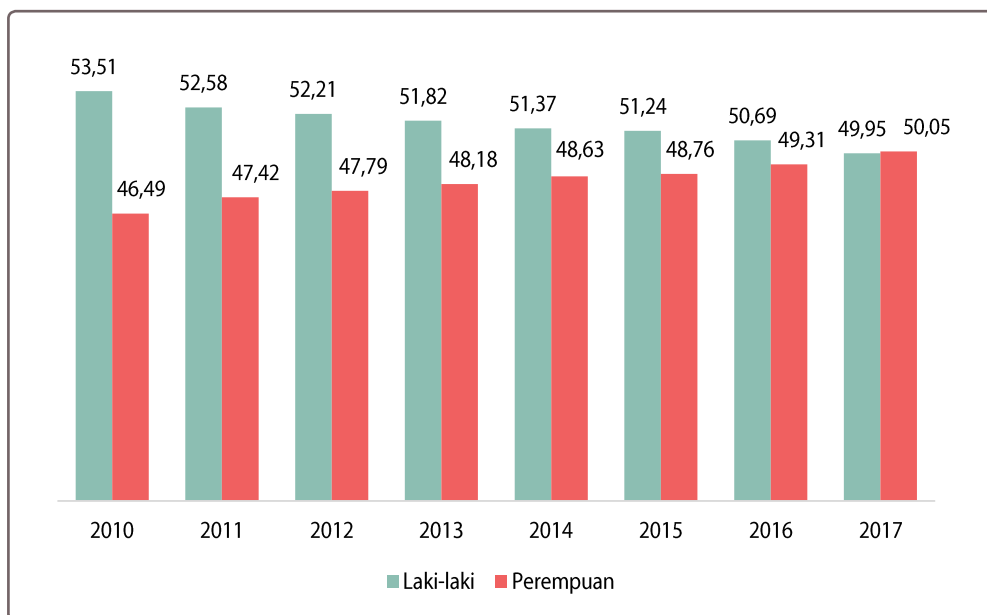
Sumber: Badan Pusat Statistik



Pada tahun 2017, sebesar 46,31 persen dari pekerja profesional merupakan perempuan. Angka ini menurun 1,28 persen dibandingkan tahun 2016. Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam sewindu terakhir. Meski demikian, secara level, persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2017 masih berada di atas capaian tahun 2010-2015.

Kondisi yang setara pada indikator terjadi jika baik laki-laki maupun perempuan mencapai angka 50 persen. Berdasarkan capaian tahun 2017 berarti perlu peningkatan 3,69 persen untuk menyentuh angka tersebut. Dihitung pada periode tahun 2010-2017, secara rata-rata, indikator ini meningkat 0,33 persen tiap tahunnya. Jika kenaikan indikator ini dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkin komposisi perempuan dapat mengejar ketertinggalannya dari laki-laki menuju ke angka yang setara.

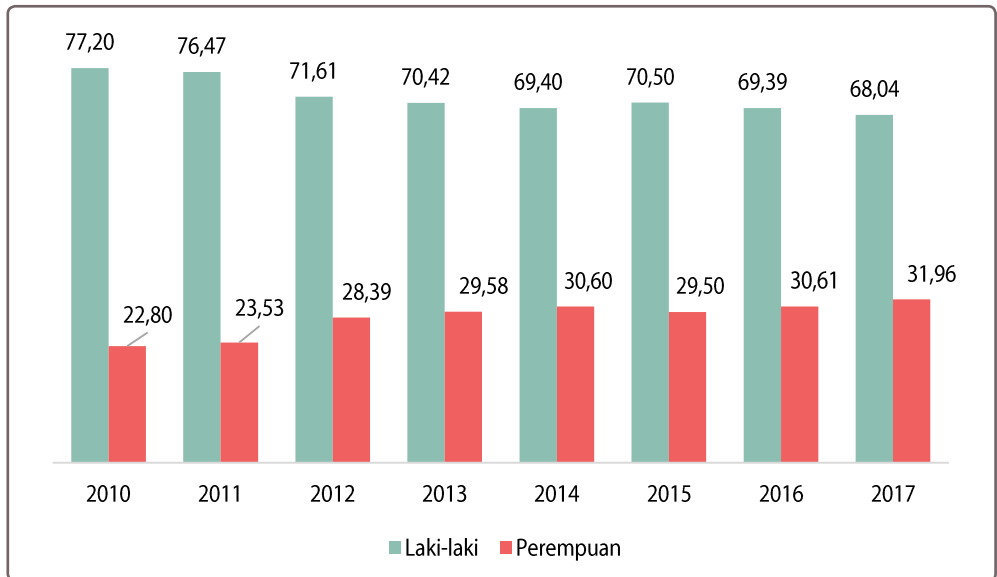
**Gambar 3.4** Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2011-2018 (BPS, 2011-2018)

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pemerintahan salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Pada tahun 2017, PNS laki-laki dan perempuan di Indonesia sudah menunjukkan kondisi yang setara secara komposisi (Gambar 3.4). Meski demikian, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan masih relatif kecil. Pasalnya, pada tahun 2017, hampir 70 persen pejabat struktural diduduki oleh kaum laki-laki (Gambar 3.5).

**Gambar 3.5** Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017



Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2011-2018 (BPS, 2011-2018)

Isu mengenai peran serta perempuan dalam pekerjaan yang bersifat profesional telah lama dibahas. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian ini juga sudah dilakukan. Kurang dari 4 persen lagi untuk mencapai kondisi yang setara di tenaga profesional. Namun ada hal yang tak kalah penting untuk disoroti seperti tersentralnya pekerja profesional perempuan di beberapa pekerjaan.

Menurut *Department for Professional Employees*, mayoritas pekerja profesional perempuan berada di sektor yang memang secara budaya dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Sementara itu, kurang dari 25 persen pekerja perempuan yang menggeluti bidang teknologi informasi, matematika dan arsitektur. Data dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyebutkan bahwa dunia sains dianggap belum ramah bagi perempuan. Persentase peneliti perempuan di Indonesia masih sekitar 30 persen, terpaut cukup jauh jika dibandingkan laki-laki.

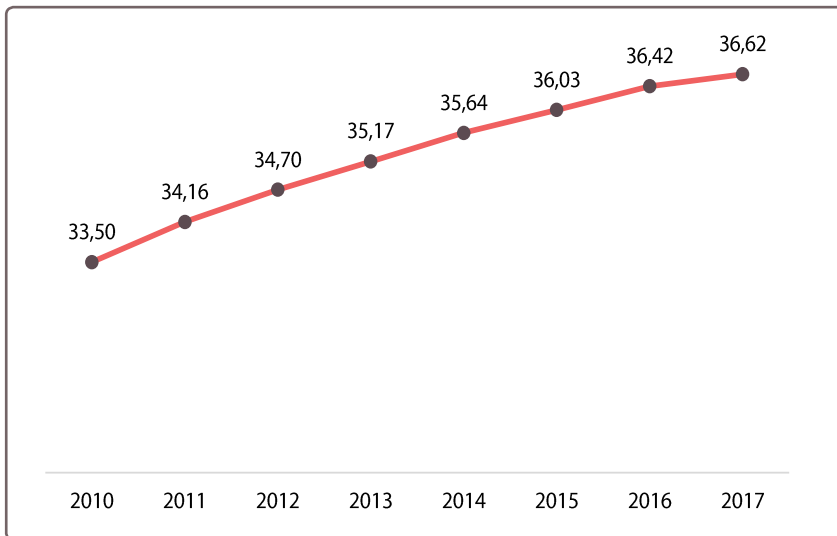
Tersentralnya pekerja perempuan di bidang-bidang tertentu disebabkan oleh anggapan tentang pekerjaan tersebut yang “cukup ramah” bagi perempuan terutama bagi mereka yang sudah menikah dan memiliki anak. Rendahnya partisipasi perempuan di beberapa sektor pekerjaan profesional juga akan berdampak signifikan pada kesenjangan pendapatan jika sektor-sektor yang banyak terisi perempuan memiliki produktivitas yang relatif rendah.

## Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Diperhitungkan

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Meski menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah di berbagai indikator ekonomi dan tenaga kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan Gambar 3.6, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2017, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 36,62 persen. Angka ini meningkat 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski masih terpaut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini menjadi sinyal positif perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam ekonomi.

**Gambar 3.6** Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen), 2010-2017

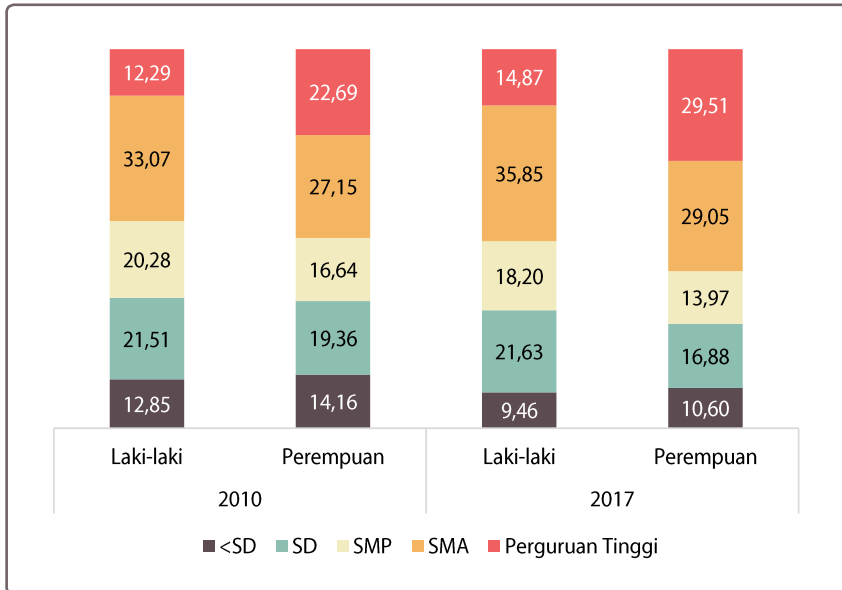


Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan sumbangan pendapatan perempuan mengindikasikan kualitas perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, pekerja perempuan yang berpendidikan minimal

SMA sebesar 58,56 persen, sedangkan pekerja laki-laki pada level pendidikan yang sama sebesar 49,48 persen. Mayoritas pekerja perempuan berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan pekerja laki-laki berpendidikan SMA/ sederajat. Dari gambar 3.7 juga dapat dilihat bahwa pekerja perempuan lebih banyak mengalami perbaikan kualitas pendidikan dibanding laki-laki.

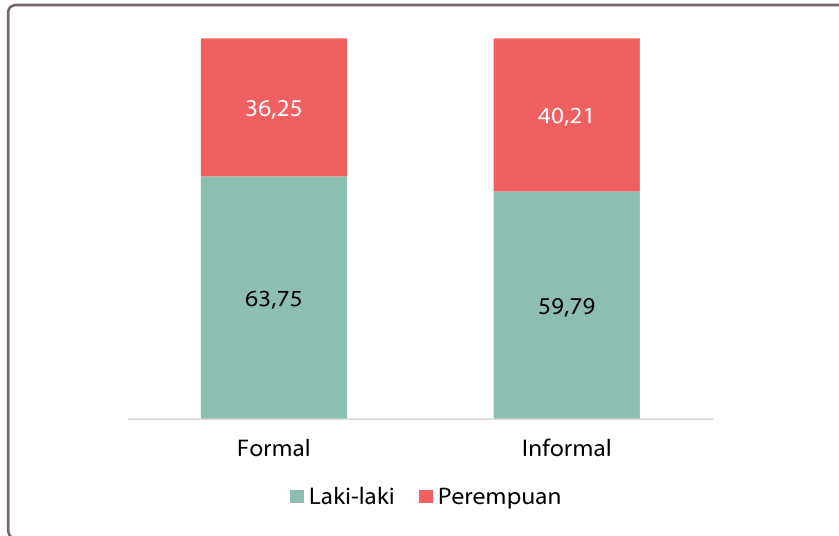
**Gambar 3.7** Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010 dan 2017



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2010 dan 2017 (BPS, 2010 dan 2017)

Meski terus mengalami peningkatan, kontribusi perempuan dalam penciptaan pendapatan dianggap masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diskriminasi gender dalam pemberian upah menjadi salah satunya. Menurut Wolfe (2018), secara global perempuan harus menambah 44 hari kerja agar mendapatkan pendapatan tahunan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan *Institute for Women's Policy Research* menemukan fakta bahwa perempuan mendapat gaji 20 persen lebih rendah dibanding laki-laki.

Kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan dapat dikaitkan dengan sektor kerja perempuan. Berdasarkan Gambar 3.7 pekerjaan formal lebih banyak diisi oleh laki-laki. Pekerja perempuan lebih cenderung bekerja di sektor informal dibanding sektor formal. Menurut *UN Women*, banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial sejenis undang-undang, tidak mendapat dana pensiun, dan tidak mendapatkan cuti serta asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual.

**Gambar 3.8** Persentase Pekerja formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

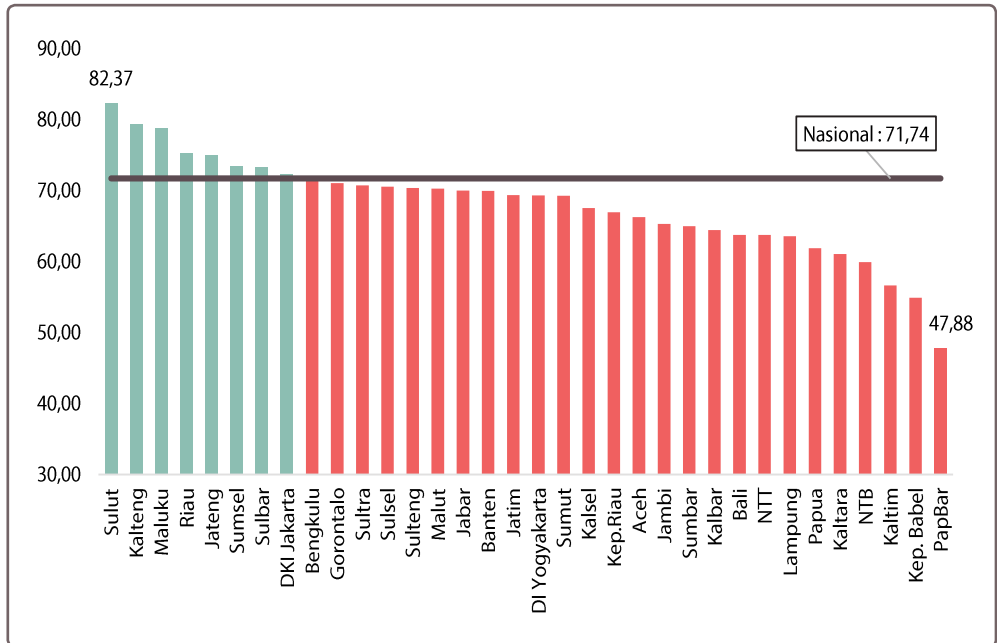
## Pemberdayaan Gender Belum Merata di Semua Provinsi

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya IDG pada tahun 2017. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak secara nasional, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antarwilayah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah.

Disparitas capaian IDG antara KBI dan KTI tidak begitu terlihat. Terdapat lima provinsi di KTI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG tertinggi. Bahkan, tiga besar provinsi dengan IDG tertinggi ditempati oleh provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, ada 3 provinsi di KBI yang berada dalam 10 besar provinsi dengan IDG terendah.

Secara nasional, IDG Indonesia berada pada level 71,74. Beberapa provinsi sudah mampu melebihi angka tersebut. Tercatat sebanyak 8 provinsi (23,53 persen) yang memiliki IDG di atas capaian nasional. Namun ironisnya, IDG sebagian besar atau sebanyak 26 provinsi di Indonesia masih berada di bawah angka nasional. Meski demikian, sebanyak 25 provinsi mengalami peningkatan IDG pada tahun 2017. Dengan kata lain, hanya 9 provinsi yang mengalami penurunan IDG. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah bahwa secara umum, kebijakan responsif gender yang telah dilakukan telah berjalan cukup baik.

Gambar 3.9 Capaian IDG Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki angka IDG di atas 60. Bahkan sudah ada satu provinsi dengan IDG lebih dari 80, yakni Sulawesi Utara. Masih terdapat tiga provinsi dengan IDG di bawah 60, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Bahkan Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang belum mencapai IDG di atas 50.

Gambar 3.10 Peta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Posisi lima besar provinsi dengan IDG tertinggi tidak berubah selama dua tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan prestasinya dalam hal pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2017, IDG Sulawesi Utara sebesar 82,37. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 79,36 disusul oleh Maluku (78,87), Riau (75,36) dan Jawa Tengah (75,10). Sementara itu, lima provinsi dengan IDG terendah adalah Kalimantan Utara (61,09), Nusa Tenggara Barat (59,95), Kalimantan Timur (56,64), Kepulauan Bangka Belitung (54,91) dan Papua Barat (47,88).

**Tabel 3.3** Capaian IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi, 2016-2017

Provinsi	IDG		Ranking (%)		Keterwakilan Perempuan di Parlemen		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Pendapatan Perempuan	
					%		%		%	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>IDG Tertinggi</b>										
Sulawesi Utara	81,24	82,37	1	1	37,78	38,64	53,34	52,52	31,56	32,17
Kalimantan Tengah	78,23	79,36	2	2	26,67	28,89	46,62	42,99	33,26	33,39
Maluku	77,36	78,87	3	3	26,67	28,89	49,44	48,81	37,12	37,13
Riau	75,19	75,36	5	4	27,69	28,13	52,45	53,67	28,10	28,13
Jawa Tengah	74,89	75,10	4	5	24,00	24,00	49,30	46,97	34,09	34,13
<b>IDG Terendah</b>										
Kalimantan Utara	63,52	61,09	28	30	14,29	11,43	48,75	44,82	25,43	25,88
NTB	60,06	59,95	31	31	9,38	9,23	47,96	44,10	32,30	32,69
Kalimantan Timur	56,93	56,64	33	32	10,91	10,91	44,03	39,36	23,00	23,43
Kep. Babel	51,69	54,91	32	33	4,44	6,67	48,99	49,36	25,69	26,17
Papua Barat	49,56	47,88	34	34	4,44	3,57	41,90	37,32	26,34	27,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian IDG pada level provinsi tentu tidak akan terlepas dari capaian tiap komponen pembentuknya. Provinsi dengan IDG yang tinggi memiliki capaian komponen yang hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Perubahan masing-masing komponen menyebabkan peningkatan atau penurunan level IDG serta perubahan peringkat IDG. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Kalimantan Utara mengalami penurunan level dan peringkat IDG yang menyebabkan provinsi tersebut menjadi lima besar provinsi dengan IDG terendah. Penurunan level IDG Kalimantan Utara disebabkan oleh persentase perempuan dalam parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang menurun dari tahun 2016.

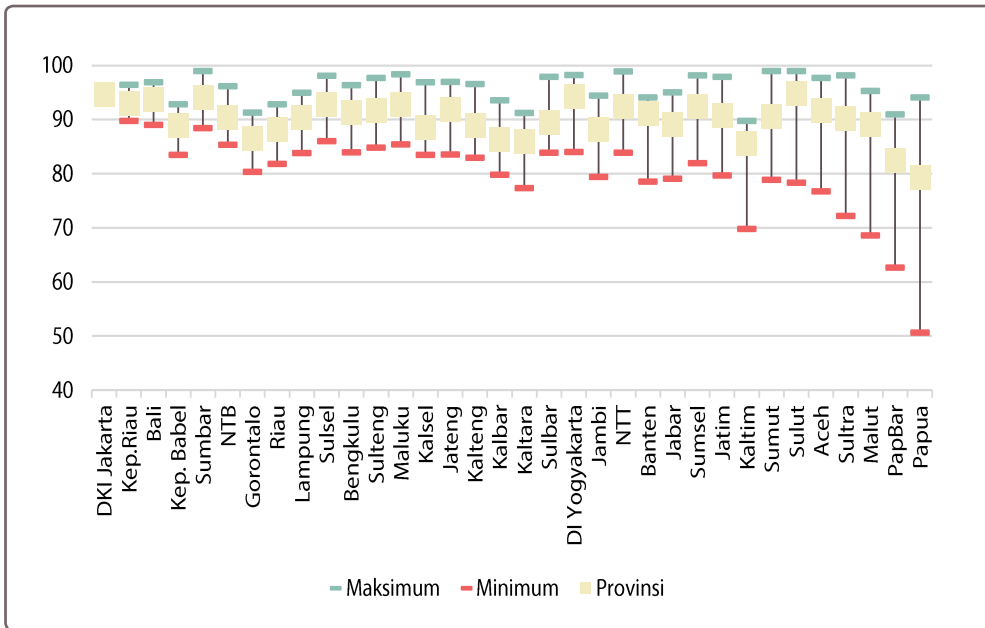
Berdasarkan Tabel 3.3, keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi komponen yang cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG antarprovinsi. Persentase perempuan dalam parlemen di lima provinsi dengan IDG tertinggi berada di atas angka 20 persen. Bahkan ada satu provinsi yang sudah berhasil mencapai lebih dari 30 persen, yakni Sulawesi Utara. Sebaliknya, persentase perempuan dalam parlemen di provinsi-provinsi yang memiliki IDG terendah tidak lebih dari 15 persen saja.

### **Ketimpangan Pemberdayaan Gender Antarkabupaten/kota Masih Tinggi**

Disparitas pemberdayaan gender tidak hanya terjadi pada level provinsi, tetapi juga kabupaten/kota bahkan di satu provinsi yang sama. DKI Jakarta, Bali dan Banten menjadi 3 provinsi dengan variasi IDG antarkabupaten/kota terkecil. Sedangkan 3 provinsi dengan variasi IDG antarkabupaten/kota terbesar ditempati oleh Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Papua. Gambar 3.11 menunjukkan bahwa jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi tampaknya berpengaruh terhadap kesenjangan yang terjadi. Perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi dan budaya serta implementasi kebijakan pada setiap daerah menjadi penyebab perbedaan capaian IDG antarwilayah.



Gambar 3.11 Variasi IDG Antarkabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai IDG pada tingkat kabupaten/kota sangat bervariasi dengan rentang dari 28,71 hingga 86,20. IDG tertinggi pada level kabupaten/kota ditempati oleh Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 86,20 diikuti oleh Kota Kendari dan Kota Surabaya di posisi kedua dan ketiga. Sebanyak lima dari 10 kabupaten/kota dengan IDG tertinggi berada di KBI, dan 5 lainnya berada di KTI. Berbeda halnya dengan kabupaten/kota yang memiliki IDG tertinggi, sepuluh daerah dengan IDG terendah sebagian besar ditempati oleh kabupaten di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua dan Papua Barat. Faktor yang menyebabkan nilai IDG rendah di wilayah-wilayah tersebut adalah rendahnya partisipasi perempuan di semua komponen. Bahkan, di beberapa wilayah, tidak ada wakil perempuan dalam parlemen level kabupaten/kota.

**Tabel 3.4** Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya Menurut Kabupaten/kota, 2017

Kabupaten/Kota	Ranking	IDG	Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
			(persen)	(persen)	(persen)
<b>IDG Tertinggi</b>					
Barito Utara	1	86,20	36,00	45,39	43,73
Kota Kendari	2	85,30	40,00	47,34	37,76
Kota Surabaya	3	82,89	34,00	47,29	35,45
Temanggung	4	82,49	31,11	44,62	40,87
Minahasa	5	82,42	31,43	54,19	38,80
Kota Kediri	6	82,36	33,33	51,19	35,56
Kota Tomohon	7	82,32	40,00	56,98	33,89
Kota Madiun	8	82,19	33,33	47,24	37,83
Kota Mojokerto	9	82,00	32,00	54,39	37,05
Barito Selatan	10	81,67	36,00	34,70	38,11
<b>IDG Terendah</b>					
Puncak Jaya	505	42,76	36,00	45,39	43,73
Belitung	506	42,62	40,00	47,34	37,76
Pegunungan Arfak	507	42,46	34,00	47,29	35,45
Siak	508	42,02	31,11	44,62	40,87
Lanny Jaya	509	38,86	31,43	54,19	38,80
Halmahera Selatan	510	38,52	33,33	51,19	35,56
Deiyai	511	38,42	40,00	56,98	33,89
Sumbawa Barat	512	38,03	33,33	47,24	37,83
Mamberamo Raya	513	36,95	32,00	54,39	37,05
Asmat	514	28,71	36,00	34,70	38,11

Sumber: Badan Pusat Statistik



## BAB 4

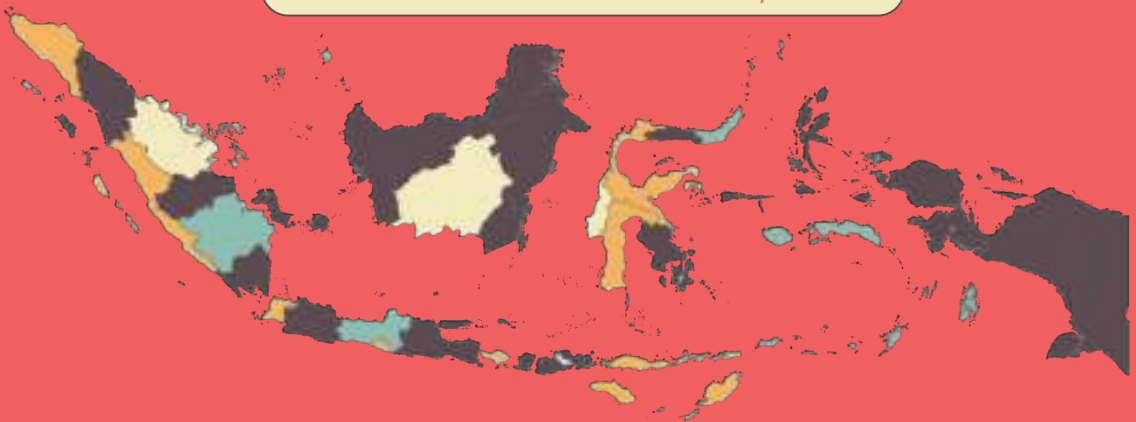


# KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

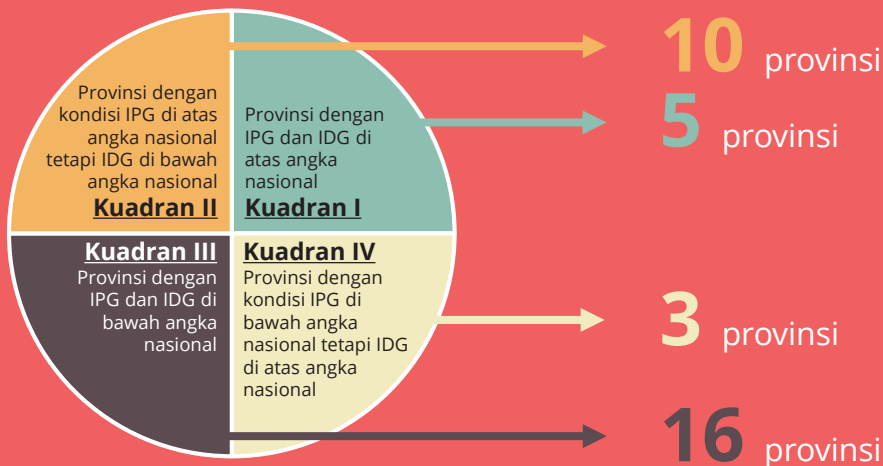
# PEMBANGUNAN GENDER **BELUM SEPENUHNYA** DIKUTI PEMBERDAYAAN GENDER

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara IPG dan IDG pada level provinsi ditunjukkan oleh koefisien korelasi *Pearson* sebesar 0,51. Pada kenyataannya, fenomena peningkatan kualitas pembangunan perempuan belum sepenuhnya diimbangi oleh peran aktif di sektor publik terjadi di beberapa wilayah. Analisis kuadran dapat digunakan untuk mengetahui capaian masing-masing provinsi dalam hal pembangunan dan pemberdayaan gender dibandingkan dengan rata-rata nasional.

## HUBUNGAN ANTARA IPG DAN IDG, 2017



Keterangan:

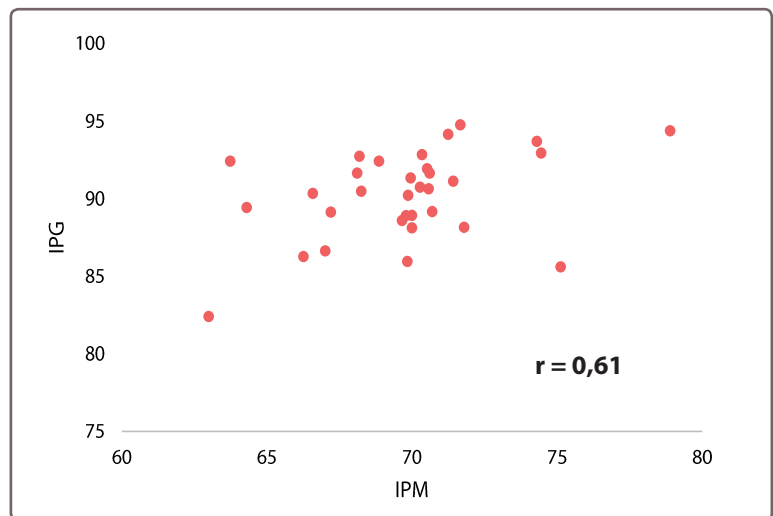


# Kesetaraan Gender dan Pembangunan Manusia

## Pembangunan Gender Sejalan dengan Pembangunan Manusia

Menciptakan kondisi setara dan mengurangi ketimpangan gender menjadi beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut guna menciptakan keadaan yang adil dan ideal antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Kualitas pembangunan manusia tinggi dan merata tentu akan mendorong pembangunan gender ke arah yang lebih baik. Itulah sebabnya pembangunan manusia dan pembangunan gender merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menarik untuk dianalisis.

**Gambar 4.1** Sebaran IPM dan IPG Menurut Provinsi, 2017

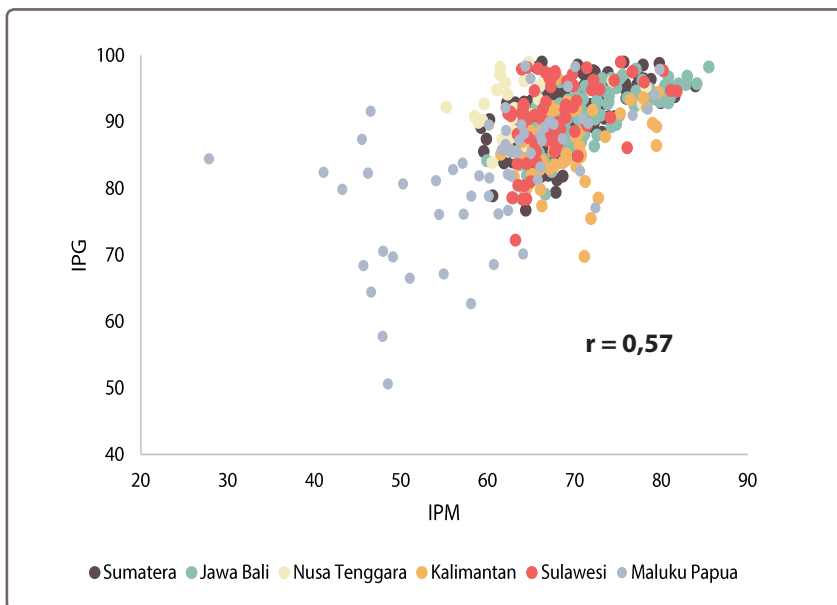


Sumber: Badan Pusat Statistik

Idealnya, kualitas pembangunan manusia akan berbanding lurus dengan kualitas pembangunan gender. Wilayah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik akan memiliki kualitas pembangunan gender yang baik pula dengan catatan

tidak ada kesenjangan peningkatan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 yang memperlihatkan hubungan antara IPM dan IPG di semua wilayah di Indonesia. Secara umum, IPM dan IPG menunjukkan pola yang searah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Wilayah dengan IPM tinggi akan memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan koefisien korelasi *Pearson* yang menunjukkan hubungan yang bersifat sedang, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Korelasi antara IPM dan IPG sebesar 0,61 pada level provinsi dan 0,57 pada level kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota, variasi hubungan IPM dan IPG yang paling mencolok terjadi di wilayah Maluku dan Papua (Gambar 4.2).

**Gambar 4.2** Sebaran Kabupaten/kota Menurut IPM dan IPG, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

### Kualitas Pembangunan Relatif Rendah di Sebagian Besar Provinsi

Hubungan searah yang terjadi antara IPM dan IPG menciptakan interpretasi bahwa wilayah dengan IPM tinggi tentu akan memiliki IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Hal ini tidak berlaku ketika terjadi perbedaan pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang cukup besar. Semua wilayah di Indonesia memperlihatkan capaian pembangunan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dampaknya, belum ada satupun wilayah dengan IPG mencapai 100.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kebijakan perbaikan kualitas pembangunan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum sensitif gender. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dengan membagi provinsi sesuai dengan posisi capaian IPM dan IPG dilihat dari rata-rata nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Provinsi-provinsi tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok dengan perbandingan capaian secara nasional sebagai berikut:

- **Kuadran I** : Kelompok pertama merupakan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional
- **Kuadran II** : Kelompok kedua merupakan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional
- **Kuadran III** : Kelompok ketiga adalah provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional
- **Kuadran IV** : Kelompok keempat adalah provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional.

**Gambar 4.3** Hubungan Antara IPM dan IPG, 2013-2017

2013	2015	2017		2013	2015	2017	
Sumsutera Utara Riau Kalimantan Timur	Riau Kalimantan Timur	Riau Kalimantan Timur	<b>IPM di Atas Nasional</b>	Sumsutera Barat Kep. Riau DKI Jakarta DI Yogyakarta Banten Bali Sumsutera Utara	Sumsutera Barat Kep. Riau DKI Jakarta DI Yogyakarta Banten Bali Sumsutera Utara	Sumsutera Barat Kep. Riau DKI Jakarta DI Yogyakarta Banten Bali Sumsutera Utara	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
<b>KUADRAN II</b>				<b>KUADRAN I</b>			
<b>IPG di Bawah Nasional</b>				<b>IPG di Atas Nasional</b>			
Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat NTB Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sumsutera Tenggara Gorontalo Sumsutera Barat Makulu Utara Papua Barat Papua	Sumsutera Utara Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat NTB Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sumsutera Tenggara Gorontalo Sumsutera Barat Makulu Utara Papua Barat Papua	Sumsutera Utara Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Tengah NTB Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sumsutera Tenggara Gorontalo Sumsutera Barat Makulu Utara Papua Barat Papua		<b>IPM di Bawah Nasional</b>	Aceh Sumsutera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Jawa Timur NTT Sumsutera Tengah Sumsutera Selatan Maluku	Aceh Sumsutera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Jawa Timur NTT Sumsutera Tengah Sumsutera Selatan Maluku	Aceh Sumsutera Selatan Bengkulu Jawa Tengah NTT Sumsutera Tengah Sumsutera Selatan Maluku
(15)	(16)	(17)			(8)	(9)	(10)
<b>KUADRAN III</b>			<b>KUADRAN IV</b>				

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pembangunan gender di sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada di bawah capaian nasional. Bahkan, selama periode tahun lima tahun terakhir, jumlah provinsi yang berada di Kuadran III mengalami peningkatan dari 15 provinsi di tahun 2013 menjadi 17 provinsi di tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa separuh provinsi di Indonesia selain memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, juga terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Terbukti, nilai IPG ketujuhbelas provinsi tersebut masih berada di bawah capaian secara nasional. Meskipun demikian, sudah ada tujuh provinsi yang konsisten dengan pembangunan manusia dan pembangunan gender yang baik atau berhasil melampaui rata-rata nasional (Kuadran I). Ketujuh provinsi ini adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, dan Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi di Kuadran II dan IV merupakan provinsi yang berhasil mencapai kualitas pembangunan manusia atau pembangunan gender yang baik, namun masih perlu perhatian lebih di salah satunya.

### Pergeseran Kondisi Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender

Kecepatan pembangunan menciptakan berbagai perubahan. Kecepatan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan yang berbeda menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai IPG. Perbedaan kecepatan di level provinsi dengan nasional berdampak pada pergeseran posisi suatu provinsi dari satu kuadran ke kuadran lainnya.

**Tabel 4.1** Pergeseran Kondisi Kesetaraan Pembangunan Gender dan Pembangunan Manusia

Provinsi	2013	2015	2017	Keterangan
Sumatera Utara	Kuadran II	Kuadran III	Kuadran III	Kualitas pembangunan manusia dan pembangunan gender lebih rendah dari rata-rata nasional.
Jawa Timur	Kuadran IV	Kuadran IV	Kuadran III	Kualitas pembangunan manusia dan pembangunan gender lebih rendah dari rata-rata nasional.

Sumber: Badan Pusat Statistik

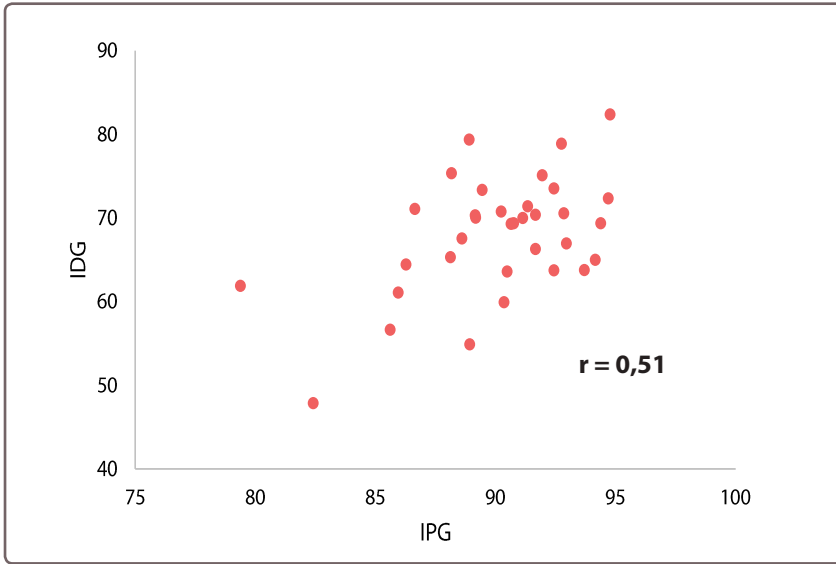
Kasus perpindahan kuadran terjadi di dua provinsi, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Fenomena perpindahan kuadran provinsi Sumatera Utara terjadi pada tahun 2015. Sebelumnya, pada tahun 2013, pembangunan manusia di Sumatera Utara di atas capaian nasional, meski belum merata antara laki-laki dan perempuan (Kuadran II). Pada tahun 2015, Sumatera Utara berada di Kuadran III dengan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan gender berada di bawah rata-rata nasional. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 2017. Sementara itu, peningkatan pembangunan manusia yang kalah cepat dibanding nasional menyebabkan Jawa Timur mengalami perpindahan posisi dari Kuadran IV di tahun 2015 menjadi Kuadran III di tahun 2017. Pada tahun 2015 pembangunan di Jawa Timur antara laki-laki dan perempuan cukup merata yang menyebabkan nilai IPG di provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional. Perpindahan kuadran yang terjadi di tahun 2017 menunjukkan bahwa di posisi capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pergeseran posisi suatu provinsi dibandingkan provinsi lainnya dengan tolak ukur capaian nasional merupakan hal yang lumrah. Berbagai kebijakan yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan manusia yang adil secara gender. Meski demikian, dampak implementasi kebijakan tidak dapat dilihat dalam jangka pendek dan seragam antarwilayah. Oleh sebab itu, beberapa wilayah cenderung tertinggal dalam menggapai kualitas pembangunan manusia dan gender secara optimal.

## **Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti oleh Pemberdayaan**

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup yang meningkat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan mendorong ke arah pemberdayaan. Pemberdayaan tidak hanya diharapkan dari laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Budaya yang selama ini berkembang seakan menghambat pemberdayaan perempuan, seperti dalam pengambilan keputusan hingga penciptaan pendapatan dalam pasar tenaga kerja. Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan.

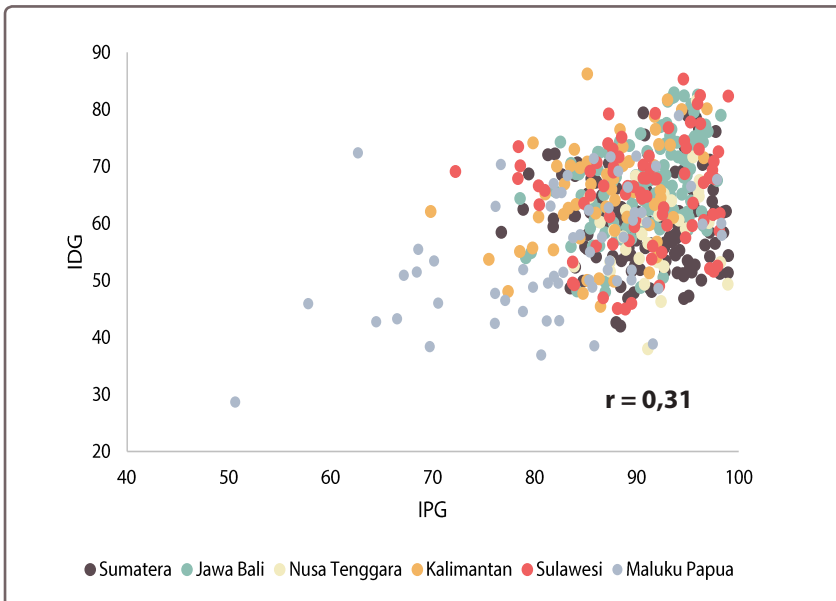
**Gambar 4.4** Sebaran Provinsi Menurut IPG dan IDG, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 4.4 dan Gambar 4.5, hubungan antara pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia tahun 2017 cenderung searah. Wilayah dengan kualitas pembangunan gender yang tinggi akan mencapai tingkat pemberdayaan gender yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Hubungan antara IPG dan IDG pada level provinsi lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi *Pearson* antara IPG dan IDG sebesar 0,51 pada

**Gambar 4.5** Sebaran Kabupaten/kota Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

tingkat provinsi dan 0,31 pada tingkat kabupaten/kota. Dengan koefisien sebesar itu, hubungan IPG dan IDG di level provinsi status sedang, sedangkan di level kabupaten/kota masih berada pada rentang korelasi rendah. Variasi hubungan IPG dan IDG dengan pola paling mencolok terjadi di kabupaten/kota di Maluku dan Papua. Fakta yang tersirat dari fenomena ini adalah masih terjadi kesenjangan yang cukup berarti dalam hal kualitas pembangunan dan pemberdayaan gender antarwilayah serta peningkatan pembangunan perempuan yang ditandai dengan IPM yang terus naik antarwaktu belum sepenuhnya dapat mendorong perempuan untuk berperan aktif di sektor publik.

### Mayoritas Provinsi Berada pada Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Bawah Angka Nasional

Penyempitan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif secara ekonomi. Namun pada kenyataannya, fenomena peningkatan kualitas pembangunan perempuan yang belum sepenuhnya diimbangi oleh peran aktif di sektor publik terjadi di beberapa wilayah. Analisis kuadran perlu dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing provinsi dalam hal pembangunan dan pemberdayaan gender dibandingkan dengan rata-rata nasional. Langkah ini diharapkan dapat berguna untuk menentukan kebijakan terkait pembangunan dan pemberdayaan gender pada level provinsi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan provinsi-provinsi ke dalam empat kelompok (kuadran) sebagai berikut:

- Kuadran I : Kelompok pertama merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional
- Kuadran II : Kelompok kedua merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional
- Kuadran III : Kelompok ketiga adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional
- Kuadran IV : kelompok keempat adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional.

**Gambar 4.6** Hubungan Antara IPG dan IDG, 2013-2017

2013	2015	2017		2013	2015	2017
Aceh Sumatera Barat Sumatera Selatan Kep. Riau Banten Bali NTT Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan (9)	Aceh Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Kep. Riau DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTT Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan (12)	Aceh Sumatera Barat Bengkulu Kep. Riau DI Yogyakarta Banten Bali NTT Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan (10)	IPG di Atas Nasional	Bengkulu DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sulawesi Utara Maluku (7)	DKI Jakarta Jawa Tengah Sulawesi Utara Maluku (4)	Sumatera Selatan DKI Jakarta Jawa Tengah Sulawesi Utara Maluku (5)
<b>KUADRAN II</b>				<b>KUADRAN I</b>		
<b>IDG di Bawah Nasional</b>				<b>IDG di Atas Nasional</b>		
Sumatera Utara Riau Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat NTB Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua (18)	Sumatera Utara Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat NTB Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua (15)	Sumatera Utara Jambi Lampung Kep. Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Timur NTB Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Utara Papua Barat Papua (16)	IPG di Bawah Nasional	(0)	Riau Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara (3)	Riau Kalimantan Tengah Sulawesi Barat (3)
<b>KUADRAN III</b>				<b>KUADRAN IV</b>		

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada posisi ideal (Kuadran I), sudah terdapat 5 provinsi yang mampu mencapai kualitas pembangunan dan pemberdayaan gender di atas angka nasional. Provinsi-provinsi yang berada di kuadran I adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku.

Di kuadran II terdapat 10 provinsi dengan IPG di atas nasional namun IDG masih berada di bawah nasional. Meski masih relatif banyak, namun jumlah provinsi yang berada pada posisi ini mengalami penurunan dari 12 provinsi di tahun 2015 menjadi 10 provinsi di tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh berpindahannya Jawa Timur ke kuadran III dan Sumatera Selatan ke kuadran I pada tahun 2017. Provinsi-

provinsi di kuadran ini sebenarnya sudah mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, namun perlu ada kebijakan khusus untuk mendorong kaum perempuan yang sudah berkualitas untuk lebih berperan aktif di sektor publik. Dorongan pada perempuan diperlukan terutama untuk terjun menjadi pengambil keputusan di politik, pekerja profesional dan penciptaan pendapatan yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja.

Sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada di kuadran III. Sebanyak 16 provinsi berada di posisi ini. Jumlah ini bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2015. Artinya, baik dari sisi kualitas pembangunan maupun pemberdayaan gender di Indonesia belum cukup memuaskan. Kebijakan multisektor untuk perbaikan kualitas hidup perempuan serta mengurangi kesenjangan capaiannya dengan laki-laki diperlukan sebelum mendorong pemberdayaan perempuan.

Meski jumlahnya relatif kecil, namun masih ada dua provinsi yang berada di kuadran IV. Provinsi-provinsi yang berada pada posisi ini berhasil mencapai pemberdayaan gender di atas nasional tetapi pembangunan perempuan masih di bawah nasional. Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat menjadi tiga provinsi yang berada pada posisi ini pada tahun 2017.

### **Pergeseran Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender**

Seperti diketahui, IPM perempuan menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu. Namun, pada kenyataannya, peningkatan tersebut tidak serta merta mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam sektor publik. Hal ini dapat dilihat dari dinamika capaian IDG suatu wilayah antarwaktu.

Pada tahun 2013-2017, pergeseran posisi pada level provinsi menunjukkan ke arah yang kurang memuaskan. Setidaknya, terdapat 4 provinsi yang berpindah ke kuadran dengan kualitas yang lebih buruk. Penurunan pemberdayaan perempuan hingga mencapai level di bawah nasional dialami oleh Bengkulu, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Sedangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tenggara mengakibatkan nilai IPG menjadi di bawah nasional yang berdampak pada perpindahan posisi ke kuadran III pada tahun 2017. Fenomena ini menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait kebijakan yang telah dilakukan yang belum sepenuhnya berdampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan yang adil antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 4.2 Pergeseran Kondisi Kesetaraan Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender**

Provinsi	2013	2015	2017	Keterangan
Sumatera Selatan	Kuadran II	Kuadran II	Kuadran I	Kualitas pembangunan dan pemberdayaan gender di atas angka nasional.
Bengkulu	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran II	Pembangunan gender tinggi, tetapi pemberdayaan gender di bawah angka nasional.
DI Yogyakarta	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran II	Pembangunan gender tinggi, tetapi pemberdayaan gender di bawah angka nasional.
Jawa Timur	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Pembangunan dan pemberdayaan gender mengalami penurunan menjadi dibawah angka nasional
Sulawesi Tenggara	Kuadran III	Kuadran IV	Kuadran III	Pembangunan dan pemberdayaan gender berada dibawah angka nasional
Sulawesi Barat	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran IV	Pemberdayaan gender tinggi, namun pembangunan gender di bawah angka nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik

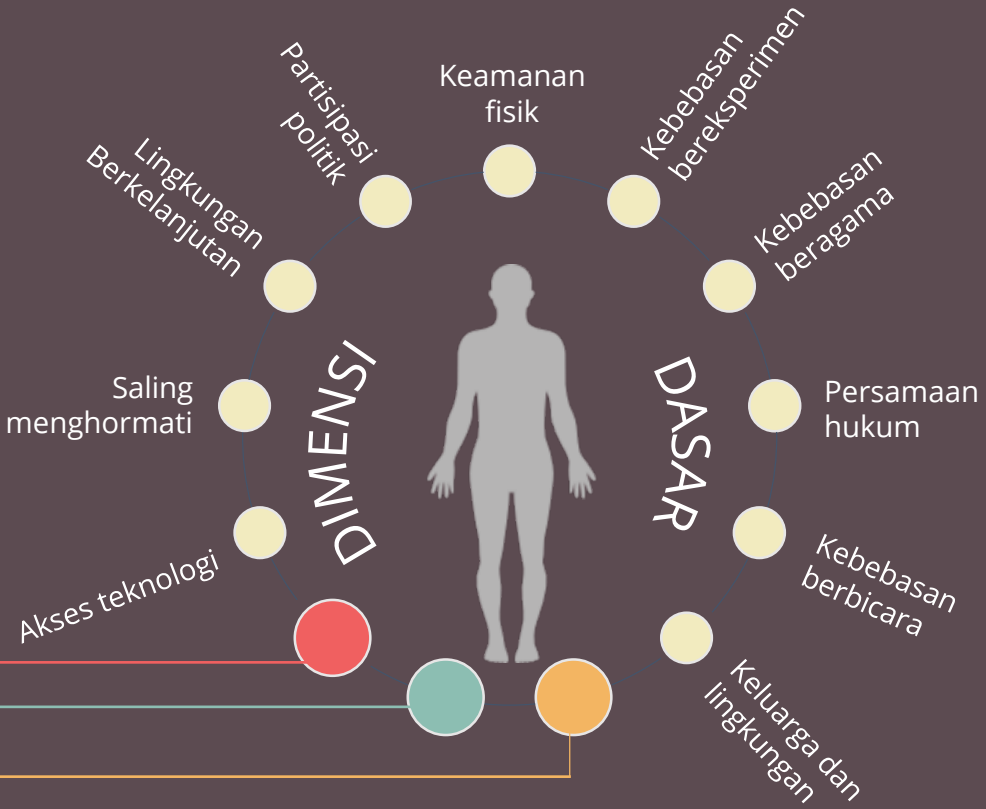
## BAB 5



# KESIMPULAN



# BAGAIMANA IPM DIUKUR?



UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

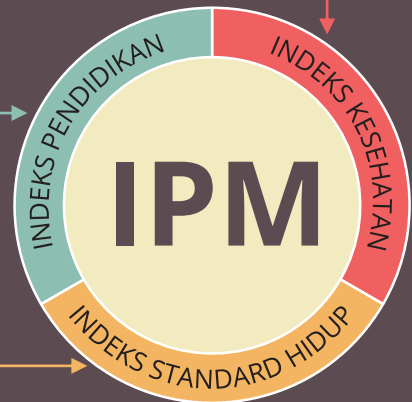
UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR

PENGETAHUAN

• HARAPAN LAMA SEKOLAH  
• RATA-RATA LAMA SEKOLAH

STANDAR HIDUP LAYAK

PENGELUARAN PER KAPITA



# Kesimpulan

- Pada tahun 2017, IPG Indonesia sebesar 90,96. Capaian ini meningkat 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Artinya pembangunan gender di Indonesia menunjukkan perbaikan. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010-2015. Nilai IPG tahun 2017 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 sebesar 91,03.
- Provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sementara provinsi-provinsi dengan IPG terendah adalah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur. Hampir separuh provinsi di Indonesia mempunyai angka IPG lebih dari 90. Artinya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah hampir tercapai.
- Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia sudah mencapai nilai IPG di atas 90. Artinya, selain pada level provinsi, kesetaraan pembangunan gender pada level kabupaten/kota juga hampir tercapai.
- IDG Indonesia pada tahun 2017 sebesar 71,74. Capaian ini meningkat 0,35 poin atau sebesar 0,49 persen dibanding tahun 2016. Pertumbuhan IDG pada periode 2016-2017 tidak secepat sebelumnya yang mencapai 0,56 poin atau 0,79 persen. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh komponen yang mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni persentase perempuan sebagai tenaga profesional.
- Provinsi-provinsi dengan IDG tertinggi adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Maluku. Sementara provinsi-provinsi dengan IDG terendah adalah Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.

- Ketimpangan IDG yang cukup nyata terjadi pada level kabupaten/kota. Jarak IDG tertinggi dan terendah kabupaten/kota sebesar 57,48, sementara rentang IDG antarprovinsi hanya 34,49.
- IPG dan IPM provinsi memiliki hubungan yang searah. Provinsi dengan IPM tinggi akan cenderung memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Sebagian besar provinsi memiliki capaian IPM maupun IPG berada di bawah nasional, sedangkan provinsi yang memiliki capaian IPM dan IPG di atas nasional hanya sebanyak 7 provinsi.
- Terdapat asosiasi positif antara IPG dan IDG. Idealnya, provinsi dengan pembangunan gender yang tinggi cenderung memiliki tingkat pemberdayaan gender yang tinggi pula. Namun sayangnya, separuh provinsi di Indonesia memiliki IPG dan IDG di bawah angka nasional. Sementara provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional hanya sebanyak 4 provinsi.



# DAFTAR PUSTAKA





# Daftar Pustaka

- BPS. 2007. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus Tahun 2007. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2016. Potret Pendidikan Indonesia Tahun 2016. Jakarta: BPS
- \_\_\_\_\_. 2017. Potret Pendidikan Indonesia Tahun 2017. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2017a. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus Tahun 2017. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2017b. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus Tahun 2017. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2017c. Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2018a. Statistik Indonesia Tahun 2018. Jakarta: BPS
- Corner, Lorraine. 2011. *Women and the formal economy*. AusAID Office of Development Effectiveness Australian Government
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Mulia, Muslidah. 2008. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Stefan Ek. 2015. *Gender differences in health information behaviour: a Finnish population-based survey*. Health Promotion International, Volume 30, Issue 3, 1 September 2015, Pages 736–745
- UN Women. <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-economy>
- UNDP. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Verick, Sher. 2018. *Female Labor Force Participation in Developing Countries*. IZA World of Labor 2014 : 87.

Wolfe, Lahlé. 2018. *Unequal Pay Is a Form Of Gender Discrimination*. <https://www.thebalancecareers.com/gender-discrimination-in-the-workplace-3515145>

World Bank. 2012. *World Development Report*. Washington: World Bank.

<https://academic.oup.com/heapro/article/30/3/736/620016> (Diakses tanggal 27 Agustus 2018)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

<https://iwpr.org/issue/employment-education-economic-change/pay-equity-discrimination/>

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>



# LAMPIRAN







## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2016	2017
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	69,51	69,52	13,89	14,13	8,86	8,98	8.768	8.957	70,00	70,60
Simeulue	64,78	64,90	13,07	13,23	8,91	9,06	6.542	6.677	63,82	64,41
Aceh Singkil	67,02	67,07	14,27	14,28	7,69	7,84	8.068	8.230	66,96	67,37
Aceh Selatan	63,75	63,89	13,53	13,80	8,02	8,33	7.397	7.567	64,13	65,03
Aceh Tenggara	67,51	67,62	13,96	13,97	9,33	9,63	7.212	7.359	67,48	68,09
Aceh Timur	68,26	68,33	12,55	13,00	7,60	7,80	7.825	7.961	65,42	66,32
Aceh Tengah	68,48	68,53	14,23	14,24	9,66	9,67	9.920	10.021	72,04	72,19
Aceh Barat	67,56	67,62	14,56	14,57	8,70	9,04	8.559	8.989	69,26	70,20
Aceh Besar	69,49	69,52	14,48	14,49	9,92	9,93	8.788	8.965	71,75	72,00
Pidie	66,52	66,58	13,93	14,25	8,75	8,76	9.273	9.377	69,06	69,52
Bireuen	70,72	70,80	14,42	14,80	9,15	9,16	7.885	8.237	70,21	71,11
Aceh Utara	68,51	68,54	14,11	14,42	8,09	8,10	7.520	7.632	67,19	67,67
Aceh Barat Daya	64,35	64,51	13,54	13,55	7,93	8,12	7.567	7.723	64,57	65,09
Gayo Lues	64,88	64,98	13,27	13,28	7,10	7,39	8.048	8.322	64,26	65,01
Aceh Tamiang	69,08	69,16	13,55	13,56	8,21	8,47	7.766	7.931	67,41	67,99
Nagan Raya	68,67	68,76	14,09	14,10	8,24	8,25	7.460	7.732	67,32	67,78
Aceh Jaya	66,70	66,77	13,94	13,95	7,95	8,13	8.796	8.898	67,70	68,07
Bener Meriah	68,85	68,90	13,42	13,43	9,43	9,55	10.140	10.428	71,42	71,89
Pidie Jaya	69,59	69,68	14,51	14,52	8,46	8,84	9.590	9.691	71,13	71,73
Kota Banda Aceh	70,92	70,96	17,03	17,10	12,57	12,59	15.737	15.917	83,73	83,95
Kota Sabang	70,01	70,09	13,17	13,58	10,51	10,70	10.507	10.610	73,36	74,10
Kota Langsa	69,00	69,06	15,17	15,18	10,71	10,90	11.015	11.261	75,41	75,89
Kota Lhokseumawe	71,05	71,14	15,16	15,17	10,53	10,88	10.549	10.673	75,78	76,34
Subulussalam	63,42	63,56	14,18	14,19	6,88	7,12	6.669	6.887	62,18	62,88
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>68,33</b>	<b>68,37</b>	<b>13,00</b>	<b>13,10</b>	<b>9,12</b>	<b>9,25</b>	<b>9.744</b>	<b>10.036</b>	<b>70,00</b>	<b>70,57</b>
Nias	69,07	69,18	12,09	12,12	4,92	4,93	6.409	6.629	59,75	60,21
Mandailing Natal	61,77	61,97	12,78	12,99	7,89	8,00	9.237	9.385	64,55	65,13
Tapanuli Selatan	64,01	64,28	13,07	13,08	8,35	8,67	10.821	10.955	68,04	68,69
Tapanuli Tengah	66,62	66,66	12,45	12,65	8,03	8,28	9.694	9.852	67,27	67,96
Tapanuli Utara	67,71	67,86	13,61	13,65	9,32	9,46	11.242	11.407	71,96	72,38
Toba Samosir	69,25	69,36	13,19	13,25	10,09	10,10	11.687	11.846	73,61	73,87
Labuhan Batu	69,40	69,44	12,58	12,59	8,78	9,01	10.559	10.760	70,50	71,00

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Asahan	67,47	67,57	12,52	12,53	8,33	8,46	10.288	10.477	68,71	69,10
Simalungun	70,43	70,53	12,70	12,71	8,86	8,95	10.855	11.055	71,48	71,83
Dairi	67,95	68,13	12,84	13,06	8,70	8,90	10.190	10.395	69,61	70,36
Karo	70,69	70,77	12,65	12,71	9,51	9,54	11.925	12.059	73,29	73,53
Deli Serdang	71,06	71,11	12,69	12,90	9,68	9,70	11.683	11.891	73,51	73,94
Langkat	67,79	67,94	12,71	12,72	8,18	8,51	10.567	10.784	69,13	69,82
Nias Selatan	67,83	68,00	11,97	11,98	4,65	4,95	6.647	6.792	59,14	59,85
Humbang Hasundutan	68,26	68,41	13,21	13,24	8,91	9,10	7.135	7.412	66,56	67,30
Pakpak Barat	64,95	65,05	13,81	13,82	8,46	8,47	7.641	7.913	65,81	66,25
Samosir	70,47	70,68	13,42	13,43	8,94	8,95	7.813	8.163	68,82	69,43
Serdang Bedagai	67,63	67,79	12,54	12,55	8,34	8,35	10.246	10.551	68,77	69,16
Batu Bara	65,95	66,10	12,34	12,49	7,75	7,83	9.886	10.084	66,69	67,20
Padang Lawas Utara	66,54	66,58	12,30	12,41	8,92	8,93	9.600	9.737	68,05	68,34
Padang Lawas	66,40	66,50	12,92	12,99	8,41	8,43	8.094	8.445	66,23	66,82
Labuhan Batu Selatan	68,11	68,14	12,94	12,95	8,69	8,70	10.712	10.892	70,28	70,48
Labuhan Batu Utara	68,80	68,91	12,54	12,79	8,33	8,34	11.278	11.510	70,26	70,79
Nias Utara	68,68	68,77	12,41	12,57	6,07	6,08	5.770	5.835	60,23	60,57
Nias Barat	68,10	68,28	12,60	12,61	5,77	5,78	5.391	5.594	59,03	59,56
Kota Sibolga	67,87	68,05	13,11	13,12	9,86	9,87	11.034	11.221	72,00	72,28
Kota Tanjung Balai	62,09	62,28	12,41	12,44	9,13	9,14	10.577	10.778	67,09	67,41
Kota Pematang Siantar	72,46	72,63	14,00	14,01	10,75	11,06	11.878	12.106	76,90	77,54
Kota Tebing Tinggi	70,21	70,28	12,65	12,66	10,07	10,09	11.747	12.055	73,58	73,90
Kota Medan	72,34	72,40	14,06	14,45	11,18	11,25	14.393	14.613	79,34	79,98
Kota Binjai	71,67	71,75	13,57	13,58	10,28	10,58	10.342	10.487	74,11	74,65
Kota Padang Sidempuan	68,37	68,41	14,49	14,50	10,48	10,56	10.198	10.464	73,42	73,81
Gunung Sitoli	70,36	70,42	13,66	13,69	8,20	8,40	6.963	7.300	66,85	67,68
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>68,73</b>	<b>68,78</b>	<b>13,79</b>	<b>13,94</b>	<b>8,59</b>	<b>8,72</b>	<b>10.126</b>	<b>10.306</b>	<b>70,73</b>	<b>71,24</b>
Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	11,74	12,07	6,52	6,69	5.771	6.010	58,27	59,25
Pesisir Selatan	70,11	70,25	13,05	13,06	8,12	8,13	8.605	8.819	68,39	68,74
Solok	67,50	67,65	13,00	13,01	7,58	7,60	9.664	9.743	67,67	67,86
Sawah Lunto/Sijunjung	65,33	65,44	12,27	12,34	7,50	7,72	9.895	10.093	66,01	66,60
Tanah Datar	68,93	69,11	13,46	13,59	8,12	8,14	10.296	10.311	70,11	70,37

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Padang Pariaman	67,80	67,96	13,55	13,56	7,00	7,21	10.455	10.579	68,44	68,90
Agam	71,44	71,57	13,73	13,84	8,18	8,39	9.111	9.388	70,36	71,10
Limapuluh Koto	69,27	69,31	13,25	13,26	7,92	7,96	8.936	9.151	68,37	68,69
Pasaman	66,40	66,54	12,71	12,72	7,64	7,65	7.678	7.882	64,57	64,94
Solok Selatan	66,78	66,92	12,51	12,68	7,99	8,00	9.802	9.891	67,47	67,81
Dharmas Raya	70,30	70,44	12,39	12,40	8,23	8,24	10.781	10.851	70,25	70,40
Pasaman Barat	67,09	67,15	12,67	13,06	7,84	7,85	8.393	8.704	66,03	66,83
Kota Padang	73,19	73,20	15,87	16,15	11,24	11,32	13.721	13.957	81,06	81,58
Kota Solok	72,83	72,92	14,28	14,29	10,79	10,95	11.519	11.673	77,07	77,44
Kota Sawah Lunto	69,33	69,39	13,05	13,14	9,92	9,93	9.051	9.343	70,67	71,13
Kota Padang Panjang	72,45	72,46	15,02	15,03	11,42	11,43	9.804	10.240	76,50	77,01
Kota Bukit Tinggi	73,60	73,69	14,93	14,94	10,98	11,30	12.475	12.816	79,11	79,80
Kota Payakumbuh	73,03	73,13	14,22	14,23	10,30	10,45	12.705	12.858	77,56	77,91
Kota Pariaman	69,63	69,67	14,50	14,51	10,09	10,10	12.141	12.425	75,44	75,71
<b>RIAU</b>	<b>70,97</b>	<b>70,99</b>	<b>12,86</b>	<b>13,03</b>	<b>8,59</b>	<b>8,76</b>	<b>10.465</b>	<b>10.677</b>	<b>71,20</b>	<b>71,79</b>
Kuantan Sengingi	67,92	67,99	12,81	13,26	8,19	8,20	9.892	10.274	68,66	69,53
Indragiri Hulu	69,79	69,83	12,24	12,29	7,83	7,89	10.068	10.223	68,67	68,97
Indragiri Hilir	66,95	67,07	11,58	11,88	6,94	7,18	9.911	10.041	65,35	66,17
Pelalawan	70,39	70,54	11,68	11,89	8,18	8,19	11.641	11.725	70,21	70,59
Siak	70,59	70,64	12,56	12,72	9,21	9,40	11.826	11.898	72,70	73,18
Kampar	70,08	70,16	12,87	13,20	8,85	9,09	10.765	10.912	71,39	72,19
Rokan Hulu	69,17	69,31	12,59	12,81	7,97	8,18	9.065	9.303	67,86	68,67
Bengkalis	70,63	70,69	12,72	12,73	8,83	8,89	11.325	11.530	71,98	72,27
Rokan Hilir	69,57	69,66	12,06	12,25	7,88	7,89	9.181	9.250	67,52	67,84
Kepulauan Meranti	66,85	66,99	12,74	12,77	7,46	7,47	7.194	7.673	63,90	64,70
Kota Pekanbaru	71,70	71,75	14,87	14,93	11,20	11,21	14.225	14.497	79,69	79,97
Kota Dumai	70,31	70,37	12,75	12,97	9,58	9,67	11.531	11.699	72,96	73,46
<b>JAMBI</b>	<b>70,71</b>	<b>70,76</b>	<b>12,72</b>	<b>12,87</b>	<b>8,07</b>	<b>8,15</b>	<b>9.795</b>	<b>9.880</b>	<b>69,62</b>	<b>69,99</b>
Kerinci	69,41	69,52	13,83	13,84	8,06	8,19	9.374	9.501	69,68	70,03
Merangin	70,93	70,94	11,87	11,95	7,44	7,62	9.644	9.753	67,86	68,30
Sarolangun	68,80	68,83	12,23	12,24	7,34	7,47	11.349	11.478	68,73	69,03
Batanghari	70,03	70,12	12,88	12,89	7,69	7,77	9.512	9.573	68,70	68,92

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2016	2017
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Muara Jambi	70,86	70,90	12,79	12,80	8,02	8,08	7.990	8.145	67,55	67,86
Tanjung Jabung Timur	65,56	65,69	11,48	11,80	6,32	6,33	8.136	8.403	61,88	62,61
Tanjung Jabung Barat	67,71	67,75	12,21	12,27	7,43	7,44	8.872	9.004	65,91	66,15
Tebo	69,66	69,67	12,36	12,37	7,54	7,55	9.745	9.832	68,05	68,16
Bungo	67,18	67,27	12,55	12,59	7,99	8,08	10.937	11.016	68,77	69,04
Kota Jambi	72,32	72,33	13,81	14,23	10,65	10,66	11.436	11.648	76,14	76,74
Kota Sungai Penuh	71,66	71,71	14,75	14,76	9,33	9,55	9.604	9.707	73,35	73,75
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>69,16</b>	<b>69,18</b>	<b>12,23</b>	<b>12,35</b>	<b>7,83</b>	<b>7,99</b>	<b>9.935</b>	<b>10.220</b>	<b>68,24</b>	<b>68,86</b>
Ogan Komering Ulu	67,65	67,66	12,55	12,56	8,33	8,67	8.993	9.340	67,47	68,28
Ogan Komering Ilir	68,02	68,04	11,35	11,39	6,74	7,01	10.039	10.306	65,44	66,11
Muara Enim (Liot)	68,07	68,14	11,93	11,94	7,41	7,49	9.766	10.575	66,71	67,63
Lahat	65,06	65,25	12,30	12,31	8,10	8,43	9.037	9.157	65,75	66,38
Musi Rawas	67,26	67,34	11,73	11,74	6,85	7,18	9.140	9.218	64,75	65,31
Musi Banyuasin	68,11	68,14	11,80	11,97	7,55	7,59	9.452	9.705	66,45	66,96
Banyuasin	68,33	68,36	11,71	11,72	6,89	7,16	8.899	9.328	65,01	65,85
Ogan Komering Ulu Selatan	66,16	66,24	11,58	11,72	7,47	7,66	7.902	7.997	63,42	63,96
Ogan Komering Ulu Timur	68,31	68,44	11,79	11,97	7,06	7,12	11.024	11.169	67,38	67,84
Ogan Ilir	64,65	64,72	12,26	12,27	7,36	7,37	9.846	9.972	65,45	65,63
Empat Lawang	64,25	64,32	12,02	12,03	7,30	7,37	8.944	9.010	64,00	64,21
Penukal Abab Lematang Ilir	67,68	67,70	10,92	11,30	6,54	6,57	7.491	7.834	61,66	62,58
Musi Rawas Utara	64,94	64,99	11,53	11,54	6,43	6,44	9.272	9.348	63,05	63,18
Kota Palembang	70,05	70,10	13,71	14,11	10,35	10,36	13.981	14.277	76,59	77,22
Kota Prabumulih	69,63	69,67	12,87	12,88	9,67	9,68	12.162	12.355	73,38	73,58
Kota Pagar Alam	65,78	65,87	12,81	12,82	8,64	8,93	7.989	8.352	65,96	66,81
Kota Lubuk Linggau	68,61	68,64	13,29	13,30	9,49	9,50	12.798	12.878	73,57	73,67
<b>BENGKULU</b>	<b>68,56</b>	<b>68,59</b>	<b>13,38</b>	<b>13,57</b>	<b>8,37</b>	<b>8,47</b>	<b>9.492</b>	<b>9.778</b>	<b>69,33</b>	<b>69,95</b>
Bengkulu Selatan	67,20	67,24	13,46	13,58	8,77	8,78	9.044	9.202	68,71	69,04
Rejang Lebong	67,58	67,65	13,23	13,31	8,03	8,04	9.520	9.660	68,34	68,61
Bengkulu Utara	67,40	67,42	12,82	12,83	7,82	7,83	9.566	9.698	67,63	67,80
Kaur	65,84	65,92	12,94	12,95	7,80	7,96	7.842	7.914	64,95	65,28

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Seluma	66,77	66,85	12,60	12,94	7,55	7,75	7.335	7.584	64,04	65,00
Mukomuko	65,88	65,93	12,49	12,70	7,85	7,87	9.482	9.770	66,52	67,07
Lebong	62,39	62,46	12,15	12,28	7,86	7,87	10.682	10.810	65,58	65,87
Kepahiang	67,03	67,12	12,66	12,67	7,83	7,84	8.701	8.866	66,35	66,60
Bengkulu Tengah	67,63	67,64	12,95	12,96	6,89	6,90	8.425	8.701	65,44	65,80
Bengkulu	69,49	69,52	15,16	15,58	11,46	11,57	12.698	13.164	77,94	78,82
<b>LAMPUNG</b>	<b>69,94</b>	<b>69,95</b>	<b>12,35</b>	<b>12,46</b>	<b>7,63</b>	<b>7,79</b>	<b>9.156</b>	<b>9.413</b>	<b>67,65</b>	<b>68,25</b>
Lampung Barat	66,64	66,86	12,17	12,18	7,28	7,33	9.106	9.517	65,45	66,06
Tanggamus	67,61	67,80	11,93	12,14	6,87	6,88	8.483	8.661	64,41	64,94
Lampung Selatan	68,49	68,65	11,68	12,05	7,53	7,66	9.189	9.310	66,19	66,95
Lampung Timur	69,92	70,11	12,41	12,44	7,55	7,56	9.416	9.453	67,88	68,05
Lampung Tengah	69,15	69,28	12,21	12,60	7,37	7,38	10.674	10.820	68,33	68,95
Lampung Utara	68,30	68,48	12,42	12,43	7,71	7,99	8.212	8.369	65,95	66,58
Way Kanan	68,58	68,74	12,31	12,32	7,33	7,34	8.411	8.522	65,74	65,97
Tulang Bawang	69,28	69,41	11,55	11,71	7,12	7,15	10.034	10.098	66,74	67,07
Pesawaran	68,05	68,29	12,25	12,26	7,24	7,45	7.055	7.449	63,47	64,43
Pringsewu	68,88	69,14	12,76	12,77	7,84	7,85	9.533	9.731	68,26	68,61
Mesuji	67,32	67,49	11,20	11,59	6,13	6,39	7.099	7.319	60,72	61,87
Tulang Bawang Barat	69,21	69,35	11,97	11,98	6,83	7,09	7.450	7.747	63,77	64,58
Pesisir Barat	62,29	62,54	11,85	11,95	7,48	7,58	7.616	7.890	61,50	62,20
Kota Bandar Lampung	70,75	70,84	13,67	13,87	10,88	10,89	11.266	11.699	75,34	75,98
Kota Metro	71,05	71,13	14,27	14,28	10,56	10,57	11.007	11.397	75,45	75,87
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>69,92</b>	<b>69,95</b>	<b>11,71</b>	<b>11,83</b>	<b>7,62</b>	<b>7,78</b>	<b>11.960</b>	<b>12.066</b>	<b>69,55</b>	<b>69,99</b>
Bangka	70,52	70,56	12,37	12,58	7,96	8,19	11.279	11.420	70,43	71,09
Belitung	70,38	70,44	11,47	11,51	8,10	8,11	12.865	12.910	70,81	70,93
Bangka Barat	69,52	69,56	11,49	11,50	6,89	7,06	11.303	11.394	67,60	67,94
Bangka Tengah	70,38	70,49	11,73	11,74	6,71	6,79	12.248	12.330	68,76	68,99
Bangka Selatan	66,99	67,13	11,25	11,34	5,96	6,12	10.932	10.999	64,57	65,02
Belitung Timur	71,30	71,37	11,46	11,48	7,95	8,00	10.729	10.894	69,30	69,57
Kota Pangkal Pinang	72,57	72,64	12,77	12,78	9,76	9,77	14.807	14.923	76,73	76,86

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>69,45</b>	<b>69,48</b>	<b>12,66</b>	<b>12,81</b>	<b>9,67</b>	<b>9,79</b>	<b>13.359</b>	<b>13.566</b>	<b>73,99</b>	<b>74,45</b>
Karimun	70,02	70,32	12,14	12,15	7,75	7,80	11.468	11.713	69,84	70,26
Bintan	70,02	70,12	12,27	12,60	8,33	8,34	13.667	13.828	72,38	72,91
Natuna	63,99	64,33	13,86	13,87	8,46	8,47	13.834	13.970	71,23	71,52
Lingga	60,44	61,14	12,06	12,42	5,85	5,97	11.280	11.421	62,44	63,45
Kepulauan Anambas	66,54	66,76	11,87	12,14	6,63	6,69	11.320	11.654	66,30	67,06
Kota Batam	73,09	73,19	12,67	12,94	11,10	11,11	16.889	17.131	79,79	80,26
Kota Tanjung Pinang	71,74	71,84	14,06	14,07	9,96	9,97	14.645	14.881	77,77	78,00
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>72,49</b>	<b>72,55</b>	<b>12,73</b>	<b>12,86</b>	<b>10,88</b>	<b>11,02</b>	<b>17.468</b>	<b>17.707</b>	<b>79,60</b>	<b>80,06</b>
Kep. Seribu	67,88	68,04	12,10	12,40	8,24	8,25	11.608	11.833	69,52	70,11
Kota Jakarta Selatan	73,83	73,84	13,22	13,27	11,42	11,47	22.932	23.098	83,94	84,13
Kota Jakarta Timur	74,14	74,18	13,20	13,26	11,52	11,60	16.733	17.007	81,28	81,61
Kota Jakarta Pusat	73,76	73,83	13,09	13,18	11,01	11,02	16.493	16.719	80,22	80,49
Kota Jakarta Barat	73,34	73,37	12,69	12,70	10,36	10,37	19.501	19.695	80,34	80,47
Kota Jakarta Utara	72,95	72,99	12,53	12,55	10,23	10,60	17.418	17.763	78,78	79,47
<b>JAWA BARAT</b>	<b>72,44</b>	<b>72,47</b>	<b>12,30</b>	<b>12,42</b>	<b>7,95</b>	<b>8,14</b>	<b>10.035</b>	<b>10.285</b>	<b>70,05</b>	<b>70,69</b>
Bogor	70,65	70,70	12,05	12,43	7,83	7,84	9.537	9.901	68,32	69,13
Sukabumi	70,14	70,26	12,18	12,19	6,74	6,79	8.077	8.263	65,13	65,49
Cianjur	69,39	69,49	11,88	11,89	6,61	6,92	7.074	7.300	62,92	63,70
Bandung	73,10	73,13	12,42	12,43	8,50	8,51	9.580	9.854	70,69	71,02
Garut	70,76	70,84	11,69	11,73	6,88	7,28	7.079	7.270	63,64	64,52
Tasikmalaya	68,54	68,71	12,46	12,47	6,94	7,12	7.081	7.250	63,57	64,14
Ciamis	70,90	71,07	13,65	13,66	7,55	7,59	8.432	8.658	68,45	68,87
Kuningan	72,76	72,88	12,04	12,06	7,34	7,35	8.580	8.736	67,51	67,78
Cirebon	71,43	71,49	12,03	12,21	6,41	6,61	9.463	9.650	66,70	67,39
Majalengka	69,22	69,39	11,89	12,18	6,89	6,90	8.594	8.833	65,25	65,92
Sumedang	71,96	72,00	12,91	12,93	7,72	7,98	9.339	9.569	69,45	70,07
Indramayu	70,72	70,86	12,20	12,21	5,56	5,97	8.866	9.014	64,78	65,58
Subang	71,61	71,71	11,66	11,67	6,58	6,83	10.012	10.206	67,14	67,73
Purwakarta	70,34	70,42	11,82	11,89	7,42	7,74	10.732	10.941	68,56	69,28
Karawang	71,60	71,64	11,85	11,96	6,94	7,34	10.379	10.703	68,19	69,17
Bekasi	73,24	73,30	12,23	12,63	8,81	8,82	10.435	10.790	71,83	72,63

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2016	2017
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bandung Barat	71,82	71,87	11,56	11,79	7,63	7,74	7.698	8.002	65,81	66,63
Pangandaran	70,40	70,56	12,02	12,03	7,07	7,37	8.312	8.588	65,79	66,60
Kota Bogor	72,95	73,01	13,01	13,37	10,28	10,29	10.662	10.940	74,50	75,16
Kota Sukabumi	71,90	71,95	13,38	13,39	9,28	9,52	9.819	10.188	72,33	73,03
Kota Bandung	73,84	73,86	13,89	13,90	10,58	10,59	15.805	16.033	80,13	80,31
Kota Cirebon	71,83	71,86	13,07	13,08	9,87	9,88	10.824	11.100	73,70	74,00
Kota Bekasi	74,55	74,63	13,47	13,51	10,78	10,93	15.236	15.378	79,95	80,30
Kota Depok	74,01	74,04	13,86	13,87	10,76	10,84	14.560	14.727	79,60	79,83
Kota Cimahi	73,59	73,61	13,75	13,76	10,89	10,93	11.141	11.353	76,69	76,95
Kota Tasikmalaya	71,37	71,48	13,40	13,41	8,63	9,03	9.145	9.497	70,58	71,51
Kota Banjar	70,33	70,39	13,18	13,19	8,19	8,59	9.815	9.987	70,09	70,79
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>74,02</b>	<b>74,08</b>	<b>12,45</b>	<b>12,57</b>	<b>7,15</b>	<b>7,27</b>	<b>10.153</b>	<b>10.377</b>	<b>69,98</b>	<b>70,52</b>
Cilacap	73,11	73,24	12,29	12,30	6,90	6,91	9.677	9.896	68,60	68,90
Banyumas	73,23	73,33	12,58	12,63	7,39	7,40	10.554	10.713	70,49	70,75
Purbalingga	72,86	72,91	11,93	11,94	6,86	6,87	9.159	9.340	67,48	67,72
Banjarnegara	73,69	73,79	11,40	11,41	6,26	6,27	8.400	8.630	65,52	65,86
Kebumen	72,87	72,98	12,61	12,90	7,05	7,29	8.276	8.446	67,41	68,29
Purworejo	74,14	74,26	13,05	13,47	7,66	7,69	9.497	9.601	70,66	71,31
Wonosobo	71,16	71,30	11,67	11,68	6,12	6,51	9.877	9.969	66,19	66,89
Magelang	73,33	73,39	12,15	12,47	7,40	7,41	8.501	8.627	67,85	68,39
Boyolali	75,67	75,72	12,14	12,15	7,17	7,44	12.192	12.262	72,18	72,64
Klaten	76,59	76,62	12,85	12,97	8,22	8,23	11.227	11.369	73,97	74,25
Sukoharjo	77,46	77,49	13,79	13,80	8,58	8,71	10.452	10.765	75,06	75,56
Wonogiri	75,88	76,00	12,43	12,44	6,57	6,68	8.589	8.765	68,23	68,66
Karanganyar	77,11	77,31	13,64	13,65	8,49	8,50	10.722	10.933	74,90	75,22
Sragen	75,43	75,55	12,30	12,64	6,87	7,04	11.688	12.041	71,43	72,40
Grobogan	74,37	74,46	12,26	12,27	6,62	6,66	9.487	9.716	68,52	68,87
Blora	73,88	73,99	11,92	12,13	6,18	6,45	8.846	9.065	66,61	67,52
Rembang	74,27	74,32	12,03	12,04	6,93	6,94	9.453	9.736	68,60	68,95
Pati	75,69	75,80	11,92	12,29	6,83	7,08	9.548	9.813	69,03	70,12
Kudus	76,43	76,44	13,19	13,20	7,85	8,31	10.348	10.639	72,94	73,84
Jepara	75,67	75,68	12,28	12,70	7,32	7,33	9.695	9.745	70,25	70,79



## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Demak	75,27	75,27	12,44	12,54	7,46	7,47	9.377	9.544	70,10	70,41
Semarang	75,54	75,57	12,83	12,84	7,48	7,87	11.102	11.389	72,40	73,20
Temanggung	75,39	75,42	12,06	12,07	6,55	6,90	8.593	8.794	67,60	68,34
Kendal	74,20	74,24	12,68	12,69	6,65	6,85	10.631	10.863	70,11	70,62
Batang	74,46	74,50	11,51	11,87	6,42	6,61	8.568	8.805	66,38	67,35
Pekalongan	73,41	73,46	12,15	12,16	6,56	6,73	9.300	9.702	67,71	68,40
Pemalang	72,87	72,98	11,87	11,88	6,05	6,31	7.447	7.785	64,17	65,04
Tegal	71,02	71,14	12,01	12,06	6,54	6,55	8.709	9.136	65,84	66,44
Brebes	68,41	68,61	11,37	11,69	6,17	6,18	9.148	9.554	63,98	64,86
Kota Magelang	76,62	76,66	13,55	13,79	10,29	10,30	11.090	11.525	77,16	77,84
Kota Surakarta	77,03	77,06	14,50	14,51	10,37	10,38	13.900	13.986	80,76	80,85
Kota Salatiga	76,87	76,98	14,98	14,99	9,82	10,15	14.811	14.921	81,14	81,68
Kota Semarang	77,21	77,21	14,70	15,20	10,49	10,50	13.909	14.334	81,19	82,01
Kota Pekalongan	74,15	74,19	12,77	12,78	8,29	8,56	11.721	11.800	73,32	73,77
Kota Tegal	74,18	74,23	12,88	12,89	8,28	8,29	11.849	12.283	73,55	73,95
<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>74,71</b>	<b>74,74</b>	<b>15,23</b>	<b>15,42</b>	<b>9,12</b>	<b>9,19</b>	<b>13.229</b>	<b>13.521</b>	<b>78,38</b>	<b>78,89</b>
Kulon Progo	75,03	75,06	13,97	14,23	8,50	8,64	8.938	9.277	72,38	73,23
Bantul	73,50	73,56	14,73	14,74	9,09	9,20	14.880	14.995	78,42	78,67
Gunung Kidul	73,76	73,82	12,93	12,94	6,62	6,99	8.467	8.788	67,82	68,73
Sleman	74,60	74,63	16,08	16,48	10,64	10,65	14.921	15.365	82,15	82,85
Kota Yogyakarta	74,30	74,35	16,81	16,82	11,42	11,43	17.770	18.005	85,32	85,49
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>70,74</b>	<b>70,80</b>	<b>12,98</b>	<b>13,09</b>	<b>7,23</b>	<b>7,34</b>	<b>10.715</b>	<b>10.973</b>	<b>69,74</b>	<b>70,27</b>
Pacitan	71,18	71,31	12,19	12,41	6,89	7,02	8.048	8.288	65,74	66,51
Ponorogo	72,18	72,27	13,69	13,70	6,97	7,01	8.908	9.107	68,93	69,26
Trenggalek	73,03	73,15	12,09	12,10	7,19	7,20	8.829	9.034	67,78	68,10
Tulungagung	73,40	73,53	13,03	13,04	7,73	7,82	9.881	10.114	70,82	71,24
Blitar	72,89	72,99	12,42	12,43	7,25	7,26	9.467	9.828	68,88	69,33
Kediri	72,20	72,25	12,57	12,86	7,58	7,65	10.140	10.326	69,87	70,47
Malang	72,05	72,12	12,28	12,56	6,98	7,17	9.018	9.356	67,51	68,47
Lumajang	69,38	69,50	11,77	11,78	6,05	6,20	8.311	8.503	63,74	64,23
Jember	68,37	68,54	12,31	12,79	6,05	6,06	8.409	8.698	64,01	64,96
Banyuwangi	70,11	70,19	12,55	12,68	6,93	7,11	11.171	11.438	69,00	69,64

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bondowoso	65,89	66,04	12,87	12,94	5,54	5,55	10.007	10.086	64,52	64,75
Situbondo	68,41	68,53	12,99	13,00	5,68	6,03	9.106	9.178	65,08	65,68
Probolinggo	66,31	66,47	12,05	12,06	5,67	5,68	10.170	10.239	64,12	64,28
Pasuruan	69,86	69,90	11,81	12,05	6,58	6,82	9.198	9.556	65,71	66,69
Sidoarjo	73,67	73,71	14,13	14,34	10,22	10,23	13.320	13.710	78,17	78,70
Mojokerto	72,03	72,10	12,44	12,52	7,76	8,15	11.798	12.240	71,38	72,36
Jombang	71,77	71,87	12,69	12,70	7,68	8,06	10.237	10.560	70,03	70,88
Nganjuk	71,04	71,11	12,82	12,83	7,34	7,38	11.451	11.560	70,50	70,69
Madiun	70,55	70,77	13,11	13,12	7,00	7,30	10.904	11.012	69,67	70,27
Magetan	72,09	72,16	13,71	13,72	7,66	7,94	10.988	11.288	71,94	72,60
Ngawi	71,63	71,74	12,65	12,67	6,54	6,66	10.810	10.899	68,96	69,27
Bojonegoro	70,67	70,83	12,11	12,34	6,65	6,71	9.420	9.553	66,73	67,28
Tuban	70,67	70,80	12,17	12,18	6,25	6,48	9.353	9.540	66,19	66,77
Lamongan	71,77	71,87	13,44	13,45	7,29	7,54	10.252	10.664	70,34	71,11
Gresik	72,33	72,36	13,69	13,70	8,94	8,95	11.961	12.375	74,46	74,84
Bangkalan	69,77	69,82	11,56	11,57	5,13	5,14	8.030	8.192	62,06	62,30
Sampang	67,62	67,67	11,37	11,38	3,79	4,12	8.096	8.352	59,09	59,90
Pamekasan	66,95	67,05	13,35	13,61	6,08	6,25	7.975	8.311	63,98	64,93
Sumenep	70,56	70,71	12,73	12,74	5,08	5,22	7.846	8.316	63,42	64,28
Kota Kediri	73,65	73,69	14,61	14,95	9,89	9,90	11.070	11.550	76,33	77,13
Kota Blitar	73,09	73,17	14,00	14,01	9,88	9,89	12.499	12.910	76,71	77,10
Kota Malang	72,68	72,77	15,38	15,39	10,14	10,15	15.732	15.939	80,46	80,65
Kota Probolinggo	69,79	69,86	13,54	13,55	8,47	8,48	10.792	11.390	71,50	72,09
Kota Pasuruan	70,93	71,02	13,57	13,58	9,08	9,09	12.295	12.557	74,11	74,39
Kota Mojokerto	72,78	72,86	13,80	13,81	9,93	9,98	12.449	12.804	76,38	76,77
Kota Madiun	72,44	72,48	14,19	14,20	11,09	11,10	15.300	15.415	80,01	80,13
Kota Surabaya	73,87	73,88	13,99	14,41	10,44	10,45	16.295	16.726	80,38	81,07
Kota Batu	72,20	72,25	13,62	14,03	8,45	8,46	11.772	12.057	73,57	74,26
<b>BANTEN</b>	<b>69,46</b>	<b>69,49</b>	<b>12,70</b>	<b>12,78</b>	<b>8,37</b>	<b>8,53</b>	<b>11.469</b>	<b>11.659</b>	<b>70,96</b>	<b>71,42</b>
Pandeglang	63,77	64,04	13,40	13,41	6,62	6,63	8.138	8.358	63,40	63,82
Lebak	66,43	66,59	11,91	11,92	6,19	6,20	8.308	8.372	62,78	62,95
Tangerang	69,37	69,47	12,11	12,51	8,23	8,24	11.863	11.914	70,44	70,97

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Serang	63,81	64,02	12,37	12,38	6,98	7,17	10.317	10.466	65,12	65,60
Kota Tangerang	71,34	71,38	13,41	13,44	10,28	10,29	13.911	14.104	76,81	77,01
Kota Cilegon	66,24	66,32	13,11	13,12	9,68	9,69	12.326	12.562	72,04	72,29
Kota Serang	67,36	67,38	12,63	12,64	8,60	8,61	12.660	12.914	71,09	71,31
Kota Tangerang Selatan	72,14	72,16	14,08	14,39	11,58	11,77	14.972	15.291	80,11	80,84
<b>BALI</b>	<b>71,41</b>	<b>71,46</b>	<b>13,04</b>	<b>13,21</b>	<b>8,36</b>	<b>8,55</b>	<b>13.279</b>	<b>13.573</b>	<b>73,65</b>	<b>74,30</b>
Jembrana	71,57	71,70	12,27	12,40	7,59	7,62	11.343	11.468	70,38	70,72
Tabanan	72,89	73,03	12,87	12,95	8,10	8,43	13.800	13.923	74,19	74,86
Badung	74,42	74,53	13,66	13,94	9,90	9,99	16.567	17.063	79,80	80,54
Gianyar	72,95	73,06	13,36	13,37	8,86	8,87	13.766	14.222	75,70	76,09
Klungkung	70,28	70,45	12,86	12,94	7,06	7,46	10.852	11.005	69,31	70,13
Bangli	69,69	69,83	11,82	12,30	6,44	6,80	10.819	10.956	67,03	68,24
Karangasem	69,66	69,85	12,33	12,38	5,48	5,52	9.690	9.833	65,23	65,57
Buleleng	70,97	71,14	12,61	12,62	6,85	7,03	12.814	12.995	70,65	71,11
Kota Denpasar	74,04	74,17	13,76	13,97	11,14	11,15	19.084	19.364	82,58	83,01
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>65,48</b>	<b>65,55</b>	<b>13,16</b>	<b>13,46</b>	<b>6,79</b>	<b>6,90</b>	<b>9.575</b>	<b>9.877</b>	<b>65,81</b>	<b>66,58</b>
Lombok Barat	65,44	65,78	12,80	13,04	5,93	6,15	10.924	11.048	65,55	66,37
Lombok Tengah	65,01	65,28	12,83	13,13	5,60	5,95	9.079	9.319	63,22	64,36
Lombok Timur	64,73	65,01	13,30	13,35	6,26	6,32	8.449	8.805	63,70	64,37
Sumbawa	66,30	66,58	12,68	12,85	7,53	7,54	8.070	8.584	64,89	65,84
Dompu	65,62	65,89	13,28	13,29	8,10	8,11	7.819	8.351	65,48	66,33
Bima	65,13	65,40	13,25	13,26	7,45	7,58	7.585	8.006	64,15	65,01
Sumbawa Barat	66,66	66,98	13,58	13,59	8,05	8,18	10.528	11.066	69,26	70,08
Lombok Utara	65,88	66,17	12,68	12,69	5,47	5,54	8.155	8.637	62,24	63,04
Kota Mataram	70,70	70,98	15,50	15,51	9,25	9,32	13.733	14.316	77,20	77,84
Kota Bima	69,35	69,58	14,96	14,97	10,13	10,14	9.930	10.458	73,67	74,36
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>66,04</b>	<b>66,07</b>	<b>12,97</b>	<b>13,07</b>	<b>7,02</b>	<b>7,15</b>	<b>7.122</b>	<b>7.350</b>	<b>63,13</b>	<b>63,73</b>
Sumba Barat	66,15	66,20	12,64	12,87	6,45	6,51	6.914	6.997	61,85	62,30
Sumba Timur	64,00	64,12	12,30	12,79	6,48	6,73	9.004	9.093	63,22	64,19
Kupang	63,33	63,49	13,48	13,49	6,93	7,10	7.217	7.301	62,39	62,79
Timor Tengah Selatan	65,60	65,65	12,53	12,54	6,27	6,39	6.360	6.676	60,37	61,08
Timor Tengah Utara	66,14	66,19	13,27	13,28	7,13	7,14	5.930	6.164	61,54	62,03

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2016	2017
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belu	63,21	63,42	12,02	12,24	7,06	7,07	7.199	7.251	61,04	61,44
Alor	60,35	60,47	11,64	12,08	7,76	7,77	6.468	6.553	58,99	59,61
Lembata	66,02	66,19	12,23	12,25	7,52	7,58	7.010	7.084	62,81	63,09
Flores Timur	64,36	64,45	12,38	12,88	6,99	7,12	7.237	7.442	61,90	62,89
Sikka	66,20	66,30	11,91	12,34	6,55	6,56	7.740	7.855	62,42	63,08
Ende	64,42	64,48	13,74	13,75	7,38	7,63	8.801	8.841	65,74	66,11
Ngada	67,34	67,36	12,66	12,67	7,61	7,85	8.195	8.649	65,61	66,47
Manggarai	65,66	65,84	11,92	12,32	6,97	6,98	7.008	7.056	61,67	62,24
Rote Nda	63,13	63,41	12,51	12,91	6,67	6,98	6.110	6.320	59,28	60,51
Manggarai Barat	66,19	66,19	10,67	11,09	6,82	7,14	7.149	7.269	60,63	61,65
Sumba Tengah	67,73	67,74	11,93	12,31	5,21	5,51	5.907	5.946	58,52	59,39
Sumba Barat Daya	67,71	67,76	13,02	13,03	6,30	6,31	6.079	6.134	61,31	61,46
Nageko	66,31	66,36	11,98	12,45	7,34	7,52	8.054	8.119	63,93	64,74
Manggarai Timur	67,39	67,40	10,58	11,04	6,44	6,45	5.396	5.643	57,50	58,51
Sabu Raijua	58,69	59,00	13,00	13,11	5,68	6,02	4.923	5.120	54,16	55,22
Malaka	64,27	64,29	12,28	12,75	6,31	6,32	5.658	5.726	58,29	58,90
Kota Kupang	68,46	68,58	15,76	15,77	11,44	11,45	12.986	13.028	78,14	78,25
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>69,90</b>	<b>69,92</b>	<b>12,37</b>	<b>12,50</b>	<b>6,98</b>	<b>7,05</b>	<b>8.348</b>	<b>8.472</b>	<b>65,88</b>	<b>66,26</b>
Sambas	68,05	68,17	11,92	12,38	6,42	6,67	9.311	9.403	64,94	65,92
Bengkayang	73,01	73,04	11,60	12,00	6,08	6,09	8.588	8.640	65,45	65,99
Landak	72,10	72,12	12,35	12,36	7,07	7,08	6.737	6.931	64,58	64,93
Pontianak	70,30	70,32	12,29	12,30	6,46	6,47	7.270	7.358	63,84	64,00
Sanggau	70,67	70,75	11,05	11,53	6,92	6,93	7.729	7.828	63,90	64,61
Ketapang	70,52	70,52	11,34	11,76	6,68	7,03	8.430	8.475	64,74	65,71
Sintang	71,08	71,11	11,27	11,54	6,71	6,72	8.302	8.343	64,78	65,16
Kapuas Hulu	71,94	71,95	11,84	11,85	7,01	7,02	6.691	6.883	63,83	64,18
Sekadau	70,94	70,98	11,34	11,53	6,56	6,57	6.820	7.001	62,52	63,04
Melawai	72,39	72,39	11,05	11,12	6,52	6,53	7.858	7.922	64,25	64,43
Kayong Utara	67,39	67,46	11,75	11,78	5,84	5,85	7.030	7.434	60,87	61,52
Kubu Raya	69,77	69,80	12,84	13,21	6,57	6,58	8.145	8.430	65,54	66,31
Kota Pontianak	72,14	72,17	14,49	14,72	9,78	9,79	13.838	13.904	77,63	77,93
Kota Singkawang	71,08	71,13	12,85	12,86	7,29	7,30	11.006	11.122	70,10	70,25

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>69,57</b>	<b>69,59</b>	<b>12,33</b>	<b>12,45</b>	<b>8,13</b>	<b>8,29</b>	<b>10.155</b>	<b>10.492</b>	<b>69,13</b>	<b>69,79</b>
Kotawaringin Barat	70,21	70,34	12,42	12,69	8,05	8,35	12.101	12.420	71,13	72,11
Kotawaringin Timur	69,60	69,70	12,21	12,59	7,88	7,89	10.922	11.249	69,42	70,17
Kapuas	68,49	68,59	11,92	12,25	7,09	7,50	10.287	10.421	66,98	68,04
Barito Selatan	66,63	66,78	12,30	12,31	8,60	8,67	10.938	11.031	69,00	69,25
Barito Utara	71,26	71,27	11,96	12,38	8,34	8,35	8.774	9.067	68,28	69,07
Sukamara	71,32	71,41	11,97	11,98	7,82	7,83	7.792	8.177	66,40	66,98
Lamandau	69,20	69,28	12,44	12,45	7,79	7,94	10.049	10.455	68,54	69,17
Seruyan	69,22	69,23	11,61	11,62	7,49	7,75	8.331	8.658	65,40	66,14
Katingan	65,40	65,53	12,19	12,20	8,63	8,64	9.969	10.029	67,41	67,56
Pulang Pisau	67,75	67,86	12,32	12,38	7,66	7,67	9.017	9.365	66,49	67,00
Gunung Mas	70,02	70,15	11,74	11,75	8,94	8,96	10.155	10.276	69,73	69,95
Barito Timur	67,84	67,97	12,79	12,80	9,03	9,04	10.631	10.808	70,33	70,57
Murung Raya	69,30	69,39	11,71	11,72	7,37	7,38	9.742	9.872	66,96	67,16
Kota Palangka Raya	73,05	73,13	14,91	14,92	11,02	11,03	12.899	13.435	79,21	79,69
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>67,92</b>	<b>68,02</b>	<b>12,29</b>	<b>12,46</b>	<b>7,89</b>	<b>7,99</b>	<b>11.307</b>	<b>11.600</b>	<b>69,05</b>	<b>69,65</b>
Tanah Laut	68,76	68,89	11,50	11,82	7,30	7,37	10.862	10.925	67,44	68,00
Kota Baru	68,61	68,72	11,66	11,82	7,02	7,18	10.777	11.065	67,10	67,79
Banjarnegara	66,17	66,38	11,41	11,76	7,00	7,28	12.311	12.366	66,87	67,77
Barito Kuala	65,14	65,33	11,92	12,08	7,06	7,08	9.226	9.535	64,33	64,93
Tapin	69,62	69,77	11,24	11,52	7,44	7,53	11.237	11.411	68,05	68,70
Hulu Sungai Selatan	65,38	65,39	12,02	12,05	7,68	7,71	11.623	11.890	67,52	67,80
Hulu Sungai Tengah	65,06	65,30	12,00	12,17	7,53	7,79	11.527	11.635	67,07	67,78
Hulu Sungai Utara	62,71	62,94	12,81	12,82	7,00	7,19	8.668	9.100	63,38	64,21
Tabalong	69,84	69,95	12,46	12,47	8,32	8,56	10.620	10.977	70,07	70,76
Tanah Bumbu	69,19	69,44	11,53	12,00	7,66	7,67	11.006	11.244	68,28	69,12
Balangan	67,07	67,19	11,77	12,07	6,71	7,03	10.953	11.186	66,25	67,25
Kota Banjarmasin	70,44	70,55	13,79	13,90	9,91	9,92	13.417	13.899	75,94	76,46
Kota Banjar Baru	71,43	71,50	14,77	14,78	10,76	10,77	12.879	13.279	77,96	78,32
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>73,68</b>	<b>73,70</b>	<b>13,35</b>	<b>13,49</b>	<b>9,24</b>	<b>9,36</b>	<b>11.355</b>	<b>11.612</b>	<b>74,59</b>	<b>75,12</b>
Pasir	72,02	72,05	12,96	12,98	8,19	8,20	10.171	10.280	71,00	71,16
Kutai Barat	72,28	72,37	12,75	12,82	8,03	8,06	9.492	9.532	69,99	70,18

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kutai	71,64	71,68	13,26	13,56	8,71	8,83	10.593	10.692	72,19	72,75
Kutai Timur	72,45	72,51	12,44	12,48	8,72	9,06	9.960	10.273	71,10	71,91
Berau	71,37	71,44	13,18	13,29	8,78	8,96	11.675	11.843	73,05	73,56
Penajam Paser Utara	70,80	70,82	12,46	12,53	7,60	7,95	11.019	11.126	69,96	70,59
Mahakam Ulu	71,19	71,25	12,42	12,47	7,37	7,68	7.281	7.364	65,51	66,09
Kota Balikpapan	73,96	73,97	13,59	13,75	10,54	10,55	13.883	14.254	78,57	79,01
Kota Samarinda	73,68	73,71	14,23	14,64	10,33	10,34	14.010	14.175	78,91	79,46
Kota Bontang	73,71	73,72	12,79	12,88	10,39	10,70	16.157	16.271	78,92	79,47
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>72,43</b>	<b>72,47</b>	<b>12,59</b>	<b>12,79</b>	<b>8,49</b>	<b>8,62</b>	<b>8.434</b>	<b>8.643</b>	<b>69,20</b>	<b>69,84</b>
Malinau	71,24	71,39	13,24	13,25	8,56	8,88	9.529	9.586	70,71	71,23
Bulongan	72,36	72,51	12,75	12,96	8,43	8,75	8.933	9.094	69,88	70,74
Tana Tidung	71,31	71,33	12,17	12,18	8,11	8,23	6.919	7.207	65,64	66,26
Nunukan	71,23	71,25	12,58	12,61	7,57	7,65	6.333	6.680	64,35	65,10
Kota Tarakan	73,69	73,85	13,42	13,61	9,92	9,93	10.715	10.841	74,88	75,27
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>71,02</b>	<b>71,04</b>	<b>12,55</b>	<b>12,66</b>	<b>8,96</b>	<b>9,14</b>	<b>10.148</b>	<b>10.422</b>	<b>71,05</b>	<b>71,66</b>
Bolaang Mongondow	68,51	68,61	11,07	11,16	7,30	7,38	9.657	9.761	65,73	66,08
Minahasa	70,40	70,46	13,93	13,94	9,54	9,55	11.827	12.026	74,37	74,59
Kep,Sangihe Talaud	69,26	69,35	11,71	11,90	7,70	7,89	10.959	11.111	68,52	69,14
Kepulauan Talaud	69,41	69,48	12,13	12,14	8,92	8,93	8.184	8.268	67,58	67,74
Minahasa Selatan	69,17	69,24	11,75	11,76	8,71	8,72	11.133	11.162	69,97	70,05
Minahasa Utara	70,82	70,86	12,13	12,45	9,24	9,32	10.789	11.075	71,49	72,20
Bolaang Mongondow Utara	66,91	66,98	11,86	11,87	7,67	7,86	8.593	8.739	65,16	65,60
Kep, Siau Tagulandang Biaro	69,72	69,85	11,24	11,32	8,45	8,56	7.742	7.812	65,66	66,03
Minahasa Tenggara	69,53	69,58	11,51	11,71	8,39	8,51	10.002	10.105	68,42	68,91
Bolaang Mongondow Selatan	64,00	64,03	12,21	12,22	7,71	7,72	8.371	8.452	63,92	64,05
Bolaang Mongondow Timur	67,27	67,32	11,46	11,47	7,52	7,53	8.361	8.568	64,44	64,73
Manado	71,31	71,34	13,83	14,11	11,02	11,03	13.253	13.477	77,59	78,05
Kota Bitung	70,50	70,54	12,24	12,25	9,37	9,64	11.718	11.895	72,43	72,94
Kota Tomohon	71,07	71,18	14,16	14,16	10,23	10,24	10.936	11.323	74,91	75,34
Kota Kotamobago	69,69	69,72	12,67	12,68	9,97	9,98	10.084	10.366	71,68	72,00

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>67,31</b>	<b>67,32</b>	<b>12,92</b>	<b>13,04</b>	<b>8,12</b>	<b>8,29</b>	<b>9.034</b>	<b>9.311</b>	<b>67,47</b>	<b>68,11</b>
Banggai Kepulauan	64,44	64,53	12,72	13,03	7,94	7,99	7.286	7.440	63,45	64,07
Banggai	69,97	70,02	12,73	12,89	7,73	7,92	9.144	9.516	68,17	69,00
Morowali	68,06	68,07	12,75	12,77	8,49	8,73	10.575	11.012	69,69	70,41
Poso	70,13	70,16	13,16	13,38	8,67	8,81	8.345	8.781	68,83	69,78
Donggala	65,84	65,89	12,43	12,46	7,82	7,84	7.802	7.924	64,42	64,66
Toli-Toli	64,03	64,12	12,68	12,70	7,73	7,85	7.493	7.916	63,27	64,05
Buol	66,93	67,00	13,05	13,06	8,62	8,63	7.740	7.934	66,37	66,69
Parigi Moutong	63,18	63,19	12,23	12,44	6,87	6,98	9.351	9.488	63,60	64,09
Tojo Una-Una	64,01	64,07	11,68	11,81	7,87	7,90	7.361	7.465	62,27	62,61
Sigi	68,69	68,72	12,31	12,51	8,21	8,22	7.714	8.113	65,95	66,72
Banggai Laut	63,55	63,62	12,85	12,87	7,94	8,21	7.529	7.693	63,49	64,08
Morowali Utara	68,32	68,34	12,02	12,21	8,16	8,39	8.594	8.842	66,57	67,35
Kota Palu	69,93	69,93	15,53	15,92	11,25	11,26	14.663	14.871	79,73	80,24
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>69,82</b>	<b>69,84</b>	<b>13,16</b>	<b>13,28</b>	<b>7,75</b>	<b>7,95</b>	<b>10.281</b>	<b>10.489</b>	<b>69,76</b>	<b>70,34</b>
Selayar	67,76	67,82	12,44	12,45	7,17	7,18	8.123	8.436	64,95	65,39
Bulukumba	66,84	66,96	12,64	12,65	6,86	7,16	10.040	10.217	66,46	67,08
Bantaeng	69,84	69,90	11,88	11,99	6,17	6,45	10.596	10.751	66,59	67,27
Jeneponto	65,57	65,65	11,77	11,93	5,65	5,98	8.559	8.747	61,81	62,67
Takalar	66,29	66,38	12,00	12,21	6,64	6,77	9.759	9.845	64,96	65,48
Gowa	69,92	69,95	13,03	13,04	7,52	7,74	8.717	9.009	67,70	68,33
Sinjai	66,54	66,61	12,83	12,84	7,06	7,28	8.706	8.816	65,36	65,80
Maros	68,58	68,60	12,96	12,97	7,20	7,42	9.758	10.121	67,76	68,42
Pangkajene Kepulauan	65,77	65,86	12,39	12,40	7,33	7,48	10.670	10.837	66,86	67,25
Barru	68,16	68,30	13,54	13,55	7,61	7,85	10.155	10.285	69,07	69,56
Bone	66,12	66,22	12,42	12,43	6,76	6,77	8.275	8.470	63,86	64,16
Soppeng	68,62	68,72	12,20	12,33	7,06	7,42	8.965	9.035	65,95	66,67
Wajo	66,38	66,52	13,08	13,09	6,38	6,78	11.681	11.770	67,52	68,18
Sidenreng Rappang	68,69	68,82	12,89	12,90	7,33	7,52	11.368	11.523	69,39	69,84
Pinrang	68,55	68,68	13,18	13,19	7,48	7,54	10.899	11.279	69,42	69,90
Enrekang	70,34	70,38	13,65	13,66	8,06	8,43	10.188	10.359	70,79	71,44
Luwu	69,52	69,60	13,27	13,28	7,75	7,89	9.301	9.381	68,71	69,02

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tana Toraja	72,48	72,56	13,24	13,25	7,92	7,93	6.509	6.801	66,25	66,82
Luwu Utara	67,50	67,61	12,33	12,38	7,39	7,52	10.786	11.101	67,81	68,35
Luwu Timur	69,71	69,79	12,78	12,79	7,88	8,20	11.960	12.030	70,95	71,46
Toraja Utara	72,87	72,94	13,33	13,34	7,72	7,73	7.228	7.457	67,49	67,90
Kota Makasar	71,49	71,51	14,80	15,18	11,07	11,08	16.013	16.367	80,53	81,13
Kota Pare Pare	70,64	70,69	14,45	14,46	10,02	10,09	12.966	13.078	76,48	76,68
Kota Palopo	70,25	70,30	15,03	15,05	10,26	10,33	12.156	12.319	76,45	76,71
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>70,46</b>	<b>70,47</b>	<b>13,24</b>	<b>13,36</b>	<b>8,32</b>	<b>8,46</b>	<b>8.871</b>	<b>9.094</b>	<b>69,31</b>	<b>69,86</b>
Buton	67,23	67,30	13,22	13,52	7,06	7,22	6.950	7.117	63,69	64,47
Muna	69,77	69,77	13,20	13,48	7,66	7,89	7.928	8.000	66,96	67,61
Konawe/Kab Kendari	69,48	69,52	12,96	12,97	8,60	8,77	9.696	9.857	69,84	70,24
Kolaka	69,97	70,05	12,37	12,38	8,19	8,31	12.072	12.243	71,12	71,46
Konawe Selatan	69,93	69,98	12,16	12,22	7,71	7,72	8.660	8.798	66,97	67,23
Bombana	67,72	67,82	11,80	11,81	7,52	7,53	7.607	7.908	64,02	64,49
Wakatobi	69,54	69,59	12,87	13,14	7,70	7,71	8.651	8.800	67,50	67,99
Kolaka Utara	69,62	69,74	11,92	11,93	7,49	7,50	9.846	9.941	67,60	67,77
Konawe Utara	70,37	70,38	12,72	12,73	7,92	8,18	7.168	7.249	65,95	66,40
Buton Utara	68,64	68,69	11,93	12,02	8,41	8,62	8.822	8.943	67,20	67,71
Kolaka Timur	71,58	71,66	11,33	11,58	6,65	6,90	7.283	7.499	63,60	64,55
Konawe Kepulauan	67,87	67,88	10,94	11,30	8,80	8,90	6.227	6.458	62,56	63,44
Muna Barat	69,78	69,79	11,64	12,06	6,24	6,48	7.221	7.288	62,57	63,43
Buton Tengah	67,17	67,17	12,31	12,32	7,01	7,02	6.860	7.012	62,56	62,82
Buton Selatan	67,17	67,17	12,54	12,55	6,81	7,06	6.859	7.075	62,55	63,20
Kota Kendari	72,98	73,02	16,05	16,06	11,67	11,68	13.828	13.995	81,66	81,83
Kota Bau-Bau	70,47	70,50	14,78	14,79	9,89	9,90	10.110	10.223	73,99	74,14
<b>GORONTALO</b>	<b>67,13</b>	<b>67,14</b>	<b>12,88</b>	<b>13,01</b>	<b>7,12</b>	<b>7,28</b>	<b>9.175</b>	<b>9.532</b>	<b>66,29</b>	<b>67,01</b>
Boalemo	67,67	67,86	12,34	12,41	6,30	6,38	7.895	8.325	63,42	64,22
Gorontalo	66,66	66,69	12,31	12,53	6,64	6,81	8.589	8.828	64,22	64,95
Pokuwato	62,65	62,86	12,28	12,34	6,67	6,84	9.381	9.715	63,17	63,88
Bone Bolango	67,65	67,71	13,05	13,09	7,81	7,84	9.115	9.597	67,48	68,11
Gorontalo Utara	65,06	65,12	12,26	12,40	6,62	6,68	8.270	8.480	63,02	63,52
Kota Gorontalo	71,74	71,79	14,19	14,22	10,30	10,32	11.360	11.651	75,75	76,09



Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>64,31</b>	<b>64,34</b>	<b>12,34</b>	<b>12,48</b>	<b>7,14</b>	<b>7,31</b>	<b>8.450</b>	<b>8.736</b>	<b>63,60</b>	<b>64,30</b>
Majene	60,64	60,79	13,54	13,57	7,81	8,14	9.441	9.559	64,80	65,40
Polewali Mamasa	61,65	61,76	12,96	13,01	6,89	7,09	7.559	7.947	61,51	62,35
Mamasa	70,43	70,48	11,36	11,41	6,98	7,10	7.231	7.353	63,51	63,92
Mamuju	66,51	66,65	12,97	13,13	7,21	7,26	8.689	9.019	65,65	66,32
Mamuju Utara	65,13	65,33	11,27	11,37	7,47	7,48	10.264	10.577	65,17	65,67
Mamuju Tengah	67,36	67,52	11,49	11,57	7,10	7,13	7.521	7.931	62,89	63,64
<b>MALUKU</b>	<b>65,35</b>	<b>65,40</b>	<b>13,73</b>	<b>13,91</b>	<b>9,27</b>	<b>9,38</b>	<b>8.215</b>	<b>8.433</b>	<b>67,60</b>	<b>68,19</b>
Maluku Tenggara Barat	62,93	63,06	12,25	12,26	8,99	9,18	5.901	6.032	61,12	61,64
Maluku Tenggara	64,45	64,61	12,40	12,61	9,17	9,27	7.063	7.302	64,20	64,94
Maluku Tengah	65,93	66,06	13,77	13,93	9,18	9,29	9.672	9.875	69,54	70,09
Buru	65,82	66,03	12,52	12,78	7,67	7,99	9.806	10.036	66,63	67,61
Kepulauan Aru	62,16	62,34	11,41	11,77	8,39	8,40	7.080	7.334	61,32	62,13
Seram Bagian Barat	60,72	60,96	13,24	13,40	8,43	8,47	8.121	8.333	63,76	64,34
Seram Bagian Timur	58,32	58,56	11,99	12,20	7,53	7,84	8.848	9.058	61,15	62,06
Maluku Barat Daya	61,37	61,62	11,78	11,88	7,85	7,99	6.298	6.508	59,43	60,16
Buru Selatan	65,60	65,74	12,22	12,28	6,96	7,13	7.175	7.337	62,19	62,75
Kota Ambon	69,74	69,92	15,90	15,91	11,64	11,65	13.497	13.699	79,55	79,82
Kota Tual	64,33	64,61	13,87	13,88	9,76	9,87	6.803	7.012	65,64	66,25
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>67,51</b>	<b>67,54</b>	<b>13,45</b>	<b>13,56</b>	<b>8,52</b>	<b>8,61</b>	<b>7.545</b>	<b>7.792</b>	<b>66,63</b>	<b>67,20</b>
Halmahera Barat	65,45	65,55	13,05	13,06	7,86	7,87	7.076	7.266	63,83	64,19
Halmahera Tengah	62,60	62,80	12,70	12,92	8,14	8,37	7.481	7.688	63,05	63,89
Kepulauan Sula	62,50	62,60	12,23	12,38	7,96	8,33	6.741	6.859	61,25	62,04
Halmahera Selatan	65,11	65,20	12,31	12,52	7,42	7,43	6.894	7.026	62,17	62,64
Halmahera Utara	68,86	68,94	13,06	13,22	8,35	8,36	7.110	7.302	66,02	66,52
Halmahera Timur	67,67	67,85	12,48	12,72	7,77	7,89	7.560	7.841	64,92	65,77
Pulau Morotai	66,13	66,28	11,92	12,17	6,88	6,89	5.888	6.167	59,87	60,71
Pulau Taliabu	61,20	61,32	11,73	11,87	7,42	7,43	6.208	6.306	58,66	59,03
Kota Ternate	70,17	70,27	15,06	15,30	11,13	11,25	12.643	12.989	77,80	78,48
Kota Tidore Kepulauan	68,54	68,64	13,74	13,90	9,11	9,39	7.772	8.044	68,37	69,25

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>65,30</b>	<b>65,32</b>	<b>12,26</b>	<b>12,47</b>	<b>7,06</b>	<b>7,15</b>	<b>7.175</b>	<b>7.493</b>	<b>62,21</b>	<b>62,99</b>
Fak-Fak	67,84	67,95	13,51	13,76	8,22	8,27	6.935	7.057	65,55	66,09
Kaimana	63,79	63,99	11,46	11,59	7,83	7,90	7.538	7.752	62,15	62,74
Teluk Wondama	58,96	59,26	10,48	10,81	6,57	6,67	7.434	7.694	57,16	58,10
Teluk Bintuni	59,48	59,83	11,62	11,70	7,57	7,62	9.208	9.463	61,81	62,39
Manokwari	67,84	68,00	13,51	13,54	7,85	7,92	11.440	11.595	70,34	70,67
Sorong Selatan	65,49	65,63	11,93	12,28	6,95	7,01	5.644	5.904	59,20	60,19
Sorong	65,39	65,52	12,81	13,05	7,57	7,61	6.563	6.975	62,42	63,42
Raja Ampat	64,16	64,26	11,65	11,79	7,53	7,57	7.393	7.508	61,95	62,35
Tambrauw	59,16	59,29	10,89	11,20	4,70	4,81	4.561	4.626	50,35	51,01
Maybrat	64,73	64,80	12,31	12,53	6,33	6,43	4.692	4.905	56,35	57,23
Manokwari Selatan	66,82	66,96	12,20	12,27	6,32	6,37	4.702	5.012	57,12	58,08
Pegunungan Arfak	66,61	66,72	11,07	11,27	4,90	4,91	4.594	4.683	53,89	54,39
Kota Sorong	69,36	69,67	14,00	14,01	10,91	10,92	12.858	13.141	76,33	76,73
<b>PAPUA</b>	<b>65,12</b>	<b>65,14</b>	<b>10,23</b>	<b>10,54</b>	<b>6,15</b>	<b>6,27</b>	<b>6.637</b>	<b>6.996</b>	<b>58,05</b>	<b>59,09</b>
Merauke	66,53	66,56	12,71	12,98	8,26	8,27	10.016	10.277	68,09	68,64
Jayawijaya	58,48	58,67	11,01	11,30	4,74	4,99	7.282	7.524	54,96	55,99
Jayapura	66,40	66,47	14,15	14,16	9,53	9,54	9.653	10.055	70,50	70,97
Nabire	67,50	67,55	10,66	10,86	9,48	9,49	8.779	8.983	66,64	67,11
Yapen Waropen	68,69	68,71	11,62	11,85	8,81	8,82	7.414	7.605	65,55	66,07
Biak Namfor	67,86	67,87	13,68	13,93	9,84	9,85	9.647	9.812	71,13	71,56
Paniai	65,58	65,70	10,32	10,33	3,77	3,94	6.191	6.355	54,34	54,91
Puncak Jaya	64,29	64,41	5,99	6,24	3,38	3,50	5.089	5.341	45,49	46,57
Mimika	71,90	71,93	11,11	11,48	9,53	9,54	11.169	11.591	71,64	72,42
Boven Digoel	58,51	58,77	10,97	10,98	7,82	8,08	7.770	8.048	59,35	60,14
Mappi	64,16	64,30	10,47	10,48	5,98	6,10	5.951	6.143	56,54	57,10
Asmat	55,90	56,32	7,79	8,12	4,48	4,71	5.601	5.771	47,31	48,49
Yahukimo	65,19	65,32	7,54	7,55	3,99	4,00	4.248	4.554	47,13	47,95
Pegunungan Bintang	63,84	63,90	5,12	5,52	2,19	2,32	5.289	5.506	41,90	43,24
Tolikara	64,98	65,10	7,69	7,70	3,21	3,50	4.711	4.827	47,11	47,89

## Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sarmi	65,76	65,82	11,09	11,29	8,08	8,34	6.417	6.723	61,27	62,31
Keerom	66,13	66,18	11,62	11,89	7,24	7,57	8.671	8.824	64,10	64,99
Waropen	65,77	65,82	12,60	12,61	8,66	8,67	6.270	6.810	63,10	64,08
Supiori	65,29	65,33	12,70	12,71	8,13	8,14	5.379	5.655	60,59	61,23
Membramo Raya	56,74	56,90	10,80	11,07	4,89	5,23	4.387	4.596	49,00	50,25
Nduga	54,50	54,60	2,34	2,64	0,70	0,71	3.725	3.972	26,56	27,87
Lanny Jaya	65,63	65,65	7,50	7,71	2,92	3,17	4.106	4.356	45,16	46,49
Mamberamo Tengah	62,82	62,92	7,66	8,01	2,57	2,67	4.219	4.510	44,15	45,50
Yalimo	64,90	64,94	7,82	8,20	2,19	2,25	4.435	4.702	44,95	46,19
Puncak	65,10	65,13	4,48	4,66	1,78	1,94	5.181	5.413	39,96	41,06
Dogiyai	64,99	65,12	9,87	10,12	4,89	4,90	5.190	5.375	53,32	54,04
Intan Jaya	65,04	65,09	6,52	6,76	2,49	2,50	5.038	5.293	44,82	45,68
Deiyai	64,55	64,63	9,77	9,78	2,97	2,98	4.383	4.597	48,50	49,07
Kota Jayapura	69,99	70,00	14,61	14,98	11,14	11,15	14.319	14.781	78,56	79,23
<b>INDONESIA</b>	<b>70,90</b>	<b>71,06</b>	<b>12,72</b>	<b>12,85</b>	<b>7,95</b>	<b>8,10</b>	<b>10.420</b>	<b>10.664</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>ACEH</b>	<b>67,62</b>	<b>71,55</b>	<b>13,95</b>	<b>14,32</b>	<b>9,36</b>	<b>8,62</b>	<b>12.551</b>	<b>7.641</b>	<b>74,63</b>	<b>68,41</b>	<b>91,67</b>
Simeulue	62,93	66,77	13,20	13,37	9,64	8,48	10.708	3.189	70,29	53,93	76,72
Aceh Singkil	65,13	68,98	14,32	14,05	8,37	7,31	14.113	5.573	73,68	61,88	83,98
Aceh Selatan	61,93	65,73	13,53	14,01	8,84	7,78	10.240	6.638	68,74	62,87	91,46
Aceh Tenggara	65,59	69,54	13,64	14,53	10,18	9,10	10.757	7.176	72,72	67,46	92,77
Aceh Timur	66,28	70,25	12,56	13,05	8,07	7,49	12.578	5.283	70,99	61,07	86,03
Aceh Tengah	66,66	70,45	13,85	14,78	9,83	9,62	10.458	8.904	72,76	71,08	97,69
Aceh Barat	65,59	69,54	14,52	14,82	9,44	8,49	13.420	5.381	74,91	63,61	84,92
Aceh Besar	67,56	71,43	14,21	15,32	10,13	9,57	11.626	8.360	74,98	71,30	95,09
Pidie	64,57	68,48	13,92	14,82	9,32	8,31	11.906	8.460	72,50	68,17	94,03
Bireuen	68,79	72,70	14,56	15,06	9,29	9,14	10.834	7.947	74,23	70,63	95,15
Aceh Utara	66,63	70,47	13,96	15,07	8,56	7,61	9.918	6.549	70,84	65,72	92,77
Aceh Barat Daya	62,54	66,36	13,54	14,71	8,36	8,04	13.545	6.415	71,16	63,68	89,49
Gayo Lues	63,01	66,85	13,56	13,08	8,36	6,57	12.700	7.288	70,83	62,17	87,77
Aceh Tamiang	67,13	71,08	13,22	13,77	8,79	8,26	14.851	4.431	74,56	60,60	81,28
Nagan Raya	66,72	70,68	13,87	14,42	8,89	7,87	11.787	6.543	72,93	65,49	89,80
Aceh Jaya	64,75	68,67	13,73	14,12	8,62	7,74	14.192	6.921	73,24	64,79	88,46
Bener Meriah	66,87	70,82	13,23	13,62	9,75	9,34	12.625	10.260	74,07	71,37	96,35
Pidie Jaya	67,65	71,60	14,03	15,08	9,31	8,42	12.786	9.463	74,85	71,25	95,19
Kota Banda Aceh	68,95	72,86	17,30	16,97	12,81	12,34	18.585	14.380	86,17	82,21	95,40
Kota Sabang	68,07	72,00	13,45	13,84	10,80	10,70	13.057	9.848	76,45	73,26	95,83
Kota Langsa	67,03	70,98	14,40	15,75	11,03	10,56	14.623	10.352	78,20	74,84	95,70
Kota Lhokseumawe	69,13	73,03	15,05	15,59	11,30	10,49	13.898	10.102	79,70	75,40	94,60
Subulussalam	61,61	65,40	14,02	14,20	8,25	6,84	11.119	4.792	69,16	58,07	83,96
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>66,49</b>	<b>70,29</b>	<b>12,92</b>	<b>13,35</b>	<b>9,55</b>	<b>8,96</b>	<b>14.522</b>	<b>7.915</b>	<b>74,66</b>	<b>67,68</b>	<b>90,65</b>
Nias	67,15	71,10	12,32	11,92	6,28	3,97	7.556	6.131	63,78	57,61	90,33
Mandailing Natal	60,05	63,78	12,68	13,54	8,34	7,86	14.381	9.030	69,46	64,76	93,23
Tapanuli Selatan	62,32	66,13	13,02	14,02	9,06	8,51	16.539	8.569	73,14	66,61	91,07
Tapanuli Tengah	64,79	68,55	12,32	13,10	8,91	7,90	13.066	9.450	71,41	67,24	94,16
Tapanuli Utara	65,83	69,79	13,60	14,09	9,92	9,15	12.300	11.234	73,85	72,01	97,51
Toba Samosir	67,33	71,28	13,11	13,39	10,58	9,67	12.402	11.628	74,98	73,03	97,40
Labuhan Batu	67,53	71,35	12,08	13,20	9,38	8,83	16.933	8.405	75,49	68,54	90,79
Asahan	65,54	69,49	12,53	13,09	8,73	8,21	15.893	8.530	73,57	67,00	91,07

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Simalungun	68,51	72,44	12,55	13,26	9,35	8,69	16.052	9.575	75,96	70,33	92,59
Dairi	66,09	70,06	12,75	13,06	9,30	8,64	10.748	10.053	71,08	69,43	97,68
Karo	68,75	72,67	12,42	13,28	9,58	9,47	13.760	10.040	74,80	71,87	96,08
Deli Serdang	69,10	73,00	12,62	13,16	10,42	9,45	17.985	9.648	78,73	71,47	90,78
Langkat	65,90	69,86	12,30	13,39	8,78	8,14	16.547	7.242	73,92	65,62	88,77
Nias Selatan	65,96	69,92	12,04	11,85	5,93	4,23	10.539	6.167	65,78	57,48	87,38
Humbang Hasundutan	66,37	70,33	13,24	14,37	9,70	8,88	7.816	6.795	68,78	66,82	97,15
Pakpak Barat	63,07	66,91	12,44	14,98	8,98	8,02	8.771	7.685	66,87	66,19	98,98
Samosir	68,66	72,59	13,20	14,42	9,75	8,21	9.431	8.041	71,92	69,09	96,07
Serdang Bedagai	65,75	69,71	12,14	12,69	8,85	7,88	16.496	7.469	73,74	64,91	88,03
Batu Bara	64,10	67,98	12,33	12,99	8,11	7,56	16.406	5.059	72,09	59,58	82,65
Padang Lawas Utara	64,69	68,47	12,34	12,47	9,19	8,69	15.977	6.441	73,56	63,42	86,22
Padang Lawas	64,49	68,39	12,48	13,29	8,69	8,16	13.209	5.079	71,25	60,71	85,21
Labuhan Batu Selatan	66,29	70,06	12,42	13,31	9,25	8,47	18.180	7.276	75,68	66,06	87,29
Labuhan Batu Utara	66,87	70,83	12,68	12,93	8,73	8,12	17.615	8.458	75,31	67,28	89,34
Nias Utara	66,74	70,70	12,86	12,22	7,27	5,13	9.161	3.692	67,41	53,16	78,86
Nias Barat	66,24	70,21	13,03	12,41	7,46	4,73	8.170	5.122	66,41	56,80	85,53
Kota Sibolga	66,01	69,98	12,72	13,49	10,06	9,75	13.101	10.748	73,86	71,77	97,17
Kota Tanjung Balai	60,35	64,09	12,12	12,90	9,46	9,01	17.331	7.758	72,03	64,06	88,94
Kota Pematang Siantar	70,66	74,48	14,90	13,59	11,28	10,96	13.799	11.713	80,24	76,37	95,18
Kota Tebing Tinggi	68,25	72,19	12,33	12,67	10,57	10,03	17.069	10.794	77,70	72,44	93,23
Kota Medan	70,43	74,27	14,54	14,43	11,59	11,01	21.318	13.725	84,35	78,73	93,34
Kota Binjai	69,76	73,63	13,53	13,79	10,59	10,09	15.682	8.436	78,92	71,63	90,76
Kota Padang Sidempuan	66,51	70,34	13,61	15,01	10,95	10,45	12.602	10.097	75,63	73,48	97,16
Gunung Sitoli	68,39	72,33	13,66	13,73	9,62	7,42	10.738	6.924	73,46	65,72	89,46
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>66,94</b>	<b>70,70</b>	<b>13,53</b>	<b>14,38</b>	<b>8,86</b>	<b>8,60</b>	<b>14.446</b>	<b>9.379</b>	<b>74,62</b>	<b>70,26</b>	<b>94,16</b>
Kepulauan Mentawai	62,46	66,22	12,37	11,74	7,19	6,45	8.770	5.506	64,38	57,38	89,13
Pesisir Selatan	68,23	72,16	12,99	13,63	8,49	8,09	11.614	8.441	72,14	68,52	94,98
Solok	65,62	69,57	12,33	13,61	7,82	7,58	13.699	9.448	70,88	67,85	95,73
Sawah Lunto/Sijunjung	63,45	67,31	12,15	13,05	7,76	7,59	15.415	9.161	70,56	65,90	93,40
Tanah Datar	67,07	71,03	12,65	14,15	8,14	8,21	12.224	9.810	71,28	70,22	98,51

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Padang Pariaman	65,92	69,88	12,86	14,21	7,54	6,99	15.800	9.559	72,51	68,01	93,79
Agam	69,58	73,46	13,21	14,55	8,45	8,38	11.594	8.848	72,93	70,86	97,16
Limapuluh Koto	67,28	71,23	12,89	13,58	8,24	7,96	12.691	8.727	72,12	68,24	94,62
Pasaman	64,54	68,44	12,20	13,42	7,87	7,59	11.363	6.848	68,55	63,75	93,00
Solok Selatan	64,91	68,83	12,37	13,31	8,20	7,89	13.248	8.849	70,76	66,90	94,54
Dharmas Raya	68,42	72,35	12,05	12,50	8,66	8,22	16.674	7.366	74,82	66,16	88,43
Pasaman Barat	65,23	69,06	12,48	13,39	8,15	7,56	12.876	6.238	70,71	62,91	88,97
Kota Padang	71,24	75,15	15,72	16,39	11,62	11,26	20.657	12.536	85,67	80,33	93,77
Kota Solok	70,96	74,77	13,94	14,73	10,78	11,18	14.893	10.861	79,65	77,02	96,70
Kota Sawah Lunto	67,36	71,31	12,76	13,72	9,89	10,10	13.121	8.880	74,39	71,04	95,50
Kota Padang Panjang	70,49	74,38	14,45	15,98	11,49	11,38	10.716	8.651	77,31	75,58	97,76
Kota Bukit Tinggi	71,75	75,51	14,45	15,38	11,39	11,11	13.724	12.565	80,43	79,45	98,78
Kota Payakumbuh	71,17	74,98	14,02	14,62	10,37	10,52	14.451	12.658	79,05	77,89	98,53
Kota Pariaman	67,71	71,59	13,87	15,38	10,18	10,08	13.817	11.831	76,51	75,71	98,95
<b>RIAU</b>	<b>69,12</b>	<b>72,92</b>	<b>12,84</b>	<b>13,23</b>	<b>9,02</b>	<b>8,49</b>	<b>16.093</b>	<b>7.189</b>	<b>76,18</b>	<b>67,17</b>	<b>88,17</b>
Kuantan Sengingi	66,04	69,91	12,85	13,51	8,69	7,84	15.271	7.754	73,75	66,16	89,71
Indragiri Hulu	67,81	71,75	11,86	12,39	8,19	7,61	16.077	6.412	73,35	63,51	86,58
Indragiri Hilir	65,05	68,97	11,88	11,94	7,48	6,86	16.472	5.081	71,26	58,29	81,80
Pelalawan	68,52	72,45	11,63	12,19	8,65	7,83	18.509	8.236	75,29	66,63	88,50
Siak	68,62	72,55	12,86	12,68	9,58	9,21	18.488	8.294	77,92	68,89	88,41
Kampar	68,14	72,07	13,13	13,24	9,40	8,77	16.522	8.100	76,72	68,45	89,22
Rokan Hulu	67,27	71,22	13,34	12,80	8,42	8,05	16.351	5.135	75,16	61,51	81,84
Bengkalis	68,67	72,60	12,68	13,63	9,30	8,54	17.237	8.211	76,77	68,95	89,81
Rokan Hilir	67,63	71,58	11,96	12,59	8,20	7,57	14.732	5.384	72,61	61,52	84,73
Kepulauan Meranti	64,97	68,89	12,76	12,92	8,05	6,73	11.858	5.363	69,98	59,69	85,30
Kota Pekanbaru	69,75	73,63	14,94	14,76	11,46	11,01	20.929	12.864	84,06	78,06	92,86
Kota Dumai	68,35	72,28	12,68	13,18	9,94	9,39	17.121	8.740	77,36	70,03	90,52
<b>JAMBI</b>	<b>68,75</b>	<b>72,67</b>	<b>12,72</b>	<b>13,04</b>	<b>8,59</b>	<b>7,70</b>	<b>14.962</b>	<b>7.081</b>	<b>74,64</b>	<b>65,78</b>	<b>88,13</b>
Kerinci	67,49	71,44	14,00	13,56	8,95	7,64	14.767	6.712	75,69	65,07	85,97
Merangin	68,92	72,84	11,95	12,17	8,02	7,20	14.073	6.601	72,56	63,59	87,64
Sarolangun	66,87	70,75	12,33	12,22	7,96	6,88	16.509	9.673	73,34	66,33	90,44
Batanghari	68,10	72,03	12,89	13,23	8,26	7,26	15.273	5.637	74,27	62,52	84,18

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Muara Jambi	68,89	72,80	12,65	13,31	8,46	7,80	12.945	3.749	73,11	58,06	79,41
Tanjung Jabung Timur	63,70	67,57	11,48	11,98	6,79	6,01	13.695	5.939	67,61	58,52	86,56
Tanjung Jabung Barat	65,76	69,67	11,93	12,65	7,84	7,06	13.405	5.344	70,34	60,10	85,44
Tebo	67,71	71,58	12,27	12,57	8,18	7,22	14.413	7.973	72,77	65,54	90,06
Bungo	65,25	69,18	12,59	12,71	8,66	7,48	16.934	8.189	73,95	65,19	88,15
Kota Jambi	70,35	74,25	14,05	14,51	11,05	10,27	15.312	10.926	80,05	75,61	94,45
Kota Sungai Penuh	69,72	73,60	15,10	14,64	10,60	9,50	11.954	9.480	77,71	73,03	93,98
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>67,29</b>	<b>71,17</b>	<b>12,18</b>	<b>12,56</b>	<b>8,30</b>	<b>7,67</b>	<b>14.330</b>	<b>8.927</b>	<b>72,57</b>	<b>67,08</b>	<b>92,43</b>
Ogan Komering Ulu	65,77	69,58	12,09	12,79	8,89	8,35	13.990	9.068	72,27	67,54	93,46
Ogan Komering Ilir	66,13	69,97	11,22	11,71	7,43	6,48	15.458	8.948	70,42	64,14	91,08
Muara Enim (Liot)	66,64	70,07	11,73	12,11	8,13	7,03	15.000	8.056	71,94	64,26	89,32
Lahat	63,27	67,11	11,91	12,95	8,86	7,98	12.396	9.052	69,67	66,05	94,80
Musi Rawas	65,32	69,25	11,75	11,73	7,51	6,87	14.264	5.726	70,04	59,62	85,12
Musi Banyuasin	66,20	70,07	11,94	12,05	7,86	7,31	15.483	4.896	71,88	58,92	81,97
Banyuasin	66,42	70,29	11,48	11,92	7,51	6,85	13.873	6.898	70,02	62,30	88,97
Ogan Komering Ulu Selatan	64,24	68,13	11,47	11,89	7,85	7,44	11.459	7.111	67,68	62,35	92,12
Ogan Komering Ulu Timur	66,40	70,36	12,14	11,95	7,61	6,80	14.550	10.942	71,32	66,93	93,84
Ogan Ilir	62,75	66,58	12,23	12,31	8,00	6,97	9.969	10.557	66,62	65,39	98,15
Empat Lawang	62,35	66,17	11,78	12,48	8,03	7,20	12.828	8.461	68,34	63,52	92,95
Penukal Abab Lematang Ilir	65,76	69,62	10,35	11,38	7,40	5,98	11.004	7.351	66,17	61,00	92,19
Musi Rawas Utara	63,02	66,85	11,31	12,09	7,08	6,02	13.499	8.976	67,35	62,54	92,86
Kota Palembang	68,07	72,01	14,34	13,89	10,60	9,70	16.396	14.054	79,29	75,77	95,56
Kota Prabumulih	67,64	71,59	12,72	12,90	10,12	9,10	18.100	11.726	77,76	72,10	92,72
Kota Pagar Alam	63,87	67,74	12,63	13,25	9,34	8,71	11.229	7.844	70,34	65,99	93,82
Kota Lubuk Linggau	66,65	70,56	13,27	13,95	9,89	9,31	16.685	12.533	76,80	73,53	95,74
<b>BENGKULU</b>	<b>66,64</b>	<b>70,51</b>	<b>13,29</b>	<b>13,86</b>	<b>8,76</b>	<b>8,16</b>	<b>13.683</b>	<b>7.811</b>	<b>73,59</b>	<b>67,22</b>	<b>91,34</b>
Bengkulu Selatan	65,31	69,15	13,58	14,13	9,27	8,29	12.531	8.947	72,99	68,42	93,74
Rejang Lebong	65,61	69,56	12,86	13,91	8,37	7,73	13.402	8.928	71,95	67,74	94,15
Bengkulu Utara	65,46	69,33	12,45	13,14	8,33	7,31	14.209	8.160	71,92	65,45	91,00
Kaur	63,92	67,80	13,15	12,81	8,58	7,72	11.421	5.709	70,14	60,96	86,91

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Seluma	64,84	68,75	12,63	13,11	8,17	7,31	11.848	4.988	69,92	59,57	85,20
Mukomuko	63,94	67,81	12,72	12,64	8,22	7,53	15.350	5.643	71,99	60,46	83,98
Lebong	60,67	64,28	11,94	12,28	8,25	7,48	16.739	9.289	70,20	63,63	90,64
Kepahiang	65,10	69,03	12,66	12,95	8,43	7,64	11.035	8.573	69,72	66,02	94,69
Bengkulu Tengah	65,70	69,56	13,03	12,87	7,57	6,29	13.026	6.041	70,89	60,80	85,77
Bengkulu	67,49	71,43	15,23	15,93	11,80	11,48	16.237	12.451	81,10	78,15	96,36
<b>LAMPUNG</b>	<b>68,04</b>	<b>71,91</b>	<b>12,29</b>	<b>12,67</b>	<b>8,08</b>	<b>7,49</b>	<b>13.335</b>	<b>7.347</b>	<b>72,10</b>	<b>65,24</b>	<b>90,49</b>
Lampung Barat	64,85	68,76	12,09	12,42	7,77	6,99	12.411	8.156	69,28	64,06	92,47
Tanggamus	65,76	69,72	11,70	12,65	7,23	6,50	12.961	7.021	68,97	62,56	90,71
Lampung Selatan	66,62	70,58	11,68	12,28	7,95	7,36	13.427	6.791	70,64	63,24	89,52
Lampung Timur	68,08	72,02	13,11	12,37	7,96	7,15	14.081	7.269	73,36	64,45	87,85
Lampung Tengah	67,25	71,20	12,63	12,46	7,75	7,08	15.390	7.981	72,96	65,10	89,23
Lampung Utara	66,44	70,40	12,43	12,95	8,38	7,67	12.274	6.146	71,09	63,05	88,69
Way Kanan	66,71	70,67	12,14	12,69	7,74	6,71	12.844	6.225	70,51	61,94	87,85
Tulang Bawang	67,38	71,33	11,59	11,87	8,11	7,11	14.958	7.422	72,09	63,81	88,51
Pesawaran	66,25	70,22	12,00	12,57	7,77	7,12	11.918	5.477	69,48	60,62	87,25
Pringsewu	67,10	71,06	12,66	12,96	8,12	7,44	15.072	9.279	73,22	67,55	92,26
Mesuji	65,46	69,40	11,23	11,59	6,81	6,04	11.118	4.470	66,33	55,60	83,82
Tulang Bawang Barat	67,31	71,26	11,84	12,41	7,47	6,73	11.002	5.489	68,65	60,47	88,08
Pesisir Barat	60,61	64,37	12,01	11,15	7,91	7,25	9.778	7.657	65,04	60,38	92,84
Kota Bandar Lampung	68,83	72,75	13,86	14,06	11,33	10,55	16.354	11.035	80,05	74,87	93,53
Kota Metro	69,12	73,02	14,56	14,17	11,07	10,50	14.028	11.074	79,07	75,09	94,97
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>68,08</b>	<b>71,89</b>	<b>11,66</b>	<b>12,00</b>	<b>8,10</b>	<b>7,48</b>	<b>18.257</b>	<b>8.448</b>	<b>74,24</b>	<b>66,02</b>	<b>88,93</b>
Bangka	68,54	72,47	12,50	12,85	8,65	7,94	16.912	7.573	75,49	66,54	88,14
Belitung	68,42	72,35	11,51	11,54	8,48	7,76	19.238	8.516	75,20	66,17	87,99
Bangka Barat	67,61	71,48	11,48	11,54	7,66	7,03	17.046	8.562	72,60	64,91	89,41
Bangka Tengah	68,46	72,40	11,72	12,05	7,28	6,37	18.147	10.023	73,28	66,56	90,83
Bangka Selatan	65,11	69,03	11,30	11,65	6,52	5,68	17.551	5.863	69,78	58,25	83,48
Belitung Timur	69,36	73,25	11,48	11,64	8,16	7,80	16.945	6.480	74,09	63,75	86,04
Kota Pangkal Pinang	70,67	74,50	13,02	12,77	10,22	9,40	20.692	13.520	80,96	75,13	92,80



## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>67,60</b>	<b>71,40</b>	<b>12,76</b>	<b>12,88</b>	<b>10,00</b>	<b>9,57</b>	<b>19.398</b>	<b>11.951</b>	<b>78,25</b>	<b>72,74</b>	<b>92,96</b>
Karimun	68,29	72,23	12,01	12,71	8,14	7,50	18.067	9.604	74,71	68,25	91,35
Bintan	68,10	72,03	12,52	13,26	8,87	8,18	20.505	11.702	77,26	71,53	92,58
Natuna	62,37	66,19	13,72	13,96	8,79	8,22	20.182	10.972	75,26	68,72	91,31
Lingga	59,24	62,93	12,49	12,08	6,47	5,84	16.948	9.409	67,80	60,84	89,73
Kepulauan Anambas	64,74	68,66	11,83	12,47	7,26	6,11	16.822	8.884	70,92	63,81	89,97
Kota Batam	71,24	75,04	12,90	12,96	11,30	10,90	25.035	16.442	84,18	79,31	94,21
Kota Tanjung Pinang	69,85	73,71	13,96	14,28	10,22	9,75	17.907	14.468	80,20	77,36	96,46
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>70,78</b>	<b>74,41</b>	<b>12,96</b>	<b>12,81</b>	<b>11,43</b>	<b>10,61</b>	<b>21.620</b>	<b>16.433</b>	<b>82,87</b>	<b>78,48</b>	<b>94,70</b>
Kep. Seribu	66,10	69,96	12,71	12,39	8,53	8,03	16.680	11.406	74,21	69,19	93,24
Kota Jakarta Selatan	71,92	75,76	13,74	13,18	11,97	11,10	26.560	22.557	86,78	83,06	95,71
Kota Jakarta Timur	72,27	76,05	13,28	12,89	12,17	11,19	21.532	16.706	84,84	80,25	94,59
Kota Jakarta Pusat	71,90	75,65	13,38	13,11	11,59	10,37	18.833	16.390	82,80	79,09	95,52
Kota Jakarta Barat	71,42	75,25	13,12	12,63	10,80	9,97	22.897	19.010	83,09	79,25	95,38
Kota Jakarta Utara	71,03	74,84	12,78	12,43	11,10	10,11	25.422	17.516	83,82	78,27	93,38
<b>JAWA BARAT</b>	<b>70,58</b>	<b>74,42</b>	<b>12,41</b>	<b>12,51</b>	<b>8,59</b>	<b>7,69</b>	<b>14.495</b>	<b>7.599</b>	<b>74,88</b>	<b>66,78</b>	<b>89,18</b>
Bogor	68,69	72,61	12,72	12,37	8,71	6,99	13.810	8.088	74,02	65,65	88,69
Sukabumi	68,23	72,17	12,58	12,02	7,56	6,55	12.197	6.219	70,99	61,69	86,90
Cianjur	67,46	71,41	12,17	11,56	7,06	6,47	10.721	4.537	68,29	57,06	83,56
Bandung	71,17	75,01	11,88	12,84	8,87	8,15	13.470	8.665	74,25	69,37	93,43
Garut	68,82	72,74	11,96	11,60	7,63	6,83	10.440	4.098	69,17	56,69	81,96
Tasikmalaya	66,68	70,64	12,60	12,46	7,40	6,85	10.780	4.886	68,89	58,99	85,63
Ciamis	69,06	72,97	14,60	13,64	7,92	7,27	13.176	5.950	74,73	63,97	85,60
Kuningan	70,92	74,73	12,75	12,00	7,78	7,04	12.962	6.196	73,29	63,28	86,34
Cirebon	69,49	73,38	12,05	12,55	7,16	6,28	14.996	4.955	72,33	59,68	82,51
Majalengka	67,36	71,31	12,40	11,85	7,26	6,44	12.958	5.825	70,55	60,27	85,43
Sumedang	70,02	73,88	12,92	13,58	8,30	7,66	12.706	9.128	73,54	69,57	94,60
Indramayu	68,84	72,76	11,68	12,39	6,67	5,26	13.363	6.655	69,87	61,42	87,91
Subang	69,71	73,59	11,64	12,02	7,19	6,25	14.241	8.102	71,53	64,75	90,52
Purwakarta	68,40	72,33	11,52	12,16	8,41	7,46	16.689	7.047	73,88	64,41	87,18
Karawang	69,64	73,52	11,84	12,08	7,92	6,65	14.443	8.569	72,87	65,89	90,42
Bekasi	71,35	75,14	12,60	12,65	9,46	8,17	16.349	8.004	77,72	68,39	88,00
Bandung Barat	69,88	73,75	11,56	11,81	8,15	7,57	12.349	3.679	71,52	56,58	79,11

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pangandaran	68,53	72,46	12,02	12,20	7,82	7,13	12.391	6.616	71,00	63,40	89,30
Kota Bogor	71,06	74,86	13,13	13,41	10,68	9,89	16.309	9.051	79,65	72,40	90,90
Kota Sukabumi	69,96	73,82	14,30	13,15	10,06	8,98	14.156	9.467	78,16	71,09	90,95
Kota Bandung	71,93	75,79	13,81	14,17	10,90	10,27	21.353	15.246	83,57	79,42	95,03
Kota Cirebon	69,87	73,74	12,76	13,37	10,42	9,30	15.037	10.662	77,59	72,89	93,94
Kota Bekasi	72,73	76,50	13,77	13,48	11,76	10,62	20.953	14.430	84,82	78,96	93,09
Kota Depok	72,12	76,03	13,77	13,98	11,30	10,38	21.238	13.441	84,07	78,23	93,05
Kota Cimahi	71,67	75,51	14,19	13,64	11,01	10,61	15.426	9.855	80,87	74,67	92,33
Kota Tasikmalaya	69,48	73,36	13,35	13,70	9,43	8,64	12.427	7.346	74,93	68,23	91,06
Kota Banjar	68,37	72,30	13,49	12,88	8,83	8,16	15.141	6.953	75,69	65,80	86,93
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>72,16</b>	<b>76,02</b>	<b>12,52</b>	<b>12,63</b>	<b>7,79</b>	<b>6,78</b>	<b>14.214</b>	<b>9.207</b>	<b>74,48</b>	<b>68,48</b>	<b>91,94</b>
Cilacap	71,28	75,08	12,91	12,16	7,40	6,44	14.591	6.830	74,23	63,94	86,14
Banyumas	71,39	75,17	12,88	12,63	7,93	7,11	15.449	7.359	75,50	66,15	87,62
Purbalingga	70,95	74,76	12,17	11,73	7,28	6,48	12.589	8.889	71,69	66,18	92,31
Banjarnegara	71,86	75,61	11,40	11,42	6,57	6,08	9.639	7.772	67,62	64,25	95,02
Kebumen	71,02	74,83	12,87	12,94	7,90	6,82	10.988	7.895	72,00	66,73	92,68
Purworejo	72,35	76,06	13,61	13,30	8,42	7,33	10.610	9.440	73,68	70,19	95,26
Wonosobo	69,29	73,19	11,64	11,72	6,76	6,27	13.614	8.813	70,33	65,13	92,61
Magelang	71,44	75,22	12,42	12,92	7,87	6,95	12.450	7.878	72,89	67,02	91,95
Boyolali	73,87	77,62	11,89	12,39	8,44	6,72	16.516	11.956	76,82	71,41	92,96
Klaten	74,81	78,53	12,61	13,34	8,92	7,62	12.435	11.083	75,97	73,34	96,54
Sukoharjo	75,71	79,45	13,62	14,19	9,47	8,25	11.557	10.652	77,38	75,04	96,98
Wonogiri	74,16	77,86	12,45	12,13	7,39	6,13	11.963	7.961	73,08	66,28	90,70
Karanganyar	75,53	79,16	13,30	13,73	9,30	7,74	11.399	10.800	76,61	73,93	96,50
Sragen	73,69	77,38	12,46	12,65	7,84	6,30	16.236	10.985	76,41	70,21	91,89
Grobogan	72,56	76,25	13,73	12,27	7,18	6,13	14.507	7.131	75,39	64,60	85,69
Blora	72,06	75,80	12,86	11,81	6,98	5,95	13.329	5.671	73,11	61,08	83,55
Rembang	72,41	76,12	12,07	11,68	7,52	6,40	14.693	6.830	74,01	63,78	86,18
Pati	73,95	77,68	12,56	12,27	7,51	6,57	13.654	9.281	74,56	68,58	91,98
Kudus	74,62	78,41	13,16	13,20	8,93	7,70	14.518	10.133	78,03	72,32	92,68
Jepara	73,83	77,67	12,68	12,75	7,73	6,67	13.483	7.979	74,83	67,64	90,39
Demak	73,41	77,16	12,33	12,81	8,25	6,81	13.775	8.209	75,16	67,98	90,45
Semarang	73,71	77,46	13,09	12,84	8,35	7,43	12.050	11.340	74,95	72,31	96,48

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Temanggung	73,56	77,33	12,04	12,27	7,12	6,71	10.280	8.454	70,47	67,65	96,00
Kendal	72,33	76,10	12,64	12,81	7,42	6,30	14.262	10.303	74,22	69,21	93,25
Batang	72,60	76,41	11,91	11,67	7,31	6,05	11.906	7.776	71,63	64,82	90,49
Pekalongan	71,52	75,30	11,64	12,95	7,06	6,15	13.616	8.207	71,75	66,50	92,68
Pemalang	71,02	74,83	11,96	11,76	6,89	5,65	11.570	5.516	70,14	59,95	85,47
Tegal	69,14	73,04	12,41	12,02	7,15	5,97	13.898	7.203	71,89	62,92	87,52
Brebes	66,57	70,53	11,80	11,49	6,74	5,36	14.148	6.708	69,57	59,73	85,86
Kota Magelang	74,84	78,55	13,74	13,79	10,92	9,94	12.832	11.363	79,97	76,98	96,26
Kota Surakarta	75,26	78,96	14,42	14,57	10,96	9,84	14.093	12.963	81,87	79,20	96,74
Kota Salatiga	75,18	78,84	14,58	15,00	10,68	9,57	18.669	14.679	84,46	80,52	95,34
Kota Semarang	75,42	79,13	15,41	14,83	11,28	10,13	15.137	13.639	84,03	80,41	95,69
Kota Pekalongan	72,28	75,99	12,67	12,79	8,93	8,21	15.550	11.528	77,07	72,78	94,43
Kota Tegal	72,32	76,18	12,66	12,98	8,68	7,45	17.173	11.634	77,67	72,17	92,92
<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>72,95</b>	<b>76,57</b>	<b>15,54</b>	<b>15,14</b>	<b>9,74</b>	<b>8,73</b>	<b>16.119</b>	<b>12.801</b>	<b>81,77</b>	<b>77,18</b>	<b>94,39</b>
Kulon Progo	73,19	77,00	13,92	15,20	9,12	8,22	12.261	8.801	76,74	72,85	94,93
Bantul	71,62	75,39	15,10	14,54	9,69	8,79	17.350	14.372	81,31	77,23	94,98
Gunung Kidul	71,89	75,64	13,12	12,72	7,74	6,33	14.503	6.010	75,15	63,15	84,03
Sleman	72,74	76,53	16,59	15,97	11,30	10,14	16.334	14.515	84,62	80,91	95,62
Kota Yogyakarta	72,45	76,24	16,84	16,79	11,78	10,91	17.997	18.282	86,21	84,71	98,26
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>68,82</b>	<b>72,70</b>	<b>13,21</b>	<b>13,03</b>	<b>7,93</b>	<b>6,78</b>	<b>15.671</b>	<b>9.580</b>	<b>74,77</b>	<b>67,86</b>	<b>90,76</b>
Pacitan	69,30	73,20	12,62	12,40	7,61	6,59	12.877	5.389	72,11	60,87	84,41
Ponorogo	70,29	74,14	13,57	13,70	7,50	6,55	11.916	8.623	72,71	67,84	93,30
Trenggalek	71,20	75,00	12,11	12,00	7,60	6,86	13.495	8.714	72,83	66,89	91,84
Tulungagung	71,59	75,36	12,89	13,11	8,14	7,53	12.545	9.900	73,90	70,43	95,30
Blitar	71,03	74,84	11,90	12,86	7,68	6,83	14.603	8.828	73,35	67,85	92,50
Kediri	70,27	74,12	12,59	13,09	8,05	7,25	14.994	9.590	74,53	69,17	92,81
Malang	70,14	73,99	12,18	12,60	7,58	6,77	13.920	6.736	72,69	64,21	88,33
Lumajang	67,47	71,41	11,96	11,68	6,81	5,64	13.037	6.921	69,55	61,01	87,72
Jember	66,50	70,46	12,88	12,63	6,85	5,42	13.462	5.800	70,47	59,42	84,32
Banyuwangi	68,17	72,10	12,64	12,77	7,52	6,35	18.124	7.516	74,55	64,26	86,20
Bondowoso	64,05	67,93	13,47	12,93	6,37	4,66	13.849	9.032	69,55	62,23	89,48
Situbondo	66,49	70,46	13,44	12,98	6,80	5,42	14.041	7.077	71,40	61,96	86,78

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Probolinggo	64,46	68,36	12,34	11,74	6,56	5,07	16.173	7.077	70,07	59,26	84,57
Pasuruan	67,87	71,81	12,03	12,19	7,51	6,18	12.793	8.025	70,59	63,99	90,65
Sidoarjo	71,78	75,54	14,37	14,28	10,77	9,70	19.054	13.231	82,85	77,32	93,33
Mojokerto	70,11	73,97	12,93	12,52	8,91	7,52	17.166	10.530	77,20	69,78	90,39
Jombang	69,88	73,75	12,70	12,85	8,55	7,67	15.342	8.278	75,34	67,74	89,91
Nganjuk	69,10	73,00	12,80	13,13	7,91	7,02	16.211	11.087	74,73	69,86	93,48
Madiun	68,75	72,67	12,94	13,63	8,13	6,91	15.250	9.174	74,45	68,20	91,61
Magetan	70,18	74,03	14,11	13,69	8,56	7,29	14.441	11.042	76,44	71,24	93,20
Ngawi	69,74	73,62	12,53	12,98	7,25	6,15	15.196	9.362	73,25	67,17	91,70
Bojonegoro	68,81	72,73	12,26	12,39	7,32	6,12	14.066	8.045	71,90	64,55	89,78
Taban	68,78	72,70	12,19	12,16	7,08	5,92	14.674	7.129	71,86	62,75	87,32
Lamongan	69,88	73,75	13,59	13,44	8,15	7,00	15.954	7.883	76,15	67,00	87,98
Gresik	70,38	74,22	13,93	13,70	9,49	8,44	18.825	9.905	79,99	71,65	89,57
Bangkalan	67,79	71,73	11,83	11,44	5,96	4,60	11.993	6.469	67,59	58,75	86,92
Sampang	65,63	69,58	11,80	10,91	4,91	3,40	12.588	6.185	65,48	55,10	84,15
Pamekasan	65,03	68,95	13,85	13,36	7,05	5,29	12.237	6.214	70,19	60,14	85,68
Sumenep	68,69	72,62	13,18	12,29	6,26	4,39	12.750	4.718	70,55	56,19	79,65
Kota Kediri	71,76	75,51	14,63	15,06	10,77	9,34	14.489	11.406	80,44	76,13	94,64
Kota Blitar	71,22	75,02	13,84	14,22	10,14	9,67	13.693	12.570	78,09	76,46	97,91
Kota Malang	70,80	74,62	15,78	15,24	10,95	9,96	19.295	15.763	84,08	79,84	94,96
Kota Probolinggo	67,84	71,78	13,87	13,26	9,12	7,92	11.460	11.108	73,47	70,58	96,07
Kota Pasuruan	69,01	72,92	13,49	13,79	9,96	8,34	12.785	12.056	75,76	73,00	96,36
Kota Mojokerto	70,90	74,71	14,26	13,81	10,57	9,43	16.650	12.357	80,78	75,45	93,40
Kota Madiun	70,50	74,34	14,31	14,18	11,65	10,60	21.166	14.834	84,17	78,83	93,66
Kota Surabaya	71,96	75,70	14,68	14,08	10,98	9,85	20.181	15.154	84,05	78,72	93,66
Kota Batu	70,27	74,11	14,22	13,98	8,83	8,15	17.691	8.886	78,84	70,38	89,27
<b>BANTEN</b>	<b>67,57</b>	<b>71,47</b>	<b>12,80</b>	<b>12,77</b>	<b>9,07</b>	<b>7,98</b>	<b>16.588</b>	<b>10.031</b>	<b>75,70</b>	<b>68,99</b>	<b>91,14</b>
Pandeglang	62,08	65,88	13,13	13,82	7,23	6,09	13.510	5.850	69,07	59,49	86,13
Lebak	64,58	68,48	12,08	11,74	6,60	5,70	12.611	3.888	67,73	53,21	78,56
Tangerang	67,44	71,39	12,46	12,52	8,60	7,53	17.235	10.308	75,00	68,40	91,20
Serang	62,06	65,87	12,07	12,81	7,72	6,61	14.956	9.458	69,44	64,08	92,28
Kota Tangerang	69,38	73,27	13,60	13,44	10,88	9,74	18.322	13.795	80,61	75,83	94,07

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Cilegon	64,32	68,21	13,12	14,60	10,34	8,52	19.797	7.594	77,46	66,89	86,35
Kota Serang	65,43	69,30	12,84	12,42	9,35	7,86	18.514	12.116	75,97	69,25	91,15
Kota Tangerang Selatan	70,17	74,09	14,39	14,20	12,05	10,78	21.514	14.380	84,69	78,62	92,83
<b>BALI</b>	<b>69,58</b>	<b>73,35</b>	<b>13,33</b>	<b>13,13</b>	<b>9,35</b>	<b>7,75</b>	<b>16.369</b>	<b>13.180</b>	<b>77,50</b>	<b>72,62</b>	<b>93,70</b>
Jembrana	69,71	73,58	12,64	12,15	8,80	6,75	13.392	11.205	74,24	68,78	92,65
Tabanan	71,07	74,88	13,23	12,87	9,43	7,78	14.171	13.217	76,86	73,12	95,13
Badung	72,63	76,47	14,23	13,48	10,82	9,16	19.018	16.879	83,19	78,63	94,52
Gianyar	71,10	74,90	13,77	13,13	9,75	8,01	16.100	13.629	79,06	74,01	93,61
Klungkung	68,42	72,35	13,86	12,84	8,51	6,49	13.952	10.703	74,93	68,21	91,03
Bangli	67,81	71,75	12,54	11,72	7,73	5,99	14.543	10.550	72,60	65,86	90,72
Karangasem	67,82	71,76	12,55	12,37	6,55	4,72	13.979	8.604	70,66	62,90	89,02
Buleleng	69,13	73,03	12,67	12,53	7,90	6,24	18.085	12.180	75,55	69,05	91,40
Kota Denpasar	72,26	75,98	14,00	13,92	11,60	10,82	20.942	18.903	84,62	81,98	96,88
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>63,57</b>	<b>67,42</b>	<b>13,58</b>	<b>13,36</b>	<b>7,63</b>	<b>6,27</b>	<b>13.681</b>	<b>8.638</b>	<b>70,93</b>	<b>64,09</b>	<b>90,36</b>
Lombok Barat	63,79	67,66	13,26	12,60	6,92	5,34	16.515	9.924	71,44	63,53	88,93
Lombok Tengah	63,30	67,15	13,55	12,79	6,78	5,25	13.913	7.245	69,83	60,33	86,40
Lombok Timur	63,04	66,88	13,68	13,15	7,00	5,79	11.238	7.883	68,16	62,11	91,12
Sumbawa	64,57	68,47	12,86	12,76	8,18	7,07	10.529	8.139	68,90	64,35	93,40
Dompu	63,89	67,77	13,28	13,84	8,76	7,49	12.424	7.382	71,28	64,54	90,54
Bima	63,41	67,27	13,32	12,73	8,32	7,26	10.430	7.211	68,86	62,72	91,08
Sumbawa Barat	64,96	68,88	13,95	13,18	8,61	7,75	14.845	10.505	73,98	68,34	92,38
Lombok Utara	64,17	68,06	13,13	12,52	6,30	4,98	12.508	6.058	68,23	58,23	85,34
Kota Mataram	68,97	72,88	15,59	15,11	10,36	9,11	18.033	12.557	81,60	75,61	92,66
Kota Bima	67,55	71,49	14,80	15,61	10,78	9,58	11.641	9.792	76,27	73,33	96,15
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>64,20</b>	<b>67,96</b>	<b>13,05</b>	<b>13,08</b>	<b>7,46</b>	<b>6,87</b>	<b>10.179</b>	<b>6.985</b>	<b>67,70</b>	<b>62,58</b>	<b>92,44</b>
Sumba Barat	64,20	68,08	13,03	12,68	6,82	6,21	8.532	6.892	65,14	61,31	94,12
Sumba Timur	62,16	65,97	12,65	12,85	6,81	6,66	11.117	8.979	66,31	63,73	96,11
Kupang	61,54	65,33	13,72	13,48	7,45	7,04	10.409	5.380	67,26	59,01	87,73
Timor Tengah Selatan	63,66	67,52	12,25	14,73	6,71	6,01	8.877	5.846	64,34	60,99	94,79
Timor Tengah Utara	64,19	68,07	12,91	13,94	7,39	6,98	7.235	5.721	63,97	61,33	95,87

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belu	61,47	65,26	11,93	12,58	7,39	6,77	7.981	7.124	62,76	60,92	97,07
Alor	58,59	62,25	12,01	12,26	8,23	7,39	8.637	6.288	63,19	58,56	92,67
Lembata	64,19	68,08	12,22	12,72	8,35	7,19	9.720	6.644	67,49	62,12	92,04
Flores Timur	62,48	66,30	12,92	12,42	7,89	6,50	10.102	7.027	67,18	60,79	90,49
Sikka	64,30	68,19	12,22	12,71	7,00	6,36	12.012	6.045	67,85	60,14	88,64
Ende	62,51	66,34	14,01	13,62	8,11	7,25	9.486	8.511	67,89	64,85	95,52
Ngada	65,38	69,27	12,36	12,95	8,01	7,75	10.812	8.451	68,83	66,12	96,06
Manggarai	63,85	67,72	12,55	12,23	7,47	6,74	10.321	5.434	67,17	58,69	87,38
Rote Nda	61,46	65,25	13,16	12,51	7,28	6,78	9.650	4.307	65,73	55,12	83,86
Manggarai Barat	64,28	68,08	11,30	11,06	7,66	6,75	11.147	5.855	67,01	58,55	87,38
Sumba Tengah	65,84	69,69	12,30	12,60	5,71	5,40	8.112	4.875	63,18	57,02	90,25
Sumba Barat Daya	65,73	69,68	12,60	13,20	6,40	5,98	6.363	5.952	61,75	60,64	98,20
Nageko	64,35	68,25	12,73	12,43	7,57	7,46	8.119	8.315	65,30	64,60	98,93
Manggarai Timur	65,47	69,31	11,03	11,43	6,88	6,14	7.625	4.942	62,53	56,75	90,76
Sabu Raijua	57,16	60,74	13,11	13,32	5,79	6,02	6.779	4.569	58,29	53,73	92,18
Malaka	62,50	66,09	12,35	12,92	6,78	6,20	8.007	4.815	62,96	56,60	89,90
Kota Kupang	66,54	70,51	16,32	15,71	11,97	11,02	15.221	12.776	81,11	77,24	95,23
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>68,00</b>	<b>71,90</b>	<b>12,46</b>	<b>12,68</b>	<b>7,59</b>	<b>6,49</b>	<b>12.669</b>	<b>5.803</b>	<b>71,14</b>	<b>61,38</b>	<b>86,28</b>
Sambas	66,13	70,10	12,22	12,39	7,32	6,06	14.142	6.748	70,63	61,49	87,06
Bengkayang	71,08	74,95	11,53	12,09	6,44	5,73	12.558	4.451	69,79	57,79	82,81
Landak	70,14	73,99	12,25	12,54	7,96	6,54	9.522	5.326	69,56	61,12	87,87
Pontianak	68,35	72,23	12,15	12,31	7,00	6,09	11.402	5.570	69,18	60,17	86,98
Sanggau	68,73	72,65	11,57	11,50	7,50	6,31	11.994	4.156	69,86	56,15	80,38
Ketapang	68,55	72,43	11,77	11,59	7,49	6,43	11.907	6.345	69,92	61,42	87,84
Sintang	69,10	73,00	11,54	11,51	7,14	6,13	12.247	5.674	69,69	59,91	85,97
Kapuas Hulu	69,96	73,86	12,44	11,83	7,50	6,33	9.900	4.755	69,50	58,69	84,45
Sekadau	68,97	72,88	11,52	11,84	7,27	5,98	10.873	4.158	68,66	56,18	81,82
Melawai	70,42	74,30	10,91	11,39	7,17	6,09	12.997	4.026	70,13	55,96	79,79
Kayong Utara	65,53	69,37	11,96	11,63	6,46	5,14	10.625	5.249	66,29	56,44	85,14
Kubu Raya	67,81	71,71	12,90	13,22	7,40	6,39	13.558	5.221	71,92	60,45	84,05
Kota Pontianak	70,18	74,03	14,77	14,55	10,42	9,38	18.687	13.392	81,83	76,59	93,60
Kota Singkawang	69,12	73,02	12,83	13,25	7,68	7,02	15.892	9.381	74,29	68,33	91,98

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>67,69</b>	<b>71,50</b>	<b>12,44</b>	<b>12,48</b>	<b>8,62</b>	<b>7,91</b>	<b>15.094</b>	<b>7.597</b>	<b>73,94</b>	<b>65,74</b>	<b>88,91</b>
Kotawaringin Barat	68,31	72,25	12,80	12,60	8,68	7,86	18.111	11.136	76,35	70,06	91,76
Kotawaringin Timur	67,67	71,61	12,80	12,52	8,30	7,41	17.309	8.106	75,13	65,91	87,73
Kapuas	66,55	70,51	11,65	12,31	7,81	7,37	12.283	9.930	69,57	67,20	96,59
Barito Selatan	64,76	68,68	12,07	12,44	9,11	8,42	15.157	9.836	72,74	67,66	93,02
Barito Utara	69,25	73,15	12,96	11,83	8,80	7,91	13.783	6.222	74,64	63,56	85,16
Sukamara	69,41	73,30	12,11	11,90	8,18	7,14	10.717	7.198	70,57	64,39	91,24
Lamandau	67,25	71,20	11,98	12,47	8,24	7,60	14.699	8.711	72,48	66,66	91,97
Seruyan	67,29	71,06	11,60	11,80	8,07	7,39	13.219	6.693	70,89	62,84	88,64
Katingan	63,55	67,40	11,97	12,58	8,95	8,19	15.449	5.935	71,97	61,54	85,51
Pulang Pisau	65,82	69,78	12,34	12,79	7,99	7,53	12.955	7.607	70,70	64,83	91,70
Gunung Mas	68,13	72,06	11,63	12,38	9,04	8,77	14.558	7.961	73,49	67,42	91,74
Barito Timur	65,93	69,89	13,10	12,30	9,64	8,74	15.901	8.271	75,50	66,71	88,36
Murung Raya	67,36	71,31	11,90	11,70	8,36	7,01	15.559	5.729	73,12	60,63	82,92
Kota Palangka Raya	71,17	74,97	15,05	14,73	11,45	10,78	17.792	13.203	83,37	78,72	94,42
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>65,98</b>	<b>69,95</b>	<b>12,53</b>	<b>12,42</b>	<b>8,45</b>	<b>7,52</b>	<b>17.402</b>	<b>8.564</b>	<b>74,22</b>	<b>65,76</b>	<b>88,60</b>
Tanah Laut	66,86	70,81	11,79	11,87	7,92	6,88	16.444	7.629	72,64	63,58	87,53
Kota Baru	66,68	70,64	11,81	11,82	7,73	6,57	17.214	6.133	72,71	60,71	83,50
Banjar	64,38	68,27	11,57	11,91	7,77	6,79	18.242	11.043	71,82	65,97	91,85
Barito Kuala	63,35	67,20	12,43	11,92	7,43	6,42	13.721	7.659	69,37	61,48	88,63
Tapin	67,74	71,68	11,58	11,51	8,26	7,16	17.337	6.300	73,76	61,86	83,87
Hulu Sungai Selatan	63,41	67,26	11,99	12,58	7,97	7,46	17.648	8.038	71,79	63,94	89,07
Hulu Sungai Tengah	63,32	67,17	11,80	12,17	8,23	7,45	12.745	11.444	69,04	66,89	96,89
Hulu Sungai Utara	61,00	64,77	12,39	13,34	7,87	7,09	13.042	8.025	68,23	63,02	92,36
Tabalong	67,93	71,87	12,38	12,50	9,00	8,11	17.484	6.577	75,81	64,55	85,15
Tanah Bumbu	67,41	71,36	12,18	11,86	8,29	7,08	18.151	6.949	74,71	63,07	84,42
Balangan	65,17	69,10	12,12	12,00	7,70	6,52	15.815	10.966	71,54	66,04	92,31
Kota Banjarmasin	68,52	72,45	13,90	14,00	11,06	9,26	17.645	13.140	80,33	74,93	93,28
Kota Banjar Baru	69,50	73,38	15,66	14,75	11,35	10,28	19.064	12.820	83,62	77,07	92,17

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>71,87</b>	<b>75,61</b>	<b>13,42</b>	<b>13,67</b>	<b>9,75</b>	<b>8,93</b>	<b>17.830</b>	<b>6.751</b>	<b>80,03</b>	<b>68,52</b>	<b>85,62</b>
Pasir	70,07	73,92	12,86	13,43	8,58	7,78	16.968	2.733	76,57	53,43	69,78
Kutai Barat	70,39	74,23	13,05	12,77	8,81	7,59	14.622	5.549	75,85	63,18	83,30
Kutai	69,68	73,56	13,50	13,62	9,18	8,14	17.606	4.444	78,18	61,40	78,54
Kutai Timur	70,54	74,37	12,52	12,45	9,28	8,54	17.067	3.685	77,40	58,42	75,48
Berau	69,44	73,32	12,89	14,18	9,22	8,65	18.560	7.182	77,94	68,41	87,77
Penajam Paser Utara	69,30	73,08	12,27	12,59	8,43	7,54	16.883	6.872	75,29	64,98	86,31
Mahakam Ulu	69,24	73,14	12,98	12,41	8,88	7,32	11.908	4.216	73,34	58,54	79,82
Kota Balikpapan	72,05	75,88	13,74	14,00	11,06	10,22	22.034	10.498	84,05	75,43	89,74
Kota Samarinda	71,78	75,68	14,37	14,71	10,68	9,76	21.075	9.754	83,68	74,69	89,26
Kota Bontang	71,79	75,66	13,20	12,87	11,05	10,36	25.587	9.378	84,66	73,18	86,44
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>70,50</b>	<b>74,34</b>	<b>12,81</b>	<b>12,77</b>	<b>9,27</b>	<b>8,44</b>	<b>12.380</b>	<b>5.528</b>	<b>74,62</b>	<b>64,14</b>	<b>85,96</b>
Malinau	71,17	71,61	13,06	13,68	9,18	8,03	14.397	4.971	76,56	62,03	81,02
Bulungan	71,42	73,53	13,16	12,73	9,35	8,33	14.227	6.262	76,89	65,16	84,74
Tana Tidung	70,57	71,41	12,38	12,15	8,76	7,61	10.867	3.643	72,26	55,91	77,37
Nunukan	70,47	72,12	12,60	12,67	8,25	7,57	9.794	4.052	70,74	58,11	82,15
Kota Tarakan	73,26	74,35	13,04	13,96	10,44	9,52	15.258	9.423	79,69	72,70	91,23
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>69,11</b>	<b>73,01</b>	<b>12,42</b>	<b>12,95</b>	<b>9,10</b>	<b>9,19</b>	<b>14.497</b>	<b>9.639</b>	<b>74,86</b>	<b>70,95</b>	<b>94,78</b>
Bolaang Mongondow	66,58	70,54	11,03	11,71	7,38	7,22	14.448	6.049	69,76	61,19	87,72
Minahasa	68,44	72,37	13,81	14,03	9,42	9,70	15.097	11.219	76,76	73,86	96,22
Kep.Sangihe Talaud	67,32	71,27	11,55	12,87	7,55	8,05	14.548	9.223	71,01	68,24	96,10
Kepulauan Talaud	67,45	71,40	12,13	12,40	9,10	8,75	8.855	7.834	68,88	66,94	97,18
Minahasa Selatan	67,21	71,16	11,41	12,48	9,24	8,69	16.243	6.981	74,05	65,56	88,53
Minahasa Utara	68,84	72,76	12,28	12,74	9,30	9,41	13.990	10.435	74,50	71,71	96,26
Bolaang Mongondow Utara	64,96	68,88	11,79	12,47	7,65	7,86	14.945	5.242	70,51	60,26	85,46
Kep. Siau Tagulandang Biaro	67,82	71,76	11,28	11,35	8,49	8,93	12.112	5.316	70,53	61,81	87,64
Minahasa Tenggara	67,55	71,50	11,49	12,13	8,62	8,50	14.665	7.982	72,57	66,63	91,81
Bolaang Mongondow Selatan	62,13	65,88	12,12	12,35	7,99	7,50	13.829	3.760	69,20	54,21	78,34



## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bolaang Mongondow Timur	65,35	69,23	11,39	12,31	7,65	7,29	12.338	6.455	68,54	62,03	90,50
Kota Manado	69,34	73,23	14,03	14,48	11,45	10,66	15.779	12.642	80,27	77,03	95,96
Kota Bitung	68,52	72,45	11,60	12,72	9,60	9,71	16.480	10.179	75,51	71,64	94,87
Kota Tomohon	69,18	73,08	13,66	14,38	10,09	10,32	12.293	10.954	75,77	75,00	98,98
Kota Kotamobago	67,69	71,58	12,15	13,54	10,14	9,33	14.259	9.731	75,03	71,11	94,78
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>65,40</b>	<b>69,29</b>	<b>12,82</b>	<b>13,27</b>	<b>8,56</b>	<b>8,00</b>	<b>12.980</b>	<b>7.710</b>	<b>71,74</b>	<b>65,76</b>	<b>91,66</b>
Banggai Kepulauan	62,56	66,39	13,05	12,83	8,31	7,75	10.971	7.261	68,65	63,04	91,83
Banggai	67,99	71,93	12,57	13,21	8,24	7,52	14.192	7.687	73,17	66,32	90,64
Morowali	66,13	70,00	12,58	12,78	9,54	8,49	16.949	6.376	75,52	64,06	84,83
Poso	68,14	72,07	12,95	13,97	9,00	8,66	10.042	8.202	71,21	69,15	97,11
Donggala	63,90	67,77	12,23	12,76	8,46	7,16	11.120	5.728	68,80	60,31	87,66
Toli-Toli	62,15	65,97	12,70	13,02	7,96	7,60	11.400	6.142	68,03	61,02	89,70
Buol	64,98	68,90	13,03	14,38	8,78	8,43	11.770	5.586	71,08	63,35	89,12
Parigi Moutong	61,35	65,03	12,00	12,95	7,17	6,85	12.428	7.389	66,68	61,65	92,46
Tojo Una-Una	62,11	65,92	11,76	12,48	7,91	7,84	11.193	6.328	66,80	61,10	91,47
Sigi	66,72	70,64	12,24	12,60	8,66	7,79	10.784	7.515	70,13	65,21	92,98
Banggai Laut	61,67	65,46	12,87	12,25	8,56	7,77	10.617	7.397	68,00	62,26	91,56
Morowali Utara	66,40	70,26	11,82	12,62	8,69	8,05	10.391	8.639	69,21	66,84	96,58
Kota Palu	67,97	71,84	15,92	15,86	11,64	10,87	15.303	14.730	81,23	79,35	97,69
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>67,96</b>	<b>71,86</b>	<b>12,99</b>	<b>13,59</b>	<b>8,31</b>	<b>7,63</b>	<b>15.010</b>	<b>9.379</b>	<b>74,21</b>	<b>68,90</b>	<b>92,84</b>
Selayar	65,78	69,74	12,38	13,21	7,66	6,97	13.483	7.414	70,66	64,28	90,97
Bulukumba	64,94	68,86	12,35	13,09	7,47	7,09	12.680	10.068	69,41	67,02	96,56
Bantaeng	67,94	71,81	11,77	12,34	7,15	6,32	11.014	8.743	68,44	65,21	95,28
Jeneponto	63,66	67,52	12,00	11,92	6,37	5,98	13.481	7.884	67,47	61,36	90,94
Takalar	64,37	68,27	12,21	12,50	7,03	6,55	15.361	6.394	70,09	60,81	86,76
Gowa	67,92	71,86	12,83	13,46	7,95	7,55	13.884	6.065	72,84	63,87	87,69
Sinjai	64,60	68,50	12,84	13,55	7,57	7,03	9.308	8.539	66,93	65,60	98,01
Maros	66,71	70,52	12,97	13,11	7,84	7,16	15.419	7.644	73,21	65,09	88,91
Pangkajene Kepulauan	63,87	67,74	12,37	12,45	8,02	6,91	16.919	8.914	72,16	64,41	89,26
Barru	66,26	70,22	13,46	13,79	8,06	7,67	13.167	10.061	72,34	69,09	95,51
Bone	64,22	68,11	12,40	12,88	6,94	6,67	11.908	7.421	67,85	62,86	92,65

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Soppeng	66,68	70,64	12,31	12,83	7,57	7,30	10.050	8.680	68,12	66,37	97,43
Wajo	64,52	68,42	12,83	13,60	7,12	6,38	19.260	9.160	72,89	65,53	89,90
Sidenreng Rappang	66,78	70,74	12,49	13,25	7,78	7,34	17.443	9.650	73,71	67,97	92,21
Pinrang	66,64	70,60	12,31	13,97	8,04	7,18	14.601	10.131	72,22	68,93	95,44
Enrekang	68,36	72,29	13,40	14,14	8,75	8,03	10.567	9.847	71,99	70,64	98,12
Luwu	67,57	71,52	12,81	13,67	7,96	7,69	13.383	7.776	72,32	66,91	92,52
Tana Toraja	70,59	74,42	13,22	13,72	8,49	7,77	10.053	4.908	72,01	62,78	87,18
Luwu Utara	65,58	69,53	12,51	12,23	7,67	7,07	15.544	7.893	71,99	63,98	88,87
Luwu Timur	67,76	71,70	12,73	13,18	8,56	7,94	18.509	8.725	76,03	68,04	89,49
Toraja Utara	70,98	74,79	12,92	13,64	8,37	7,50	10.628	4.779	72,30	62,20	86,03
Kota Makasar	69,51	73,39	14,99	15,77	11,36	10,83	19.668	13.110	83,28	78,87	94,70
Kota Pare Pare	68,67	72,60	14,07	14,63	10,31	9,90	15.066	12.929	78,19	76,21	97,47
Kota Palopo	68,28	72,21	14,08	15,75	10,54	10,30	14.919	11.461	78,17	76,27	97,57
<b>SULAWESI TENGGERA</b>	<b>68,57</b>	<b>72,47</b>	<b>13,17</b>	<b>13,54</b>	<b>8,98</b>	<b>7,95</b>	<b>13.068</b>	<b>7.422</b>	<b>74,25</b>	<b>67,00</b>	<b>90,24</b>
Buton	65,27	69,21	14,07	13,44	9,31	6,16	11.899	4.402	72,99	57,22	78,39
Muna	67,80	71,68	13,32	14,07	9,09	7,13	11.746	6.047	73,12	63,86	87,34
Konawe/Kab Kendari	67,48	71,43	12,57	13,31	9,35	8,51	14.141	9.126	74,30	69,19	93,12
Kolaka	68,02	71,96	12,17	12,90	8,70	8,07	17.562	8.354	75,27	67,57	89,77
Konawe Selatan	67,95	71,89	12,22	12,79	8,26	7,17	12.918	6.044	71,92	62,76	87,26
Bombana	65,78	69,74	11,69	12,31	8,11	6,98	12.059	4.704	69,47	58,15	83,71
Wakatobi	67,56	71,51	13,29	13,11	8,33	7,17	12.746	6.797	72,83	64,26	88,23
Kolaka Utara	67,71	71,65	11,59	11,97	7,92	7,26	10.497	9.721	68,69	67,01	97,55
Konawe Utara	68,39	72,29	12,63	12,85	8,84	7,54	9.575	6.719	70,32	64,65	91,94
Buton Utara	66,71	70,61	11,98	12,21	9,30	7,97	13.039	5.719	72,48	61,93	85,44
Kolaka Timur	69,67	73,54	11,98	11,49	7,10	6,20	7.484	8.220	65,43	64,22	98,15
Konawe Kepulauan	65,94	69,80	11,38	10,98	9,61	8,32	9.958	4.535	69,25	57,97	83,71
Muna Barat	67,80	71,68	12,07	12,03	7,13	5,60	10.045	5.915	67,79	59,74	88,13
Buton Tengah	65,24	69,07	12,92	12,31	7,51	4,69	11.275	4.374	69,12	54,31	78,57
Buton Selatan	65,24	69,07	12,55	12,92	7,52	6,19	13.047	2.874	70,10	50,62	72,21
Kota Kendari	71,06	74,92	16,12	16,01	12,12	11,22	16.580	12.504	84,38	79,80	94,57
Kota Bau-Bau	68,48	72,41	14,47	15,19	10,45	9,51	14.824	8.033	78,49	71,14	90,64

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>GORONTALO</b>	<b>65,22</b>	<b>69,20</b>	<b>12,54</b>	<b>13,50</b>	<b>6,98</b>	<b>7,56</b>	<b>13.552</b>	<b>4.995</b>	<b>69,71</b>	<b>60,40</b>	<b>86,64</b>
Boalemo	65,82	69,78	11,84	12,86	5,87	6,41	12.786	3.476	67,15	53,96	80,36
Gorontalo	64,78	68,59	12,04	13,03	6,30	7,05	13.595	3.671	68,04	55,10	80,98
Pokuwato	60,92	64,69	12,00	12,73	6,80	7,02	12.346	6.543	65,92	60,19	91,31
Bone Bolango	65,74	69,63	12,75	13,74	7,37	8,20	13.610	4.947	70,75	61,35	86,71
Gorontalo Utara	63,14	66,99	11,94	13,05	6,43	7,02	13.010	3.518	66,92	53,83	80,44
Kota Gorontalo	69,79	73,66	13,75	14,63	10,27	10,39	17.249	5.988	79,67	68,59	86,09
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>62,52</b>	<b>66,23</b>	<b>12,27</b>	<b>12,71</b>	<b>7,55</b>	<b>7,08</b>	<b>12.662</b>	<b>6.572</b>	<b>68,21</b>	<b>61,01</b>	<b>89,44</b>
Majene	58,90	62,57	13,38	13,58	8,41	8,08	11.665	8.780	67,74	64,13	94,67
Polewali Mamasa	59,85	63,56	12,64	13,06	7,27	6,74	11.388	6.861	65,93	60,14	91,22
Mamasa	68,46	72,39	11,07	12,02	7,70	6,84	7.883	7.304	65,27	63,91	97,92
Mamuju	64,64	68,54	12,52	13,63	7,68	7,02	11.768	6.287	69,03	62,38	90,37
Mamuju Utara	63,35	67,20	11,71	11,21	7,78	7,39	16.334	5.902	70,54	59,17	83,88
Mamuju Tengah	65,49	69,43	11,17	12,71	7,18	6,93	12.224	4.967	67,64	59,02	87,26
<b>MALUKU</b>	<b>63,49</b>	<b>67,39</b>	<b>13,69</b>	<b>14,25</b>	<b>9,63</b>	<b>9,17</b>	<b>11.602</b>	<b>7.418</b>	<b>71,82</b>	<b>66,61</b>	<b>92,75</b>
Maluku Tenggara Barat	61,12	64,89	11,80	12,76	9,44	8,97	8.136	3.828	65,05	55,81	85,80
Maluku Tenggara	62,64	66,47	11,96	13,08	9,86	9,08	8.325	6.954	66,66	64,31	96,47
Maluku Tengah	64,07	67,95	13,87	14,59	9,32	9,26	10.712	9.493	71,15	69,94	98,30
Buru	64,04	67,92	12,39	12,86	8,64	7,50	15.994	8.419	72,58	65,05	89,63
Kepulauan Aru	60,42	64,16	11,40	12,21	8,58	8,19	10.943	5.451	66,20	58,72	88,70
Seram Bagian Barat	59,06	62,74	12,92	13,72	8,87	8,22	8.390	8.069	64,72	63,65	98,35
Seram Bagian Timur	56,73	60,29	12,30	12,16	8,45	6,68	12.453	6.632	66,12	57,25	86,58
Maluku Barat Daya	59,71	63,42	11,77	11,95	8,13	7,87	9.258	5.247	64,08	57,35	89,50
Buru Selatan	63,75	67,61	12,21	12,40	7,97	6,62	12.742	5.712	69,36	59,25	85,42
Kota Ambon	67,89	71,83	15,58	16,53	11,73	11,58	15.722	13.101	81,24	79,52	97,88
Kota Tual	62,64	66,47	13,81	14,73	10,54	9,59	10.276	4.951	71,28	62,13	87,16
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>65,56</b>	<b>69,53</b>	<b>13,69</b>	<b>13,43</b>	<b>9,05</b>	<b>8,17</b>	<b>11.885</b>	<b>6.655</b>	<b>72,45</b>	<b>64,59</b>	<b>89,15</b>
Halmahera Barat	63,56	67,42	12,62	13,07	8,61	7,49	10.586	5.634	68,73	60,62	88,20
Halmahera Tengah	60,87	64,63	13,09	12,67	9,01	8,32	10.380	6.204	68,10	60,96	89,52
Kepulauan Sula	60,67	64,42	12,66	12,23	8,69	8,20	9.099	6.430	65,92	60,73	92,13
Halmahera Selatan	63,22	67,06	12,56	12,15	8,18	6,79	10.583	5.415	67,98	58,35	85,83
Halmahera Utara	66,91	70,86	13,24	13,20	8,94	7,86	11.174	6.370	71,93	64,12	89,14

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Timur	65,81	69,77	13,04	12,59	8,39	7,51	12.195	4.359	71,37	58,02	81,29
Pulau Morotai	64,28	68,17	11,32	12,18	7,63	6,17	10.469	2.262	66,41	45,54	68,57
Pulau Taliabu	59,42	63,11	12,11	11,46	7,78	7,05	11.147	4.365	65,59	53,70	81,87
Kota Ternate	68,25	72,18	15,18	15,42	11,74	10,92	17.339	10.192	82,03	75,38	91,89
Kota Tidore Kepulauan	66,61	70,57	13,79	13,95	10,03	9,21	9.393	7.759	71,78	68,43	95,33
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>63,34</b>	<b>67,19</b>	<b>13,13</b>	<b>12,10</b>	<b>9,89</b>	<b>6,90</b>	<b>10.674</b>	<b>5.312</b>	<b>70,69</b>	<b>58,26</b>	<b>82,42</b>
Fak-Fak	65,91	69,88	13,61	14,89	10,00	7,42	10.634	4.489	72,53	60,37	83,23
Kaimana	62,03	65,84	12,14	11,18	9,71	6,68	10.971	5.337	69,13	56,58	81,85
Teluk Wondama	57,41	61,00	10,79	11,19	9,07	6,62	12.020	4.199	65,43	51,59	78,85
Teluk Bintuni	57,96	61,59	12,13	11,63	8,83	7,60	13.288	6.328	67,66	57,95	85,65
Manokwari	65,96	69,92	13,79	12,81	11,08	7,70	17.014	7.454	78,54	64,89	82,62
Sorong Selatan	63,64	67,50	12,90	11,86	9,59	6,87	7.452	3.889	66,52	54,24	81,54
Sorong	63,53	67,39	13,22	12,81	8,58	7,12	9.925	5.014	68,64	58,57	85,33
Raja Ampat	62,30	66,11	12,13	11,43	8,96	7,04	11.349	3.662	68,70	52,67	76,67
Tambrauw	57,44	61,04	11,89	10,30	7,14	4,22	7.979	2.333	60,44	40,19	66,50
Maybrat	62,95	66,67	13,93	12,16	8,79	5,85	7.172	3.138	65,82	50,09	76,10
Manokwari Selatan	64,94	68,86	12,21	12,60	9,38	5,58	8.689	1.948	67,91	42,55	62,66
Pegunungan Arfak	64,71	68,62	11,29	8,16	9,00	4,11	6.355	4.087	63,07	47,98	76,07
Kota Sorong	67,64	71,58	14,13	14,00	11,30	10,71	19.173	10.434	81,14	73,82	90,98
<b>PAPUA</b>	<b>63,45</b>	<b>67,00</b>	<b>10,65</b>	<b>10,24</b>	<b>7,02</b>	<b>5,44</b>	<b>10.562</b>	<b>4.008</b>	<b>64,55</b>	<b>51,24</b>	<b>79,38</b>
Merauke	64,80	68,46	12,98	12,06	8,61	7,93	16.424	8.031	73,80	64,54	87,45
Jayawijaya	56,84	60,40	12,37	10,28	6,86	4,16	8.189	5.326	60,53	50,12	82,80
Jayapura	64,61	68,36	14,17	13,84	9,98	8,60	14.525	9.067	75,43	68,25	90,48
Nabire	65,62	69,47	10,85	11,10	10,30	8,55	14.191	8.603	72,80	65,50	89,97
Yapen Waropen	66,78	70,63	12,11	11,80	9,56	7,79	11.191	6.585	71,49	62,96	88,07
Biak Namfor	65,93	69,80	14,05	13,57	10,37	8,90	14.401	8.695	76,39	68,60	89,80
Paniai	63,88	67,58	10,78	10,10	4,15	2,63	10.186	2.374	60,45	40,59	67,15
Puncak Jaya	62,44	66,26	6,23	6,44	5,34	3,04	8.401	2.090	53,98	34,78	64,43
Mimika	69,94	73,90	11,37	11,90	9,98	9,09	19.138	4.120	77,79	59,97	77,09
Boven Digoel	56,94	60,50	11,60	10,46	8,47	7,50	12.315	4.182	65,47	51,61	78,83
Mappi	62,34	66,15	10,61	10,42	6,68	5,55	9.620	4.452	62,67	52,50	83,77
Asmat	54,57	57,98	8,23	7,65	5,68	3,91	9.932	1.470	55,03	27,85	50,61

## Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perkapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Yahukimo	63,34	67,19	8,36	7,31	5,75	2,10	8.648	3.350	58,13	41,00	70,53
Pegunungan Bintang	62,06	65,74	5,61	5,23	4,02	2,06	8.210	4.471	50,32	40,17	79,83
Tolikara	63,12	66,97	8,16	7,58	4,70	2,08	8.612	1.802	56,08	32,40	57,77
Sarmi	63,83	67,70	12,30	11,07	9,12	7,47	9.820	4.514	68,41	56,18	82,12
Keerom	64,40	68,06	12,21	11,62	8,67	6,52	13.068	6.761	70,80	60,39	85,30
Waropen	63,83	67,70	12,68	12,55	9,31	7,96	10.879	2.497	70,03	49,11	70,13
Supiori	63,35	67,20	13,74	12,32	8,68	7,18	8.434	3.059	67,48	51,39	76,16
Membramo Raya	55,13	58,58	11,57	10,26	5,48	3,76	6.870	3.661	55,53	44,78	80,64
Nduga	52,92	56,19	3,44	2,27	1,36	0,58	3.949	4.417	31,76	26,82	84,45
Lanny Jaya	63,78	67,52	8,73	7,41	4,33	1,54	4.355	5.732	49,76	45,57	91,58
Mamberamo Tengah	60,98	64,75	8,85	7,54	4,38	1,58	4.506	4.681	49,32	43,08	87,35
Yalimo	63,12	66,80	9,07	8,10	4,15	2,12	7.265	4.500	54,89	45,17	82,29
Puncak	63,50	66,99	4,91	4,43	2,48	0,81	5.668	4.337	43,42	35,78	82,40
Dogiyai	63,14	66,99	9,48	10,36	5,38	4,06	8.156	3.347	58,35	47,36	81,17
Intan Jaya	63,21	66,96	7,73	5,75	4,17	1,32	7.508	3.178	53,45	36,57	68,42
Deiyai	62,66	66,49	10,76	9,47	3,93	1,70	6.530	2.412	55,46	38,65	69,69
Kota Jayapura	68,05	71,89	15,42	14,49	11,40	10,86	18.015	13.595	82,13	77,30	94,12
<b>INDONESIA</b>	<b>69,16</b>	<b>73,06</b>	<b>12,78</b>	<b>12,93</b>	<b>8,56</b>	<b>7,65</b>	<b>14.932</b>	<b>8.752</b>	<b>74,85</b>	<b>68,08</b>	<b>90,96</b>

## Lampiran 3. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi, 2010-2017

Nama Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07	91,89	91,67
Sumatera Utara	89,43	89,57	90,04	90,07	90,26	90,96	90,82	90,65
Sumatera Barat	91,98	92,82	92,98	93,02	94,04	94,74	94,42	94,16
Riau	85,17	85,74	86,29	86,74	87,62	87,75	88,04	88,17
Jambi	83,04	83,94	85,91	87,69	87,88	88,44	88,29	88,13
Sumatera Selatan	89,73	89,92	90,79	91,25	91,64	92,22	92,08	92,43
Bengkulu	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38	91,06	91,34
Lampung	87,18	88,23	88,49	88,84	89,62	89,89	90,30	90,49
Kepulauan Bangka Belitung	86,87	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37	88,90	88,93
Kepulauan Riau	92,05	92,11	92,23	92,81	93,20	93,22	93,13	92,96
DKI Jakarta	93,76	93,76	94,11	94,26	94,60	94,72	94,98	94,70
Jawa Barat	86,94	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11	89,56	89,18
Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94
DI Yogyakarta	92,82	93,56	93,73	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39
Jawa Timur	88,80	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	90,72	90,76
Banten	90,22	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11	90,97	91,14
Bali	90,90	91,67	92,78	93,00	93,32	92,71	93,20	93,70
Nusa Tenggara Barat	86,53	87,60	88,85	89,44	90,02	90,23	90,05	90,36
Nusa Tenggara Timur	90,06	90,66	91,47	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44
Kalimantan Barat	84,09	84,10	84,28	84,39	84,72	85,61	85,77	86,28
Kalimantan Tengah	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25	89,07	88,91
Kalimantan Selatan	88,00	88,09	88,33	88,33	88,46	88,55	88,86	88,60
Kalimantan Timur	83,00	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07	85,60	85,62
Kalimantan Utara				85,63	85,67	85,68	86,34	85,96
Sulawesi Utara	93,10	93,29	93,38	93,75	94,58	94,64	95,04	94,78
Sulawesi Tengah	91,23	91,70	91,77	91,84	92,69	92,25	91,91	91,66
Sulawesi Selatan	91,54	91,79	91,96	92,34	92,60	92,92	92,79	92,84
Sulawesi Tenggara	87,90	88,06	88,42	89,24	89,56	90,30	90,23	90,24
Gorontalo	83,26	84,19	84,54	84,57	85,09	85,87	86,12	86,64
Sulawesi Barat	87,53	87,60	87,90	88,56	89,18	89,52	89,35	89,44
Maluku	91,79	92,36	92,38	92,46	92,55	92,54	92,38	92,75
Maluku Utara	85,29	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86	89,15	89,15
Papua Barat	81,15	81,34	81,57	81,72	81,95	81,99	82,34	82,42
Papua	73,93	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52	79,09	79,38
<b>Indonesia</b>	<b>89,42</b>	<b>89,52</b>	<b>90,07</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>	<b>91,03</b>	<b>90,82</b>	<b>90,96</b>

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>ACEH</b>	<b>89,05</b>	<b>89,30</b>	<b>90,32</b>	<b>90,61</b>	<b>91,50</b>	<b>92,07</b>	<b>91,67</b>
Simeulue	68,59	71,22	72,51	74,55	75,55	76,19	76,72
Aceh Singkil	76,53	77,85	79,75	81,52	82,80	82,91	83,98
Aceh Selatan	88,87	89,15	90,10	90,57	90,82	91,01	91,46
Aceh Tenggara	89,55	89,74	90,27	90,64	91,52	91,65	92,77
Aceh Timur	83,20	84,67	84,75	84,77	84,92	85,42	86,03
Aceh Tengah	95,66	96,73	97,03	97,04	97,19	97,81	97,69
Aceh Barat	83,16	83,23	83,25	83,36	83,50	84,58	84,92
Aceh Besar	93,77	93,79	94,10	94,59	94,65	95,23	95,09
Pidie	92,76	93,39	93,72	93,77	94,33	94,54	94,03
Bireuen	91,41	91,44	91,63	93,56	94,86	95,63	95,15
Aceh Utara	89,99	90,21	90,92	92,23	92,41	92,52	92,77
Aceh Barat Daya	85,90	86,64	87,38	88,59	89,39	89,54	89,49
Gayo Lues	85,27	85,88	86,31	86,70	87,03	87,04	87,77
Aceh Tamiang	76,76	77,56	78,39	78,90	80,37	81,12	81,28
Nagan Raya	80,25	81,16	82,63	86,35	90,40	89,62	89,80
Aceh Jaya	77,12	79,42	83,31	85,59	88,06	88,08	88,46
Bener Meriah	91,68	94,14	95,31	96,36	96,44	96,46	96,35
Pidie Jaya	93,66	93,96	94,01	94,11	94,70	94,98	95,19
Kota Banda Aceh	93,49	94,22	94,79	94,94	95,30	95,83	95,40
Kota Sabang	93,32	93,95	94,09	94,60	96,31	96,05	95,83
Kota Langsa	94,92	95,01	95,16	96,03	96,31	96,34	95,70
Kota Lhokseumawe	91,72	92,11	92,36	93,15	93,76	94,62	94,60
Subulussalam	81,59	81,66	81,74	81,80	81,93	82,94	83,96
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>89,43</b>	<b>89,57</b>	<b>90,04</b>	<b>90,07</b>	<b>90,26</b>	<b>90,96</b>	<b>90,65</b>
Nias	75,89	80,71	83,10	86,63	88,66	89,01	90,33
Mandailing Natal	91,53	91,64	91,88	92,28	92,34	92,61	93,23
Tapanuli Selatan	88,26	88,69	89,33	90,83	91,14	91,42	91,07
Tapanuli Tengah	93,76	93,84	93,98	94,52	95,30	95,29	94,16
Tapanuli Utara	96,94	97,13	98,82	98,99	99,01	98,68	97,51
Toba Samosir	96,74	97,34	97,52	97,89	98,11	97,43	97,40
Labuhan Batu	85,25	85,56	87,55	88,02	90,84	90,73	90,79
Asahan	85,07	85,33	86,17	87,13	90,42	90,82	91,07

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Simalungun	88,37	89,29	90,48	91,06	92,78	92,84	92,59
Dairi	96,22	96,31	97,36	97,64	97,86	98,23	97,68
Karo	94,79	94,98	95,05	95,33	95,70	95,95	96,08
Deli Serdang	89,44	89,81	90,16	90,21	90,60	90,75	90,78
Langkat	85,11	85,92	86,75	87,03	87,80	88,42	88,77
Nias Selatan	84,91	85,39	85,72	86,03	86,29	86,89	87,38
Humbang Hasundutan	90,15	92,64	95,05	96,65	97,29	96,81	97,15
Pakpak Barat	96,34	97,15	98,08	99,02	99,34	99,52	98,98
Samosir	95,63	96,38	96,47	96,47	96,75	96,17	96,07
Serdang Bedagai	86,69	86,84	87,13	87,68	87,73	87,69	88,03
Batu Bara	77,40	77,97	78,89	79,58	80,50	81,55	82,65
Padang Lawas Utara	81,22	81,93	81,96	82,02	85,86	86,24	86,22
Padang Lawas	83,27	83,67	84,61	85,21	85,80	85,87	85,21
Labuhan Batu Selatan	84,69	85,39	85,92	85,95	86,40	86,95	87,29
Labuhan Batu Utara	85,60	88,80	89,17	89,48	90,02	89,47	89,34
Nias Utara		72,54	74,25	76,00	78,20	78,85	78,86
Nias Barat		81,94	82,51	82,77	84,52	84,56	85,53
Kota Sibolga	93,13	94,30	95,09	95,89	96,84	97,46	97,17
Kota Tanjung Balai	82,46	85,29	87,19	88,25	88,65	88,67	88,94
Kota Pematang Siantar	92,80	94,17	94,84	94,98	95,04	95,18	95,18
Kota Tebing Tinggi	92,30	92,61	92,97	93,20	93,25	93,45	93,23
Kota Medan	91,87	92,34	92,40	92,91	93,10	93,16	93,34
Kota Binjai	87,95	89,19	89,72	89,95	90,81	90,79	90,76
Kota Padang Sidempuan	95,56	96,24	96,57	97,29	97,63	97,09	97,16
Gunung Sitoli		82,46	86,22	87,69	89,41	89,58	89,46
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>91,98</b>	<b>92,82</b>	<b>92,98</b>	<b>93,02</b>	<b>94,04</b>	<b>94,74</b>	<b>94,16</b>
Kepulauan Mentawai	86,77	87,63	88,04	88,45	89,15	89,31	89,13
Pesisir Selatan	93,20	93,38	93,60	93,62	95,23	95,23	94,98
Solok	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45	95,73	95,73
Sawah Lunto/Sijunjung	90,00	90,46	90,47	91,08	92,24	92,34	93,40
Tanah Datar	93,59	97,05	97,43	97,62	97,72	98,44	98,51
Padang Pariaman	92,33	92,34	92,53	92,90	93,04	93,15	93,79
Agam	94,54	94,89	96,38	96,68	96,69	97,04	97,16

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota



## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Limapuluh Koto	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77	95,50	94,62
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88	92,95	93,00
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84	95,33	94,54
Dharmas Raya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29	88,43
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41	88,44	88,97
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23	93,77	93,77
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51	96,62	96,70
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40	95,52	95,50
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37	98,56	97,76
Kota Bukit Tinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21	99,75	98,78
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47	98,52	98,53
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58	98,72	98,95
<b>RIAU</b>	<b>85,17</b>	<b>85,74</b>	<b>86,29</b>	<b>86,74</b>	<b>87,62</b>	<b>87,75</b>	<b>88,17</b>
Kuantan Sengingi	79,03	79,64	83,98	86,64	87,81	88,90	89,71
Indragiri Hulu	82,52	82,88	83,54	84,62	86,27	86,33	86,58
Indragiri Hilir	78,81	79,24	79,47	80,05	80,99	81,10	81,80
Pelalawan	83,07	83,52	84,59	85,06	87,83	87,81	88,50
Siak	87,93	88,41	88,85	89,05	89,30	89,02	88,41
Kampar	87,77	88,18	88,27	88,46	88,78	89,17	89,22
Rokan Hulu	78,25	79,00	79,15	79,35	79,36	79,79	81,84
Bengkalis	82,49	85,88	86,67	87,59	88,86	88,87	89,81
Rokan Hilir	82,29	82,73	82,79	83,93	84,30	84,29	84,73
Kepulauan Meranti		84,12	84,14	84,21	84,37	84,42	85,30
Kota Pekanbaru	90,63	90,76	90,77	91,00	91,83	92,36	92,86
Kota Dumai	84,88	88,62	88,82	89,01	89,35	89,74	90,52
<b>JAMBI</b>	<b>83,04</b>	<b>83,94</b>	<b>85,91</b>	<b>87,69</b>	<b>87,88</b>	<b>88,44</b>	<b>88,13</b>
Kerinci	82,06	82,59	83,77	85,36	85,77	85,72	85,97
Merangin	79,91	80,83	86,73	87,54	87,93	87,12	87,64
Sarolangun	85,35	86,08	86,65	87,87	90,28	90,62	90,44
Batanghari	80,43	82,20	82,35	82,64	83,67	83,93	84,18
Muara Jambi	75,97	76,28	76,89	77,45	78,01	78,41	79,41
Tanjung Jabung Timur	77,93	78,09	79,18	82,32	85,07	84,68	86,56
Tanjung Jabung Barat	80,28	80,61	83,31	83,58	83,74	84,81	85,44

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Tebo	86,63	86,80	86,88	87,01	90,31	91,31	90,06
Bungo	80,72	80,74	83,84	85,63	88,10	88,15	88,15
Kota Jambi	88,71	90,68	91,76	93,05	94,55	94,67	94,45
Kota Sungai Penuh	87,72	89,42	90,41	92,70	93,44	93,82	93,98
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>89,73</b>	<b>89,92</b>	<b>90,79</b>	<b>91,25</b>	<b>91,64</b>	<b>92,22</b>	<b>92,43</b>
Ogan Komering Ulu	86,67	86,83	87,01	89,43	93,23	93,26	93,46
Ogan Komering Ilir	87,34	88,38	89,01	89,22	89,70	90,25	91,08
Muara Enim (Liot)	84,01	84,21	85,24	86,53	88,59	89,47	89,32
Lahat	92,04	92,17	93,05	93,90	94,67	94,68	94,80
Musi Rawas	83,39	83,99	84,25	84,58	85,08	85,04	85,12
Musi Banyuasin	74,03	74,06	78,02	78,13	81,24	81,66	81,97
Banyuasin	84,63	85,22	87,24	87,37	87,84	88,69	88,97
Ogan Komering Ulu Selatan	86,18	87,30	87,70	89,68	91,75	91,82	92,12
Ogan Komering Ulu Timur	88,68	90,67	92,08	92,41	92,43	92,72	93,84
Ogan Ilir	94,10	95,62	98,01	98,48	98,73	98,64	98,15
Empat Lawang	89,87	90,02	90,29	91,01	91,59	91,71	92,95
Penukal Abab Lematang Ilir				89,85	92,34	92,37	92,19
Musi Rawas Utara				92,71	92,81	92,84	92,86
Kota Palembang	92,78	92,82	93,16	94,47	95,47	95,63	95,56
Kota Prabumulih	84,74	88,73	89,48	90,90	91,22	92,04	92,72
Kota Pagar Alam	92,30	92,80	92,83	92,98	93,23	93,43	93,82
Kota Lubuk Linggau	91,73	92,90	94,76	95,51	95,78	95,85	95,74
<b>BENGKULU</b>	<b>88,88</b>	<b>89,47</b>	<b>90,51</b>	<b>90,55</b>	<b>91,02</b>	<b>91,38</b>	<b>91,34</b>
Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00	94,42	93,74
Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55	92,85	94,15
Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32	91,39	91,00
Kaur	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66	86,21	86,91
Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80	84,98	85,20
Mukomuko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25	84,28	83,98
Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11	91,12	90,64
Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99	94,66	94,69
Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68	85,07	85,77
Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71	95,64	96,36

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>LAMPUNG</b>	<b>87,18</b>	<b>88,23</b>	<b>88,49</b>	<b>88,84</b>	<b>89,62</b>	<b>89,89</b>	<b>90,49</b>
Lampung Barat	89,94	90,81	91,04	91,29	91,54	91,65	92,47
Tanggamus	88,06	88,43	88,99	89,35	89,61	89,79	90,71
Lampung Selatan	86,67	86,99	87,80	88,37	88,82	88,89	89,52
Lampung Timur	86,37	86,97	87,09	87,28	87,42	87,51	87,85
Lampung Tengah	87,75	87,76	87,95	88,97	88,99	89,08	89,23
Lampung Utara	86,72	86,98	87,19	87,48	87,69	87,85	88,69
Way Kanan	79,09	84,14	87,11	87,28	87,45	87,54	87,85
Tulang Bawang	82,79	82,99	85,11	86,99	87,39	88,08	88,51
Pesawaran	83,33	83,87	84,19	84,70	85,33	86,13	87,25
Pringsewu		91,68	91,91	91,95	92,27	92,37	92,26
Mesuji		80,50	80,69	81,16	83,36	84,38	83,82
Tulang Bawang Barat		82,25	83,37	87,09	87,42	87,93	88,08
Pesisir Barat				90,67	92,18	92,07	92,84
Kota Bandar Lampung	92,25	92,59	92,78	93,00	93,25	93,69	93,53
Kota Metro	91,89	92,46	92,61	92,86	94,61	94,64	94,97
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>86,87</b>	<b>87,10</b>	<b>87,54</b>	<b>87,73</b>	<b>87,74</b>	<b>88,37</b>	<b>88,93</b>
Bangka	85,32	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	88,14
Belitung	85,48	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	87,99
Bangka Barat	87,04	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	89,41
Bangka Tengah	88,50	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	90,83
Bangka Selatan	78,24	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	83,48
Belitung Timur	83,81	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	86,04
Kota Pangkal Pinang	91,92	92,05	92,08	92,30	92,47	93,09	92,80
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>92,05</b>	<b>92,11</b>	<b>92,23</b>	<b>92,81</b>	<b>93,20</b>	<b>93,22</b>	<b>92,96</b>
Karimun	89,80	89,90	89,95	91,14	91,16	91,18	91,35
Bintan	90,75	91,03	91,18	91,50	92,15	92,41	92,58
Natuna	89,60	90,06	90,80	90,83	90,84	90,85	91,31
Lingga	86,94	87,46	88,03	88,10	88,59	89,11	89,73
Kepulauan Anambas	87,31	87,47	87,60	87,62	89,11	89,25	89,97
Kota Batam	93,27	93,60	93,64	93,95	94,45	94,62	94,21
Kota Tanjung Pinang	94,45	94,89	95,43	95,57	96,54	96,58	96,46

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>93,76</b>	<b>93,76</b>	<b>94,11</b>	<b>94,26</b>	<b>94,60</b>	<b>94,72</b>	<b>94,70</b>
Kep. Seribu	88,05	88,20	89,42	92,40	92,60	92,49	93,24
Kota Jakarta Selatan	92,75	93,02	94,27	94,73	94,99	95,08	95,71
Kota Jakarta Timur	93,45	93,72	93,76	93,79	94,09	94,21	94,59
Kota Jakarta Pusat	94,35	94,95	95,60	95,90	96,21	96,01	95,52
Kota Jakarta Barat	94,38	94,81	94,89	95,03	95,06	95,23	95,38
Kota Jakarta Utara	92,59	93,14	93,20	93,24	93,36	93,19	93,38
<b>JAWA BARAT</b>	<b>86,94</b>	<b>87,12</b>	<b>87,79</b>	<b>88,21</b>	<b>88,35</b>	<b>89,11</b>	<b>89,18</b>
Bogor	84,97	85,55	85,93	86,10	86,41	87,13	88,69
Sukabumi	81,35	82,16	83,36	85,46	86,17	86,68	86,90
Cianjur	77,21	77,57	79,81	82,03	82,66	82,82	83,56
Bandung	91,18	91,40	92,18	92,48	93,18	93,32	93,43
Garut	73,98	75,62	77,42	79,83	81,25	81,33	81,96
Tasikmalaya	77,71	78,24	79,03	82,53	84,47	84,67	85,63
Ciamis	80,24	82,54	83,06	84,48	85,19	85,20	85,60
Kuningan	81,25	81,28	84,75	85,46	85,65	85,77	86,34
Cirebon	68,85	79,23	79,42	80,40	81,64	81,95	82,51
Majalengka	81,57	82,17	82,36	83,76	84,09	84,96	85,43
Sumedang	82,94	83,32	83,36	83,77	94,36	94,37	94,60
Indramayu	85,02	85,08	85,37	85,96	86,75	87,46	87,91
Subang	85,25	85,79	86,49	87,08	89,68	89,71	90,52
Purwakarta	84,48	84,55	84,64	85,37	86,25	86,56	87,18
Karawang	84,83	85,40	88,53	88,89	89,69	89,60	90,42
Bekasi	84,70	85,37	86,32	86,50	86,55	87,40	88,00
Bandung Barat	74,59	74,85	75,19	76,25	77,94	78,23	79,11
Pangandaran				88,70	88,95	89,14	89,30
Kota Bogor	89,14	89,63	90,24	90,31	90,38	90,82	90,90
Kota Sukabumi	88,80	89,02	89,56	89,84	90,57	90,72	90,95
Kota Bandung	92,44	92,97	93,93	94,15	94,42	94,95	95,03
Kota Cirebon	89,46	89,74	90,61	91,83	93,23	93,76	93,94
Kota Bekasi	90,92	92,10	92,72	92,81	92,94	92,99	93,09
Kota Depok	89,47	89,93	90,76	91,46	91,94	92,56	93,05

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Kota Cimahi	88,64	89,06	89,67	90,63	92,11	92,23	92,33
Kota Tasikmalaya	86,67	86,76	88,01	88,73	90,22	90,73	91,06
Kota Banjar	83,80	84,02	84,34	84,53	85,41	85,98	86,93
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>90,32</b>	<b>90,92</b>	<b>91,12</b>	<b>91,50</b>	<b>91,89</b>	<b>92,21</b>	<b>91,94</b>
Cilacap	84,50	85,15	85,78	85,83	86,16	86,04	86,14
Banyumas	85,14	86,07	86,25	86,53	86,54	86,66	87,62
Purbalingga	87,61	88,51	88,93	89,12	90,12	90,74	92,31
Banjarnegara	90,93	91,26	91,64	92,51	94,97	94,98	95,02
Kebumen	91,07	91,74	92,26	92,70	92,81	93,48	92,68
Purworejo	92,51	92,59	93,12	93,43	93,94	94,17	95,26
Wonosobo	89,13	90,04	91,15	91,67	92,51	92,91	92,61
Magelang	89,13	91,02	92,16	92,20	92,79	92,91	91,95
Boyolali	91,54	91,91	92,19	92,52	92,76	93,97	92,96
Klaten	93,02	93,12	94,69	95,16	95,90	96,42	96,54
Sukoharjo	94,85	95,16	95,34	95,53	96,34	96,55	96,98
Wonogiri	87,71	88,10	89,47	89,81	89,87	90,30	90,70
Karanganyar	93,32	93,83	95,42	95,71	96,08	96,15	96,50
Sragen	91,38	91,91	91,93	92,04	92,13	92,29	91,89
Grobogan	82,83	83,85	85,04	85,28	85,44	85,50	85,69
Blora	80,72	81,34	82,26	82,55	82,66	83,54	83,55
Rembang	84,99	85,12	85,57	85,72	86,04	85,87	86,18
Pati	89,25	89,28	89,31	89,43	89,99	91,06	91,98
Kudus	88,78	89,99	90,26	90,33	90,82	91,56	92,68
Jepara	88,21	88,78	89,64	90,19	91,21	91,29	90,39
Demak	87,93	88,49	88,90	88,98	89,28	89,16	90,45
Semarang	93,96	94,71	94,83	95,17	95,43	95,52	96,48
Temanggung	91,69	92,08	92,32	94,81	94,97	94,75	96,00
Kendal	92,49	92,71	92,87	93,14	93,22	93,21	93,25
Batang	86,90	88,66	88,98	89,90	90,79	90,99	90,49
Pekalongan	91,04	91,12	91,45	91,65	91,88	91,84	92,68
Pemalang	80,08	80,51	83,13	83,51	83,85	84,46	85,47
Tegal	78,53	84,09	84,55	85,78	86,76	87,03	87,52
Brebes	84,17	84,43	84,59	85,58	85,60	85,66	85,86
Kota Magelang	94,16	94,83	95,14	95,36	95,45	95,81	96,26

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Kota Surakarta	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,38	96,74
Kota Salatiga	94,31	94,64	94,81	94,91	95,53	96,02	95,34
Kota Semarang	92,66	93,58	94,17	95,17	95,56	95,62	95,69
Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71	94,43
Kota Tegal	89,10	90,24	90,89	91,26	92,10	92,81	92,92
<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>92,82</b>	<b>93,56</b>	<b>93,73</b>	<b>94,15</b>	<b>94,31</b>	<b>94,41</b>	<b>94,39</b>
Kulon Progo	91,91	92,73	93,27	94,23	94,65	94,73	94,93
Bantul	93,37	93,48	93,78	94,33	94,41	94,42	94,98
Gunung Kidul	81,29	81,33	81,42	81,76	82,27	83,10	84,03
Sleman	92,96	94,22	94,75	95,50	96,09	96,08	95,62
Kota Yogyakarta	97,91	97,92	98,16	98,48	99,27	98,78	98,26
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>88,80</b>	<b>89,28</b>	<b>89,36</b>	<b>90,22</b>	<b>90,83</b>	<b>91,07</b>	<b>90,76</b>
Pacitan	72,58	76,56	79,84	82,12	83,76	84,19	84,41
Ponorogo	92,63	93,06	93,08	93,19	93,85	93,91	93,30
Trenggalek	89,78	90,79	90,83	91,04	92,58	92,22	91,84
Tulungagung	92,84	93,28	93,39	94,12	95,11	95,07	95,30
Blitar	89,30	89,77	90,04	91,14	92,81	92,96	92,50
Kediri	90,85	91,50	91,50	91,80	91,98	91,99	92,81
Malang	87,13	87,45	87,48	87,68	87,89	88,38	88,33
Lumajang	80,91	82,59	84,15	87,18	89,08	88,15	87,72
Jember	81,75	82,61	83,07	83,44	83,74	83,55	84,32
Banyuwangi	82,36	83,14	83,65	84,05	85,06	86,01	86,20
Bondowoso	85,38	87,50	87,59	88,58	88,79	89,59	89,48
Situbondo	81,64	83,63	83,86	84,08	86,64	87,16	86,78
Probolinggo	81,49	82,09	82,33	82,44	83,40	83,90	84,57
Pasuruan	87,46	87,82	87,92	89,88	89,95	90,11	90,65
Sidoarjo	90,84	91,80	92,21	93,53	94,20	94,28	93,33
Mojokerto	87,52	88,69	89,82	90,28	90,46	90,27	90,39
Jombang	86,48	87,24	87,92	88,47	89,35	89,42	89,91
Nganjuk	90,83	91,69	91,86	92,23	93,48	93,55	93,48
Madiun	90,53	90,73	90,93	90,99	91,53	91,57	91,61
Magetan	91,17	92,18	92,59	92,80	93,50	93,64	93,20
Ngawi	90,99	91,33	91,40	91,69	92,03	92,01	91,70
Bojonegoro	87,56	88,36	88,60	88,92	89,24	89,38	89,78

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Tuban	86,68	86,76	87,13	87,65	87,78	87,83	87,32
Lamongan	81,41	82,85	84,78	85,62	87,21	87,58	87,98
Gresik	87,96	87,98	88,60	88,88	89,01	89,31	89,57
Bangkalan	80,73	81,67	83,55	84,96	85,52	86,52	86,92
Sampang	76,85	78,55	80,15	81,16	82,62	83,57	84,15
Pamekasan	80,60	82,27	82,72	83,43	84,68	85,26	85,68
Sumenep	70,84	73,92	75,71	77,14	78,63	78,70	79,65
Kota Kediri	93,26	94,14	94,64	95,05	95,15	95,29	94,64
Kota Blitar	97,37	97,60	97,63	97,74	98,23	98,23	97,91
Kota Malang	92,94	94,01	94,51	94,98	94,99	95,73	94,96
Kota Probolinggo	93,54	94,64	95,71	96,27	96,74	96,65	96,07
Kota Pasuruan	95,02	95,42	95,42	95,46	96,30	96,32	96,36
Kota Mojokerto	92,13	92,71	92,97	93,05	93,27	93,67	93,40
Kota Madiun	90,93	91,68	91,84	92,15	92,81	92,95	93,66
Kota Surabaya	93,27	93,35	93,49	93,64	93,65	94,20	93,66
Kota Batu	85,75	86,17	86,74	87,25	89,22	89,47	89,27
<b>BANTEN</b>	<b>90,22</b>	<b>90,22</b>	<b>90,28</b>	<b>90,31</b>	<b>90,99</b>	<b>91,11</b>	<b>91,14</b>
Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88	86,13
Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,80	78,56
Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72	91,20
Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77	92,28
Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,90	94,03	94,07
Kota Cilegon	85,08	85,25	85,40	86,14	86,75	86,64	86,35
Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,40	91,15
Kota Tangerang Selatan		92,09	92,90	93,04	93,13	93,14	92,83
<b>BALI</b>	<b>90,90</b>	<b>91,67</b>	<b>92,78</b>	<b>93,00</b>	<b>93,32</b>	<b>92,71</b>	<b>93,70</b>
Jembrana	89,42	91,60	91,65	91,96	92,05	92,06	92,65
Tabanan	94,27	94,37	94,42	95,40	95,57	94,67	95,13
Badung	91,32	93,25	93,89	94,68	94,88	94,56	94,52
Gianyar	91,63	92,20	92,52	92,54	92,77	92,92	93,61
Klungkung	86,79	88,31	89,37	89,83	89,98	90,34	91,03
Bangli	86,26	88,83	89,19	91,08	91,49	91,92	90,72
Karangasem	84,10	86,60	87,09	88,29	88,38	88,00	89,02
Buleleng	88,00	89,40	90,10	90,30	90,54	90,97	91,40
Kota Denpasar	95,37	95,41	95,85	96,00	96,55	96,07	96,88

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>86,53</b>	<b>87,60</b>	<b>88,85</b>	<b>89,44</b>	<b>90,02</b>	<b>90,23</b>	<b>90,36</b>
Lombok Barat	84,31	86,01	87,24	87,85	88,18	88,18	88,93
Lombok Tengah	81,07	83,38	84,00	85,67	86,65	86,48	86,40
Lombok Timur	88,82	89,30	89,48	89,56	90,28	90,84	91,12
Sumbawa	86,78	90,21	92,39	93,23	93,97	94,18	93,40
Dompu	86,89	88,00	88,78	90,59	91,26	90,36	90,54
Bima	88,01	89,74	90,53	90,61	91,14	91,27	91,08
Sumbawa Barat	83,00	85,32	87,40	88,95	91,73	92,18	92,38
Lombok Utara	81,77	82,76	83,74	83,86	83,92	84,01	85,34
Kota Mataram	89,40	89,60	89,83	90,48	92,13	92,35	92,66
Kota Bima	93,62	94,14	95,74	96,93	97,47	96,62	96,15
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>90,06</b>	<b>90,66</b>	<b>91,47</b>	<b>91,74</b>	<b>92,76</b>	<b>92,91</b>	<b>92,44</b>
Sumba Barat	92,08	92,15	94,48	94,82	95,02	94,57	94,12
Sumba Timur	93,09	94,05	94,38	95,08	95,40	95,97	96,11
Kupang	73,96	75,30	84,76	86,24	87,31	87,47	87,73
Timor Tengah Selatan	89,18	90,13	92,14	93,32	94,61	94,48	94,79
Timor Tengah Utara	86,91	89,65	93,61	94,14	96,09	96,07	95,87
Belu	86,50	87,77	91,65	93,80	97,68	97,95	97,07
Alor	88,90	89,61	90,88	91,62	92,37	92,87	92,67
Lembata	87,29	87,31	89,75	90,88	91,83	92,18	92,04
Flores Timur	88,37	89,15	89,63	89,71	90,44	90,64	90,49
Sikka	86,75	86,99	87,15	87,46	88,80	89,25	88,64
Ende	93,28	93,71	94,07	94,59	95,06	95,22	95,52
Ngada	93,75	94,00	94,13	94,23	95,27	95,78	96,06
Manggarai	84,49	85,43	86,01	86,32	86,77	86,88	87,38
Rote Nda	80,74	80,91	81,27	83,48	83,51	84,38	83,86
Manggarai Barat	80,35	82,56	85,35	87,18	87,57	87,55	87,38
Sumba Tengah	90,26	90,32	90,40	90,49	90,66	90,65	90,25
Sumba Barat Daya	95,14	95,67	95,80	98,64	98,66	98,42	98,20
Nageko	95,54	95,94	96,67	96,77	97,48	97,32	98,93
Manggarai Timur	79,50	79,94	82,60	85,69	90,16	90,54	90,76
Sabu Raijua		89,77	90,83	91,52	91,71	91,79	92,18
Malaka				88,23	88,43	89,01	89,90
Kota Kupang	92,93	93,23	93,34	93,56	95,13	95,31	95,23

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota



## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>84,09</b>	<b>84,10</b>	<b>84,28</b>	<b>84,39</b>	<b>84,72</b>	<b>85,61</b>	<b>86,28</b>
Sambas	83,91	84,01	84,58	85,89	87,30	87,36	87,06
Bengkayang	80,84	81,19	81,40	81,61	81,89	81,81	82,81
Landak	84,44	85,83	86,28	86,47	86,68	87,04	87,87
Pontianak	82,22	83,19	84,93	85,76	86,61	87,43	86,98
Sanggau	65,12	65,31	65,49	65,89	79,55	80,07	80,38
Ketapang	78,36	80,83	81,61	82,78	86,30	86,79	87,84
Sintang	75,24	79,31	82,59	84,98	85,34	85,44	85,97
Kapuas Hulu	79,66	80,85	81,75	82,39	83,77	83,92	84,45
Sekadau	74,42	77,00	78,85	79,46	82,49	82,52	81,82
Melawai	69,43	72,76	75,75	77,90	79,20	79,80	79,79
Kayong Utara	70,16	76,60	81,59	83,26	84,82	84,80	85,14
Kubu Raya	80,70	81,50	82,48	82,72	82,74	82,90	84,05
Kota Pontianak	91,51	92,41	92,60	92,69	93,03	93,08	93,60
Kota Singkawang	88,58	88,96	90,23	90,43	91,95	92,43	91,98
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>88,02</b>	<b>88,11</b>	<b>88,13</b>	<b>88,47</b>	<b>89,33</b>	<b>89,25</b>	<b>88,91</b>
Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04	91,76
Kotawaringin Timur	81,90	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79	87,73
Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65	96,59
Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34	93,02
Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,50	85,62	85,16
Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09	91,24
Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55	91,97
Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42	88,64
Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78	85,51
Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25	91,70
Gunung Mas	81,57	84,90	88,16	90,99	91,80	92,00	91,74
Barito Timur	86,37	86,50	86,79	87,38	87,75	88,16	88,36
Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31	82,92
Kota Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,80	94,30	94,42
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>88,00</b>	<b>88,09</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>	<b>88,46</b>	<b>88,55</b>	<b>88,60</b>
Tanah Laut	80,63	83,41	85,49	86,88	87,68	87,50	87,53
Kota Baru	79,55	79,63	80,18	80,85	81,75	82,35	83,50
Banjar	88,73	89,33	91,06	91,28	92,17	92,11	91,85

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Barito Kuala	82,13	82,30	86,57	88,24	88,63	88,80	88,63
Tapin	82,29	82,51	82,88	83,41	83,54	83,80	83,87
Hulu Sungai Selatan	87,10	87,52	87,67	87,93	89,34	89,36	89,07
Hulu Sungai Tengah	93,47	94,50	95,35	95,99	96,82	97,61	96,89
Hulu Sungai Utara	90,60	90,68	91,42	91,53	92,17	92,05	92,36
Tabalong	83,04	83,09	83,27	84,49	84,76	84,80	85,15
Tanah Bumbu	78,58	79,01	79,94	80,86	84,10	83,80	84,42
Balangan	82,16	91,40	91,52	91,66	92,25	92,56	92,31
Kota Banjarmasin	91,50	91,62	91,88	92,11	92,38	93,31	93,28
Kota Banjar Baru	90,37	90,55	91,06	91,86	92,11	92,22	92,17
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>83,00</b>	<b>83,18</b>	<b>84,33</b>	<b>84,69</b>	<b>84,75</b>	<b>85,07</b>	<b>85,62</b>
Pasir	65,78	66,44	66,86	67,82	68,58	68,66	69,78
Kutai Barat	77,91	78,28	80,91	82,87	83,01	82,51	83,30
Kutai	72,98	73,29	74,92	76,13	76,92	77,22	78,54
Kutai Timur	72,55	72,64	73,54	74,17	74,90	74,94	75,48
Berau	81,82	83,49	85,76	86,27	87,23	87,37	87,77
Penajam Paser Utara	82,01	82,05	82,87	84,71	85,97	86,26	86,31
Mahakam Ulu				76,65	78,04	78,31	79,82
Kota Balikpapan	85,81	86,22	86,72	87,14	90,05	89,97	89,74
Kota Samarinda	87,65	87,82	88,03	88,71	89,26	89,44	89,26
Kota Bontang	79,76	82,17	84,25	85,47	86,31	85,84	86,44
<b>KALIMANTAN UTARA</b>				<b>85,63</b>	<b>85,67</b>	<b>85,68</b>	<b>85,96</b>
Malinau	78,35	79,20	79,77	80,18	80,61	80,66	81,02
Bulongan	73,56	73,60	76,55	78,71	85,18	84,96	84,74
Tana Tidung	75,06	75,12	75,20	77,04	77,51	77,71	77,37
Nunukan	71,81	77,04	80,24	80,99	81,43	81,50	82,15
Kota Tarakan	86,84	87,34	88,50	90,31	90,76	90,61	91,23
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>93,10</b>	<b>93,29</b>	<b>93,38</b>	<b>93,75</b>	<b>94,58</b>	<b>94,64</b>	<b>94,78</b>
Bolaang Mongondow	85,79	86,31	86,80	87,11	87,26	87,29	87,72
Minahasa	94,04	95,17	96,21	97,11	97,14	96,75	96,22
Kep.Sangihe Talaud	97,15	97,22	97,23	97,33	97,35	97,37	96,10
Kepulauan Talaud	96,48	97,11	97,35	97,37	97,60	97,61	97,18
Minahasa Selatan	87,11	87,13	87,18	87,35	87,42	87,47	88,53
Minahasa Utara	95,11	95,39	95,66	95,87	97,22	97,26	96,26

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Bolaang Mongondow Utara	74,66	78,42	81,84	84,27	85,90	85,83	85,46
Kep. Siau Tagulandang Biaro	86,23	86,80	87,10	87,15	87,22	87,22	87,64
Minahasa Tenggara	84,72	86,92	88,79	89,84	91,45	91,48	91,81
Bolaang Mongondow Selatan	53,49	62,63	69,23	73,91	77,81	77,97	78,34
Bolaang Mongondow Timur	87,66	88,96	89,82	89,87	90,55	90,28	90,50
Kota Manado	95,83	95,85	95,98	96,04	96,09	96,29	95,96
Kota Bitung	93,03	93,44	93,67	93,85	94,46	94,26	94,87
Kota Tomohon	98,21	98,43	98,54	98,61	99,17	99,30	98,98
Kota Kotamobago	92,30	92,91	93,76	94,13	94,29	94,34	94,78
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>91,23</b>	<b>91,70</b>	<b>91,77</b>	<b>91,84</b>	<b>92,69</b>	<b>92,25</b>	<b>91,66</b>
Banggai Kepulauan	85,64	87,61	88,20	89,97	90,60	90,90	91,83
Banggai	90,45	90,57	90,91	90,92	91,26	91,25	90,64
Morowali	83,64	83,86	84,63	84,81	84,98	84,92	84,83
Poso	93,35	93,51	94,11	95,75	98,93	98,25	97,11
Donggala	82,00	82,12	82,66	85,19	86,49	86,81	87,66
Toli-Toli	81,45	83,20	86,03	87,73	89,93	89,97	89,70
Buol	85,40	88,39	88,52	88,56	89,08	89,09	89,12
Parigi Moutong	88,40	89,13	90,52	90,54	91,12	91,13	92,46
Tojo Una-Una	90,26	91,58	91,82	92,24	92,38	92,01	91,47
Sigi	91,96	92,04	92,34	92,42	92,99	93,15	92,98
Banggai Laut				90,83	90,93	91,17	91,56
Morowali Utara				94,70	96,64	96,68	96,58
Kota Palu	96,26	97,13	97,45	97,88	98,24	97,98	97,69
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>91,54</b>	<b>91,79</b>	<b>91,96</b>	<b>92,34</b>	<b>92,60</b>	<b>92,92</b>	<b>92,84</b>
Selayar	89,28	89,78	90,76	91,16	91,37	91,82	90,97
Bulukumba	90,09	91,14	92,62	94,46	95,74	96,08	96,56
Bantaeng	95,67	96,24	96,56	96,62	96,86	96,38	95,28
Jeneponto	87,85	88,34	88,35	88,85	90,16	90,17	90,94
Takalar	81,08	82,45	84,06	85,57	86,91	87,37	86,76
Gowa	79,63	82,37	84,36	85,24	87,85	87,92	87,69
Sinjai	97,77	97,94	98,48	98,51	98,52	98,61	98,01
Maros	86,33	86,53	87,72	88,21	88,61	88,84	88,91
Pangkajene Kepulauan	86,77	87,75	88,58	89,45	89,74	89,75	89,26

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Barru	94,24	94,74	95,09	95,11	95,36	95,02	95,51
Bone	89,47	89,71	89,90	90,71	91,37	91,93	92,65
Soppeng	97,73	98,61	98,89	98,90	98,96	98,42	97,43
Wajo	87,46	87,51	88,07	88,28	88,86	89,10	89,90
Sidenreng Rappang	89,51	89,59	90,27	90,46	91,50	91,51	92,21
Pinrang	92,54	92,79	92,82	93,11	94,89	94,73	95,44
Enrekang	96,35	96,75	97,09	98,00	98,08	97,95	98,12
Luwu	90,15	90,22	91,56	91,69	91,88	91,89	92,52
Tana Toraja	85,22	85,45	85,79	85,98	86,38	86,57	87,18
Luwu Utara	87,54	87,66	87,98	88,21	88,55	88,68	88,87
Luwu Timur	87,35	87,79	88,01	88,61	89,02	89,31	89,49
Toraja Utara	83,15	84,25	84,56	84,61	85,04	85,61	86,03
Kota Makasar	92,94	93,32	93,33	93,40	93,58	93,96	94,70
Kota Pare Pare	96,28	96,59	96,69	97,05	97,27	97,29	97,47
Kota Palopo	91,05	94,07	95,48	95,66	96,81	97,20	97,57
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>87,90</b>	<b>88,06</b>	<b>88,42</b>	<b>89,24</b>	<b>89,56</b>	<b>90,30</b>	<b>90,24</b>
Buton	76,39	77,05	77,38	77,62	77,71	78,26	78,39
Muna	85,20	85,30	85,37	86,42	87,20	87,38	87,34
Konawe/Kab Kendari	91,12	91,25	91,44	92,39	93,07	93,08	93,12
Kolaka	86,21	87,13	88,37	89,16	89,17	89,55	89,77
Konawe Selatan	84,05	84,29	84,43	84,97	88,35	88,46	87,26
Bombana	82,44	82,50	82,64	82,76	82,93	82,98	83,71
Wakatobi	87,26	87,31	87,78	88,64	88,91	88,94	88,23
Kolaka Utara	95,48	95,93	95,96	96,53	97,24	97,88	97,55
Konawe Utara	84,71	85,72	87,06	90,00	92,34	92,37	91,94
Buton Utara	84,79	85,76	86,08	86,12	86,18	85,79	85,44
Kolaka Timur				91,67	98,45	98,02	98,15
Konawe Kepulauan				80,88	82,80	82,93	83,71
Muna Barat					89,71	89,65	88,13
Buton Tengah					77,41	78,11	78,57
Buton Selatan					71,63	71,69	72,21
Kota Kendari	92,27	92,34	93,13	93,31	93,87	94,20	94,57
Kota Bau-Bau	89,22	89,87	89,99	90,29	90,46	90,54	90,64

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
<b>GORONTALO</b>	<b>83,26</b>	<b>84,19</b>	<b>84,54</b>	<b>84,57</b>	<b>85,09</b>	<b>85,87</b>	<b>86,64</b>
Boalemo	69,40	72,43	75,05	77,63	78,92	79,32	80,36
Gorontalo	66,57	71,44	74,44	77,32	79,23	80,13	80,98
Pokuwato	86,14	87,88	88,72	89,32	90,32	90,57	91,31
Bone Bolango	78,03	80,79	82,57	84,40	85,99	86,00	86,71
Gorontalo Utara	68,67	72,02	74,85	77,89	79,85	79,99	80,44
Kota Gorontalo	80,60	82,01	82,84	84,37	85,17	85,51	86,09
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>87,53</b>	<b>87,60</b>	<b>87,90</b>	<b>88,56</b>	<b>89,18</b>	<b>89,52</b>	<b>89,44</b>
Majene	92,78	93,26	93,89	94,00	94,14	94,19	94,67
Polewali Mamasa	89,51	89,88	89,97	90,01	90,22	90,76	91,22
Mamasa	91,61	93,91	96,16	97,38	97,52	97,60	97,92
Mamuju	86,78	87,04	87,34	88,26	89,00	89,03	90,37
Mamuju Utara	67,72	71,49	76,18	80,00	82,03	82,96	83,88
Mamuju Tengah				85,55	86,61	86,83	87,26
<b>MALUKU</b>	<b>91,79</b>	<b>92,36</b>	<b>92,38</b>	<b>92,46</b>	<b>92,55</b>	<b>92,54</b>	<b>92,75</b>
Maluku Tenggara Barat	83,11	83,98	84,59	84,85	85,59	85,72	85,80
Maluku Tenggara	95,46	95,53	95,67	96,21	96,33	96,31	96,47
Maluku Tengah	97,39	97,49	97,81	97,84	98,13	97,68	98,30
Buru	83,04	83,73	85,95	87,04	87,76	88,31	89,63
Kepulauan Aru	74,95	77,60	81,69	84,99	87,61	87,91	88,70
Seram Bagian Barat	95,46	96,30	97,26	97,77	98,04	97,67	98,35
Seram Bagian Timur	81,04	82,44	83,78	84,44	85,77	86,41	86,58
Maluku Barat Daya	73,38	78,00	82,01	85,03	88,82	88,74	89,50
Buru Selatan	72,65	76,80	79,58	81,98	84,15	84,13	85,42
Kota Ambon	95,10	95,71	96,32	97,00	97,22	97,48	97,88
Kota Tual	87,02	87,06	87,14	87,48	87,59	87,85	87,16
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>85,29</b>	<b>85,31</b>	<b>87,06</b>	<b>87,96</b>	<b>88,79</b>	<b>88,86</b>	<b>89,15</b>
Halmahera Barat	84,07	85,43	86,81	88,13	88,71	89,23	88,20
Halmahera Tengah	83,83	84,68	85,22	87,47	89,30	89,44	89,52
Kepulauan Sula	84,27	85,71	87,32	89,66	91,33	91,83	92,13
Halmahera Selatan	83,89	84,35	84,70	85,10	85,15	85,37	85,83
Halmahera Utara	86,34	87,14	87,54	87,85	88,70	88,71	89,14
Halmahera Timur	69,94	72,37	75,98	78,15	80,66	80,77	81,29

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Pulau Morotai		63,24	63,73	63,75	63,94	67,29	68,57
Pulau Taliabu				80,77	81,48	81,83	81,87
Kota Ternate	89,91	90,66	90,89	90,91	91,00	91,36	91,89
Kota Tidore Kepulauan	85,98	90,80	91,88	92,87	94,34	95,19	95,33
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>81,15</b>	<b>81,34</b>	<b>81,57</b>	<b>81,72</b>	<b>81,95</b>	<b>81,99</b>	<b>82,42</b>
Fak-Fak	81,27	81,45	81,71	82,45	82,71	82,83	83,23
Kaimana	79,38	80,30	80,68	81,14	81,18	81,34	81,85
Teluk Wondama	71,33	73,33	75,96	76,27	78,34	78,55	78,85
Teluk Bintuni	76,04	78,12	80,15	82,26	84,08	84,91	85,65
Manokwari	80,99	81,18	81,26	81,34	81,52	81,65	82,62
Sorong Selatan	71,14	72,28	78,47	80,09	80,29	80,52	81,54
Sorong	71,52	75,90	79,16	82,11	84,46	84,64	85,33
Raja Ampat	67,37	69,68	71,23	74,32	76,34	76,50	76,67
Tambrauw		63,34	63,67	64,44	64,85	65,71	66,50
Maybrat		73,89	74,18	74,31	74,66	75,01	76,10
Manokwari Selatan				59,85	60,80	61,58	62,66
Pegunungan Arfak				61,93	74,54	75,71	76,07
Kota Sorong	88,57	89,34	89,51	90,06	90,65	90,78	90,98
<b>PAPUA</b>	<b>73,93</b>	<b>74,99</b>	<b>76,42</b>	<b>77,61</b>	<b>78,57</b>	<b>78,52</b>	<b>79,38</b>
Merauke	84,77	85,69	86,41	86,83	87,62	87,43	87,45
Jayawijaya	81,79	82,02	82,29	82,45	83,07	82,78	82,80
Jayapura	89,95	90,59	90,66	90,69	90,70	90,60	90,48
Nabire	86,97	86,98	87,39	88,67	89,73	89,81	89,97
Yapen Waropen	85,50	86,98	87,31	87,85	88,26	88,09	88,07
Biak Namfor	88,13	88,71	88,74	89,49	89,86	89,55	89,80
Paniai	57,36	61,38	64,71	65,65	66,10	66,04	67,15
Puncak Jaya	61,88	62,09	62,29	62,43	62,50	62,36	64,43
Mimika	74,07	74,31	75,27	75,46	77,06	76,98	77,09
Boven Digoel	75,14	75,97	76,13	76,91	77,53	77,79	78,83
Mappi	76,45	77,71	79,95	81,82	82,92	83,15	83,77
Asmat	44,29	44,69	45,38	46,21	48,77	49,48	50,61
Yahukimo	59,43	62,42	65,02	65,70	67,88	68,13	70,53
Pegunungan Bintang	71,90	75,40	78,83	79,71	80,12	79,71	79,83

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Tolikara	53,82	54,69	55,16	55,88	56,39	56,47	57,77
Sarmi	71,17	79,48	79,58	80,87	81,41	81,26	82,12
Keerom	79,40	79,64	81,86	82,25	84,15	84,46	85,30
Waropen	66,55	66,97	67,25	67,30	67,55	67,86	70,13
Supiori	64,35	66,85	69,99	72,26	74,50	75,13	76,16
Membramo Raya	71,33	72,42	75,25	77,99	80,32	80,92	80,64
Nduga	84,51	84,53	84,57	89,06	91,04	88,14	84,45
Lanny Jaya	87,31	87,76	89,22	90,50	91,33	90,82	91,58
Mamberamo Tengah	88,31	89,09	90,10	90,46	90,77	88,74	87,35
Yalimo	49,90	61,26	68,65	73,56	81,81	81,43	82,29
Puncak	71,71	74,92	78,68	81,53	84,62	83,95	82,40
Dogiyai	67,71	70,79	74,95	77,35	79,97	80,25	81,17
Intan Jaya		64,13	65,67	66,25	67,56	68,25	68,42
Deiyai		59,93	63,72	67,18	69,77	69,51	69,69
Kota Jayapura	94,44	94,61	94,78	94,92	94,94	94,50	94,12
<b>INDONESIA</b>	<b>89,42</b>	<b>89,52</b>	<b>90,07</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>	<b>91,03</b>	<b>90,96</b>

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>ACEH</b>	<b>14,81</b>	<b>54,71</b>	<b>34,56</b>	<b>66,28</b>
Simeulue	15,00	38,89	24,19	58,44
Aceh Singkil	8,00	35,48	28,41	52,33
Aceh Selatan	3,33	53,19	27,58	48,07
Aceh Tenggara	13,33	58,73	31,25	60,98
Aceh Timur	10,00	63,54	29,53	54,14
Aceh Tengah	3,33	52,18	37,34	56,48
Aceh Barat	8,00	52,47	29,61	55,90
Aceh Besar	2,86	51,94	25,48	47,27
Pidie	17,50	71,37	30,93	59,61
Bireuen	2,50	57,28	39,10	53,02
Aceh Utara	2,22	53,81	33,95	51,51
Aceh Barat Daya	4,00	59,31	30,55	51,62
Gayo Lues	10,00	54,12	36,51	61,62
Aceh Tamiang	30,00	51,50	27,01	72,05
Nagan Raya	16,00	62,96	26,39	59,45
Aceh Jaya	5,00	55,33	38,46	57,57
Bener Meriah	4,00	60,88	29,17	50,06
Pidie Jaya	4,00	67,76	34,97	52,00
Kota Banda Aceh	3,33	46,71	27,90	51,48
Kota Sabang	30,00	48,70	33,26	78,53
Kota Langsa	8,00	51,28	26,78	52,72
Kota Lhokseumawe	8,00	48,83	23,23	50,79
Subulussalam	15,00	47,46	36,93	68,38
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>15,00</b>	<b>52,46</b>	<b>36,03</b>	<b>69,29</b>
Nias	0,00	37,60	50,72	51,89
Mandailing Natal	7,50	54,10	46,84	64,99
Tapanuli Selatan	13,33	53,44	50,14	72,33
Tapanuli Tengah	5,71	51,81	44,72	62,07
Tapanuli Utara	8,57	55,86	50,73	65,87
Toba Samosir	6,67	59,08	47,40	63,86
Labuhan Batu	28,89	62,62	32,33	75,49



## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asahan	15,56	60,28	26,06	60,44
Simalungun	12,00	54,16	36,79	66,13
Dairi	5,71	52,65	49,50	62,16
Karo	20,00	51,88	53,46	76,42
Deli Serdang	12,00	45,60	28,05	60,54
Langkat	8,00	54,39	30,83	58,41
Nias Selatan	11,43	35,28	34,72	59,66
Humbang Hasundutan	4,00	59,08	49,70	58,44
Pakpak Barat	0,00	55,37	49,50	54,36
Samosir	20,83	48,49	49,65	77,11
Serdang Bedegai	17,78	61,45	30,42	66,17
Batu Bara	14,29	54,04	37,20	68,52
Padang Lawas Utara	6,67	56,64	45,46	63,57
Padang Lawas	3,33	52,49	40,06	58,08
Labuhan Batu Selatan	8,57	52,94	32,41	60,47
Labuhan Batu Utara	2,86	49,60	24,75	47,18
Nias Utara	8,00	40,05	47,93	62,47
Nias Barat	15,00	36,02	50,10	67,88
Kota Sibolga	20,00	50,08	32,84	71,10
Kota Tanjung Balai	16,00	51,61	23,83	59,62
Kota Pematang Siantar	23,33	44,44	34,53	73,51
Kota Tebing Tinggi	8,00	49,42	29,81	57,65
Kota Medan	10,00	52,80	32,19	61,23
Kota Binjai	16,67	49,92	34,48	69,77
Kota Padang Sidempuan	13,33	60,79	30,62	61,10
Gunung Sitoli	12,00	45,03	41,46	66,39
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>10,77</b>	<b>57,64</b>	<b>37,40</b>	<b>65,01</b>
Kepulauan Mentawai	0,00	41,07	30,84	46,90
Pesisir Selatan	4,44	63,48	34,05	53,46
Solok	8,57	59,66	39,08	62,16
Sawah Lunto/Sijunjung	10,00	61,50	28,16	56,84
Tanah Datar	8,57	59,15	33,42	58,41

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang Pariaman	5,00	51,55	31,10	54,48
Agam	2,22	61,17	38,70	54,16
Limapuluh Koto	8,57	75,08	28,35	46,81
Pasaman	8,57	55,10	38,33	63,78
Solok Selatan	0,00	49,68	36,46	51,17
Dharmas Raya	4,00	57,19	26,76	48,91
Pasaman Barat	2,50	57,33	36,36	54,42
Kota Padang	15,56	53,25	34,51	69,01
Kota Solok	5,00	62,44	36,19	56,20
Kota Sawah Lunto	20,00	55,09	27,90	65,86
Kota Padang Panjang	20,00	59,75	46,52	76,10
Kota Bukit Tinggi	8,00	58,02	37,29	62,11
Kota Payakumbuh	8,00	58,66	38,13	61,99
Kota Pariaman	5,00	63,90	30,91	51,34
<b>RIAU</b>	<b>28,13</b>	<b>53,67</b>	<b>28,13</b>	<b>75,36</b>
Kuantan Sisingi	5,71	61,07	36,61	59,55
Indragiri Hulu	12,50	57,31	28,33	62,79
Indragiri Hilir	8,89	45,03	28,79	59,43
Pelalawan	5,71	57,83	28,10	53,48
Siak	2,50	53,78	19,61	42,02
Kampar	15,56	58,54	23,56	60,80
Rokan Hulu	13,33	60,13	26,41	60,75
Bengkalis	8,89	59,05	23,16	52,64
Rokan Hilir	5,77	50,29	22,97	49,86
Kepulauan Meranti	14,81	42,99	26,78	62,82
Kota Pekanbaru	16,28	49,01	27,06	65,83
Kota Dumai	13,33	54,57	23,37	59,49
JAMBI	14,55	51,91	29,87	65,32
Kerinci	10,00	50,91	42,70	67,20
Merangin	0,00	52,92	41,04	54,21
Sarolangun	8,57	59,77	30,30	58,35
Batanghari	17,14	52,43	34,43	70,60

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muara Jambi	14,29	46,15	35,12	68,67
Tanjung Jabung Timur	23,33	59,08	22,52	64,87
Tanjung Jabung Barat	14,29	40,72	26,37	61,93
Tebo	14,29	61,45	28,18	62,02
Bungo	17,14	46,79	22,68	61,15
Kota Jambi	20,00	52,12	28,64	69,14
Kota Sungai Penuh	0,00	58,74	34,37	51,32
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>20,27</b>	<b>49,25</b>	<b>34,70</b>	<b>73,53</b>
Ogan Komering Ulu	11,43	55,21	24,67	56,84
Ogan Komering Ilir	11,11	55,02	24,65	56,08
Muara Enim (Liot)	6,67	48,84	36,73	60,18
Lahat	7,50	54,34	37,05	60,87
Musi Rawas	10,00	53,79	25,62	55,54
Musi Banyuasin	20,00	56,32	34,87	72,18
Banyuasin	11,11	54,52	29,07	59,89
Ogan Komering Ulu Selatan	10,00	55,31	23,26	54,54
Ogan Komering Ulu Timur	8,89	60,33	29,80	57,34
Ogan Ilir	5,00	52,56	28,03	51,24
Empat Lawang	11,43	61,92	34,28	61,15
Penulak Abab Lematang Ilir	4,00	55,02	36,96	55,62
Musi Rawas Utara	8,00	48,81	26,19	53,42
Kota Palembang	14,00	42,63	29,68	63,41
Kota Prabumulih	12,00	55,60	24,43	55,75
Kota Pagar Alam	16,00	46,32	21,82	58,11
Kota Lubuk Linggau	16,67	46,95	26,92	62,43
<b>BENGKULU</b>	<b>17,78</b>	<b>48,99</b>	<b>35,21</b>	<b>71,40</b>
Bengkulu Selatan	0,00	49,12	42,51	54,75
Rejang Lebong	16,67	47,31	24,60	61,73
Bengkulu Utara	10,00	50,23	38,74	65,76
Kaur	8,00	47,02	37,86	61,86

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seluma	13,33	50,03	34,74	65,15
Mukomuko	8,00	48,68	33,49	61,32
Lebong	28,00	52,27	37,91	79,39
Kepahiang	20,00	47,96	35,95	73,29
Bengkulu Tengah	16,00	49,46	42,11	70,15
Bengkulu	25,71	49,05	32,87	76,46
<b>LAMPUNG</b>	<b>14,12</b>	<b>50,52</b>	<b>29,23</b>	<b>63,60</b>
Lampung Barat	9,09	52,95	32,36	60,47
Tanggamus	20,00	49,70	29,33	69,77
Lampung Selatan	10,00	59,72	29,41	57,66
Lampung Timur	10,00	57,81	32,45	60,01
Lampung Tengah	6,00	54,37	31,33	55,75
Lampung Utara	8,89	54,48	34,85	60,90
Way Kanan	17,50	48,82	32,90	68,46
Tulang Bawang	16,67	55,77	25,86	62,78
Pesawaran	22,73	43,46	29,79	70,51
Pringsewu	25,00	44,04	19,76	62,95
Mesuji	14,29	44,64	27,27	61,40
Tulang Bawang Barat	13,33	55,13	31,02	62,74
Pesisir Barat	20,00	24,81	33,79	64,34
Kota Bandar Lampung	12,00	44,29	30,67	62,11
Kota Metro	32,00	49,43	33,40	78,92
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>6,67</b>	<b>49,36</b>	<b>26,17</b>	<b>54,91</b>
Bangka	14,29	47,84	24,94	62,04
Belitung	0,00	52,72	22,61	42,62
Bangka Barat	8,00	59,98	26,45	54,45
Bangka Tengah	12,00	43,30	21,53	55,76
Bangka Selatan	8,00	48,94	21,27	48,66
Belitung Timur	20,00	55,54	26,41	67,36
Kota Pangkal Pinang	6,67	43,35	29,24	56,64

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>17,78</b>	<b>41,63</b>	<b>28,26</b>	<b>66,96</b>
Karimun	10,00	43,17	25,16	56,47
Bintan	16,00	38,85	23,76	61,24
Natuna	5,00	43,78	24,13	48,55
Lingga	5,00	45,58	22,69	47,82
Kepulauan Anambas	10,00	51,78	25,68	57,07
Kota Batam	6,00	41,20	28,80	55,28
Kota Tanjung Pinang	26,67	40,07	26,59	70,33
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>18,87</b>	<b>43,52</b>	<b>37,74</b>	<b>72,34</b>
Kep. Seribu	18,87	46,13	25,24	61,08
Kota Jakarta Selatan	18,87	45,37	36,30	73,17
Kota Jakarta Timur	18,87	41,11	33,38	71,17
Kota Jakarta Pusat	18,87	50,33	38,27	74,71
Kota Jakarta Barat	18,87	40,74	34,57	71,66
Kota Jakarta Utara	18,87	45,58	35,63	72,12
<b>JAWA BARAT</b>	<b>22,00</b>	<b>41,60</b>	<b>29,45</b>	<b>70,04</b>
Bogor	12,00	37,78	25,80	57,10
Sukabumi	12,00	41,01	27,06	58,33
Cianjur	18,00	33,76	21,03	55,95
Bandung	28,00	38,49	32,98	76,50
Garut	16,00	38,32	31,40	65,63
Tasikmalaya	16,00	51,47	27,39	63,04
Ciamis	10,00	43,68	37,75	63,67
Kuningan	26,00	40,13	30,38	72,39
Cirebon	30,00	46,24	27,00	74,27
Majalengka	14,00	36,95	27,20	59,15
Sumedang	18,00	36,00	34,59	68,08
Indramayu	22,00	30,40	20,90	58,94
Subang	16,00	43,03	30,98	65,90
Purwakarta	24,44	48,64	28,80	72,25
Karawang	20,00	43,60	28,00	68,08

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bekasi	12,00	43,22	24,18	57,16
Bandung Barat	6,00	31,42	32,92	53,98
Pangandaran	14,29	38,72	35,42	65,45
Kota Bogor	17,78	41,01	29,32	67,37
Kota Sukabumi	14,29	34,79	27,87	60,20
Kota Bandung	6,00	45,06	33,93	58,84
Kota Cirebon	23,53	48,74	31,87	74,23
Kota Bekasi	16,00	43,69	29,05	65,68
Kota Depok	38,00	44,17	31,99	81,40
Kota Cimahi	31,11	49,32	29,82	76,97
Kota Tasikmalaya	11,11	48,56	33,38	63,50
Kota Banjar	4,00	37,38	27,30	47,96
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>24,00</b>	<b>46,97</b>	<b>34,13</b>	<b>75,10</b>
Cilacap	18,00	38,60	26,20	62,52
Banyumas	18,00	43,59	30,35	67,32
Purbalingga	26,67	49,76	29,95	73,11
Banjarnegara	17,78	45,81	28,78	66,44
Kebumen	28,00	46,71	25,20	70,13
Purworejo	17,78	50,68	33,99	69,56
Wonosobo	6,67	45,39	24,09	50,55
Magelang	8,00	43,93	37,41	62,43
Boyolali	11,11	50,69	40,53	66,28
Klaten	6,00	43,65	37,76	59,60
Sukoharjo	20,00	49,73	41,06	76,11
Wonogiri	8,89	45,84	39,18	64,04
Karanganyar	22,22	38,69	38,11	74,27
Sragen	8,89	51,68	37,13	62,28
Grobogan	12,00	43,28	24,80	56,01
Blora	17,78	50,30	34,69	70,52
Rembang	22,22	55,66	31,69	72,45
Pati	18,00	47,02	31,39	67,96

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudus	6,67	45,73	40,95	62,02
Jepara	6,00	53,47	23,31	48,76
Demak	14,00	54,71	38,70	68,48
Semarang	20,00	45,30	45,80	76,15
Temanggung	31,11	44,62	40,87	82,49
Kendal	22,73	50,99	34,86	75,35
Batang	20,00	44,75	27,96	66,58
Pekalongan	24,44	45,42	25,68	68,38
Pemalang	18,00	56,95	35,31	70,52
Tegal	20,00	48,16	29,03	68,90
Brebes	16,00	43,28	24,76	60,72
Kota Magelang	20,00	51,78	41,83	76,28
Kota Surakarta	20,00	48,66	43,94	77,25
Kota Salatiga	28,00	44,06	41,36	80,83
Kota Semarang	22,00	47,15	36,81	75,22
Kota Pekalongan	16,67	46,94	27,81	65,11
Kota Tegal	33,33	45,84	29,74	77,52
<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>12,73</b>	<b>46,06</b>	<b>40,63</b>	<b>69,37</b>
Kulon Progo	17,50	54,83	33,78	68,42
Bantul	6,67	45,76	38,17	61,99
Gunung Kidul	15,56	42,59	39,60	68,70
Sleman	26,00	44,31	38,43	79,51
Kota Yogyakarta	22,50	48,75	43,95	78,94
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>15,00</b>	<b>47,36</b>	<b>35,63</b>	<b>69,37</b>
Pacitan	15,00	44,53	39,31	69,01
Ponorogo	11,36	48,27	35,31	64,87
Trenggalek	11,11	41,76	37,73	65,21
Tulungagung	10,00	49,16	38,14	63,95
Blitar	22,00	59,33	40,34	77,15
Kediri	26,00	56,61	31,34	73,93
Malang	20,00	49,22	36,91	74,37

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lumajang	18,00	53,36	23,50	60,11
Jember	20,00	47,93	30,67	68,65
Banyuwangi	20,00	45,71	30,97	69,43
Bondowoso	4,44	49,39	37,35	57,28
Situbondo	22,22	36,54	27,40	65,04
Probolinggo	24,44	37,53	25,18	64,86
Pasuruan	12,00	48,64	34,93	65,59
Sidoarjo	14,00	47,21	29,36	64,65
Mojokerto	24,00	58,57	34,89	75,72
Jombang	22,00	44,75	27,52	68,40
Nganjuk	22,22	52,38	25,59	66,56
Madiun	11,11	48,94	30,48	60,03
Magetan	6,67	52,28	38,61	61,34
Ngawi	20,00	48,17	31,89	68,93
Bojonegoro	14,00	48,06	26,25	59,30
Tuban	12,00	43,68	30,74	61,25
Lamongan	18,00	41,94	33,59	68,10
Gresik	12,00	48,40	31,42	63,35
Bangkalan	0,00	43,34	35,23	49,74
Sampang	2,22	36,32	30,98	48,18
Pamekasan	6,67	39,93	33,46	55,81
Sumenep	6,00	32,95	36,43	54,90
Kota Kediri	33,33	51,19	35,56	82,36
Kota Blitar	12,00	55,36	38,42	67,51
Kota Malang	17,78	46,75	34,10	70,76
Kota Probolinggo	16,67	40,86	31,28	66,69
Kota Pasuruan	10,00	48,20	31,64	62,03
Kota Mojokerto	32,00	54,39	37,05	82,00
Kota Madiun	33,33	47,24	37,83	82,19
Kota Surabaya	34,00	47,29	35,45	82,89
Kota Batu	24,00	50,08	30,58	73,66



## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>BANTEN</b>	<b>20,00</b>	<b>42,84</b>	<b>31,13</b>	<b>70,00</b>
Pandeglang	12,00	39,67	29,57	60,45
Lebak	14,00	40,87	31,04	64,38
Tangerang	14,00	41,81	27,98	62,43
Serang	14,00	37,74	26,00	59,00
Kota Tangerang	20,00	44,64	31,67	71,67
Kota Cilegon	14,29	44,66	20,42	56,05
Kota Serang	15,56	45,55	27,13	63,81
Kota Tangerang Selatan	24,00	42,91	25,46	68,46
<b>BALI</b>	<b>9,09</b>	<b>44,17</b>	<b>37,68</b>	<b>63,76</b>
Jembrana	11,43	49,33	38,54	66,23
Tabanan	7,50	46,46	36,55	61,06
Badung	7,50	41,73	35,93	61,48
Gianyar	7,50	44,87	37,25	62,35
Klungkung	16,67	36,14	46,20	72,60
Bangli	6,67	37,47	37,28	59,57
Karangasem	4,44	36,24	42,45	59,30
Buleleng	13,33	41,16	38,89	67,68
Kota Denpasar	2,22	47,38	42,18	58,80
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>9,23</b>	<b>44,10</b>	<b>32,69</b>	<b>59,95</b>
Lombok Barat	15,56	36,82	31,28	62,28
Lombok Tengah	8,00	34,78	35,43	55,43
Lombok Timur	6,00	45,82	44,25	60,23
Sumbawa	2,22	49,99	37,99	56,48
Dompu	10,00	47,47	34,53	64,00
Bima	15,22	45,98	26,20	60,66
Sumbawa Barat	0,00	51,32	20,00	38,03
Lombok Utara	6,67	31,33	26,69	46,33
Kota Mataram	12,50	46,89	32,86	64,57
Kota Bima	12,00	50,06	37,75	65,14

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>9,23</b>	<b>46,07</b>	<b>43,25</b>	<b>63,76</b>
Sumba Barat	16,00	39,92	34,85	67,53
Sumba Timur	6,67	47,20	42,11	60,59
Kupang	14,29	37,45	35,12	64,75
Timor Tengah Selatan	12,50	43,30	29,16	58,78
Timor Tengah Utara	6,67	42,84	39,99	59,04
Belu	36,67	47,91	38,35	81,57
Alor	6,67	48,52	43,58	60,14
Lembata	0,00	48,13	45,39	52,44
Flores Timur	0,00	49,85	43,65	53,27
Sikka	8,57	55,48	36,53	58,15
Ende	3,33	56,48	52,38	57,64
Ngada	16,00	55,23	46,69	71,64
Manggarai	11,43	41,81	46,75	65,52
Rote Nda	4,00	36,19	34,99	51,60
Manggarai Barat	2,50	42,20	38,69	52,53
Sumba Tengah	0,00	49,69	41,30	53,21
Sumba Barat Daya	0,00	44,86	47,69	53,86
Nageko	0,00	51,58	49,05	53,14
Manggarai Timur	3,33	37,33	34,85	49,36
Sabu Raijua	5,00	56,08	35,80	49,33
Malaka	20,00	33,41	49,27	61,42
Kota Kupang	12,50	45,74	38,88	68,27
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>10,77</b>	<b>43,94</b>	<b>34,99</b>	<b>64,46</b>
Sambas	15,56	48,05	36,35	68,57
Bengkayang	10,00	60,71	36,94	61,55
Landak	11,11	38,57	36,91	64,07
Pontianak	10,00	42,98	35,28	62,91
Sanggau	10,00	41,28	32,50	61,15
Ketapang	13,33	39,79	25,28	58,77
Sintang	11,43	41,99	32,02	61,78

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kapuas Hulu	15,00	37,77	40,99	69,75
Sekadau	3,33	37,66	39,17	55,34
Melawai	5,71	36,76	34,79	55,70
Kayong Utara	3,33	38,43	30,91	50,02
Kubu Raya	10,00	49,61	34,78	63,33
Kota Pontianak	8,89	43,73	33,88	61,04
Kota Singkawang	8,00	49,05	28,61	56,75
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>28,89</b>	<b>42,99</b>	<b>33,39</b>	<b>79,36</b>
Kotawaringin Barat	16,67	44,61	23,55	63,31
Kotawaringin Timur	20,00	38,33	25,77	67,87
Kapuas	25,00	45,37	27,57	71,50
Barito Selatan	36,00	34,70	38,11	81,67
Barito Utara	36,00	45,39	43,73	86,20
Sukamara	20,00	35,71	19,47	59,78
Lamandau	5,00	39,23	27,81	54,13
Seruyan	20,00	46,79	26,98	70,13
Katingan	16,00	43,48	29,37	66,87
Pulang Pisau	28,00	52,71	22,94	70,14
Gunung Mas	28,00	31,56	51,04	78,74
Barito Timur	20,00	45,24	43,43	76,46
Murung Raya	16,00	56,34	29,35	66,93
Kota Palangka Raya	33,33	44,47	32,10	79,94
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>12,73</b>	<b>46,85</b>	<b>36,26</b>	<b>67,56</b>
Tanah Laut	17,14	47,47	28,00	65,99
Kota Baru	22,86	37,54	27,04	70,08
Banjar	24,44	49,57	33,22	76,49
Barito Kuala	17,14	50,62	40,75	73,44
Tapin	16,00	47,99	48,37	72,99
Hulu Sungai Selatan	13,33	53,25	26,74	61,10
Hulu Sungai Tengah	23,33	49,91	48,56	80,07
Hulu Sungai Utara	16,67	56,87	29,64	64,50

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabalong	23,33	39,03	29,15	70,77
Tanah Bumbu	5,71	49,96	31,24	57,45
Balangan	12,00	52,97	37,22	65,79
Kota Banjarmasin	17,78	46,39	37,94	73,74
Kota Banjar Baru	23,33	40,23	31,77	73,83
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>10,91</b>	<b>39,36</b>	<b>23,43</b>	<b>56,64</b>
Pasir	16,67	41,18	23,06	62,07
Kutai Barat	16,67	35,68	25,37	62,63
Kutai	8,89	39,26	24,30	55,07
Kutai Timur	15,00	35,88	17,39	53,71
Berau	10,00	43,51	17,03	49,85
Penajam Paser Utara	4,00	46,98	24,95	50,30
Mahakam Ulu	30,00	43,70	26,95	74,12
Kota Balikpapan	17,78	40,39	25,71	65,52
Kota Samarinda	20,45	37,79	30,42	70,84
Kota Bontang	8,00	41,41	16,97	45,44
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>11,43</b>	<b>44,82</b>	<b>25,88</b>	<b>61,09</b>
Malinau	15,00	35,50	27,86	65,14
Bulongan	4,00	44,24	21,37	47,74
Tana Tidung	10,00	23,65	22,05	48,06
Nunukan	20,00	45,21	26,59	70,02
Kota Tarakan	4,00	51,90	24,95	51,33
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>38,64</b>	<b>52,52</b>	<b>32,17</b>	<b>82,37</b>
Bolaang Mongondow	20,69	52,90	28,25	69,91
Minahasa	31,43	54,19	38,80	82,42
Kep.Sangihe Talaud	25,00	51,06	28,78	73,01
Kepulauan Talaud	5,00	55,94	27,37	52,11
Minahasa Selatan	26,67	57,99	31,57	75,10
Minahasa Utara	26,67	46,87	33,55	77,48
Bolaang Mongondow Utara	15,00	49,53	28,52	64,93
Kep. Siau Tagulandang Biaro	35,00	72,70	34,32	73,05

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Minahasa Tenggara	32,00	60,26	36,04	79,28
Bolaang Mongondow Selatan	20,00	50,27	28,11	67,86
Bolaang Mongondow Timur	20,00	57,32	24,46	64,41
Manado	32,50	44,28	34,82	81,00
Kota Bitung	30,00	58,33	26,75	73,25
Kota Tomohon	40,00	56,98	33,89	82,32
Kota Kotamobago	12,00	57,58	25,16	57,48
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>20,00</b>	<b>50,23</b>	<b>30,20</b>	<b>70,38</b>
Banggai Kepulauan	12,00	52,74	43,58	67,79
Banggai	23,53	47,77	27,49	70,23
Morowali	16,00	42,85	26,90	63,49
Poso	16,67	50,82	30,89	68,01
Donggala	6,67	50,97	29,11	56,35
Toli-Toli	23,33	59,64	25,17	66,45
Buol	24,00	47,56	24,02	66,51
Parigi Moutong	10,00	50,82	23,85	54,93
Tojo Una-Una	8,00	55,34	25,71	53,76
Sigi	10,00	53,69	31,73	59,65
Banggai Laut	5,00	40,24	36,48	56,04
Morowali Utara	20,00	46,86	20,31	60,50
Kota Palu	14,29	49,01	34,16	67,81
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>21,18</b>	<b>51,62</b>	<b>31,63</b>	<b>70,57</b>
Selayar	16,00	54,69	31,56	64,74
Bulukumba	17,50	56,04	33,43	67,16
Bantaeng	32,00	63,56	36,58	77,74
Jeneponto	20,00	55,72	30,94	67,93
Takalar	26,67	66,86	27,76	66,60
Gowa	17,78	48,36	32,70	69,01
Sinjai	26,67	56,18	32,67	72,56
Maros	20,00	48,54	26,17	65,16

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pangkajene Kepulauan	8,57	58,08	31,49	56,96
Barru	24,00	65,19	25,47	63,54
Bone	13,33	56,82	31,91	62,75
Soppeng	20,00	50,79	33,39	69,35
Wajo	17,50	62,28	26,28	60,62
Sidenreng Rappang	2,86	44,99	28,99	49,02
Pinrang	7,50	50,62	34,51	59,61
Enrekang	6,67	58,33	36,30	58,68
Luwu	8,57	50,24	36,44	61,61
Tana Toraja	20,00	55,58	40,55	73,99
Luwu Utara	5,71	56,83	19,71	44,98
Luwu Timur	3,33	50,86	22,62	45,96
Toraja Utara	5,71	54,99	33,69	56,04
Kota Makasar	16,00	41,60	34,62	68,73
Kota Pare Pare	12,00	59,48	31,56	61,56
Kota Palopo	20,00	58,31	34,17	70,85
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>17,78</b>	<b>47,92</b>	<b>36,03</b>	<b>70,76</b>
Buton	28,00	49,64	39,70	73,46
Muna	10,00	47,24	34,98	61,19
Konawe/Kab Kendari	26,67	39,98	36,40	76,76
Kolaka	13,33	60,03	25,87	59,45
Konawe Selatan	37,14	47,38	31,08	79,20
Bombana	8,00	54,42	26,61	53,23
Wakatobi	20,00	50,54	40,23	71,65
Kolaka Utara	4,00	49,61	27,44	51,62
Konawe Utara	15,00	45,79	38,11	67,83
Buton Utara	15,00	49,85	36,04	69,13
Kolaka Timur	12,00	45,76	30,58	61,70
Konawe Kepulauan	10,00	55,63	78,66	49,52
Muna Barat	10,00	44,52	17,92	45,07
Buton Tengah	12,00	47,80	42,97	70,08

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton Selatan	15,00	37,50	33,95	69,09
Kota Kendari	40,00	47,34	37,76	85,30
Kota Bau-Bau	20,00	46,07	30,03	67,98
<b>GORONTALO</b>	<b>29,55</b>	<b>57,73</b>	<b>26,10</b>	<b>71,09</b>
Boalemo	20,00	53,23	28,09	66,59
Gorontalo	22,86	60,17	26,38	65,76
Pokuwato	20,00	66,04	36,34	69,62
Bone Bolango	4,00	69,00	28,96	46,97
Gorontalo Utara	16,00	52,57	27,38	63,28
Kota Gorontalo	24,00	49,11	29,53	70,64
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>20,00</b>	<b>54,93</b>	<b>36,21</b>	<b>73,37</b>
Majene	20,00	53,72	38,42	74,51
Polewali Mamasa	20,00	61,86	37,22	71,81
Mamasa	6,67	47,66	25,67	52,52
Mamuju	17,14	53,15	27,99	65,34
Mamuju Utara	10,00	56,82	18,98	49,23
Mamuju Tengah	20,00	50,60	21,99	62,73
<b>MALUKU</b>	<b>28,89</b>	<b>48,81</b>	<b>37,13</b>	<b>78,87</b>
Maluku Tenggara Barat	16,67	48,03	43,89	71,36
Maluku Tenggara	8,00	57,93	36,10	59,84
Maluku Tengah	7,50	47,61	35,31	59,99
Buru	12,00	47,13	28,98	60,55
Kepulauan Aru	4,00	52,51	42,20	57,57
Seram Bagian Barat	6,67	59,10	36,93	57,91
Seram Bagian Timur	8,00	50,40	32,37	57,60
Maluku Barat Daya	0,00	54,53	40,63	50,10
Buru Selatan	5,00	55,46	31,38	54,98
Kota Ambon	11,43	44,87	39,47	67,66
Kota Tual	5,00	51,07	26,43	51,84

## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>17,78</b>	<b>47,54</b>	<b>36,45</b>	<b>70,31</b>
Halmahera Barat	20,00	53,21	32,23	69,15
Halmahera Tengah	5,00	49,70	29,00	51,79
Kepulauan Sula	4,00	55,27	28,76	48,59
Halmahera Selatan	0,00	48,92	21,10	38,52
Halmahera Utara	20,00	51,68	27,60	66,33
Halmahera Timur	5,00	56,52	26,05	49,53
Pulau Morotai	10,00	48,98	27,48	55,45
Pulau Taliabu	25,00	34,68	14,47	50,73
Kota Ternate	16,67	37,98	35,93	70,03
Kota Tidore Kepulauan	16,00	54,85	32,97	66,48
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>3,57</b>	<b>37,32</b>	<b>27,00</b>	<b>47,88</b>
Fak-Fak	20,00	40,75	30,54	68,38
Kaimana	25,00	21,45	37,40	66,98
Teluk Wondama	10,00	36,23	22,12	51,90
Teluk Bintuni	5,00	36,98	23,84	48,80
Manokwari	20,00	35,70	28,71	65,39
Sorong Selatan	15,00	41,95	29,44	63,02
Sorong	12,00	29,76	21,85	50,06
Raja Ampat	35,00	40,17	24,20	70,35
Tambrauw	10,00	25,75	35,22	43,28
Maybrat	5,00	40,33	29,06	47,75
Manokwari Selatan	35,00	34,81	66,45	72,37
Pegunungan Arfak	15,00	20,04	23,39	42,46
Kota Sorong	13,33	41,96	24,43	60,14
<b>PAPUA</b>	<b>10,61</b>	<b>33,41</b>	<b>36,49</b>	<b>61,89</b>
Merauke	20,69	40,70	36,73	71,65
Jayawijaya	10,00	17,80	46,88	51,42
Jayapura	8,00	46,66	32,22	61,91
Nabire	21,74	33,94	33,10	71,80



## Lampiran 5. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Yapen Waropen	0,00	34,52	36,19	49,92
Biak Namfor	16,00	36,07	30,10	61,88
Paniai	4,00	27,04	47,96	50,92
Puncak Jaya	3,33	13,86	39,51	42,76
Mimika	2,86	34,32	23,37	46,48
Boven Digoel	0,00	30,90	33,29	44,55
Mappi	8,00	33,43	41,56	57,51
Asmat	4,00	4,57	38,21	28,71
Yahukimo	2,86	22,64	46,14	46,01
Pegunungan Bintang	4,00	23,84	48,54	48,82
Tolikara	3,33	16,51	42,45	45,93
Sarmi	10,00	42,36	37,09	65,29
Keerom	10,00	33,61	35,75	62,34
Waropen	5,00	33,24	34,52	53,41
Supiori	15,00	35,44	33,97	63,00
Membramo Raya	0,00	15,95	57,09	36,95
Nduga	8,00	29,14	46,75	58,02
Lanny Jaya	8,00	8,56	43,07	38,86
Mamberamo Tengah	10,00	19,98	44,60	53,42
Yalimo	5,00	23,50	46,39	49,54
Puncak	0,00	31,46	32,34	42,95
Dogiyai	5,00	18,86	61,07	42,92
Intan Jaya	0,00	40,55	47,42	51,49
Deiyai	0,00	21,15	61,89	38,42
Kota Jayapura	25,00	38,83	34,99	78,89
<b>INDONESIA</b>	<b>17,32</b>	<b>46,31</b>	<b>36,62</b>	<b>71,74</b>

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi, 2010-2017

Nama Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57	67,40	66,28
Sumatera Utara	67,78	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81	69,07	69,29
Sumatera Barat	63,04	64,62	65,22	65,40	61,86	62,42	64,51	65,01
Riau	65,14	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59	75,19	75,36
Jambi	57,91	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43	63,14	65,32
Sumatera Selatan	67,32	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36	70,69	73,53
Bengkulu	68,50	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86	71,09	71,40
Lampung	65,32	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01	61,98	63,60
Kep. Bangka Belitung	55,62	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29	51,69	54,91
Kepulauan Riau	56,70	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15	65,60	66,96
DKI Jakarta	73,23	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41	72,14	72,34
Jawa Barat	67,01	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04
Jawa Tengah	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10
DI Yogyakarta	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75	66,96	69,37
Jawa Timur	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37
Banten	65,66	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94	69,14	70,00
Bali	58,53	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99	63,97	63,76
Nusa Tenggara Barat	54,49	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95
Nusa Tenggara Timur	57,98	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76
Kalimantan Barat	55,26	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44	64,37	64,46
Kalimantan Tengah	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87	78,23	79,36
Kalimantan Selatan	62,53	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56
Kalimantan Timur	60,05	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96	56,93	56,64
Kalimantan Utara					66,52	67,31	63,52	61,09
Sulawesi Utara	71,20	73,34	75,00	75,55	76,15	79,82	81,24	82,37
Sulawesi Tengah	65,37	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57	70,05	70,38
Sulawesi Selatan	62,46	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98	70,02	70,57
Sulawesi Tenggara	64,26	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14	70,51	70,76
Gorontalo	61,35	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26	69,70	71,09
Sulawesi Barat	63,15	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40	71,71	73,37
Maluku	75,94	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15	77,36	78,87
Maluku Utara	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74	68,19	70,31
Papua Barat	57,97	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19	49,56	47,88
Papua	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69	64,73	61,89
<b>Indonesia</b>	<b>68,15</b>	<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>	<b>71,39</b>	<b>71,74</b>

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>ACEH</b>	<b>53,40</b>	<b>52,06</b>	<b>54,44</b>	<b>59,78</b>	<b>65,12</b>	<b>65,57</b>	<b>66,28</b>
Simeulue	55,36	57,91	46,02	58,30	56,79	57,82	58,44
Aceh Singkil	56,79	54,62	54,86	58,91	54,65	54,87	52,33
Aceh Selatan	40,03	41,18	42,15	41,78	47,01	47,43	48,07
Aceh Tenggara	53,60	58,60	58,69	63,05	58,58	59,94	60,98
Aceh Timur	48,64	45,59	49,72	49,95	54,83	54,39	54,14
Aceh Tengah	56,54	57,98	57,07	56,81	55,42	55,63	56,48
Aceh Barat	46,50	47,06	47,49	48,10	55,46	55,31	55,90
Aceh Besar	44,73	44,41	44,71	46,07	46,04	45,64	47,27
Pidie	47,01	47,65	46,44	45,78	61,84	63,42	59,61
Bireuen	51,68	51,78	50,44	54,98	50,49	51,84	53,02
Aceh Utara	47,19	47,39	50,01	50,77	50,09	50,74	51,51
Aceh Barat Daya	42,78	42,75	43,94	44,30	51,72	50,83	51,62
Gayo Lues	52,28	49,27	57,90	46,89	65,17	60,67	61,62
Aceh Tamiang	55,78	55,44	48,05	57,16	72,88	71,25	72,05
Nagan Raya	54,93	56,62	55,74	60,21	60,21	61,40	59,45
Aceh Jaya	48,65	49,20	49,59	49,81	57,53	56,37	57,57
Bener Meriah	48,05	48,32	47,83	52,85	49,95	49,10	50,06
Pidie Jaya	54,61	56,12	63,81	58,20	53,10	54,66	52,00
Kota Banda Aceh	46,34	46,72	47,68	48,24	51,08	50,83	51,48
Kota Sabang	57,92	58,45	59,40	59,26	75,62	77,48	78,53
Kota Langsa	69,86	70,05	59,83	59,91	51,13	51,80	52,72
Kota Lhokseumawe	52,11	52,14	53,48	48,98	46,91	50,29	50,79
Subulussalam	69,54	70,67	74,89	70,47	65,87	68,11	68,38
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>67,78</b>	<b>67,39</b>	<b>69,82</b>	<b>70,08</b>	<b>66,69</b>	<b>67,81</b>	<b>69,29</b>
Nias	53,88	46,89	45,38	54,94	47,56	51,70	51,89
Mandailing Natal	59,53	63,16	63,49	63,47	63,63	64,80	64,99
Tapanuli Selatan	65,18	63,72	63,42	66,13	65,25	67,61	72,33
Tapanuli Tengah	68,78	73,48	74,05	69,28	73,96	60,93	62,07
Tapanuli Utara	58,22	64,56	65,19	64,91	65,42	65,34	65,87
Toba Samosir	61,87	67,76	68,05	69,14	63,71	62,75	63,86
Labuhan Batu	58,96	57,95	60,07	60,43	78,48	75,90	75,49
Asahan	51,66	53,19	53,48	53,07	59,58	61,63	60,44
Simalungun	61,78	58,69	60,60	61,28	65,47	64,52	66,13

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dairi	65,15	65,05	65,05	66,30	60,32	61,58	62,16
Karo	63,37	60,29	65,41	66,57	74,39	75,59	76,42
Deli Serdang	60,00	61,88	62,12	62,58	59,56	60,00	60,54
Langkat	52,96	51,72	56,21	56,64	57,80	56,00	58,41
Nias Selatan	59,84	61,27	56,18	58,42	60,80	57,45	59,66
Humbang Hasundutan	57,28	57,67	58,51	58,18	58,76	59,22	58,44
Pakpak Barat	58,88	58,88	56,64	60,07	50,23	53,91	54,36
Samosir	67,27	67,63	68,12	68,19	66,15	75,50	77,11
Serdang Bedegai	60,21	60,63	59,61	60,09	68,49	67,65	66,17
Batu Bara	57,20	54,62	57,55	56,64	67,84	68,33	68,52
Padang Lawas Utara	61,14	64,73	65,69	62,92	55,24	59,65	63,57
Padang Lawas	55,65	55,04	56,56	57,19	55,22	57,56	58,08
Labuhan Batu Selatan	69,20	55,43	70,18	67,33	57,74	58,22	60,47
Labuhan Batu Utara	38,61	23,59	36,05	36,98	40,48	46,77	47,18
Nias Utara	64,72	68,05	65,14	65,59	70,02	58,44	62,47
Nias Barat	60,83	61,61	67,97	65,75	68,42	70,04	67,88
Kota Sibolga	63,16	65,18	65,45	63,97	73,22	73,80	71,10
Kota Tanjung Balai	58,32	58,47	62,13	59,80	53,85	59,20	59,62
Kota Pematang Siantar	63,70	63,02	60,23	60,52	72,61	73,29	73,51
Kota Tebing Tinggi	59,33	56,67	55,50	57,47	55,90	56,82	57,65
Kota Medan	57,94	58,78	59,14	59,34	60,09	60,54	61,23
Kota Binjai	61,09	60,86	60,11	61,90	67,21	69,44	69,77
Kota Padang Sidempuan	64,83	65,92	66,04	66,49	61,37	61,95	61,10
Gunung Sitoli	57,42	60,76	64,48	64,75	64,37	63,67	66,39
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>63,04</b>	<b>64,62</b>	<b>65,22</b>	<b>65,40</b>	<b>61,86</b>	<b>62,42</b>	<b>65,01</b>
Kepulauan Mentawai	44,42	43,01	45,77	45,27	43,93	46,47	46,90
Pesisir Selatan	43,93	43,04	48,30	46,34	50,90	54,92	53,46
Solok	51,99	54,09	54,62	61,56	60,34	61,54	62,16
Sawah Lunto/Sijunjung	50,24	49,03	48,99	48,55	53,18	56,21	56,84
Tanah Datar	54,87	57,73	56,63	60,73	58,53	58,95	58,41
Padang Pariaman	53,81	55,77	56,57	53,76	53,12	53,26	54,48
Agam	58,28	60,10	60,20	57,36	49,41	54,35	54,16
Limapuluh Koto	45,92	51,90	52,37	51,10	53,46	51,68	46,81
Pasaman	54,17	54,84	55,31	56,24	59,24	59,70	63,78

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Solok Selatan	56,36	57,80	57,34	57,80	47,29	49,59	51,17
Dharmas Raya	44,75	43,62	46,23	52,20	47,73	47,47	48,91
Pasaman Barat	51,46	52,62	53,76	52,66	51,18	53,57	54,42
Kota Padang	56,10	57,51	60,65	58,68	68,26	68,31	69,01
Kota Solok	54,69	61,11	61,92	56,48	63,27	57,60	56,20
Kota Sawah Lunto	61,08	63,03	60,95	65,68	63,45	64,59	65,86
Kota Padang Panjang	74,93	75,50	74,37	80,15	76,67	73,30	76,10
Kota Bukit Tinggi	73,78	69,74	69,84	69,67	61,20	60,83	62,11
Kota Payakumbuh	59,16	59,85	55,69	60,43	62,24	61,70	61,99
Kota Pariaman	56,00	47,95	56,55	57,80	52,80	52,89	51,34
<b>RIAU</b>	<b>65,14</b>	<b>65,34</b>	<b>69,05</b>	<b>69,78</b>	<b>74,11</b>	<b>74,59</b>	<b>75,36</b>
Kuantan Singingi	53,43	55,13	55,03	55,66	64,16	64,19	59,55
Indragiri Hulu	59,62	64,56	66,23	66,60	60,07	62,92	62,79
Indragiri Hilir	58,99	51,54	49,45	50,96	57,39	59,08	59,43
Pelalawan	45,50	45,71	45,76	46,92	56,14	53,06	53,48
Siak	48,01	48,52	47,38	48,60	44,29	45,10	42,02
Kampar	47,93	49,13	50,14	53,14	65,29	61,46	60,80
Rokan Hulu	57,82	52,46	54,78	55,53	59,03	59,36	60,75
Bengkalis	47,23	47,36	44,56	48,05	59,68	51,83	52,64
Rokan Hilir	55,76	47,18	56,13	57,66	52,78	50,83	49,86
Kepulauan Meranti	53,66	54,48	55,51	59,04	57,09	64,55	62,82
Kota Pekanbaru	62,14	62,73	61,80	63,54	64,08	64,45	65,83
Kota Dumai	54,95	49,89	49,78	51,13	62,56	62,45	59,49
<b>JAMBI</b>	<b>57,91</b>	<b>58,89</b>	<b>61,52</b>	<b>66,19</b>	<b>61,93</b>	<b>62,43</b>	<b>65,32</b>
Kerinci	59,45	52,23	54,47	57,70	70,46	66,13	67,20
Merangin	53,49	56,12	56,81	57,89	53,72	53,76	54,21
Sarolangun	58,96	59,42	55,90	56,26	55,05	55,82	58,35
Batanghari	67,52	70,59	71,86	70,42	69,23	69,72	70,60
Muara Jambi	68,89	63,20	67,14	66,53	68,30	67,98	68,67
Tanjung Jabung Timur	42,53	54,87	51,54	54,50	52,26	61,57	64,87
Tanjung Jabung Barat	55,54	59,54	56,45	60,51	57,71	60,93	61,93
Tebo	48,67	49,10	49,16	49,44	64,27	62,12	62,02

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bungo	46,62	46,11	47,82	48,27	61,47	59,42	61,15
Kota Jambi	53,55	55,35	55,34	58,67	63,75	68,07	69,14
Kota Sungai Penuh	52,46	60,59	61,83	61,57	50,98	51,01	51,32
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>67,32</b>	<b>68,34</b>	<b>66,78</b>	<b>70,41</b>	<b>70,20</b>	<b>70,36</b>	<b>73,53</b>
Ogan Komering Ulu	45,82	46,48	60,54	60,83	56,02	56,77	56,84
Ogan Komering Ilir	48,81	46,36	49,03	50,52	53,03	53,04	56,08
Muara Enim (Liot)	66,10	67,25	62,91	63,42	59,21	58,61	60,18
Lahat	57,65	58,66	56,01	54,33	60,41	60,76	60,87
Musi Rawas	53,32	55,88	49,72	50,70	54,03	55,23	55,54
Musi Banyuasin	59,94	56,75	62,33	60,62	59,90	65,17	72,18
Banyuasin	57,14	58,11	65,08	65,38	57,30	59,91	59,89
Ogan Komering Ulu Selatan	48,27	48,75	49,54	49,70	53,23	51,17	54,54
Ogan Komering Ulu Timur	58,26	58,82	61,24	61,71	55,26	58,08	57,34
Ogan Ilir	50,07	50,94	51,96	51,88	49,21	50,81	51,24
Empat Lawang	68,10	70,27	64,46	73,13	60,28	62,78	61,15
Penukal Abab Lematang Ilir						55,29	55,62
Musi Rawas Utara						53,10	53,42
Kota Palembang	63,07	64,27	63,72	67,81	69,16	65,58	63,41
Kota Prabumulih	48,38	49,29	49,31	52,34	55,38	54,83	55,75
Kota Pagar Alam	46,81	48,17	53,10	53,42	56,93	49,79	58,11
Kota Lubuk Linggau	61,67	63,13	63,94	61,24	58,47	56,96	62,43
<b>BENGKULU</b>	<b>68,50</b>	<b>69,33</b>	<b>69,57</b>	<b>73,45</b>	<b>68,76</b>	<b>68,86</b>	<b>71,40</b>
Bengkulu Selatan	61,92	61,45	62,06	63,45	58,63	59,40	54,75
Rejang Lebong	55,81	62,42	56,69	57,23	57,76	57,63	61,73
Bengkulu Utara	61,43	62,30	64,38	64,81	65,15	62,88	65,76
Kaur	59,31	57,95	60,05	60,77	61,69	61,66	61,86
Seluma	58,27	58,20	58,98	68,56	66,86	66,22	65,15
Mukomuko	47,43	47,60	54,27	54,21	59,74	60,66	61,32
Lebong	68,00	73,07	69,50	69,77	77,91	79,07	79,39
Kepahiang	66,31	67,28	67,70	66,65	77,61	75,63	73,29
Bengkulu Tengah	48,95	55,81	62,70	64,50	66,22	69,09	70,15
Bengkulu	66,03	74,63	75,21	75,64	75,97	75,96	76,46

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>LAMPUNG</b>	<b>65,32</b>	<b>65,86</b>	<b>67,24</b>	<b>65,62</b>	<b>62,99</b>	<b>62,01</b>	<b>63,60</b>
Lampung Barat	69,17	67,21	70,26	68,07	49,16	59,86	60,47
Tanggamus	61,99	53,94	52,28	55,94	63,69	68,17	69,77
Lampung Selatan	59,84	60,78	60,74	61,22	58,33	56,88	57,66
Lampung Timur	62,02	62,49	62,15	62,92	60,86	60,71	60,01
Lampung Tengah	57,19	58,34	58,39	59,36	52,09	55,64	55,75
Lampung Utara	58,91	61,33	61,24	61,28	54,37	60,17	60,90
Way Kanan	59,90	58,60	59,10	66,12	65,42	66,59	68,46
Tulang Bawang	59,97	60,22	58,43	57,88	59,96	65,43	62,78
Pesawaran	61,30	62,18	62,87	64,39	68,65	70,08	70,51
Pringsewu	43,11	59,44	60,10	60,48	62,55	62,54	62,95
Mesuji	67,66	67,87	69,15	67,68	47,61	61,12	61,40
Tulang Bawang Barat	64,12	54,68	54,84	55,37	54,75	59,26	62,74
Pesisir Barat					57,12	67,73	64,34
Kota Bandar Lampung	59,54	62,82	63,42	61,53	59,53	59,05	62,11
Kota Metro	66,34	75,74	76,24	73,93	76,29	78,54	78,92
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>55,62</b>	<b>56,03</b>	<b>56,54</b>	<b>57,29</b>	<b>56,12</b>	<b>56,29</b>	<b>54,91</b>
Bangka	57,39	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32	62,04
Belitung	49,27	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00	42,62
Bangka Barat	53,32	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37	54,45
Bangka Tengah	52,92	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71	55,76
Bangka Selatan	39,16	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93	48,66
Belitung Timur	42,25	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04	67,36
Kota Pangkal Pinang	49,60	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22	56,64
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>56,70</b>	<b>60,62</b>	<b>59,32</b>	<b>60,79</b>	<b>60,54</b>	<b>62,15</b>	<b>66,96</b>
Karimun	49,43	49,93	50,14	51,49	54,43	55,55	56,47
Bintan	49,32	61,29	63,11	62,59	65,51	65,44	61,24
Natuna	43,92	45,94	46,80	46,40	53,86	52,85	48,55
Lingga	37,88	38,59	39,29	39,98	40,40	40,75	47,82
Kepulauan Anambas	50,40	49,96	49,48	50,64	56,22	56,96	57,07
Kota Batam	59,84	65,88	69,69	69,29	54,31	57,83	55,28
Kota Tanjung Pinang	51,38	56,42	57,10	57,60	70,92	70,33	70,33

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>73,23</b>	<b>74,70</b>	<b>76,14</b>	<b>77,43</b>	<b>71,19</b>	<b>71,41</b>	<b>72,34</b>
Kep. Seribu	61,47	63,35	63,75	63,73	59,84	57,06	61,08
Kota Jakarta Selatan	72,47	74,70	76,01	77,68	71,89	72,27	73,17
Kota Jakarta Timur	72,84	73,75	73,76	75,69	69,21	70,04	71,17
Kota Jakarta Pusat	74,61	75,52	75,15	79,21	73,36	72,93	74,71
Kota Jakarta Barat	73,72	74,18	75,00	77,36	71,47	71,46	71,66
Kota Jakarta Utara	72,24	74,60	73,08	76,95	70,49	70,57	72,12
<b>JAWA BARAT</b>	<b>67,01</b>	<b>68,08</b>	<b>68,62</b>	<b>67,57</b>	<b>68,87</b>	<b>69,02</b>	<b>70,04</b>
Bogor	59,05	59,46	61,35	61,86	61,08	59,84	57,10
Sukabumi	58,81	58,29	56,88	60,69	57,71	55,51	58,33
Cianjur	53,96	48,93	52,65	50,58	56,85	58,27	55,95
Bandung	67,15	66,11	69,64	46,40	73,58	74,46	76,50
Garut	60,23	64,68	65,16	65,85	63,33	63,21	65,63
Tasikmalaya	55,65	57,86	57,79	62,09	61,18	60,75	63,04
Ciamis	56,62	57,56	58,52	58,07	63,17	62,43	63,67
Kuningan	55,92	55,91	58,04	59,12	71,20	69,59	72,39
Cirebon	56,96	57,75	55,87	52,83	67,09	71,64	74,27
Majalengka	52,23	52,48	55,77	57,96	60,67	59,93	59,15
Sumedang	62,73	65,14	62,91	64,82	72,32	68,69	68,08
Indramayu	55,14	56,50	54,84	60,77	61,60	64,34	58,94
Subang	48,31	49,80	51,75	47,25	60,05	62,56	65,90
Purwakarta	66,75	64,74	64,73	65,88	69,54	70,59	72,25
Karawang	53,88	58,86	60,32	59,94	67,43	64,21	68,08
Bekasi	54,97	56,81	54,95	57,34	53,21	55,40	57,16
Bandung Barat	69,42	71,03	68,76	70,17	64,80	57,99	53,98
Pangandaran					61,27	62,15	65,45
Kota Bogor	62,60	64,75	66,09	65,02	63,07	64,05	67,37
Kota Sukabumi	52,65	53,58	52,26	58,60	62,35	59,42	60,20
Kota Bandung	64,53	65,76	67,77	68,06	58,22	58,06	58,84
Kota Cirebon	53,28	52,37	52,25	60,27	71,97	74,89	74,23
Kota Bekasi	59,19	59,49	64,69	63,50	65,33	64,84	65,68
Kota Depok	77,29	76,37	79,55	79,34	81,08	81,23	81,40

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota



## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Cimahi	66,15	66,51	69,28	53,10	72,70	73,38	76,97
Kota Tasikmalaya	54,97	50,60	55,23	54,04	54,28	62,46	63,50
Kota Banjar	53,85	55,80	51,67	48,95	47,90	49,32	47,96
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>67,96</b>	<b>68,99</b>	<b>70,82</b>	<b>71,22</b>	<b>74,46</b>	<b>74,80</b>	<b>75,10</b>
Cilacap	55,17	57,72	53,40	56,58	63,23	63,53	62,52
Banyumas	66,57	67,64	64,78	65,50	64,41	67,37	67,32
Purbalingga	66,33	67,47	67,26	68,66	71,03	72,08	73,11
Banjarnegara	57,80	59,23	61,07	61,03	67,78	65,72	66,44
Kebumen	63,18	65,63	66,31	67,32	67,98	68,76	70,13
Purworejo	59,49	58,30	60,76	67,59	68,76	68,74	69,56
Wonosobo	47,44	48,06	46,35	48,96	45,36	47,72	50,55
Magelang	60,12	60,79	61,27	58,77	65,54	68,53	62,43
Boyolali	68,47	68,82	69,39	69,56	65,71	65,82	66,28
Klaten	69,23	70,41	70,93	71,04	59,93	59,95	59,60
Sukoharjo	67,78	67,46	68,73	67,02	71,94	70,45	76,11
Wonogiri	61,93	62,71	62,80	61,10	63,34	62,63	64,04
Karanganyar	67,87	66,44	66,89	71,66	77,00	75,84	74,27
Sragen	56,06	57,18	57,58	57,92	61,75	61,80	62,28
Grobogan	57,65	57,45	59,40	59,76	56,95	57,54	56,01
Blora	74,72	75,08	74,85	75,11	67,34	69,94	70,52
Rembang	68,02	69,97	69,98	69,27	66,43	70,35	72,45
Pati	61,44	63,63	63,00	65,99	65,95	65,74	67,96
Kudus	67,01	66,05	68,10	67,65	60,56	62,00	62,02
Jepara	46,11	47,23	47,29	47,92	47,85	48,49	48,76
Demak	70,23	70,84	69,68	69,33	66,60	68,27	68,48
Semarang	75,91	76,92	75,10	77,45	75,28	75,49	76,15
Temanggung	70,83	72,00	71,83	72,96	81,65	82,20	82,49
Kendal	64,42	64,65	60,96	66,56	74,54	73,43	75,35
Batang	62,29	64,74	64,48	65,62	66,61	68,12	66,58
Pekalongan	55,20	56,81	57,35	67,03	66,84	68,09	68,38
Pemalang	70,26	69,95	68,20	70,21	68,41	68,73	70,52
Tegal	49,07	51,70	51,16	51,91	68,02	77,06	68,90
Brebes	53,94	53,95	53,28	51,14	61,00	59,26	60,72
Kota Magelang	65,29	66,78	67,29	68,03	78,82	75,83	76,28

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Surakarta	75,75	78,06	79,32	78,93	74,93	74,98	77,25
Kota Salatiga	76,28	81,45	81,25	80,91	80,36	80,38	80,83
Kota Semarang	63,46	64,48	66,61	70,62	75,58	76,53	75,22
Kota Pekalongan	64,69	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44	65,11
Kota Tegal	67,77	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67	77,52
<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>77,70</b>	<b>77,84</b>	<b>75,57</b>	<b>76,36</b>	<b>66,90</b>	<b>68,75</b>	<b>69,37</b>
Kulon Progo	61,18	61,15	59,23	59,26	63,68	67,26	68,42
Bantul	67,85	68,46	68,52	68,88	61,18	61,77	61,99
Gunung Kidul	59,36	62,22	64,58	66,01	68,27	64,48	68,70
Sleman	70,74	70,52	69,66	72,30	79,37	77,61	79,51
Kota Yogyakarta	69,85	70,00	70,70	71,75	79,44	79,33	78,94
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>67,91</b>	<b>68,62</b>	<b>69,29</b>	<b>70,77</b>	<b>68,17</b>	<b>68,41</b>	<b>69,37</b>
Pacitan	67,87	67,61	68,38	68,70	67,29	67,42	69,01
Ponorogo	64,96	67,58	65,84	66,06	64,01	62,82	64,87
Trenggalek	63,39	64,92	66,06	70,65	63,77	65,58	65,21
Tulungagung	51,96	52,67	53,00	53,54	63,28	63,59	63,95
Blitar	66,59	63,33	66,65	63,99	75,42	75,08	77,15
Kediri	70,86	72,20	72,24	72,29	74,06	74,09	73,93
Malang	69,49	69,51	70,45	73,03	68,45	72,20	74,37
Lumajang	47,09	47,99	45,78	48,44	59,21	58,62	60,11
Jember	59,47	58,76	61,63	53,54	67,69	68,58	68,65
Banyuwangi	63,52	65,50	64,81	66,89	66,45	67,58	69,43
Bondowoso	50,91	55,45	54,06	56,26	54,04	55,82	57,28
Situbondo	67,86	68,09	69,29	68,26	62,49	65,07	65,04
Probolinggo	51,28	57,01	58,40	56,61	65,10	65,47	64,86
Pasuruan	73,49	73,85	75,24	75,34	64,54	64,07	65,59
Sidoarjo	63,68	63,21	64,59	64,49	63,38	63,99	64,65
Mojokerto	70,07	70,47	71,00	72,30	68,67	75,93	75,72
Jombang	50,36	49,69	51,21	51,63	68,12	67,75	68,40
Nganjuk	57,63	57,92	56,79	58,89	66,41	62,46	66,56
Madiun	64,30	56,90	57,77	58,34	59,42	59,35	60,03
Magetan	62,33	64,65	65,87	69,89	59,96	60,50	61,34
Ngawi	65,66	66,39	66,71	63,39	68,00	67,75	68,93
Bojonegoro	57,42	58,28	59,27	60,44	55,91	58,82	59,30

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tuban	60,43	62,91	64,46	61,69	59,39	59,47	61,25
Lamongan	55,39	56,62	57,18	61,61	68,75	67,30	68,10
Gresik	62,56	63,56	63,44	66,21	62,26	62,79	63,35
Bangkalan	49,38	50,20	48,58	50,95	49,66	49,75	49,74
Sampang	41,13	43,26	44,18	42,09	45,41	49,86	48,18
Pamekasan	48,46	51,85	51,04	51,89	54,11	52,27	55,81
Sumenep	53,11	54,74	55,52	52,92	51,83	57,65	54,90
Kota Kediri	70,94	71,92	74,31	74,50	80,92	81,52	82,36
Kota Blitar	68,68	68,47	69,39	69,48	67,57	67,22	67,51
Kota Malang	73,80	78,75	74,50	75,41	74,72	74,87	70,76
Kota Probolinggo	75,70	76,14	77,10	77,65	67,18	66,28	66,69
Kota Pasuruan	51,67	56,50	57,42	57,96	53,53	57,68	62,03
Kota Mojokerto	63,78	64,46	65,15	65,81	76,96	76,98	82,00
Kota Madiun	78,69	79,21	79,96	81,49	81,11	81,48	82,19
Kota Surabaya	77,53	77,09	78,02	79,42	81,93	82,15	82,89
Kota Batu	74,31	75,01	76,10	76,11	77,35	70,02	73,66
<b>BANTEN</b>	<b>65,66</b>	<b>66,58</b>	<b>65,53</b>	<b>65,49</b>	<b>66,91</b>	<b>67,94</b>	<b>70,00</b>
Pandeglang	57,79	58,63	59,65	60,20	57,98	61,47	60,45
Lebak	60,56	59,50	63,09	60,48	63,81	62,27	64,38
Tangerang	52,00	52,88	55,41	53,16	61,67	62,54	62,43
Serang	46,16	50,08	54,21	53,72	61,94	58,32	59,00
Kota Tangerang	65,03	65,17	64,60	65,30	71,40	69,16	71,67
Kota Cilegon	55,37	57,79	55,16	54,24	55,80	52,66	56,05
Kota Serang	62,44	64,04	63,50	63,88	61,83	62,88	63,81
Kota Tangerang Selatan	59,94	60,46	59,94	60,30	65,89	63,17	68,46
<b>BALI</b>	<b>58,53</b>	<b>58,59</b>	<b>58,49</b>	<b>61,50</b>	<b>62,25</b>	<b>62,99</b>	<b>63,76</b>
Jembrana	67,87	71,76	68,93	72,10	61,48	65,07	66,23
Tabanan	54,94	55,16	54,43	55,44	59,95	59,56	61,06
Badung	52,01	53,24	54,76	55,24	55,24	58,80	61,48
Gianyar	59,03	59,42	57,72	58,43	60,99	61,45	62,35
Klungkung	67,66	66,78	67,81	69,34	74,56	74,89	72,60
Bangli	66,23	63,39	64,22	65,60	59,01	61,12	59,57

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karangasem	58,76	57,69	56,75	60,06	58,98	60,24	59,30
Buleleng	57,96	61,22	58,14	60,97	64,28	65,15	67,68
Kota Denpasar	55,98	55,74	56,28	59,66	58,25	58,50	58,80
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>54,49</b>	<b>56,57</b>	<b>57,90</b>	<b>58,54</b>	<b>57,49</b>	<b>58,69</b>	<b>59,95</b>
Lombok Barat	44,01	43,06	50,50	51,35	61,16	63,91	62,28
Lombok Tengah	48,56	48,39	48,65	53,04	47,07	54,18	55,43
Lombok Timur	57,56	59,57	59,19	58,51	54,76	57,52	60,23
Sumbawa	53,33	52,92	57,69	54,09	55,38	55,01	56,48
Dompu	58,38	60,94	62,50	60,60	63,60	63,39	64,00
Bima	42,72	43,00	44,79	45,28	55,41	53,30	60,66
Sumbawa Barat	38,85	40,01	40,23	41,43	37,14	35,74	38,03
Lombok Utara	39,17	41,87	39,49	39,48	45,93	48,70	46,33
Kota Mataram	57,75	54,40	57,60	57,99	63,49	63,87	64,57
Kota Bima	52,45	58,41	58,19	58,25	63,65	64,48	65,14
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>57,98</b>	<b>58,90</b>	<b>59,55</b>	<b>59,81</b>	<b>63,06</b>	<b>64,75</b>	<b>63,76</b>
Sumba Barat	46,96	46,43	47,81	45,26	66,73	64,05	67,53
Sumba Timur	65,89	65,94	66,51	67,00	58,56	60,06	60,59
Kupang	50,62	60,53	61,49	60,23	65,61	62,01	64,75
Timor Tengah Selatan	60,23	55,53	55,96	59,37	58,52	58,59	58,78
Timor Tengah Utara	62,71	58,78	64,21	61,04	58,30	57,54	59,04
Belu	68,32	68,21	67,98	68,57	79,21	80,49	81,57
Alor	53,67	51,94	54,80	55,39	59,50	59,24	60,14
Lembata	55,38	58,78	60,45	60,66	50,35	51,89	52,44
Flores Timur	56,43	58,48	59,15	59,81	52,17	51,17	53,27
Sikka	52,96	53,17	53,92	54,22	56,77	57,41	58,15
Ende	63,12	63,66	64,00	64,16	56,62	56,85	57,64
Ngada	63,02	63,06	63,46	63,78	69,89	73,76	71,64
Manggarai	58,75	62,38	61,24	60,36	64,90	65,17	65,52
Rote Nda	59,75	58,14	65,11	63,97	51,10	52,93	51,60
Manggarai Barat	45,56	47,70	48,60	48,59	53,07	50,07	52,53
Sumba Tengah	51,54	60,78	61,37	58,97	53,31	52,72	53,21
Sumba Barat Daya	59,51	59,88	51,91	52,01	52,45	57,36	53,86

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nageko	49,93	49,14	51,70	51,76	52,67	52,98	53,14
Manggarai Timur	44,01	39,30	46,04	44,54	45,96	48,87	49,36
Sabu Raijua	49,81	56,64	39,42	42,05	48,36	66,95	49,33
Malaka					64,16	63,79	61,42
Kota Kupang	53,95	54,84	55,37	55,35	68,40	68,07	68,27
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>55,26</b>	<b>56,39</b>	<b>59,34</b>	<b>58,78</b>	<b>64,10</b>	<b>64,44</b>	<b>64,46</b>
Sambas	61,16	59,66	61,48	62,21	61,61	61,76	68,57
Bengkayang	60,27	62,15	60,97	62,02	63,09	62,93	61,55
Landak	56,45	57,65	57,42	55,90	67,77	65,59	64,07
Pontianak	53,14	53,73	55,00	53,56	66,56	66,17	62,91
Sanggau	64,46	58,12	59,20	55,54	61,08	64,08	61,15
Ketapang	46,49	49,29	50,00	50,26	54,28	54,40	58,77
Sintang	54,43	59,50	61,78	60,94	53,70	55,71	61,78
Kapuas Hulu	58,43	60,57	60,58	59,19	65,12	65,72	69,75
Sekadau	58,25	59,19	60,00	57,64	51,39	49,62	55,34
Melawai	42,84	39,13	45,73	44,75	53,72	58,15	55,70
Kayong Utara	43,97	45,86	44,43	45,10	56,59	56,44	50,02
Kubu Raya	53,43	53,97	54,80	54,06	63,24	63,90	63,33
Kota Pontianak	53,66	64,40	64,95	65,05	68,01	68,08	61,04
Kota Singkawang	53,41	53,34	54,19	54,63	57,95	58,05	56,75
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>68,62</b>	<b>69,48</b>	<b>70,35</b>	<b>68,61</b>	<b>77,90</b>	<b>77,87</b>	<b>79,36</b>
Kotawaringin Barat	57,79	58,96	60,92	60,75	64,48	63,98	63,31
Kotawaringin Timur	61,51	60,82	60,27	61,34	69,91	70,23	67,87
Kapuas	64,28	55,99	58,94	61,90	62,46	68,21	71,50
Barito Selatan	75,06	76,98	76,95	77,43	84,02	83,88	81,67
Barito Utara	76,63	78,56	78,91	76,18	83,51	84,35	86,20
Sukamara	55,31	58,55	59,58	63,32	60,27	61,24	59,78
Lamandau	48,45	49,31	50,45	51,76	54,65	53,55	54,13
Seruyan	61,72	63,33	62,32	64,71	69,47	69,70	70,13
Katingan	64,72	64,16	64,71	69,48	62,33	60,79	66,87
Pulang Pisau	66,10	67,22	66,51	68,44	69,38	69,32	70,14
Gunung Mas	82,53	83,08	81,58	78,29	81,01	79,98	78,74

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Barito Timur	64,68	65,23	66,16	65,70	66,01	75,80	76,46
Murung Raya	57,45	58,71	59,15	59,90	65,16	65,82	66,93
Kota Palangka Raya	60,78	62,39	63,35	67,51	79,59	79,83	79,94
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>62,53</b>	<b>66,61</b>	<b>68,40</b>	<b>65,60</b>	<b>68,22</b>	<b>70,05</b>	<b>67,56</b>
Tanah Laut	63,71	63,96	64,46	61,77	65,36	68,33	65,99
Kota Baru	65,32	68,68	66,24	66,97	71,42	71,35	70,08
Banjar	68,17	70,31	71,13	71,49	72,68	73,37	76,49
Barito Kuala	63,81	63,39	57,41	61,62	70,00	70,29	73,44
Tapin	71,33	71,44	75,39	71,60	72,76	72,88	72,99
Hulu Sungai Selatan	54,04	54,29	54,60	55,24	60,41	60,38	61,10
Hulu Sungai Tengah	75,60	76,03	76,30	78,81	76,91	79,36	80,07
Hulu Sungai Utara	55,34	52,21	56,23	55,87	64,25	64,48	64,50
Tabalong	66,16	65,25	65,89	67,54	71,62	69,03	70,77
Tanah Bumbu	50,74	51,50	48,92	46,63	56,45	60,15	57,45
Balangan	57,50	58,53	58,86	59,45	63,17	65,47	65,79
Kota Banjarmasin	78,44	78,77	78,30	79,69	71,62	72,66	73,74
Kota Banjar Baru	61,13	61,79	61,31	61,07	72,47	72,09	73,83
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>60,05</b>	<b>61,29</b>	<b>61,84</b>	<b>63,12</b>	<b>53,74</b>	<b>55,96</b>	<b>56,64</b>
Pasir	54,26	56,08	54,51	52,85	58,90	64,58	62,07
Kutai Barat	52,78	47,77	53,70	49,15	63,49	62,36	62,63
Kutai	46,73	45,81	46,04	45,86	52,91	53,41	55,07
Kutai Timur	51,67	54,92	48,56	50,52	55,13	55,20	53,71
Berau	46,40	49,53	50,34	50,48	49,20	47,09	49,85
Penajam Paser Utara	64,45	63,69	63,98	61,74	49,42	49,92	50,30
Mahakam Ulu					68,19	66,37	74,12
Kota Balikpapan	66,39	58,62	68,94	67,83	65,82	66,29	65,52
Kota Samarinda	62,25	57,49	55,60	56,79	70,67	73,60	70,84
Kota Bontang	46,93	59,11	59,06	59,47	44,29	45,85	45,44
<b>KALIMANTAN UTARA</b>					<b>66,52</b>	<b>67,31</b>	<b>61,09</b>
Malinau	56,82	56,97	61,24	58,31	59,75	65,79	65,14
Bulongan	57,35	58,49	57,68	57,36	45,91	44,53	47,74
Tana Tidung	53,79	58,83	58,68	56,58	58,34	53,27	48,06
Nunukan	68,93	72,04	68,93	70,33	68,65	66,79	70,02
Kota Tarakan	52,93	58,05	49,79	58,82	49,78	50,65	51,33

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>71,20</b>	<b>73,34</b>	<b>75,00</b>	<b>75,55</b>	<b>76,15</b>	<b>79,82</b>	<b>82,37</b>
Bolaang Mongondow	66,62	67,75	65,26	68,23	71,03	67,77	69,91
Minahasa	76,66	78,27	79,21	78,40	76,91	81,15	82,42
Kep.Sangihe Talaud	65,76	60,96	62,83	62,80	67,57	71,31	73,01
Kepulauan Talaud	55,62	55,14	61,57	61,75	60,69	51,02	52,11
Minahasa Selatan	68,11	66,59	66,94	68,19	74,48	72,56	75,10
Minahasa Utara	77,63	71,20	78,74	78,90	71,68	71,12	77,48
Bolaang Mongondow Utara	71,40	51,33	51,98	52,16	52,61	60,79	64,93
Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,01	46,59	70,26	72,33	74,91	76,19	73,05
Minahasa Tenggara	72,19	78,75	76,88	80,08	73,00	78,85	79,28
Bolaang Mongondow Selatan	58,94	60,24	54,10	69,38	62,04	66,63	67,86
Bolaang Mongondow Timur	65,00	64,71	64,98	58,41	63,12	62,98	64,41
Kota Manado	70,25	63,55	71,41	72,01	82,50	80,33	81,00
Kota Bitung	69,64	60,46	70,62	71,15	60,48	67,15	73,25
Kota Tomohon	78,40	78,40	79,72	79,91	79,23	79,98	82,32
Kota Kotamobago	61,48	62,75	63,97	64,28	60,36	57,28	57,48
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>65,37</b>	<b>66,08</b>	<b>67,96</b>	<b>68,59</b>	<b>65,11</b>	<b>65,57</b>	<b>70,38</b>
Banggai Kepulauan	69,20	68,22	69,27	69,97	52,51	57,56	67,79
Banggai	61,90	61,65	62,84	63,55	66,88	66,96	70,23
Morowali	57,35	58,31	58,77	58,79	63,48	63,87	63,49
Poso	45,93	46,56	47,19	46,32	63,40	63,80	68,01
Donggala	45,15	44,38	68,29	65,92	55,28	55,95	56,35
Toli-Toli	61,55	61,86	62,79	63,77	65,45	67,47	66,45
Buol	64,13	63,20	65,01	65,51	65,70	66,03	66,51
Parigi Moutong	54,49	53,41	52,12	45,70	53,32	54,39	54,93
Tojo Una-Una	41,28	40,38	40,73	56,44	45,50	48,55	53,76
Sigi	60,47	61,25	65,06	65,51	65,56	59,06	59,65
Banggai Laut					55,49	56,03	56,04
Morowali Utara					59,32	59,12	60,50
Kota Palu	69,08	70,45	70,58	71,54	66,37	60,83	67,81
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>62,46</b>	<b>63,38</b>	<b>63,88</b>	<b>64,42</b>	<b>66,76</b>	<b>67,98</b>	<b>70,57</b>
Selayar	68,14	70,30	70,56	59,61	59,67	62,75	64,74
Bulukumba	57,97	58,53	60,81	58,55	66,15	63,74	67,16
Bantaeng	74,10	74,73	74,50	75,69	78,41	79,24	77,74

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jeneponto	54,06	58,02	55,32	60,76	65,86	67,39	67,93
Takalar	63,22	60,51	62,65	63,84	62,75	68,87	66,60
Gowa	73,50	73,23	74,71	75,10	67,37	67,99	69,01
Sinjai	56,08	59,77	56,40	59,99	70,44	69,69	72,56
Maros	60,00	60,54	61,10	58,85	61,62	64,55	65,16
Pangkajene Kepulauan	55,64	58,93	56,66	59,86	57,00	57,28	56,96
Barru	58,98	61,67	63,12	60,63	64,35	64,62	63,54
Bone	65,54	65,37	60,59	60,64	62,18	62,49	62,75
Soppeng	59,76	59,75	60,51	60,63	63,37	65,76	69,35
Wajo	58,66	59,49	59,67	59,44	59,98	59,72	60,62
Sidenreng Rappang	55,46	47,93	47,95	52,97	48,43	49,16	49,02
Pinrang	61,55	62,13	62,10	61,91	59,00	59,02	59,61
Enrekang	61,09	57,52	61,77	61,40	57,89	58,59	58,68
Luwu	62,61	63,76	59,92	63,05	60,72	62,47	61,61
Tana Toraja	64,88	64,44	65,88	62,58	72,56	73,38	73,99
Luwu Utara	39,27	39,29	39,77	40,04	43,92	43,74	44,98
Luwu Timur	54,13	43,12	43,61	43,53	45,04	45,72	45,96
Toraja Utara	61,69	62,83	62,72	63,18	58,03	57,80	56,04
Kota Makasar	64,49	65,26	66,10	64,68	68,63	69,21	68,73
Kota Pare Pare	62,60	62,80	63,70	63,85	61,22	61,86	61,56
Kota Palopo	61,21	68,38	69,84	70,35	69,67	70,91	70,85
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>64,26</b>	<b>65,26</b>	<b>65,86</b>	<b>64,49</b>	<b>68,13</b>	<b>72,14</b>	<b>70,76</b>
Buton	64,38	66,80	60,11	67,55	66,20	63,61	73,46
Muna	58,23	57,97	59,66	59,72	56,34	60,40	61,19
Konawe/Kab Kendari	63,15	64,24	64,50	64,89	74,01	72,42	76,76
Kolaka	57,11	57,52	55,32	57,97	57,00	59,83	59,45
Konawe Selatan	56,30	56,33	57,55	56,42	78,35	78,80	79,20
Bombana	54,41	54,67	55,19	55,80	51,91	52,38	53,23
Wakatobi	56,19	56,77	56,39	57,66	67,07	65,81	71,65
Kolaka Utara	46,06	48,81	49,14	48,95	50,26	50,82	51,62
Konawe Utara	54,97	65,43	66,36	67,30	65,12	61,08	67,83
Buton Utara	65,49	54,57	55,27	56,57	61,85	63,37	69,13
Kolaka Timur					60,67	60,75	61,70
Konawe Kepulauan					31,31	45,84	49,52

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota



## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Muna Barat					61,22	58,49	45,07
Buton Tengah					54,88	54,35	70,08
Buton Selatan					61,54	48,91	69,09
Kota Kendari	78,52	79,37	79,11	79,88	83,04	83,87	85,30
Kota Bau-Bau	56,70	59,10	55,38	58,77	66,31	67,23	67,98
<b>GORONTALO</b>	<b>61,35</b>	<b>62,12</b>	<b>62,08</b>	<b>60,89</b>	<b>67,36</b>	<b>69,26</b>	<b>71,09</b>
Boalemo	51,55	50,74	50,20	52,68	62,84	64,58	66,59
Gorontalo	55,67	56,02	57,38	56,75	64,08	65,71	65,76
Pokuwato	73,12	74,32	72,05	74,89	71,41	69,08	69,62
Bone Bolango	48,51	44,70	51,58	52,23	47,98	49,64	46,97
Gorontalo Utara	50,47	51,50	51,71	54,79	61,55	61,06	63,28
Kota Gorontalo	68,32	68,76	69,23	66,82	69,04	69,63	70,64
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>63,15</b>	<b>63,71</b>	<b>64,25</b>	<b>64,47</b>	<b>67,14</b>	<b>69,40</b>	<b>73,37</b>
Majene	68,38	68,38	68,04	76,18	70,54	74,24	74,51
Polewali Mamas	65,19	65,56	67,16	67,34	72,97	72,90	71,81
Mamas	47,64	46,84	47,72	53,37	51,22	51,23	52,52
Mamuju	60,16	60,58	61,14	61,74	58,95	59,29	65,34
Mamuju Utara	50,07	51,47	51,46	52,64	44,80	45,79	49,23
Mamuju Tengah					61,46	64,58	62,73
<b>MALUKU</b>	<b>75,94</b>	<b>76,51</b>	<b>78,72</b>	<b>79,93</b>	<b>76,99</b>	<b>77,15</b>	<b>78,87</b>
Maluku Tenggara Barat	56,91	57,65	58,29	58,33	65,10	65,88	71,36
Maluku Tenggara	51,33	51,84	52,76	60,75	62,90	59,03	59,84
Maluku Tengah	61,15	59,69	60,64	64,86	59,66	59,64	59,99
Buru	57,25	56,68	56,24	59,11	57,39	63,58	60,55
Kepulauan Aru	50,39	50,22	51,03	51,03	51,55	55,75	57,57
Seram Bagian Barat	61,62	59,56	57,11	59,35	57,82	57,82	57,91
Seram Bagian Timur	42,93	44,41	44,88	45,17	56,87	54,64	57,60
Maluku Barat Daya	53,71	53,81	54,70	55,39	41,56	46,14	50,10
Buru Selatan	57,89	59,09	59,57	53,83	50,21	55,09	54,98
Kota Ambon	55,88	55,77	56,46	56,71	66,51	67,07	67,66
Kota Tual	47,43	47,80	48,96	47,17	50,47	50,92	51,84

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>58,17</b>	<b>59,38</b>	<b>59,84</b>	<b>59,66</b>	<b>61,05</b>	<b>65,74</b>	<b>70,31</b>
Halmahera Barat	45,20	64,50	62,80	64,43	65,29	64,32	69,15
Halmahera Tengah	55,04	65,41	65,66	65,99	55,06	57,18	51,79
Kepulauan Sula	46,90	47,79	48,33	48,42	40,32	43,68	48,59
Halmahera Selatan	35,36	40,20	40,31	45,54	38,01	38,20	38,52
Halmahera Utara	62,30	63,97	64,09	63,99	62,05	65,65	66,33
Halmahera Timur	39,66	40,64	41,56	42,04	49,36	49,49	49,53
Pulau Morotai	38,91	58,72	53,16	57,24	52,42	54,53	55,45
Pulau Taliabu					43,55	49,16	50,73
Kota Ternate	66,23	67,94	67,91	67,15	71,44	70,48	70,03
Kota Tidore Kepulauan	57,16	58,96	58,66	59,58	57,18	62,01	66,48
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>57,97</b>	<b>57,54</b>	<b>58,46</b>	<b>57,01</b>	<b>47,97</b>	<b>48,19</b>	<b>47,88</b>
Fak-Fak	54,08	52,47	55,91	52,53	65,46	64,43	68,38
Kaimana	51,76	53,81	54,91	60,68	75,09	74,94	66,98
Teluk Wondama	39,34	39,46	51,04	57,60	46,62	50,45	51,90
Teluk Bintuni	30,83	38,09	34,33	36,84	47,24	48,98	48,80
Manokwari	45,39	40,60	42,19	46,54	59,64	62,40	65,39
Sorong Selatan	62,77	54,00	58,74	52,91	52,72	53,10	63,02
Sorong	38,27	43,35	41,67	35,17	47,50	43,72	50,06
Raja Ampat	44,13	48,94	40,61	43,00	67,08	66,43	70,35
Tambrauw	37,02	31,61	37,64	46,10	39,92	36,30	43,28
Maybrat	51,05	50,51	40,74	41,12	53,65	51,66	47,75
Manokwari Selatan					66,42	69,72	72,37
Pegunungan Arfak					52,72	49,05	42,46
Kota Sorong	57,59	50,79	50,95	55,11	55,67	55,43	60,14
<b>PAPUA</b>	<b>55,42</b>	<b>57,74</b>	<b>57,76</b>	<b>57,22</b>	<b>64,21</b>	<b>63,69</b>	<b>61,89</b>
Merauke	69,66	71,24	69,93	69,26	60,95	60,88	71,65
Jayawijaya	57,93	54,87	48,48	58,39	53,25	50,57	51,42
Jayapura	56,70	55,88	58,73	58,21	50,06	47,25	61,91
Nabire	57,98	56,43	53,99	56,42	69,53	71,51	71,80
Yapen Waropen	48,10	49,99	49,29	50,88	47,20	47,47	49,92
Biak Namfor	44,23	47,83	49,16	49,47	57,02	56,52	61,88

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota

## Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paniai	32,58	50,27	49,77	55,98	47,33	50,72	50,92
Puncak Jaya	62,54	68,48	67,29	56,45	58,08	55,33	42,76
Mimika	50,06	54,33	53,04	46,10	53,69	41,24	46,48
Boven Digoel	39,34	41,59	44,89	44,98	47,15	50,22	44,55
Mappi	60,08	61,01	54,17	60,20	54,07	58,66	57,51
Asmat	39,84	31,44	37,38	38,25	36,32	35,73	28,71
Yahukimo	57,88	38,27	50,26	49,93	51,28	42,38	46,01
Pegunungan Bintang	60,94	60,63	62,13	44,49	42,18	50,14	48,82
Tolikara	46,53	43,63	40,27	42,99	33,13	39,01	45,93
Sarmi	54,60	56,66	56,73	56,36	63,39	64,89	65,29
Keerom	59,00	62,03	60,62	63,02	52,17	52,16	62,34
Waropen	58,24	59,63	58,38	53,90	45,06	51,81	53,41
Supiori	62,62	67,63	66,73	69,64	60,14	60,77	63,00
Membramo Raya	58,77	59,74	59,98	51,49	55,51	57,36	36,95
Nduga	68,51	70,02	68,99	69,52	64,14	64,40	58,02
Lanny Jaya	62,02	62,70	63,63	64,40	45,78	45,58	38,86
Mamberamo Tengah	52,57	52,43	52,79	53,16	54,30	54,23	53,42
Yalimo	51,49	47,90	43,40	49,52	43,36	43,62	49,54
Puncak	48,07	49,25	48,86	49,28	27,32	33,15	42,95
Dogiyai	51,70	38,53	39,78	40,20	32,39	32,81	42,92
Intan Jaya	42,63	49,73	49,96	50,40	50,08	50,84	51,49
Deiyai	19,61	20,24	20,43	24,47	26,25	30,12	38,42
Kota Jayapura	70,54	72,63	71,45	74,02	77,93	74,98	78,89
<b>INDONESIA</b>	<b>68,15</b>	<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>	<b>71,74</b>

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota



# CATATAN TEKNIS





# Catatan Teknis

## 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

### Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

## Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

## Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

- $PPP_j$  : paritas daya beli di wilayah  $j$
- $p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kabupaten/kota  $j$
- $p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan
- $m$  : jumlah komoditas

## Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel L1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$



**Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)**

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

**Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

### Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok “sangat tinggi” :  $IPM \geq 80$
- Kelompok “tinggi” :  $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “sedang” :  $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “rendah” :  $IPM < 60$

### Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $t$

$IPM_{(t-1)}$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $(t-1)$

## 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

### Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

### Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

**Tabel 2.1** Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Minimum		Maksimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur Harapan Hidup (tahun)	17,5	22,5	82,5	87,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	0	18	18
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)	1.007.436		26.572.352	

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_p = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \cdot I_{pendidikan_p} \cdot I_{pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan_L} \cdot I_{pendidikan_L} \cdot I_{pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \cdot 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

### Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

## 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

## Penyusunan Indeks

### 4. Indeks keterwakilan di parlemen ( $I_{par}$ )

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dan

$$EDEP_{(DM)} = \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \cdot 100^{-1}$$

dimana,

$P_f$  = proporsi penduduk perempuan

$P_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$X_f$  = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

$X_m$  = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

### 5. Indeks pengambilan keputusan ( $I_{DM}$ )

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dan

$$EDEP_{(DM)} = \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \cdot 100^{-1}$$

dimana,

$P_f$  = proporsi penduduk perempuan

$P_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$Y_f$  = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

$Y_m$  = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

6. Indeks distribusi pendapatan ( $I_{inc-dis}$ )

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)	732.720

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata upah} = & (\text{Rasio upah}_m \cdot \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ & + (\text{Rasio upah}_f \cdot \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata-rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata-rata Upah}_m}$$

Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Sumbangan Pendapatan}_i = & \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \cdot \\ & \text{Rasio terhadap Rata-rata Upah}_i \end{aligned}$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana

$i$  = Laki-laki (m) atau perempuan (f)



Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \cdot 1$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \cdot \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

dimana,

$P_f$  = proporsi penduduk perempuan

$P_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$Z_f$  = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

$Z_m$  = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

## 7. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110



(021) 3842638, 3805563, 34835456



(021) 3805562, 3805559



[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

ISSN 2089-3531



9 772 086 234 000